

LAPORAN KEGIATAN DISKUSI SEJARAH
11 – 12 APRIL 2007

KOTA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM
PERSPEKTIF SEJARAH



BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
Jl. Brigjen Katamso, 139 Yogyakarta Telp. (0274) 373241, 379308 Fax 381555

kaan Direktorat
Kebudayaan

907
LAP
I

307
LAP
I

LAPORAN KEGIATAN DISKUSI SEJARAH
11 – 12 APRIL 2007

KOTA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM
PERSPEKTIF SEJARAH



BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
Jl. Brigjen Katamso, 139 Yogyakarta Telp. (0274) 373241, 379308 Fax 381555

KOTA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota adalah tempat konsentrasi keahlian, kekuasaan, dan kegiatan ekonomi. Kota, setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek yakni morfologi, jumlah penduduk, hukum, ekonomi, dan sosial. Suatu daerah disebut kota jika hubungan antara penduduk bersifat impersonal dan hidup dengan kepentingan masing-masing yang berbeda. Dengan demikian sejarah kota lebih berhubungan dengan kejadian yang berlangsung di ruang-ruang kota. Demikian halnya mempelajari kota berarti mempelajari persoalan sosial-historis suatu bangsa.

Dalam sejarah Indonesia, proses terbentuknya kota lazim berawal dari sebuah desa. Demikian juga proses urbanisasi terjadi tidak secara mendadak dan menyeluruh. Banyak ciri-ciri pedesaan masih terdapat dalam masyarakat kota, bahkan batas-batas antara desa dan kota kadang-kadang sukar ditegaskan. Hanya dalam ketentuan administratif, batas antara kota dan desa menjadi agak jelas. Oleh karena itu perlu diadakan diskusi sejarah dengan materi kajian, melihat kota kaitannya dengan transformasi sosial, ekonomi, problem sosial, perkembangan ekologi kota, dan mobilitas sosial.

Sejalan dengan terjadinya proses transformasi sosial-ekonomi terdapat problem sosial yang sangat menarik, yaitu pergeseran antara kelas-kelas sosial dalam masyarakat, kejahatan sosial, kriminalitas, akan cukup menarik untuk diangkat dalam diskusi sejarah. Begitu juga perubahan ekologi kota. Pertumbuhan sistem produksi industri kecil ke sistem industri besar adalah contoh yang jelas dari perubahan organisasi ekonomi. Timbulnya birokrasi, perbankan, sekolah, semuanya mempengaruhi ekologi kota.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka ada beberapa materi yang perlu diangkat sebagai bahan diskusi. Antara lain, jika berbicara kota dan perubahan sosial maka perlu ada kajian suatu proses yang berkaitan dengan penduduk dan

perkembangan kota dalam kurun waktu tertentu, karena kota merupakan “ panggung” terjadinya banyak peristiwa penting.

Selain itu, juga ada perubahan penguasa administratif perkotaan. Administrasi perkotaan bukanlah sektor satu-satunya di kota. Transisi dari administratur pemerintah kolonial ke republik pasti telah menghasilkan gagasan-gagasan baru tentang bagaimana membentuk suatu kota yang ideal. Kesemuanya itu mencakup perencanaan, permukiman, jalur-jalur hijau, kekuasaan serta prosedur administratif.

Proses Indonesiasi membawa perubahan perubahan termasuk struktur pemerintahan sampai tingkat bawah. Bahkan dalam proses dekolonisasi, komposisi etnis pada populasi perkotaan berubah. Kelompok sosial yang dominan nampak tergeser dari pandangan kota. Proses migrasi orang-orang dari pedalaman ke perkotaan mendorong semakin meningkatnya jumlah orang pribumi yang tinggal di kota.

Selain itu, proses politik akibat dekolonisasi sangat penting untuk diperhatikan terutama perubahan politik dan perubahan kota. Desain dan arsitektur kota selalu mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan jiwa zamannya. Fenomena tentang perubahan sosial, ekonomi, dan kultural menjadi titik sentral dalam diskusi ini terutama perubahan-perubahan yang terjadi di perkotaan.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang perlu mendapat sorotan untuk bahan diskusi ini adalah perlunya pemahaman kembali konsep tentang pengertian kota, dan kategorisasi kota, misalnya Ibu kota, kota metropolitan, kota megapolitan dan label-label kota seperti kota perdagangan, kota pelabuhan, kota kerajaan, kota kolonial, kota ritual. Dalam diskusi ini diharapkan akan didapatkan bahan perbandingan yang berkaitan dengan jalur-jalur pertumbuhan kota sebagai kesatuan sosio kultural. Hal ini penting karena kota-kota merupakan sebuah jaringan yang saling berkaitan dalam dinamika sejarah. Oleh karena itu, tema yang menjadi sorotan dalam diskusi ini adalah mencakup bagaimana pola permukiman dan pembangunan infrastruktur kota, perkembangan

perkebunan-perkebunan, dan sampai seberapa jauh sistem kapitalisme merambah wilayah-wilayah perkebunan. Selain itu juga sampai seberapa jauh makna dan perubahan tersebut berkaitan dengan identitas kota beserta simbol-simbolnya.

Dalam diskusi ini perlu juga menyoroti masalah potensi kota sebagai kawasan pusaka budaya, sampai seberapa jauh implementasinya bila dikaitkan dengan peraturan daerah.

Kota dalam proses perkembangan dan perubahannya selalu menghadapi persoalan yang berkaitan dengan keanekaragaman aktivitas manusia, sehingga muncul kekerasan dan kriminalitas.

C. DASAR KEGIATAN

Dasar kegiatan Diskusi Sejarah Kota dan Perubahan Sosial tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. DIPA Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta tahun anggaran 2007 Nomor: 0048.0/040-03.0/XIV/2007 tanggal 31 Desember 2006
2. Surat Keputusan Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta tahun 2007, Nomor: 052/SB/BKSNT/DKP/I/2007 tanggal 30 Januari 2007

D. SASARAN DISKUSI SEJARAH

Diskusi sejarah yang dilaksanakan tahun 2007 ini mempunyai sasaran:

1. Memberi wawasan kepada para peserta yang terdiri dari guru (sejarah), siswa, mahasiswa, birokrat, peneliti, dan pemerhati sejarah tentang perlunya kajian kota dan perubahan sosial
2. Mensosialisasikan konsep-konsep tentang pengertian kota dan perubahan sosial.

E. TEMA DAN SUB TEMA

Tema yang akan diangkat dalam diskusi tahun ini adalah:

Kota Dan Perubahan Sosial Dalam Prespektif Sejarah.

Berdasar tema tersebut di atas, dijabarkan menjadi 8 (delapan) Sub Tema, yaitu:

1. Permukiman dan Pembangunan Infrastruktur Kota.
2. Kota dan Kapitalisme Perkebunan
3. Potensi dan Masalah Perkotaan Sebagai Kawasan Pusaka Budaya
4. Ruang-Ruang Perkotaan : Makna dan Perubahan Simbol
5. Kekerasan dan Kriminalitas Masyarakat Perkotaan Dalam Perkembangan Zaman
6. Perkembangan Ekonomi Perkotaan Pasca Kemerdekaan
7. Sejarah Kota, Penduduk Kota dan warga Kota : Kisah Kota di Indonesia
8. Perpindahan Ibukota Negara: Suatu Wacana atau Keharusan ?

F. TUJUAN

Diskusi Sejarah Kota dan Perubahan Sosial di Yogyakarta ini bertujuan:

1. Memberi gambaran tentang perkembangan dan perubahan kota beserta kondisi sosial masyarakatnya melalui prespektif sejarah.
2. Menyebarkan konsep-konsep dan hasil-hasil kajian sejarah yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan suatu kota.
3. Meningkatkan kepedulian warga masyarakat akan arti pentingnya suatu perkembangan dan perubahan agar dapat menjadi lebih arif
4. Menambah wawasan para siswa, mahasiswa, guru, birokrat, pemerhati sejarah terhadap perkembangan suatu kota beserta perubahannya.

G. PESERTA

Peserta diskusi sejarah dengan tema tersebut di atas berjumlah 75 orang, meliputi: Sejarawan, peneliti, guru sejarah, siswa, mahasiswa, dosen, kalangan LSM, dan unsur instansi terkait.

H. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan diskusi sejarah akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 11-12 April 2007 bertempat di Hotel Matahari Prawirotaman Yogyakarta, Jl. Parangtritis No.123 , Telp. (0274) 372020 Yogyakarta.

1. Permukiman dan Pembangunan Infrastruktur Kota.
2. Kota dan Kapitalisme Perkebunan
3. Potensi dan Masalah Perkotaan Sebagai Kawasan Pusaka Budaya
4. Ruang-Ruang Perkotaan : Makna dan Perubahan Simbol
5. Kekerasan dan Kriminalitas Masyarakat Perkotaan Dalam Perkembangan Zaman
6. Perkembangan Ekonomi Perkotaan Pasca Kemerdekaan
7. Sejarah Kota, Penduduk Kota dan warga Kota : Kisah Kota di Indonesia
8. Perpindahan Ibukota Negara: Suatu Wacana atau Keharusan ?

F. TUJUAN

Diskusi Sejarah Kota dan Perubahan Sosial di Yogyakarta ini bertujuan:

1. Memberi gambaran tentang perkembangan dan perubahan kota beserta kondisi sosial masyarakatnya melalui prespektif sejarah.
2. Menyebarkan konsep-konsep dan hasil-hasil kajian sejarah yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan suatu kota.
3. Meningkatkan kepedulian warga masyarakat akan arti pentingnya suatu perkembangan dan perubahan agar dapat menjadi lebih arif
4. Menambah wawasan para siswa, mahasiswa, guru, birokrat, pemerhati sejarah terhadap perkembangan suatu kota beserta perubahannya.

G. PESERTA

Peserta diskusi sejarah dengan tema tersebut di atas berjumlah 75 orang, meliputi: Sejarawan, peneliti, guru sejarah, siswa, mahasiswa, dosen, kalangan LSM, dan unsur instansi terkait.

H. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan diskusi sejarah akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 11-12 April 2007 bertempat di Hotel Matahari Prawirotaman Yogyakarta, Jl. Parangtritis No.123 , Telp. (0274) 372020 Yogyakarta.

I. SUMBER DANA

Adapun sumber dana untuk membiayai kegiatan Diskusi Sejarah Kota dan perubahan Sosial ini berasal dari dana rutin Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tahun anggaran 2007.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT

Sesuai dengan program kerja BPSNT Yogyakarta tahun anggaran 2007 kegiatan diskusi sejarah dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 April 2007 bertempat di Hotel Matahari, Jalan Parangtritis, 123 Yogyakarta.

B. BENTUK KEGIATAN

Diskusi sejarah dengan tema Kota dan perubahan Sosial Dalam Perspek Sejarah di Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan acara pokok yang berbentuk diskusi panel dipandu moderator dan dicatat oleh notulis.

Adapun jalannya kegiatan diskusi sejarah sebagai berikut:

1. Pembukaan

Pembukaan kegiatan diskusi sejarah dimulai pukul 09.00 didahului laporan yang disampaikan oleh Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi DIY sekaligus membuka kegiatan diskusi sejarah, dilanjutkan dengan pengarahan dari Direktur Nilai Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata .

2. Jalannya diskusi

Setelah acara pembukaan dan pengarahan dilanjutkan acara pokok yaitu diskusi sejarah berupa ceramah panel yang menampilkan 8 narasumber terbagi dalam 4 sesi dengan urutan sebagai berikut:

Sesi 1.

Sesi ini mengangkat sub tema potensi masalah perkotaan sebagai kawasan pusaka budaya yang disampaikan Dr. Inayati Ramli dan perpindahan Ibu Kota Suatu Wacana Atau Keharusan Oleh prof.Dr. Sutikno.

Sesi 2

Mengangkat sub tema Kota dan Kapitalisme Perkebunan dan Sejarah Kota, Penduduk Kota dan Warga Kota, Kisah Kota Di Indonesia oleh prof.Dr. Sugiyanto Padmo dan Prof.Dr. Bambang Purwanto

Sesi 3

Sesi ini mengangkat sub tema Ruang-Ruang Perkotaan, Makna dan Perubahan Simbul oleh Prof.Dr. Djoko Suryo dan Kekerasan Dan Kriminalitas masyarakat Perkotaan Dalam Perkembangan Jaman oleh POLDA DIY.

Sesi 4

Mengangkat sub tema Permukiman Dan Perkembangan Infrastruktur Kota oleh Prof.Dr. Tadjuddin Nur Efendi, MA. Dilanjutkan pembahasan sub tema Perkembangan Ekonomi Perkotaan Paska Kemerdekan oleh prof.Dr. Mundradjat Kuncoro.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas secara garis besar kegiatan diskusi sejarah Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah yang diselenggarakan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta tanggal 11 – 12 April 2007 berjalan lancar, sukses dan mencapai sasaran. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah peserta yang sesuai dengan target panitia sebanyak 75 orang, narasumber 8 orang dapat memaparkan materi sesuai jadwal persidangan dan peserta diskusi dapat mengikuti dengan hikmad dan berperan aktif setiap persidangan.

Namun demikian di balik keberhasilan atas penyelenggaraan kegiatan diskusi sejarah, panitia menyadari dengan sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan, kendala, teknis yang dihadapi terutama terkait dengan alokasi waktu diskusi yang selalu kekurangan waktu sehingga diwaktu mendatang perlu penambahan waktu.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Dari uraian dan masukan baik tertulis maupun tidak tertulis maka bersama ini kami sampaikan saran dan rekomendasi kegiatan diskusi sejarah tahun 2007 sebagai berikut:

1. Sebagai usaha untuk gambaran dinamika kota, perkembangan dan perubahan kota dalam prespektif sejarah, perlu dilakukan diskusi sejarah yang diikuti sejarawan, guru, siswa dan masyarakat umum sehingga peserta dapat memahami dinamika kota.
2. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian warga masyarakat tentang pentingnya penataan kota dan memahami perkembangan kota secara arif
3. Dari kegiatan diskusi sejarah ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman wawasanwarga masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan kota.

Demikianlah laporan kegiatan diskusi sejarah tahun 2007 di Yogyakarta disusun sebagai pertanggungjawaban panitia.

Beberapa kesimpulan, saran dan rekomendasi dapat bermanfaat untuk masyarakat luas.

Mengetahui
Kepala Balai,



Yogyakarta, April 2007

Ketua Penyelenggara

Drs. Nurdiyanto

NOTULEN DISKUSI SEJARAH

(tanggal 11-12 April 2007)

Tema : KOTA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Hari : Rabu, 11 April 2007
Sesi I : Pukul 11.00-13.00
Moderator : Suhatno, BA
Notulis : S.Iلمي Albiladiyah

Penyampaian makalah

Pembicara :

1. Dr.Inajati Adrisijanti M.Romli

Judul Makalah : “Kota Yogyakarta Sebagai Kawasan Pusaka Budaya Potensi Dan Permasalahannya”

Penyampaian uraian judul tersebut dapat dibaca dalam makalah (lihat makalah).

2. Prof.Dr. Sutikno

Judul Makalah : “Perpindahan Ibu Kota Suatu Keharusan Atau Wacana”

Penyampaian uraian judul tersebut dapat dibaca seperti yang tercantum dalam makalah (lihat makalah).

Tanya-Jawab / Tanggapan / Masukan

Yang menanggapi / bertanya / memberi masukan :

1. Bapak Darma dari Jogja Heritage Society (JHS)
2. Ibu Diah Setyawati dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
3. Bapak Drs. HJ Wibowo dari Nogotirto
4. Bapak Drs. H..A. Adaby Darban, SU dari Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sejarah
5. Ibu Endah, guru Sejarah SMA 8 Yogyakarta

Oleh penceramah, jawaban untuk para penanya dirangkum.

Pertanyaan (sesi I):

1. Penanya : Bp. Darma dari JHS Yogyakarta :

Kepada Ibu Inajati, seperti makalah yang Ibu sampaikan, Yogyakarta memang menarik. Bagaimana caranya supaya kelanjutannya kota Jogja ini tetap hidup, bagaimana saat ini tentang bangunan njeron Beteng. Langkah aapa yang harus kita

lakukan ? bagaimana hal itu bisa terhindarkan. Kota-kota lama harganya mahal, karena harus dilestarikan.

Kepada Bapak Sutikno, mengenai kondisi Yogyakarta seperti ini, secara geografis Yogyakarta dibagi menjadi Yogyakarta timur, barat,... dst. Sebaiknya pembagian Yogyakarta itu bagaimana ?

2. Penanya : Ibu Diyah Setyawati dari Dinas Pariwisata Bantul :

Berangkat dari himbauan (Ibu Inajati) tentang penggantian nama-nama jalan supaya tidak dilakukan. Penamaan jalan – menurut alur sejarah. Ini penting bagi wisata budaya bagi Yogya yang dapat dijual mahal. Di Bantul misalnya, penamaan harus berdasar Per.Da. Untuk melestarikan budaya, masing-masing daerah harus mengusulkan nama-nama jalan yang cocok dengan sejarah seperti ini, jangan berubah. Apabila membangun kota, Bappeda harus mempunyai visi budaya khususnya budaya kota Yogyakarta.

3. Penanya : Bapak Drs. HJ Wibowo, Nogotirto :

Kepada Ibu Inajati, nama-nama jalan di Yogyakarta ini dirubah gara-gara Pak Harto jadi presiden, sehingga nama-nama jalan nama militer. Bagaimana: nama-nama itu dikembalikan saja seperti semula, sehingga arkeologi kota nampak.

Kepada Bapak Sutikno, di luar negeri, pembangunan kota (kuna), yang ada : kota pusat → tetap sebagai kota kuna. Bangunan yang baru dibuat di luar. Bagaimana di Indonesia ? dalam membangun kota dikerjakan secara acak-acakan. Pembangunan,

setiap arsitek berbeda. Apa di Indonesia tidak mempunyai, tidak mempunyai gagasan seperti itu ? (yang di tengah / pusat → kuna). Jadi dengan demikian ada makna.

4. Penanya : Bapak Drs. H.A. Adaby Darban, SU dari Fak.Ilmu Budaya UGM Jurusan Sejarah:

Masalah toponim Yogyakarta banyak yang kisruh, mungkin tidak mengetahui sejarah. Itu, toponim-toponim yang punya makna tolong dikembalikan, mengembalikan ke asal kalau perlu. Tetapi toponim itu tidak hanya jalan, tapi juga kampung, lingkungan. Ini setting kerajaan yang hidup, misalnya Tamansari. Menurut sejarah disebutkan (Tamansari) indah sekali. Yogyakarta belum mempunyai replika tentang kota. Replika ini untuk pegangan. Replika atau miniatur Yogyakarta untuk menunjukkan bahwa 'dulu ini lho Yogyakarta itu seperti ini !'. Untuk kepentingan ini perlu ada replica. Kemudian ada perubahan. Perubahan-perubahan yang ada seperti sekarang ini misalnya, Malioboro. Dulu ketika saya masih di Malioboro, yang namanya *Malioboro* itu dari Toko Terang Bulan – sampai – Teteg Sepur, dulu namanya *Pacinan* - tempat Cina.

Dari kraton – sampai – perempatan kantor pos alun-alun lor = *Pangurakan*

Dari perempatan Kantor Pos –sampai-Toko Terang Bulan = *Margomulyo*

Dari Toko Terang Bulan-sampai-rel kereta api = *Malioboro*

Dari rel KA – sampai – tugu pal putih = *Tugu Kidul*

Tetapi nama-nama itu sekarang sudah ganti nama.

Mengenai anatomi kota. Harus diketahui pula tentang anatomi kota. Di bawah kota (Yogyakarta) ini ada apa? Misalnya; pipa leiding ada berapa, kabel listrik ada

berapa,dst. Ini harus dicatat. Sehingga kalau ada pembangunan saluran, tidak akan tabrakan, karena di bawah kota ada pipa, dsb.

Mengenai pengembangan kota, nama-nama jalan, misalnya Kotabaru, nama-nama pahlawan. Ini ada kaitannya dengan perebutan Kotbaru yang dilakukan oleh laskar-laskar, bukan tentara.

Tentang pemindahan ibu kota, pindah itu tidak sakral. Dalam kenyataan, sekarang ini sentralisasi. Ini kurang merata. Ibu kota, Jakarta sekarang ini bebannya berat. Jakarta tidak hanya sebagai ibu kota, tetapi kenyataan juga sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Saya sarankan ibu kota dipindah. Mungkin bisa ke Kalimantan Tengah. Jakarta bebannya berat. Mudah-mudahan ide Pak Tikno dapat didengar.

5. Penanya : Ibu Endah, guru sejarah SMA 8 Yogyakarta.

Saya guru sejarah. Saya kalau cerita tentang JP Coen dan Raffles, murid-murid saya bilang, “Kok kita tidak dijajah Inggris saja ya, biar maju !”

Kepada Ibu Romli [Ibu Inajati], rencana pembangunan kota Yogyakarta, akan membuat parker di bawah tanah ? Mudah-mudahan tidak. Jika kenyataan, apa tidak berpengaruh pada Yogyakarta sebagai pusaka budaya ? Bagaimana. Kok tidak membenahi Tamansari supaya indah, menarik. Atau Kotagede → Kota Budaya.

Jawaban : (dirangkum)

Dari Ibu Inajati :

Saya senang atas dukungan dari Bapak – Ibu mengenai berbagai perubahan (topik makalah saya). Kita semua setuju, Yogyakarta salah satu kawasan pusaka

budaya di Indonesia berwujud peninggalan yang ke depannya juga lebih panjang. Bapak, Ibu sangat memperhatikan pada pelestarian jejak-jejak sejarah perkembangan kota sejarah potensi Yogyakarta. Saya lama tinggal di Leiden, Belanda di *Rijk Universiteit van Leiden*, universitas Kerajaan Belanda. Gedung pusatnya adalah bekas biara, tetap dilestarikan seperti dulu, zaman abad 13. Bangku-bangku gereja masih tetap dipakai untuk upacara dies, pengukuhan guru besar. Di sebelahnya ada satu ruangan 'pesakitan', ruang untuk mahasiswa yang menunggu yudisium, hasil ujian S3. Di tembok kota lamanya yang sebagian memakai batu-batu besar ditata rapi, tetap ada. Walaupun jalannya sempit, tetapi tidak ada yang *ngomel*. Pembangunan kota yang baru dilakukan di luar kota lama itu

Tentang perubahan nama, dssb. Jika saya bandingkan, di Leiden juga ada toponim, masih ada kanal, single, jembatan, masih ada. Apa di Yogyakarta yang tadi saya sebut sebagai *civic center* bisa seperti itu. Untuk pembangunan yang baru itu dilakukan di luar kota Yogyakarta. Bagaimana kalau pembangunannya di luar kota Yogyakarta. Ini himbauan untuk pemerintah. Sehingga Malioboro tidak sesak.

Saya belum melihat adanya sheet itu yang melihat Yogyakarta mulai abad 18 – sampai dengan 20, diatur dalam cerita.

Saya sangat senang, jika nama-nama dikembalikan seperti semula. Ini penting untuk bahan pendidikan, supaya siswa-siswanya tidak protes karena dalam pelajaran sejarah yang diceritakan kok hanya perang saja. Kalau mengenai sejarah Yogyakarta ini akan dapat dikisahkan riwayat tentang Yogyakarta.

Mengenai jalan-jalan di Kotabaru, saya ini lahir di tempat orang tua saya, dulu namanya Jalan Batonowarso, sekarang Jalan I Dewa Nyoman Oka. Jalan Sundoro

sekarang jadi Jalan Supadi. Orang pada masa sekarang tidak tahu mana Jalan Batonowarso. Walaupun Kotabaru itu perumahan Belanda, tapi nama-nama jalannya sangat Jawa, nama-nama gunung, wayang.

Benar anatomi kota itu. Anatomi kota memang harus diketahui, karena sebagai kota lama (Yogyakarta), bisa saja di bawah tanah ada pipa leiding, kawat / kabel, dsb. Ada Kali Larangan, yaitu sungai yang diambil airnya dari Kali Winongo, dialirkan masuk ke Masjid Agung, Keraton, Tamansari, membuangnya ke Kali Code. Kali Larangan ini di bawah trotoir Malioboro sebelah barat. Disebut Kali Larangan karena orang dilarang memaakai untuk cuci, dsb.

Saya setuju dengan Pak Adaby, Yogya seharusnya punya tampilan / wajah spesifik Yogya. Saya contohkan bahwa Yogya itu pecahannya Sala. Tapi beda. Coba; Yogya punya 'sumbu imajiner' [Gunung Merapi – Tugu Pal Putih – Malioboro - Keraton – Panggung Krapyak – Lautan Selatan], sedangkan Sala tidak. Ini hanya berjarah 65 km, berjajar. Yogya beda dengan Sala. Kenapa kita tidak memelihara yang spesifik tersebut.

Tentang toponim yang sudah dikerjakan oleh Mas Koko, dkk., harap hasilnya disebarluaskan. Yogya yang spesifik ini dapat dijelaskan kepada semua orang. Untuk pembuatan Tempat Parkir itu sudah dilupakan, karena banyak yang tidak setuju, karena memang banyak negatifnya.

Untuk Tamansari, ini masalahnya, PR nya banyak sekali. Tidak hanya yang di bagian atas. Coba lihat ke bawah, maka sudah terlihat adanya patok-patok BPN. Ini tanah siapa ? maka, masalahnya banyak, sangat sulit. Oleh karena itu kita perlu saling

mendukung mengembalikan seperti sediakala. Kita jangan maju sendiri-sendiri. PR Tamansari banyak dan berat.

Jawaban dari Bapak Prof.Dr.Sutikno :

Secara geografis memang Yogya itu ada Yogya timur, tengah, barat.

K. Opak – timur : Timur - ada kapur, goa, sungai bawah tanah – dpt. utk. wisata

K.Opak – K.Progo: Tengah - jajahan Merapi: Merapi-Sleman-Bantul-air tanah-dapat untuk pertanian

Barat K.Progo : Barat - ada gamping, pegunungan Kulon Progo, Menoreh, Pantai Glagah

Untuk realisasinya jika DIY pembagiannya seperti tersebut tadi (seperti pembagian geografis) ini sangat berat, karena ada 4 kabupaten, tidak bisa dijadikan 3 → sulit.

Untuk Bapak HJ Wibowo :

Tentang pembangunan kota → acak-acakan, karena dalam pembangunan kota, kota tidak punya design jangka panjang, master plan jangka panjang. Akibatnya jika ganti pimpinan ya ganti kebijakan. Akhirnya ada konflik kepentingan. Maka ke depannya, harus ada rencana pembangunan jangka panjang. Kapan kota dibangun (ada pembangunan di kota), maka tata ruang kota rusak. Kota dekat dengan mall, nantinya para murid ya ke mall. Pikirkan ke depan. Dulu di Samirana itu akan dibangun pertokoan, mall, dsb., tapi ditentang karena banyak sekolah di sana, maka tidak jadi.

Untuk penanya ke 2:

Dalam suatu diskusi harus diteruskan, tidak mandeg. Misalnya tentang banjir, bencana lam. Sekarang ke depannya ini perlu paradigma pembangunan berwawasan ekonomi berbasis lingkungan dan budaya. Aspek ini harus diperhatikan.

Pertanyaan (sesi II):

Penanya : Bapak Fredy – seniman:

Untuk Pak Tikno. Balai Pelestarian ini supaya berperan. Perubahan kota bertahap. Pelestariannya supaya dikedepankan. Pertahankan spesifik Yogya, apa tidak bisa ? Diskusi, seminar, bagaimana *tutuge* ? Tentang pemindahan ibu kota, setiap perubahan, perpindahan, perlu waktu. Saya harap diskusi ini ada *tutuge*. Pak Tikno kan punya hubungan dengan pusat.

Jawaban / tanggapan pembicara :

Prof.Dr.Sutikno : Perlu pembicaraan, DPR, kemudian dibicarakan, seterusnya diskusi saat inilah yang diteruskan. Gagasan ini perlu diteruskan. Mungkin pak Fredy juga punya hubungan di pusat.

Dr. Inajati : Untuk Pak Fredy. Selain hasil pembicaraan saat ini, kita harus bersatu bergandengan tangan antara yang berkomitmen di bidang kebudayaan ini: Balai Pelestarian Sejarah, BP 3, Balai Arkeologi, Dinas-Dinas kebudayaan, lembaga-lembaga swasta yang memperhatikan, mencintai warisan budaya, jadi katakanlah : kita sama-sama – akan jadi satu kekuatan besar yang mempunyai *bargaining power*. Ini pernah kita lakukan seperti dulu ketika gedung Senisono akan dibongkar. Kita maju bersama-sama. Ini berkelanjutan, punya efek besar, daripada kita maju sendiri-sendiri. Dalam hal demikian perlu ada koordinasi. Perlunya koordinasi terus-menerus bergandengan tangan. Tidak sesaat, tidak sendiri-sendiri. Jadi ada persatuan. Memang ada peraturan-peraturan tapi tidak bergigi – akibatnya sama saja. Ini dilangsungkan. Hal yang demikian perlu bagi pengambilan keputusan.

Tanya-jawab ditutup oleh pemandu diskusi.

DISKUSI SEJARAH
KOTA DAN PERUBAHAN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Hari : Selasa
Tanggal : 11 – 12 April 2007
Jam : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Hotel Matahari Jalan Parangtritis 123 Yogyakarta
Sesi : II
Pemakalah : 1. Prof. DR. Soegiyanto Padmo, M. Sc
2. Prof. DR. Bambang Purwanto

Judul Makalah:

1. Sejarah Kota dan Ekonomi Perkebunan
2. Kisah dari Dua Kota. Sejarah Kota dan Penduduk Kota Indonesia

Notulis : Isyanti

A. Garis Besar Makalah

1. Sejarah Kota dan Ekonomi Perkebunan

Bagaimana keterikatan perkebunan di suatu daerah berpengaruh terhadap perkebunan kota Kerajaan Surakarta maupun yang lebih kecil. Pertumbuhan seperti itu dapat dijumpai misalnya di Besuki dll tetapi di Sumatera Timur tidak Sumatra adalah daerah kosong. Yogyakarta yang padat dan terbuka, subur, bagaimana industri hubungan ekonomi perkebunan dan tradisional dapat dihayati, bagaimana persewaan. Bagaimana memahami tradisional perkebunan kopi, tanaman tambahan seperti di Jawa (misal Imogiri, Siluk, Kedu).

Bagaimana hubungan ekonomi perkebunan dengan sosial politik tradisional. Di Solo daerah spesifik dimana ekonomi perkebunan merupakan ujung tombak colonial Nusantara tidak lain dibacknya semua bahkan industri-industri yang lain. Di Solo residen

mulai dibentuk abad 19 bagaimana peran penting residen sangat jelas, bagaimana kebijakan 1940 maka di Sumatra diadakan reorganisasi.

Tidak seperti agrarian awal abad XX, masuknya abad 19 selama sewa kontrak dengan orang Belanda $\pm$ 20 tahun, kemudian sifat-sifatnya sangat personal skala kecil, tanah kecil $\pm$ 50 bahwa tidak sederhana adanya pasar local, apa yang ada di wilayah itu sifatnya masih sederhana. Sifat organisasi kecil, keluarga usaha perkebunan terdapat di desa kecil misalnya Gantiwarno.

Bahkan di Belanda tahun 50- an membuat munculnya pemuda-pemuda yang menugntungkan tahun 1960 an penguasa sewa masih Belanda maka berbagai kebijakan adanya undang-undang agrarian. Usaha yang memberikan keuntungan harus diberi ke swasta. Undang-undang agrarian.

1. Luas tanah 90 tahun sewanya sehingga timbul gerakan petani.
2. Luas usaha minimum 350 bahu – 500 bahu lahan kering (ditanami kopi, karet)

Buruh-buruh perkebunan butuh permodalan, management menolong munculnya administrai kota diambil alih untuk swasta. Muncul organisasi perkebunan skala besar, pasar modal dengan skala besar.

Bagaimana dengan di Surakarta, Surakarta hamper tidak bebas dari perkebunan. Misal di Prambanan, juga dari lereng merapi sampai Wonogiri. Terpengaruh politik marginal, sedemikian kuatnya hamper 70 % ekonomi desa digunakan untuk memunculkan ekonomi sekunder, produksi dan pengolahan. Pengolahan muncul ekonomi pedesaan puncaknya tahun 1900 – 1918 dengan ditandai kota-kota, seperti Klaten, kelautan di Ngawi, juga dibangunnya transportasi misal di Prambanan dsb.

Secara fisik jaringan komunikasi dsbnya, sangat berpengaruh terhadap ekonomi perkebunan. Kota-kota dimana ada perkebunan dengan pabrik akan muncul kota-kota sebagai pengumpul kemudian di bawa ke Klaten (Srowot ke Klaten), Klaten, Solo, Semarang. Dulu lewat sungai, sekarang lewat KA. Industri perkapalan menjadi mati. Transportasi local Surakarta sebagai kerajaan sangat berguna terutama masuknya import misal kain atau cita, tetapi pada yang sama juga ke seluruh kecamatan, desa dll.

Industri batik sangat intent, juga beras dari Solo diimport melalui madiun, Ngawi dll sehingga terjadi sirkulasi yang intent. Dampaknya terjadi diservasi spatial, pola hidup yang berbeda daya beli yang kuat. Muncul industri pedesaan. Hidup lebih baik. Tahun 20 an kota di Jawa tidak pernah tidur. Sekarang Yogya tidak pernah tidur artinya sudah rame karena ada UGM, UNY dsb (jadi rame karena pendidikan) demikian pula untuk daerah perkebunan. Tumbuhnya kota kerajaan akan diikuti dengan pasar desa karena buruh perkebunan 2 minggu sekali bayaran, kemudian di depan pabrik akan muncul pasar (pasar tradisional, ada makanan tradisional dsb).

Dengan demikian ekonomi perkebunan muncul, misalnya perkebunan tembakau, kopi. Demikian pula petani tidak sempat menggarap tanah pertanian. Petani penggarap dikontrak sehingga petani pasti mendapatkan uang dari kontrakannya.

Pada tahun 20 an ekonomi petani, sector informal tahun 30 an awal abad 15 sudah ada industri pedesaan. Gudang-gudang diberhentikan misal di Sorogeduk, Prambanan, Klaten, ini memunculkan penjualan remang-remang (gelap). Di Delanggu muncul kota kehutanan. Bagaimana kota muncul di pedesaan, muncul kelompok-kelompok tertentu informal. Sehingga sector perkebunan mampu memberi ekonomi upportunity (pendorong

sosial, petani tradisional) ada pasar internasional terjadilah perubahan. Kapitalisme perkebunan sangat penting bagaimana di Surakarta seandainya tidak ada kapitalisme.

2. Kisah dari dua kota dan penduduk kota Indonesia oleh Prof. Dr. Bambang Purwanto

Pada banyak hal seolah-olah Indonesia adalah ketenangan, ramah, aman dan tentram. Sejarah Indonesia selalu desa. Akibatnya kota yang kacau balau, hiruk pikuk hampir tak tersentuh dalam catatan sejarah. Kalau berbicara kota. Fenomena kota muncul abad terakhir saja. Sebuah fenomena kerajaan (modern) selalu berlangsung pada abad 15, bahkan lebih jauh sebelumnya Kraton (Jawa Kertanegara). Sejarah Indonesia adalah desa. Kota adalah bagian integral dari sejarah Indonesia misal tentang kehidupannya sehari-hari. Jakarta-Kotagede yang menggambarkan bagian (kisah 2 kota) realistis yang sampai saat ini tak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehingga kalau ada orang mandi di kali (koneksi dengan orang bawah), sehingga orang mandi di kali tidak dapat dipisahkan status sosialnya. Rumah yang besar (rumah gaya Indies besar dengan banyak pembantu) namun jambannya tidak ada ia harus ke kali.

Pada abad 18 an 19 ada beberapa lukisan yang menggambarkan kehidupan orang-orang di Jakarta. Status sosial tak dapat dibedakan. Konsep sehat, bersih akan lain. Bagaimana sejarah kota dapat menggambarkan peradaban manusia. Informasi tentang kota bagaimana proses perkembangan masyarakat kota. Bahkan orang hidup punya persoalan contoh pada tahun 70 an penguburan mayat mahal, kota tidak sama dengan desa. Jadi kemiskinan tidak hanya persoalan mereka, awal abad 16 proses urbanisasi berlangsung (misal tanam paksa dll) Bagaimana kehidupan mereka sehari-hari misal hanya Pramudya (hidup sebagai gelandangan) cerita sastra.

Sekumpulan foto ada di Liden, gambaran di sekitar Tanah Abang, Pasar Senin (disana ada pelacur, tuna wisma di gubug-gubug) tahun 70 an sampai dengan abad 21. Realitas tak pernah hadir dalam bahan sejarah. Kapan bagaimana ada becak, tetapi bagaimana kehidupan tukang becak. Realitas kehidupan perkotaan akan menceritakan sejarah Indonesia. Sejak colonial sampai dengan sekarang belum lagi tetapi makanan di kota (misal bakso yang lahir desa). Kita kehilangan banyak dengan politik-politik yang luar biasa apa yang ada disekeliling kita. Kita bingung. Bagaimana realitas muncul di Jakarta, adalah perkembangan seperti kota-kota lain.

Masyarakat kita ramah, aman dll bila berhadapan dengan transisi. Di Kotagede tahun 40 an akhir bagaimana kehidupan yang muncul. Masyarakat santri, Muhammadiyah mengadakan kegiatan moral belum dalam kondisi seperti itu. Anti sosial berkembang dari masyarakat tertentu, orang tidak lagi berkata tentang Tuhan. Contoh orang kalang tidak diterima, bukan Jawa (dibuat mitos) agar tercipta asing orang kalang. Orang Kotagede (adalah kami), Kalang (dalam konteks ekonomi), orang Kalang tidak santri. Apakah situasi terjadi di pedesaan yang sama sebuah fenomena urban. Sebuah gambaran banyak gambaran hanya citra palsu bukan kenyataan. Kebingungan akan muncul di wilayah yang mempunyai persoalan realitas itu akan lain. Dua kisah memberikan gambaran untuk mencontoh persoalan di Indonesia.

B. Tanya Jawab

1. Dari Saudara Tito (Antropologi)

Ditujukan pada Bapak Bambang dan Bapak Sugiyanto

- a. Apa relevansi hubungan jarring-jaring yang dilakukan oleh Geertz, dan bagaimana studi perkebunan yang dihubungkan dengan kapitalisme, selanjutnya menumbuhkan kota.
- b. Pergeseran perkembangan perkebunan kemudian menimbulkan kapitalisme kota, pergeseran dari kota-desa kemudian muncul etika apa dan bagaimana.

2. Ibu Diah (Dinas Pariwisata Bantul)

Untuk Bapak Bambang.

Apa yang muncul, system informal di Malioboro, muncul opini-opini adalah orang-orang dengan ekonomi lemah, orang terpinggirkan. Padahal mereka ini penghasilannya lebih besar dari pada yang ada di took-toko. Ketika ada penertiban PKL ada pelanggaran-pelanggaran HAM. Bagaimana kondisi mereka apa benar-benar terpinggirkan, bila ada penataan kota, posisi yang bagaimana mereka akan ditempatkan.

3. Sdr. Sohiful (Geografi)

Sejarah kota dan perkebunan. Pergeseran nilai-nilai di kota dan perkebunan, bagaimana perkebunan tersebut. Dengan adanya perkebunan maka akan timbul akan adanya dampak missal pemukiman. Adanya slum (permukiman liar), tanah illegal,

daerah kumuh, sehingga akan menimbulkan kriminal sanitasi buruh, sanitasi buruh (kesehatan kurang). Bagaimana cara mengatasinya.

4. Nina (MSI)

Untuk Bapak Bambang

- Apakah guru-guru sejarah telah mengajarkan pada anak didik tentang pendidikan sejarah yang benar
- Penggambaran tentang Kotagede, yang terjadi di Indonesia bukan agamanya tetapi organisasi agama yang diikutisehingga timbul gambaran seperti yang ada di Kotagede. Seorang santri koq bringas bukan fakta yang ada. Bagaimana solusinya antara realita dengan gambaran yang telah bapak gambarkan tersebut.

5. Sdr Longgi (Sanata Dharma)

- Bagaimana guru sejarah tidak mendapatkan tempat terjadinya degradasi sejarah umbi menurun. Bagaimana melihat identifikasi Indonesia di desa. Siapa orang-orang yang ada di dalam Indonesia. Indonesia adalah pedesaan, komunitas masyarakat kita (kota) selalu melihat pemandangan hanya dalam satu sisi (dilihat dengan kaca mata yang sempit).
- Apa ada system yang dipolitisir (missal zaman orde baru)

- Sejarah dipandang secara politik, apa ada organisasi politik, hegemoni, pandangan-pandangan tertentu.

Jawab :

1. Dari Bapak Sugiyanto

Teori Geertz dengan perkembangan penduduk yang besar, tanah statis maka realisasi tanaman padi dan kebun timbul proses kemampuan daya dukung lahan sebagian besar ditanami padi hasilnya sedikit maka timbullah evolusi pertanian.

Ekonomi sector pertanian tradisional mengakibatkan penghasilan buruh berkurang, kemudian beralih ke penyadap. Proses involusi berjalan, muncul di bidang informal.

Bagaimana etika yang muncul di bidang ekonomi dipolitisir missal penguasaan tanah di Klaten tidak terkendali, petani dengan tanah kecil tidak dapat hidup. Selanjutnya masyarakat Solo ingin lewati hidup dengan senang-senang ini merupakan urbanisasi yang kacau.

Kemudian mobilitas sosial terjadi menimbulkan pemukiman liar, ini terjadi pada saat zaman Jepang. Pada zaman Jepang banyak perkebunan yang distop diganti dengan tanaman pangan, jarak (untuk minyak pelumas pesawat). Area kebun dipetak-petak sehingga muncul bangunan-bangunan liar. Rumah untuk kuli-kuli yang dulu kerja diperkebunan. Timbul slum-slum, sanitasi, kesehatan dll jelek timbullah kriminalitas. Ini adalah gejala laten. Di Yogyakarta terdapat di pinggir sungai Code, dekat pasar, stasiun dll terjadi slum-slum (ini adalah bagian dari kehidupan kota).

2. Bapak Bambang

Ada perubahan baru, bila dilokasi baru.

Ndesa (desa) contoh: di kota naik kendaraan di desa naik kebo.

Ada etika-etika yang harus ada pemahaman-pemahamannya gejala-gejala menciptakan, memproduksi makna-makna itu. Tinggal di kota mentalnya desa sehingga tidak heran seperti penggambaran Pramudya bahwa Jakarta adalah dusun besar mereka hidup dengan etika desa. Etika desa tidak selalu salah.

Contoh: pada waktu kita berkendara ada problem proses budaya.

Tidak ada harmoni, mereka yang mampu dapat menciptakan harmoni, keseimbangan-keseimbangan walaupun di diperkotaan.

- Apa solusinya, bagaimana memahami sejarah betul-betul dengan materinya.

- Pedagang kaki lima ada persoalan besar dengan penghasilan yang lebih besar.

Pelacur tak sama dengan kemiskinan, pedagang kaki lima bukan pedagang garam, mereka bukan orang tidak bermodal (missal yang muncul klitikan) ada pemodalnya ada yang memasukkan modalnya. Karena persoalan tidak holistic tetapi kesimpulan persial. Tidak ada pedagang lemah, kecil di Malioboro sebagai PKI, yang ada pedagang dimanfaatkan pemodal. Ketidak seimbangan yang membuat cara berpikir secara parsial, semu dll, dan realitasnya memang seperti itu.

Bagaimana cara membangun kesadaran cultural. Kembali pada moralitas, kesalahan pendidikan, kita tak akan mengetahui perubahan diri kita, orang lain.

Pendidikan sejarah, perkembangan sejarah membuat anak tidak cerdas dan tidak fungsional. Kita seolah-olah bicara dengan orang tuli, buta tidak ada harapan dalam

pendidikan sejarah. Sejarah itu penting tetapi munafik sehingga bagi saya sudah tidak ada idie, tidak ada solusi yang ada obatnya hanya revolusi.

Kebaikan hanya ada di desa, demokrasi ada di desa. Bagaimana kita membangun symbol-simbol sesuai dengan realitas kota.

Dalam kemiskinan struktural, orang-orang miskin, tidak solit orang-orang kaya selalu jahat, budaya Indonesia itu apa.

Ki hajar menanyakan puncak-puncak kebudayaan daerah, kita tahu dapat memahami konsep itu. Demokrasi ada di pedesaan (Hatta) tetapi jago lurah koq pakai uang (itu culture kota masuk desa). Sebuah masyarakat mampu memahami perubahan-perubahan tetapi kalau tidak tepat ada deriant.

Termin II

Pertanyaan

1. Bapak Bawa

Ada perubahan besar di Indonesia mulai dari Sukarno sampai dengan Suharto.

Indonesia menuju ke hal-hal yang tidak positif, hegoisme menggunakan uang Negara.

Aplikasi dengan agama berlainan sehingga timbul konflik-konflik besar.

Bahwa banyak berdoa tetapi tak mengalami perbaikan agama hanya semu/ palsu. Di Indonesia memberantas korupsi sangat sulit.

Bagaimana pemikiran Bapak, Bagaimana pemecahan korupsi.

2. Bapak Kartono (Muh 5)

Mengajar sejarah di IPA lebih realistis meskipun hanya satu jam pelajaran.

Terima kasih Indonesia di jajah Belanda, bila yang jajah Inggris mungkin belum merdeka malah mungkin dapat terpecah-pecah.

Tanya Bapak Sugiyanto

Ada apa korelasi perkebunan di Yogyakarta dengan Perang Diponegoro.

- Suksesi tentang patih ke Mangkunegara VIII juga masyarakat perkebunan.
- Bagaimana sikap Belanda terhadap industri tekstil yang kemudian ditutup (Ini Oral Histori) mitos penjelasan.

1. Jawab : dari Bapak Sugiyanto

Persewaan tanah sejak lama di Jogja sudah lama Belanda masuk 20 tahun, tetapi belum sampai 20 tahun diperpanjang lagi sewanya.

Untuk persewaan yang lebih dari 40 tahun gaya hidup bangsawan adalah molimo tanpa maling, nah ini tidak baik, maka untuk menghilangkan negatifnya sebaiknya untuk itu uang dikembalikan padahal uang sudah habis.

Pejabat hentikan sewa tanah, bangsawan tidak mau kemudian ditaklukkan dengan politik. 1825 Perang Diponegoro jadi ini ada hubungan dengan kehidupan bangsawan.

Patih seperti Mangkunegara V berhak sewa tanah 60 tahun. Belanda dapat membawa hasil exportnya. Tetapi kalau patih di Jogja tahu Belanda ngapusi secara halus dsb sehingga di control residen harus ada persetujuan. Jadi masalah apapun lewat politik.

2. Dari Bapak Bambang

Timbul kesalahan terus menerus tetapi kita nurut saja. Nampaknya sejarah bangsa gagal menjadi orang kota.

Kita tidak berhasil membangun kearifan kota. Korupsi di kota bentuk kegagalan, korupsi ada di kota. Proteksi budaya gagal. Culture kota tidak diperhatikan, culture desa untuk orang kota.

Bagaimana nilai agama, era, desa

Problem yang terjadi di masyarakat kota adalah alimasi. Kita tidak mampu keberadaan dalam aliansi sehingga ada deirent akan timbul korupsi. Sebagai korupsi dalam persoalan sosial tidak dapat direalisasikan.

Aliansi ketidak dapat membangun relaitas etika-etika kota.

Notulen 12 April 2007

Tata Ruang Perkotaan: Makna dan Perubahan Simbol Perkotaan Di Indonesia
oleh Prof. Dr. Djoko Suryo

Dalam penjelasannya Prof. Djoko pada dasarnya mengatakan bahwa tata ruang kota sangat berkaitan dengan sejarah perubahan sosial.

-Sejak awal tata ruang memang mengalami perubahan sebagai akibat dari faktor demografi dan ekologis. Dari segi ekologi dapat diketahui bahwa:

-Pusat kota ada di pusat kekuasaan

-Pusat kota ada di zona pusat perdagangan seperti di pusat bandar (pasar)

Pada masa tradisional zona-zona itu tampak jelas sekali seperti: Kraton kemudian zona kampung prajurit, dan kampung-kampung penduduk.

Pada masa kolonial, tata ruang dan simbol perkotaan bersifat nuansa barat. Pada masa Indonesia baru transformasi sosial dan budaya dari kebudayaan kolonial ke kebudayaan Indonesia baru pada masa kemerdekaan menjadi fenomena baru dalam sejarah Indonesia

-proses pergeseran berkelanjutan hingga masa reformasi dan berkembang pada masa abad 21, ditandai dengan berkembangnya dimensi ekspresi kreatif

-Simbol-simbol kota mengalami perubahan sesuai dengan terjadinya perubahan kekuasaan, perdagangan dan lain-lain.

-Pada masa orde baru muncul adanya nama-nama jalan sesuai dengan nama-nama pahlawan.

-Pada jaman reformasi sudah lain lagi. Di sini nama-nama pahlawan kurang disenangi.

Kekerasan dan Kriminalitas Masyarakat Perkotaan Dalam Perkembangan Jaman Disampaikan oleh Kopol Suradji

Dalam penjelasannya Kopol Suradji memberikan pengertian tentang arti kekerasan. Dijelaskan bahwa pengertian kekerasan adalah perbuatan seseorang yang menimbulkan kesengsaraan pada orang lain atau menimbulkan rasa tidak enak pada orang lain baik fisik, phsykis atau seksual.

Dalam perkembangan jaman telah terjadi banyak perubahan-perubahan. Pada awalnya kejahatan tidak sebanyak sekarang, dan pada waktu itu kejahatannya hanya bersifat konvensional, seperti pencurian, penipuan, perampokan dan lain-lain. Pada saat ini sifatnya sudah menggunakan alat-alat yang canggih seperti money laundering, teror dan lain-lain. Pada masyarakat modern yang ada sekarang ini tidak semuanya dapat menerima seutuhnya sebagai contoh dalam mengendarai sepeda motor. Dalam hal kejahatan pada saat sekarang sudah menggunakan teknologi yang canggih. Pada waktu dulu kekerasan terjadi untuk mempertahankan hidup sedang pada saat sekarang hanya untuk memperkaya diri dan untuk kepentingan politik, kekerasan seksual dan kekerasan psykis.

Kekerasan terjadi karena:

- Terjadinya perubahan dari masa ke masa baik internal dan di luar komunitas
- Meningkatnya kemiskinan, masyarakat urban, pengangguran, kebutuhan, kesenjangan sosial.
- Ketidak puasan dengan kebijakan
- Perubahan perilaku.

Situasi Politik Bangsa Indonesia

Pada masa orde lama kejahatan timbul karena masalah ekonomi, perilaku dalam kota terutama pendatang. Disamping itu situasi masih dipengaruhi sebagai akibat dari penjajahan Belanda dan Jepang.

Pada masa orde baru; maraknya pembangunan di segala sektor sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas kejahatan. Kejahatan konvensional tetap dominan tetapi muncul kejahatan lain.

Pada masa reformasi kejahatan menurun hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun

Tahun	Kasus kejahatan	Jenis kejahatan
2001	3199	curanmor, curat
2002	2420	curas, penggelapan
2003	2664	penipuan
2004	3476	penganiayaan
2005	2945	

Tanya-Jawab

Pada termin pertama dibuka untuk lima penanya antara lain:

1. Saudara Mujiono dari GKj Samirono untuk Bpk Suradji

- Apakah keberadaan teroris yang ditangkap di Yogyakarta merupakan tujuan atau sekedar hanya lewat saja.
- Apakah perampokan itu merupakan sarana cari dana untuk teroris?
- Apakah mungkin dilakukan Petrus?

-Bagaimana di penjara bisa terjadi transaksi narkoba.

2. Ibu Sohibunajah

-KDRT, penganiayaan dari suami ke istri atau dari orang tua pada anak bagaimana ini bisa terjadi?

- Lalu bagaimana menyikapinya , pertanyaan ini ditujukan baik pada bapak Suradji atau pun pada Prof. Djoko.

3. Herdiwati , guru sejarah SMA 2 Yogya

-Apakah perkembangan kota Yogyakarta karena faktor ekonomi atau ekologi

-Adanya tawuran pelajar menurut saya karena adanya kerumunan pelajar. Oleh karena itu alangkah baiknya diadakan rasia pelajar pada jam-jam belajar atau di luar jam belajar

-Bagaimana cara penanganan pencurian besar dan pencurian kecil.

-Bagaimana penanganan pelanggaran yang dilakukan kendaraan plat kuning , dalam hal ini tampaknya kok ada deskriminasi terhadap kendaraan berplat hitam

4. Supihandono

-Simbol yang salah akan menyebabkan yang lain juga salah.

-Simbol harusnya disempurnakan.

-Konsep Tuhan harus disempurnakan

-Dokma-dokma agama perlu dimasukkan

5. Ariani dari UGM

-Bagaimana pertumbuhan perkotaan

-Kekerasan-kekeraan sebenarnya berlangsung pada tahun 1965 sampai sekarang bagaimana menurut bapak Suradji?

Rangkuman jawaban dari Prof. Dr. Djoko Surjo

- Fungsi kota di Indonesia sebagai agen tranformasi dan mediasi yang cukup strategis semua ditandai dengan adanya hal-hal yang masal
- Kota-kota di Indonesia menghadapi permasalahan-permasalahan baru sebagai akibat adanya arus globalisasi baik positif dan negatif
- Kota menjadi pintu dari dunia luar dengan fungsinya sebagai agen informasi, investasi, revolusi informasi, elektronik dan lain-lain.

Kota Indonesia baru dan kebudayaan Indonesia baru yang ke depan harus direncanakan, kalau tidak ditanggulangi dikawatirkan akan terjerumus menjadi kota yang penuh horor, kumuh, dan penuh teror, sehingga tidak nyaman dan membahagiakan. Orang kota akan kehilangan ruang, kehilangan jati diri dan emosinya tidak stabil. Pada akhirnya kota dan desa akan integreted, gaya di kota akan ada di desa seperti salon dan lain-lain. Oleh karena itu perlu adanya adaptasi, kreativitas untuk merencanakan hal tersebut.

Rangkuman jawaban dari Bapak Suraji

- Untuk sementara ini Yogyakarta tidak sebagai basis teroris. Kalau ada yang ditangkap di Yogya karena bersembunyi saja.
- Pelaku-pelaku teroris sudah disebarkan sampai ke tingkat kalurahan.
- Dari kepolisian sudah melakukan sosialisasi ke hotel-hotel barangkali tempat tersebut akan dijadikan sasaran.
- Petrus dalam undang-undang hukum pidana tidak ada dan untuk ini saya tidak dapat menjelaskan.
- KDRT diundangkan tahun 2004 sebagai usaha kita, bahwa wanita ditempatkan di posisi lemah (secara fisik) karena perlu dilindungi. Masalah-masalah ekonomi seperti Phk hanya sebagai ekses saja. Sebagai laki-laki mestinya tidak perlu emosi.

-Kalau ada kekerasan terhadap perempuan ada LSM Ripka yang dapat dimintai bantuan tentang hal tersebut.

-Untuk pencegahan tawuran sebenarnya dalam KUHP ada sanksinya 12 tahun.

Semestinya diadakan pembinaan lewat rumah tangga, sekolah dan lingkungan masyarakat

-Kekerasan tahun 65 dalam KUHP disebutkan ada beberapa pelaksanaan eksekusi dan sejauh itu dilaksanakan dengan benar maka tidak menjadi masalah dan dibenarkan.

Oleh: Suwarno

Acara : Diskusi Sejarah dengan topik “ Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah”

Tgl : 11-12 April 2007

Tempat : Hotel Matahari, Jln Parangtritis No 123, Yogyakarta

Pembicara : 1. Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi (Judul makalah : Perkembangan Perkotaan dan Masalah Pemukiman)
2. Prof. Mudrajat Kuncoro. Ph.D (Judul Makalah : Dinamika Ekonomi Perkotaan)

Pemandu : Drs. Tugas Tri Wahyono

Notulis : Endah Susilantini

Isi Makalah :

1. Prof. Dr. Tadjuddin Noer Efendi,

Menurut Prof. Tajuddin yang dimaksud kota adalah merupakan sebuah ruang atau tempat yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal atau pemukiman yang bersifat permanen, dengan ciri-cirinya bersifat universal. Kota tidak hanya terdiri dari bangunan fisik saja, akan tetapi yang lebih penting adalah manusia sebagai pemukim yang membentuk, memberi serta menghidupkan kota. Sehingga apabila membicarakan tentang pemukiman mau tidak mau harus membicarakan serta memikirkan sifat-sifat manusia yang bermukim di kota tersebut. Pada seminar ini pemakalah mengajak untuk mendiskusikan konsep type ideal yang berkembang pada saat ini, yang dikembangkan oleh para pakar dari Eropa, khususnya aliran Jerman.

Pemukiman diciptakan manusia untuk beradaptasi. Untuk membuat kenikmatan dan kenyamanan. Konsep dasar pemukiman muncul kondisi posisi saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut pemakalah konsep ideal pemukiman adalah merupakan hasil rekaan manusia yang berusaha diciptakan untuk kenyamanan, baik yang bersifat material maupun non material. Aspek-aspek yang mempengaruhi proses rekaan pemukiman adalah kondisi lingkungan, perkembangan teknologi, kebudayaan, perkembangan penduduk. Ada empat aliran yang dipakai untuk menjelaskan kecenderungan perkampungan kota dan pemukiman ialah: aliran progresif, aliran kebudayaan, aliran natural, aliran utopia. Untuk membangun pemukiman yang ideal yang harus dilakukan adalah: mengurangi arus migrasi desa ke kota, agar terdapat keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lahan pemukiman. Berikutnya memindahkan beberapa kegiatan utama kota ke wilayah lain, contohnya Jakarta dengan program pengembangan kota yang disangga oleh jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

2. Prof. Mudradjat Kuncoro Ph.D,

Menurut Prof Mudradjat bahwa dalam konsep perkembangan kota tidak lepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya yaitu :

a. Dinamika Ekonomi.

- Keterkaitan ekonomi dan geografi, yaitu letak geografis suatu wilayah strategis dekat dengan lalu lintas ekonomi memiliki kecenderungan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada yang letak

geografisnya di wilayah pemukiman yang tidak dilalui lalu lintas ekonomi (pegunungan). Secara teoritis seperti konsep perkembangan kota di wilayah Asia Pasifik memiliki ciri yang sama, bahwa kota-kota pelabuhan, kota dipinggir jalan raya lebih banyak penduduknya daripada yang terletak di wilayah pedalaman.

- Menurut dinamika ekonomi, perkembangan kota yang pesat pertumbuhan ekonominya cenderung memancing urbanisasi dari desa ke kota.
 - Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan pemukiman.
 - Dengan adanya hal-hal tersebut diatas maka perlu konsep penataan perkotaan.
- b. Mengingat DIY golongan daerah yang letak geografisnya kurang menguntungkan, maka melihat fenomena ketimpangan DIY atas kota-kota besar lainnya maka perlu dilakukan re-orientasi pembangunan daerah. Menurut teori The Rise Region State, Jogjakarta memerlukan suatu sarana penghubung yang vital untuk menghubungkan kota-kota besar disekitarnya agar terjadi Rise Region State. Misalkan saja bila terlaksananya pembangunan jalan tol Jogja-Solo-Semarang (joglosemar), maka akan terjadi Rise Region State di ketiga wilayah tersebut.

Kemudian setelah itu di wilayah DIY perlu dikembangkan strategi pembangunan ekonomi lokal yang menekankan dimensi spasial. Strategi pembangunan daerah pedesaan yang diintegrasikan dengan strategi pembangunan kota. Peningkatan aksesibilitas modal dan pembangunan

infrastruktur di daerah tertinggal sebagai *big push* bagi percepatan pembangunan di daerah tersebut.

Tanya Jawab

1. Vito (Mahasiswa Antropologi FIB)

Penanya menyampaikan pengalamannya ketika menemukan studi kasus di Bangkok bahwa penduduk di sana ada yang mempunyai pendapatan besar, meskipun mereka tinggal di barak-barak. Bahkan pemerintah sendiri tidak bisa memindahkan mereka di luar kota, sebab mereka menganggap meski hidup di tempat kumuh kehidupannya sudah lebih baik, sehingga tidak mau dipindahkan. Pertanyaan saya kepada Pak Tadjuddin bagaimana pendapat bapak tentang kasus tersebut, apakah mereka menganut salah satu aliran yang ada yang tadi telah Bapak sampaikan kepada kami, bagaimana menurut persepsi Bapak dengan adanya kasus tersebut.

2. Ibu Diah (Guru SMA Muhammadiyah)

Pertanyaan ditujukan kepada Prof. Mudrajat Kuncoro. Tadi Bpk mengatakan bahwa globalisasi itu sama saja dengan gombalisasi, ini menunjukkan bahwa masyarakat kita tidak siap bersaing dengan luar negeri. Pertanyaan saya apakah kita masih menggunakan konsep ekonomi kerakyatan. Kemudian bagaimana mengaplikasikan ekonomi kerakyatan dengan globalisasi itu.

3. Bpk Gustam (JHS)

1. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Prof. Tadjuddin. Bagaimana kedepannya mengenai perkembangan pemukiman di Yogya, sebab Yogya sepertinya sudah kehilangan ruhanya. Pertanyaan saya apa yang harus dilakukan agar Yogya bisa mengembalikan ruhnya kembali seperti dulu, karena kita tahu bahwa di Yogyakarta banyak orang-orang pintar. Yang kita harapkan jangan sampai Yogya itu dianggap membosankan, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa Yogya itu tidak ada perubahan, sepi dan membosankan. Sebagai pendatang dari Medan yang tinggal di Yogya, setiap hari Sabtu Bapak lebih memilih untuk bersantai di Klaten daripada di Yogyakarta.

2. Pertanyaan kedua ditujukan kepada Prof. Mudrajad. Kita lihat perkembangan kota sekarang ini tidak merata, antara Sleman dan tempat-tempat lain. Dengan ditetapkannya otonomi daerah maka keputusan akhir itu akan kita kembangkan mengingat HB X sudah tidak mau dicalonkan lagi menjadi Gubernur DIY.

4. Sdr. Sofwan (Balar)

1. Pertanyaan ditujukan kepada Prof. Tadjuddin. Saya tidak setuju dengan pendapat Bpk, yang mengatakan bahwa pada masa kerajaan Hindu atau kota Pra Islam itu belum mempelopori adanya kota. Pada hal kita tahu bahwa di Trowulan pada zaman Majapahit pusat pemerintahan sudah ada, pemukiman di sana juga ada, disamping itu tempat ibadah dan tembok tinggi yang mengelilingi kerajaan juga sudah ada dan berdiri megah, serta mempunyai halaman yang sangat luas. Bahkan kompleks percandiaan pun di sana juga banyak, begitu pula jalan juga sudah berpasir, bahkan sarana keamanan sangat baik. Jadi kalau dikatakan bahwa proses

perkembangan kota dimulai ketika bangsa asing datang dan mempengaruhi bentuk pemukiman di Indonesia itu tidak benar.

2. Pertanyaan juga ditujukan kepada Prof. Mudrajad. Strategi pembangunan di Indonesia harus selaras antara kota dan desa, pertanyaannya langkah-langkah apa yang harus dilakukan, mohon penjelasan dari Bapak.

5. Bpk. HJ Wibowo

Dalam orde globalisasi ini ternyata sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang akibatnya akan merubah perilaku manusia yang bisa dilihat dari berbagai sektor, utamanya yang paling menonjol dari segi ekonomi. Kalau dilihat dari segi ekonomi, nampak sekali bahwa masyarakat banyak yang ingin mengejar aliran sekularisasi yang sudah mendunia, dimana bahwa aliran ini yang dipentingkan adalah materi, sehingga banyak orang yang salah dalam melangkah, sehingga melakukan korupsi. Yang kami tanyakan mengapa Indonesia takut miskin dan lebih memilih terhadap aliran sekularisasi itu, sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari rejeki yang tidak halal, bahkan sekarang ini banyak orang beragama tetapi melupakan Tuhannya. Bagaimana menurut pendapat Bpk Mudrajad.

Rangkuman jawaban Prof. Dr. Tadjuddin Noor Effendi

1. Menjawab pertanyaan Sdr. Vito Memang benar seperti kasus yang anda temukan di Bangkok. Untuk kasus pemindahan pemukiman kumuh ke rumah susun itu sulit dilakukan dan biasanya tidak diminati orang, mereka lebih memilih untuk

hidup di tempat kumuh dan tidak mau tinggal di rumah susun, alasan mereka lebih praktis. Bisa dicontohkan misalnya ada kerabatnya yang meninggal mereka bisa memandikan jenazah dengan enak tanpa mengganggu sesama penghuni, sebaliknya jika tinggal di rumah susun akan kerepotan. Sebab rumah itu merupakan tempat bekerja (contoh penjual bakso), mereka memasak dan mencuci mangkok dibawah terasa lebih nyaman. Bisa dilihat lagi contohnya, bahwa Pasar Beringharja lantai atas itu tidak laku, orang malas akan belanja ke sana, sebab di bawah orang jualan apa saja ada, jadi tidak perlu harus ke lantai tiga kalau hanya akan membeli lombok, misalnya. Saya kira tidak hanya di Yogya saja orang yang mau tinggal di rumah susun, akan tetapi di kota-kota besar seperti Jakarta juga mereka menolak bertempat tinggal di rumah susun.

2. Menjawab pertanyaan Sdr. Gustam. Bahwa untuk mengembalikan ruhnya perencanaan kota harus dikembalikan lagi seperti dulu dan perlu dipikirkan adanya kegiatan di tempat lain agar merata sehingga masyarakat tidak bosan. Tetapi yang harus diingat bahwa untuk mengembalikan lagi ruhnya itu cukup sulit (ruhnya bisa ngos-ngosan). Kalau bawah tanah alun-alun utara akan dijadikan tempat parkir terus terang saya pribadi tidak setuju, karena akan menimbulkan banyak masalah dan menimbulkan kerawanan. Bisa dilihat pada halaman 4 makalah saya, bahwa pusat-pusat itu belum bisa dikatakan kota. Sebab jumlah penduduk belum tahu, disana sudah ada perusahaan, ada tempat tinggal, pasar, tempat ibadah dan sebagainya. Dengan proses modernisasi, dalam ajaran agama ada aliran baru. Itu akan berkembang dengan proses globalisasi.

Contohnya sekarang di Indonesia banjir buku-buku yang menarik, misalnya ada buku yang berjudul *Mencari Tuhan dan Tuhan Agamamu Apa ?*, Mengapa menulis buku tersebut, permasalahannya jika dirinya mati di negeri orang itulah yang dipersoalkan, karena mereka merasa ketakutan, sehingga muncullah buku-buku itu. Sebagai warga negara Indonesia apabila mati di luar negeri maka apa yang harus mereka lakukan. Ini menunjukkan suatu bukti adanya krisis moral dalam kehidupan masyarakat, sehingga muncullah buku-buku seperti itu.

Jawaban global dari Prof. Mudrajat Kuncoro. PHD

1. Menjawab pertanyaan Bpk Gustam, perkembangan kota menurut konsep otonomi daerah tidak diarahkan pada satu kota tertentu. Hal itu terjadi sesuai dengan dinamika perekonomian masyarakat, maksudnya bahwa pengaruh perekonomian dan pendapatan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan kota dan pusat keramaian. Mengingat Sleman merupakan sentral perkembangan ekonomi dan pendidikan maka apabila kabupaten Bantul atau Gunung Kidul misalnya disamakan dengan Sleman sangatlah sulit. Misalnya, pembangunan Mall ditengah masyarakat yang belum membutuhkan, maka sangat mustahil akan berkembang.
2. Menjawab pertanyaan Ibu Diah, memang benar Bu bahwa globalisasi itu sama dengan gombalisasi, sebab dibalik globalisasi itu tersembunyi sesuatu, seperti halnya mengapa kita mengenal Kapten Subasa ?, dengan kata lain bahwa ekonomi kerakyatan itu hanya untuk penghalusan ekonomi global. Apakah benar bahwa ekonomi kerakyatan itu sama dengan ekonomi Pancasila ? Kita perlu membaca kembali pasal 33 UUD 45 itu sudah direvisi atau belum? Sebab pada pasal itu

berbunyi bahwa bumi, air, dan alam dikuasai oleh negara. Kalau pasal 33 itu dikaitkan dengan suwasta apa sudah pas dengan bunyi pasal tersebut ? Kalau kita kembali ke pasal 33 yang kita lihat sekarang ini adalah ekonomi kapitalis. Pertanyaan kita apakah ekonomi kerakyatan bisa membendung hal itu ? ini yang perlu dijawab oleh orang-orang yang membuat kebijakan.

Contohnya ketika saya pengukuhan guru besar Gubernur DIY saya undang tetapi beliau tidak hadir, selang beberapa saat beliau telpon memberitahu bahwa beliau mau datang ke rumah saya, visi HB X ke rumah saya itu ada apa ? apa yang beliau tanyakan kepada saya hanyalah ingin konsultasi, yang akan dikembangkan oleh beliau adalah sektor agroindustri, kemudian kerajinan (perak, grabah dll), dan teknologi (cyber provance) yang mengandalkan internet yang didukung oleh birokrat di daerah. Saya memberikan saran masukan kepada beliau, kemudian saya katakan setelah ke tiga sektor itu sudah berjalan, saran saya agar orang-orang tertentu, seperti rekanan dan sebagainya, sebaiknya mengurangi tatap muka dengan pejabat, maksudnya untuk mengurangi *grace money* yang sifatnya *pungli* (pungutan liar) dan *punji* (pungutan jinak).

3. Untuk menjawab pertanyaan Pak Bowo itu tidak mudah, bagaimana kita mau menyikapi ? karena adanya fanatisme regional yang luar biasa di Indonesia dan budaya sekularisme sudah mengglobal di negeri ini.

RUMUSAN DISKUSI SEJARAH: KOTA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Berdasarkan pada pidato pengarahan Direktur Nilai Sejarah, Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta makalah yang disampaikan oleh para pembicara dihasilkan rumusan sebagai berikut :

1. Wacana tentang perpindahan ibukota dapat menjadi realita sepanjang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, politik, ekologi dan budaya serta sebagai upaya untuk menciptakan negara yang maju, yang memerlukan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif, untuk membangun masyarakat yang cerdas dan sejahtera secara berkeadilan.
2. Ekonomi perkebunan merupakan faktor dominan bagi berkembangnya kota lewat peluang ekonomi yang diciptakannya yang mampu mendorong berkembangnya sektor primer, sekunder dan tertier yang dalam proses tersebut proses involusi dapat dihambat dengan munculnya etika baru dalam berkehidupan serta munculnya sektor informal di kota dan di desa.
3. Fungsi ekonomis kota berkembang sejalan dengan dinamika kegiatan ekonomi domestik maupun internasional. Posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Pasifik merupakan peluang bagi Indonesia untuk tampil lebih nyata dalam dinamika ekonomi yang terjadi. Hal tersebut menuntut diaktifkannya fungsi dalam angkutan darat, laut dan udara dengan dibangunnya sarana prasarana yang memadai seperti bandar udara, terminal, dan pelabuhan yang mempunyai arti penting dalam memanfaatkan peluang tersebut.
4. Perkembangan pemukiman kota dipengaruhi oleh nilai Jawa dan Islam serta nilai Eropa. Pada masa kemudian nilai modern telah mendominasi perkembangan pola pemukiman yang terjadi di wilayah perkotaan.
5. Kehidupan kota yang sangat kompetitif dan memerlukan kertrampilan formal membuat tenaga kerja tidak terdidik yang merupakan sebagian besar pencari kerja

di Indonesia menjadi semakin termarginalkan apalagi sektor informal di kota mulai tidak ditolerir oleh para penguasa. Akibatnya muncullah alternatif baru yaitu *papa budaya* atau *poverty culture* yang sarat dengan budaya kriminal dan kejahatan. Semakin maraknya kriminalitas baik secara kuantitatif maupun kualitatif menggaris bawahi kegagalan bangsa ini dalam mendidik anak bangsa menjadi manusia yang berakhlak mulia.

6. Bangunan fisik dan peninggalan budaya merupakan aset bangsa yang perlu dilestarikan karena dapat menjadi sumber pendapatan nasional lewat program pengembangan pariwisata.
7. Perubahan yang terjadi pada aspek tata ruang kota yang berlangsung sejak masa tradisional, kolonial dan masa modern yang didorong oleh pergeseran kedudukan sebagai pusat politik, administrasi pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, dan pusat kebudayaan ditandai oleh proses konvergensi, transformasi, dan konfigurasi berbagai unsur kebudayaan lokal dan luar Indonesia.
8. Wacana kajian sejarah kota perlu dilakukan reinterpretasi dari sejarah kota yang bernuansa politik ke narasi sejarah kota yang bernuansa kehidupan sehari-hari.







**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
YOGYAKARTA**

**Jl. Brigjen Katamso 139,
Yogyakarta 55152**

**Tel. (0274)
373241, 379308**

**Fax : (0274)
381555**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA**

Nomor : 052 /SB/BKSNT/DKP/I/2007

Tentang

Penunjukan Panitia / Kelompok Kerja Kegiatan Diskusi Sejarah Tahun 2007

Kepala Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Yogyakarta

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Diskusi Sejarah pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta tahun anggaran 2007 perlu ditunjuk panitia/ Kelompok Kerja.
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai Panitia / Kelompok Kerja kegiatan Diskusi Sejarah Tahun 2007.
- Mengingat :**
- Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.01/KP.110/MKP-2007 Tgl. 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2007 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
 - Pengesahan DIPA Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Tahun anggaran 2007 Nomor: 0048.0/040-03.0/XIV/2007 tanggal 31 Desember 2006.
 - Keppres No. 42 Tahun 2002 dan No. 80 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia / Kelompok Kerja Kegiatan Diskusi Sejarah yang diselenggarakan Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta.
 - Panitia bertugas membuat rencana kegiatan, menyusun jadwal dan menyelenggarakan kegiatan serta membuat laporan hasil kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Panitia/ Kelompok Kerja akan diberikan honorarium sesuai dengan alokasi yang tersedia untuk kegiatan ini.
 - Semua biaya / pembayaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta tahun anggaran 2007, khususnya MAK untuk kegiatan tersebut.

- e. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan tersebut selesai, dengan catatan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2007



Dra. Sumintarsih, M.Hum.
NIP 131126661

- embusan Yth.
- Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film Depbudpar di Jakarta
- Inspektur Jenderal Depbudpar di Jakarta
- Kepala KPPN Yogyakarta
- Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Nomor: 052/SB/BKSNT/DKP/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Penunjukan Panitia Kegiatan Diskusi Sejarah Tahun anggaran 2007.

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Kepanitiaan
A. Pengarah :			
1.	Dr. Magdalia Alfian, MA.	Direktur Nilai Sejarah Ditjen Sepur, Depbudpar	Pengarah Umum
2.	Ir. Condroyono	Dinas Kebudayaan Propinsi DIY	Pengarah Teknis
3.	Dra. Sumintarsih, M.Hum.	Ka. BKSNT Yogyakarta	Pengarah Teknis
B. Penyusun Pedoman :			
1.	Dra. Dwi Ratna N, M.Hum.	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Penanggung jawab
2.	Drs. Nurdiyanto	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Anggota
3.	Dra. Sri Retna Astuti	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Anggota
C. Panitia Penyelenggara:			
1.	Drs. Nurdiyanto	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Ketua Panitia / Pokja
2.	Drs. Sumardi	Kasubbag Tata Usaha Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Sekretaris Panitia / Pokja
3.	Sudarsi	Staf Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Urusan Administrasi Keuangan
4.	Dra. Dwi Ratna N, M.Hum.	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Seksi Ceramah/Persidangan
5.	Dra. Sri Retna Astuti	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Seksi Ceramah/Persidangan
6.	Ana Amini	Staf Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Seksi Konsumsi/Akomodasi
7.	Sri herawati	Staf Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Seksi Konsumsi/Akomodasi
8.	Damardjati	Staf Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Seksi Dokumentasi/Publikasi
9.	Mudji Slamet	Staf Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Pembantu Umum
10.	Wagiman	Staf Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Pembantu Umum
D. Moderator/Pemandu :			
1.	Suhatno, BA.	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Moderator Sesi I
2.	Drs. Hisbaron Muryantoro	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Moderator Sesi II
3.	Drs. Tugas Tri Wahyono	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Moderator Sesi III
4.	Drs. Agustinus Darto Harnoko	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Moderator Sesi IV

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Kepanitiaan
E.	Notulis/Pencatat Sidang		
1.	Samrotul Ilmi Albiladiyah,SS.	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Notulis Sesi I
2.	Dra. Isyanti	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Notulis Sesi II
3.	Drs. Suwarno	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Notulis Sesi III
4.	Dra. Endah Susilantini	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Notulis Sesi IV
F.	Perumus :		
1.	Drs. H. Tashadi	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Ketua
2.	Dra. Suhartinah Sudijono	Peneliti Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta	Anggota
3.	Salah satu Narasumber	Narasumber	Anggota



Dra. Sumintarsih, M.Hum.
NIP. 126661



**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
YOGYAKARTA**

**Jl. Brigjen Katamso 139,
Yogyakarta 55152**

**Tel. (0274)
373241, 379308**

**Fax : (0274)
381555**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA**

Nomor : 052.A/SB/BKSNT/DKP/I/2007

**Tentang
Penunjukan Narasumber dan Peserta Kegiatan Diskusi Sejarah Tahun 2007**

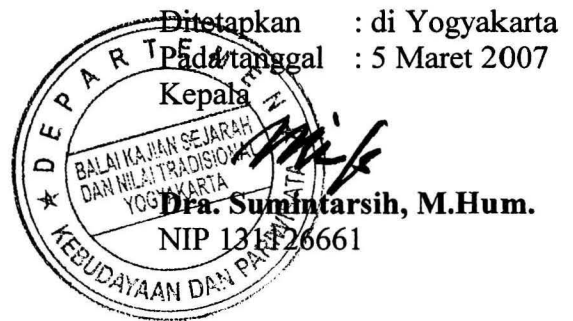
Kepala Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Yogyakarta

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Diskusi Sejarah pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta tahun anggaran 2007 perlu ditunjuk Narasumber dan Peserta.
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Narasumber/Peserta kegiatan Diskusi Sejarah Tahun 2007.
- Mengingat :**
- Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.01/KP.110/MKP-2007 Tgl. 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2007 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
 - Pengesahan DIPA Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Tahun anggaran 2007 Nomor: 0048.0/040-03.0/XIV/2007 tanggal 31 Desember 2006.
 - Keppres No. 42 Tahun 2002 dan No. 80 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini sebagai Narasumber dan Peserta Kegiatan Diskusi Sejarah yang diselenggarakan Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta.
 - Narasumber dan Peserta melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - Narasumber dan Peserta akan diberikan imbalan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan ini.
 - Semua biaya / pembayaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta tahun anggaran 2007, khususnya MAK untuk kegiatan tersebut.

- e. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan tersebut selesai, dengan catatan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Tembusan Yth.

1. Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film Depbudpar di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depbudpar di Jakarta
3. Kepala KPPN Yogyakarta
4. Yang bersangkutan.

lampiran I: Surat Keputusan Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Nomor: 052A/SB/BKSNT/DKP/I/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Diskusi Sejarah Tahun anggaran 2007.

No	Nama	Alamat Dinas Kantor
1.	Dr. Inajati Romli	FIB UGM Yogyakarta
2.	Prof. Dr. Sutikno	Fakultas Geografi UGM Yogyakarta
3.	Prof. Dr. Soegijanto Padmo, M.Sc.	FIB UGM Yogyakarta
4.	Prof. Dr. Bambang Purwanto	FIB UGM Yogyakarta
5.	Prof. Dr. Djoko Suryo	FIB UGM Yogyakarta
6.	Prof. Dr. Tajudin Noor Efendi, MA.	FISIPOL UGM Yogyakarta
7.	Prof. Dr. Mudradjat Kuncoro	Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta
8.	Suradji, SH.MH.	Polda DIY

Kepala



Dra. Sumintarsih, M.Hum.
NIP. 31126661

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Nomor : 052.A/SB/BKSNT/DKP/I/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Penunjukan Peserta Kegiatan Diskusi Sejarah Tahun 2007.

No.	Nama	Alamat
1.	Theresiana Ani L, S.Psi.	BPSNT Yogyakarta
2.	Drs. Siswanto	Univ. PGRI Yogyakarta
3.	Drs. Mudji Hartono, M.Hum	Jurusan Sejarah UNY
4.	Dra. Sulistyawati	Dinas Kebudayaan Prop. DIY
5.	Anas Mubakhir, SS.	Dinas Budpar Kab. Sleman
6.	Aniani Ratna	Pusat Studi Asia Tenggara UGM
7.	Mudjiono Darmosiswoyo	GKJ Samirono Baru
8.	Drs. I Gede Adi Asmaya	UPTD Museum Sonobudoyo
9.	Sukarmin	Polsekta Mantrijeron Yk.
10.	Drs. Soraya Adriani, M.Si.	Fak. Adab UIN Suka Yk.
11.	Drs. Slamet Penardi	FIB UGM Yogyakarta
12.	Maharjono, S.Pd.	SMA N 1 Sewon
13.	Suarman, S.H., M.H.	Dinas P dan K Kab. Bantul
14.	Ery Iwandiyati K, S.Pd.	SMA Marsudi Luhur Yk.
15.	Drs. Moertjipto	BPSNT Yogyakarta
16.	Dra. Emiliana Sadilah	BPSNT Yogyakarta
17.	Ernawati Purwaningsih, S.Si.	BPSNT Yogyakarta
18.	Ir. Sulistyanto Istifaruloh	RRI Yogyakarta
19.	Sutiyasno, S.Pt.	RRI Yogyakarta
20.	Drs. Sujarno	BPSNT Yogyakarta
21.	Dra. Christriyati A, M.Hum.	BPSNT Yogyakarta
22.	Andri Rosidi	BKPB Daerah Melayu
23.	Soch Ibunnajah	Fakultas Geografi UGM
24.	Poppy Yuanita	Fakultas Geografi UGM
25.	Dra. Isni Herawati	BPSNT Yogyakarta
26.	Eko Suryanti, SS.	Bapeda Propinsi DIY

No.	Nama	Alamat
27.	Dra. Suyami, M.Hum.	Jumlah pindahan BPSNT Yogyakarta
28.	Dra. Taryati	BPSNT Yogyakarta
29.	Sri Sumarsih, BA.	BPSNT Yogyakarta
30.	Noor Sulistyo Budi, SH	BPSNT Yogyakarta
31.	Drs. Mudjijono, M.Hum.	BPSNT Yogyakarta
32.	Agung Budiyo	Mahasiswa FIB UGM Yk.
33.	Drs. A. Adaby Darban, SU.	FIB UGM
34.	Aditya Kusumawan	Mahasiswa FIB UGM Yk.
35.	Drs. Sukari	BPSNT Yogyakarta
36.	Dra. Titi Mumfangati	BPSNT Yogyakarta
37.	Dra. Siti Munawaroh	BPSNT Yogyakarta
38.	Drs. Salamun	BPSNT Yogyakarta
39.	Drs. Singgih Hapsoro	Dinas Budpar Kab. Kulonprogo
40.	Drs. Wisnu Wardhana	Dinas Budpar Kab Gunungkidul
41.	Nunuk Dwi hastuti	Dinas Pendidikan Kota Yk.
42.	Drs. Suratmin	MSI Yogyakarta
43.	Dra. Mistianik	SMP N 2 Gamping
44.	Drs. Musdiastomo, M.Si.	UNY
45.	Petrus Sukamso	BPPT Yogyakarta
46.	Nasib Dwi Riyanto, S.Pd.	Museum benteng Yogyakarta
47.	Dra. Andi Riyana	BP-3 kalasan Yogyakarta
48.	Ir. Dhamra Gupta	JHS Yogyakarta
49.	Supiyandono, SH., MMA.	Kecamatan mantrijeron Yk.
50.	Baha'uddin, M.Hum.	MSI Yogyakarta
51.	Drs.Silverio RL, M.Hum	USD Yogyakarta
52.	Reza Udianto, M.Hum.	Pasca Sarjana UGM
53.	Asti Kurniawati, M.Hum.	Pasca Sarjana UGM

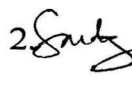
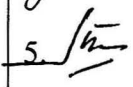
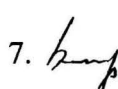
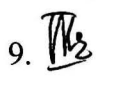
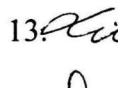
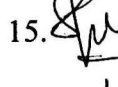
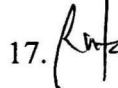
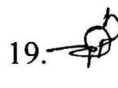
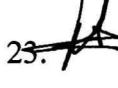
No.	Nama	Alamat
54.	Chatarina Elty	MSI Yogyakarta
55.	Nirmala	MAN 3 Yogyakarta
56.	Ambar Nuradi P.	Bapeda Kota Yogyakarta
57.	Drs. Hari Lelono	Balai Arkeologi Yogyakarta
58.	Endah Widayanti, S.Pd.	SMA N 8 Yogyakarta
59.	A. Diah Setiawati, SH.	Dinas Pariwisata Kab. Bantul
60.	Dra. Tatik Dwi Kusmiati	SMA PIRI 1 Yogyakarta
61.	E. Astoko Datu	LSM
62.	Drs. Suradi	SMA N 3 Yogyakarta
63.	Longginus Pekey	USD Yogyakarta
64.	Dra. Pratiwi Yuliani	Dinas Parnenibud Kota Yk.
65.	Dra. Herdiwati	SMA Muha Yogyakarta
66.	Yosafat Ardila	FIB UGM Yogyakarta
67.	Dra. Sri Saptarini	SMA Bopkri Banguntapan
68.	Noor Kholis Akbar	Teknik Arsitektur UGM
69.	Dimas Wihardianto, ST.	Teknik Arsitektur UGM
70.	Drs. Mursetyadi	SMA Bopkri 1 Yogyakarta
71.	Tiwuk	UNS Surakarta
72.	Drs. Partono	SMA Muh. 5 Yogyakarta
73.	Drs. IW. Pantja Sunjata	BPSNT Yogyakarta
74.	Drs. Ig. Eko Hadiyanto	BP-3 DIY
75.	Drs. HJ. Wibowo	STIA – AAN- Yogyakarta

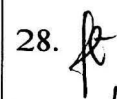


Kepala

Dra. Sumintarsih, M. Hum.
NIP-131126661

DAFTAR HADIR
KEGIATAN DISKUSI SEJARAH DIY, DI YOGYAKARTA, 11 – 12 APRIL 2007
Rabu, 11 April 2007

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1.	Dr. Magdalia Alfian, MA.	Direktorat Nilai Sejarah Jakarta	1.	
2.	Dra. Sri Gayatri	Direktorat Nilai Sejarah Jakarta	2.	
3.	Ir. Condroyono	Dinas Kebudayaan Propinsi DIY	3.	
4.	Dr. Inajati Romli	FIB UGM Yogyakarta	4.	
5.	Prof. Dr. Sutikno	Fakultas Geografi UGM Yogyakarta	5.	
6.	Prof. Dr. Soegijanto Padmo	FIB UGM Yogyakarta	6.	
7.	Prof. Dr. Bambang Purwanto	FIB UGM Yogyakarta	7.	
8.	Prof. Dr. Djoko Suryo	FIB UGM Yogyakarta	8.	
9.	Prof. Dr. Tajuddin Noor Efendi	FISIPOL UGM Yogyakarta	9.	
10.	Prof. Dr. Mudradjat Kuncono	Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta	10.	
11.	Suradji, SH., MH.	Polda Propinsi DIY	11.	
12.	Dra. Sumintarsih, M.Hum.	BKSNT Yogyakarta	12.	
13.	Drs. Nurdianto	BKSNT Yogyakarta	13.	
14.	Drs. Sumardi	BKSNT Yogyakarta	14.	
15.	Sudarsi	BKSNT Yogyakarta	15.	
16.	Dra. Sri Retna Astuti	BKSNT Yogyakarta	16.	
17.	Dra. Dwi Ratna N, M.Hum.	BKSNT Yogyakarta	17.	
18.	Ana Amini	BKSNT Yogyakarta	18.	
19.	Sri Herawati	BKSNT Yogyakarta	19.	
20.	Damardjati	BKSNT Yogyakarta	20.	
21.	Mudji Slamet	BKSNT Yogyakarta	21.	
22.	Wagiman	BKSNT Yogyakarta	22.	
23.	Suhatno, BA.	BKSNT Yogyakarta	23.	
24.	Drs. Hisbaron Muryantoro	BKSNT Yogyakarta	24.	
25.	Drs. Tugas Tri Wahyono	BKSNT Yogyakarta	25.	
26.	Drs. Darto Harnoko	BKSNT Yogyakarta	26.	

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
27.	S. Ilmi Albiladiyah, SS.	BKSNT Yogyakarta	27.	
28.	Dra. Isyanti	BKSNT Yogyakarta	28.	
29.	Drs. Suwarno	BKSNT Yogyakarta	29.	
30.	Dra. Endah Susilantini	BKSNT Yogyakarta	30.	
31.	Drs. Tashadi	BKSNT Yogyakarta	31.	
32.	Dra. Suhartinah Sudijono	BKSNT Yogyakarta	32.	

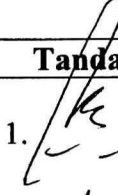
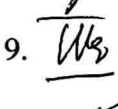
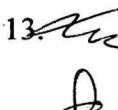
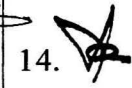
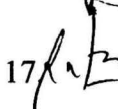
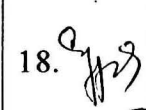
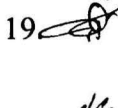
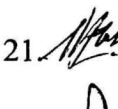
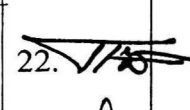
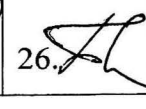
Yogyakarta,

Kepala Balai Kajian Jarahnitra



Dra. Sumintarsih, M. Hum.
NIP 131126661

DAFTAR HADIR
KEGIATAN DISKUSI SEJARAH DIY, DI YOGYAKARTA, 11 – 12 APRIL 2007
Kamis, 12 April 2007

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1.	Dr. Magdalia Alfian, MA.	Direktorat Nilai Sejarah Jakarta	1. 	
2.	Dra. Sri Gayatri	Direktorat Nilai Sejarah Jakarta		2. 
3.	Ir. Condroyono	Dinas Kebudayaan Propinsi DIY	3. 	
4.	Dr. Inajati Romli	FIB UGM Yogyakarta		4. 
5.	Prof. Dr. Sutikno	Fakultas Geografi UGM Yogyakarta	5. 	
6.	Prof. Dr. Soegijanto Padmo	FIB UGM Yogyakarta		6. 
7.	Prof. Dr. Bambang Purwanto	FIB UGM Yogyakarta	7. 	
8.	Prof. Dr. Djoko Suryo	FIB UGM Yogyakarta		8. 
9.	Prof. Dr. Tajuddin Noor Efendi	FISIPOL UGM Yogyakarta	9. 	
10.	Prof. Dr. Mudradjat Kuncono	Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta		10. 
11.	Suradji, SE., MH.	Polda Propinsi DIY	11. 	
12.	Dra. Sumintarsih, M.Hum.	BKSNT Yogyakarta		12. 
13.	Drs. Nurdiyanto	BKSNT Yogyakarta	13. 	
14.	Drs. Sumardi	BKSNT Yogyakarta		14. 
15.	Sudarsi	BKSNT Yogyakarta	15. 	
16.	Dra. Sri Retna Astuti	BKSNT Yogyakarta		16. 
17.	Dra. Dwi Ratna N, M.Hum.	BKSNT Yogyakarta	17. 	
18.	Ana Amini	BKSNT Yogyakarta		18. 
19.	Sri Herawati	BKSNT Yogyakarta	19. 	
20.	Damardjati	BKSNT Yogyakarta		20. 
21.	Mudji Slamet	BKSNT Yogyakarta	21. 	
22.	Wagiman	BKSNT Yogyakarta		22. 
23.	Suhatno, BA.	BKSNT Yogyakarta	23. 	
24.	Drs. Hisbaron Muryantoro	BKSNT Yogyakarta		24. 
25.	Drs. Tugas Tri Wahyono	BKSNT Yogyakarta	25. 	
26.	Drs. Darto Harnoko	BKSNT Yogyakarta		26. 

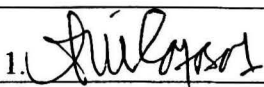
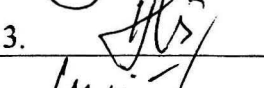
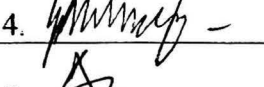
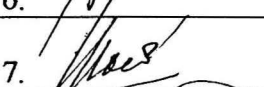
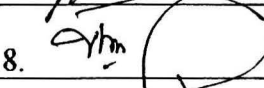
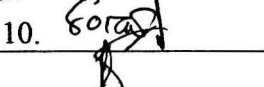
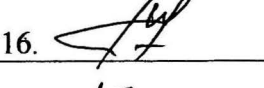
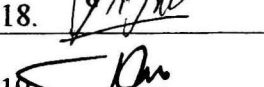
No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
27.	S. Ilmi Albiladiyah, SS.	BKSNT Yogyakarta	27.	
28.	Dra. Isyanti	BKSNT Yogyakarta	28.	
29.	Drs. Suwarno	BKSNT Yogyakarta	29.	
30.	Dra. Endah Susilantini	BKSNT Yogyakarta	30.	
31.	Drs. Tashadi	BKSNT Yogyakarta	31.	
32.	Dra. Suhartinah Sudijono	BKSNT Yogyakarta	32.	

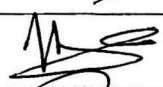
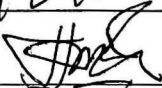
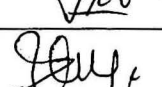
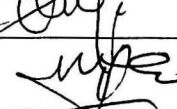
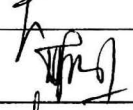
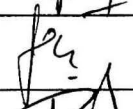
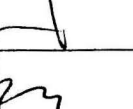
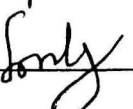
Yogyakarta,
Kepala Balai Kajian Jarahnitra

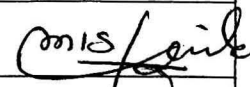
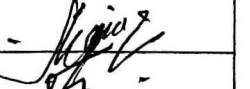
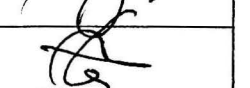
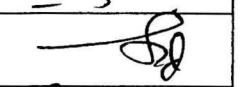
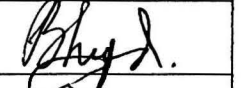
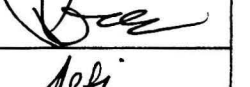
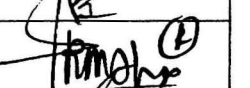
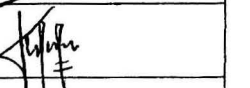
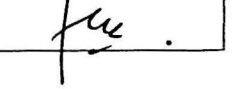


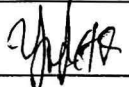
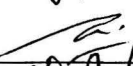
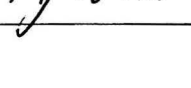
Dra. Sumintarsih, M. Hum.
NIP 131126661

DAFTAR HADIR
DISKUSI SEJARAH
KOTA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
Rabu, 11 April 2007

NO.	NAMA	ALAMAT/INSTANSI ASAL	T.TANGAN
1.	Theresiana Ani Larasati, S.psi	Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta	1. 
2.	Drs. Siswanta	Univ PGRI Yogyakarta	2. 
3.	Drs. Mudji Hartono, M.Hum	Jurusan Sejarah UNY	3. 
4.	Dra. Sulistyawati	Dinas Kebudayaan Propinsi DIY	4. 
5.	Anas Mubakkir, SS	Dinas Budpar kab. Sleman	5. 
6.	Ariani ratna	Pusat Studi Asia Tenggara UGM	6. 
7.	Mudjiono Darmosiswoyo, Bsc.	GKJ Samirono Baru	7. 
8.	Drs. I Gede Adi Asmaya	UPTD Museum Sonobudoyo	8. 
9.	Sukarmin	Polsekta Mantrijeron Yogyakarta	9. 
10.	Dra. Soraya Adriani, M.Si	UIN Yogyakarta (Fak. Adab)	10. 
11.	Drs. Slamet Penardi	FIB UGM (Arkeologi)	11. 
12.	Maharjono, S.Pd	SMAN I Sewon	12. 
13.	Suarman, SH, M.H	Dinas P & K Kab. Bantul	13. 
14.	Ery Iwandyati Kardono, S.Pd	SMA marsudi Luhur	14. 
15.	Drs. Moertjipto	BPSNT Yogyakarta	15. 
16.	Dra. Emiliana Sadilah	BPSNT Yogyakarta	16. 
17.	Ernawati Purwaningsih, S.Si	BPSNT Yogyakarta	17. 
18.	Ir. Sulistyanto Istifaruloh	RRI Yogyakarta	18. 
19.	Sutiyasno, S.Pt	RRI Yogyakarta	19. 
20.	Drs. Sujarno	BPSNT Yogyakarta	20. 

NO.	NAMA	ALAMAT	T.TANGAN
21.	Dra. Christriyati Ariani, M.Hum	BPSNT Yogyakarta	21. 
22.	Andri Rosidi	Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Daerah Melayu	22. 
23.	Soch Ibunnajah	Fak Geografi UGM	23. 
24.	Poppy Yuanita	Fak Geografi UGM	24. 
25.	Dra. Isni Herawati	BPSNT Yogyakarta	25. 
26.	Eko Suryanti, SS	Bapeda Prop. DIY	26. 
27.	Dra. Suyami, M.Hum	BPSNT Yogyakarta	27. 
28.	Dra. Taryati	BPSNT Yogyakarta	28. 
29.	Sri Sumarsih, BA	BPSNT Yogyakarta	29. 
30.	Noor Sulistyo Budi, SH	BPSNT Yogyakarta	30. 
31.	Drs. Mudjijono, M.Hum	BPSNT Yogyakarta	31. 
32.	Agung Budiyo	Mahasiswa FIB UGM	32. 
33.	Drs. A Adaby Darban, SU	FIB UGM	33. 
34.	Aditya Kusumawan	Mahasiswa FIB UGM	34. 
35.	Drs. Sukari	BPSNT Yogyakarta	35. 
36.	Dra. Titi Mumfagati	BPSNT Yogyakarta	36. 
37.	Drs. Siti Munawaroh	BPSNT Yogyakarta	37. 
38.	Drs. Salamun	BPSNT Yogyakarta	38. 
39.	Drs. Stameslaus Singgih Hapsoro, SS	Dinas Budpar Kab. Kulonprogo	39. 
40.	Drs. Wisnu Wardana	Dinas Budpar Kab. Gunungkidul	40. 
41.	Nunuk Dwi Hastuti	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	41. 
42.	Drs. Suratmin	MSI Yogyakarta	42. 

NO.	NAMA	ALAMAT	T. TANGAN
43.	Dra. Mistianik	SMPN 2 Gamping	43. 
44.	Drs. Mudiastomo, M.Si	Jurusan Sejarah UNY	44. 
45.	Petrus Sukamso	BPPT Yogyakarta	45. 
46.	Nasib Dwi Riyanto, S.Pd	Museum Benteng Vredeberg	46. 
47.	Dra. Andi Riyana	BP 3 Bogem Kalasan	47. 
48.	Ir. Dharma Gupta	JHS Yogyakarta	48. 
49.	Supiyandono, SH, MMA	Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta	49. 
50.	Baha uddin, M.Hum	MSI Yogyakarta	50. 
51.	Silverto	Universitas Sanata Dharma Yk	51. 
52.	Reza Udianto, M.Hum	Pasca Sarjana UGM	52. 
53.	Asti Kurniawati, M.Hum	Pasca Sarjana UGM	53. 
54.	Chatarina Elty	MSI Yogyakarta	54. 
55.	Nirmala	MAN 3 Yogyakarta	55. 
56.	Ambar Nuradi Pramukayana	Bapeda Kota Yogyakarta	56. 
57.	Hari Lelono	Balar Yogyakarta	57. 
58.	Endah Widayanti, S.Pd	SMA 8 Yogyakarta	58. 
59.	A. Diah Setiawati, S.H.	Parbud Bantul	59. 
60.	Dra. Tatik Dwi Kusmiati	SMA PIRI I Yogyakarta	60. 
61.	E. Astoko Datu	LSM	61. 
62.	Drs. Suradi	SMAN 3 Yogyakarta	62. 
63.	Longginus Pekey	Universitas Sanata Dharma	63. 
64.	Dra. Pratiwi Yuliani	Parsenibud Kota Yogyakarta	64. 
65.	Dra. Herdiwati	SMA MUHA Yogyakarta	65. 

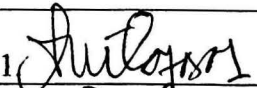
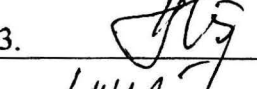
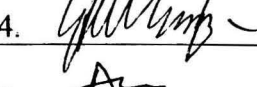
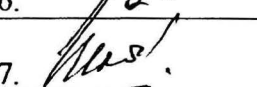
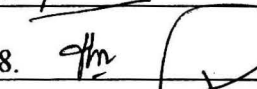
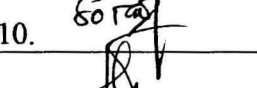
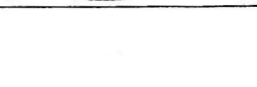
NO.	NAMA	ALAMAT	T. TANGAN
66.	Yosapat Ardila	Antropologi UGM	66. 
67.	Dra. Sri Saptarini	SMA Bopkri Banguntapan	67. 
68.	Noor kholis Akbar	Arsitektur UGM	68. 
69.	Dimas Wihardianto, ST	Arsitektur UGM	69. 
70.	Drs. Mursetyadi	Bopkri I Yogyakarta	70. 
71.	Tiwuk	UNS Surakarta	71. 
72.	Drs. Partono	SMA Muhamadiyah 5 Yk.	72. 
73.	Drs. Pantja Sunjata	BPSNT Yogyakarta	73. 
74.	Drs. Ig. Eko Hadiyanto	BP 3 DIY	74. 
75.	Drs. HJ. Wibowo	STIA "AAN" Yogyakarta	75. 

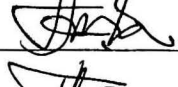
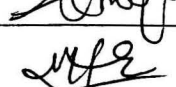
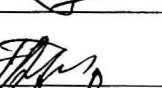
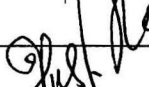
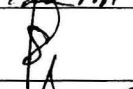
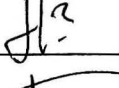
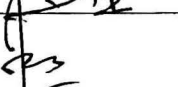
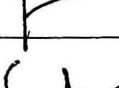
Yogyakarta, April 2007
Kepala Balai Pelestarian Sejarah
Dan Nilai Tradisional

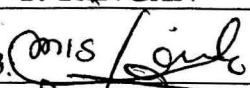
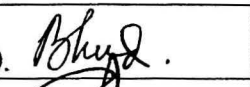
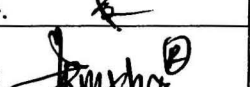
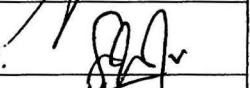
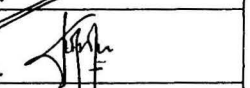
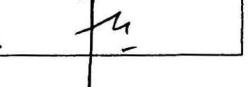


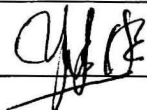
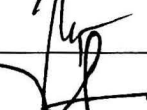
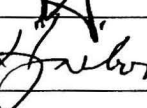
Dra. Sumintarsih, M.Hum
NIP 131126661

DAFTAR HADIR
DISKUSI SEJARAH
KOTA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
Kamis, 12 April 2007

NO.	NAMA	ALAMAT/INSTANSI ASAL	T.TANGAN
1.	Theresiana Ani Larasati, S.psi	Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta	1. 
2.	Drs. Siswanta	Univ PGRI Yogyakarta	2. 
3.	Drs. Mudji Hartono, M.Hum	Jurusan Sejarah UNY	3. 
4.	Dra. Sulistyawati	Dinas Kebudayaan Propinsi DIY	4. 
5.	Anas Mubakhir, SS	Dinas Budpar kab. Sleman	5. 
6.	Ariani ratna	Pusat Studi Asia Tenggara UGM	6. 
7.	Mudjiono Darmosiswoyo, Bsc.	GKJ Samirono Baru	7. 
8.	Drs. I Gede Adi Asmaya	UPTD Museum Sonobudoyo	8. 
9.	Sukarmin	Polsekta Mantrijeron Yogyakarta	9. 
10.	Dra. Soraya Adriani, M.Si	UIN Yogyakarta (Fak. Adab)	10. 
11.	Drs. Slamet Penardi	FIB UGM (Arkeologi)	11. 
12.	Maharjono, S.Pd	SMAN I Sewon	12. 
13.	Suarman, SH, M.H	Dinas P & K Kab. Bantul	13. 
14.	Ery Iwandiyati Kardono, S.Pd	SMA marsudi Luhur	14. 
15.	Drs. Moertjipto	BPSNT Yogyakarta	15. 
16.	Dra. Emiliana Sadilah	BPSNT Yogyakarta	16. 
17.	Ernawati Purwaningsih, S.Si	BPSNT Yogyakarta	17. 
18.	Ir. Sulistyanto Istifaruloh	RRI Yogyakarta	18. 
19.	Sutiyasno, S.Pt	RRI Yogyakarta	19. 
20.	Drs. Sujarno	BPSNT Yogyakarta	20. 

NO.	NAMA	ALAMAT	T.TANGAN
21.	Dra. Christriyati Ariani, M.Hum	BPSNT Yogyakarta	21. 
22.	Andri Rosidi	Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Daerah Melayu	22. 
23.	Soch Ibunnajah	Fak Geografi UGM	23. 
24.	Poppy Yuanita	Fak Geografi UGM	24. 
25.	Dra. Isni Herawati	BPSNT Yogyakarta	25. 
26.	Eko Suryanti, SS	Bapeda Prop. DIY	26. 
27.	Dra. Suyami, M.Hum	BPSNT Yogyakarta	27. 
28.	Dra. Taryati	BPSNT Yogyakarta	28. 
29.	Sri Sumarsih, BA	BPSNT Yogyakarta	29. 
30.	Noor Sulistyo Budi, SH	BPSNT Yogyakarta	30. 
31.	Drs. Mudjijono, M.Hum	BPSNT Yogyakarta	31. 
32.	Agung Budiyo	Mahasiswa FIB UGM	32. 
33.	Drs. A Adaby Darban, SU	FIB UGM	33. 
34.	Aditya Kusumawan	Mahasiswa FIB UGM	34. 
35.	Drs. Sukari	BPSNT Yogyakarta	35. 
36.	Dra. Titi Mumfangati	BPSNT Yogyakarta	36. 
37.	Drs. Siti Munawaroh	BPSNT Yogyakarta	37. 
38.	Drs. Salamun	BPSNT Yogyakarta	38. 
39.	Drs. Stameslaus Singgih Hapsoro, SS	Dinas Budpar Kab. Kulonprogo	39. 
40.	Drs. Wisnu Wardana	Dinas Budpar Kab. Gunungkidul	40. 
41.	Nunuk Dwi Hastuti	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	41. 
42.	Drs. Suratmin	MSI Yogyakarta	42. 

NO.	NAMA	ALAMAT	T. TANGAN
43.	Dra. Mistianik	SMPN 2 Gamping	43. 
44.	Drs. Mudiastomo, M.Si ^{M. Hum}	Jurusan Sejarah UNY	44. 
45.	Petrus Sukamso	BPPT Yogyakarta	45. 
46.	Nasib Dwi Riyanto, S.Pd	Museum Benteng Vredebreg	46. 
47.	Dra. Andi Riyana	BP 3 Bogem Kalasan	47. 
48.	Ir. Dharma Gupta	JHS Yogyakarta	48. 
49.	Supiyandono, SH, MMA	Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta	49. 
50.	Baha uddin, M.Hum	MSI Yogyakarta	50. 
51.	Silverio Silverio R.L. ^{Aji S}	Universitas Sanata Dharma Yk	51. 
52.	^H Reza Udiyanto, M.Hum	Pasca Sarjana UGM	52. 
53.	Asti Kurniawati, M.Hum	Pasca Sarjana UGM	53. 
54.	Chatarina Elty	MSI Yogyakarta	54. 
55.	Nirmala	MAN 3 Yogyakarta	55. 
56.	Ambar Nuradi Pramukayana	Bapeda Kota Yogyakarta	56. 
57.	Hari Lelono	Balar Yogyakarta	57. 
58.	Endah Widayanti, S.Pd	SMA 8 Yogyakarta	58. 
59.	A. Diah Setiawati, S.H.	Parbud Bantul	59. 
60.	Dra. Tatik Dwi Kusmiati	SMA PIRI I Yogyakarta	60. 
61.	E. Astoko Datu	LSM	61. 
62.	Drs. Suradi	SMAN 3 Yogyakarta	62. 
63.	Longginus Pekey	Universitas Sanata Dharma	63. 
64.	Dra. Pratiwi Yuliani	Parsenibud Kota Yogyakarta	64. 
65.	Dra. Herdiwati	SMA MUHA Yogyakarta	65. 

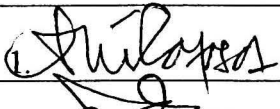
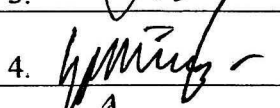
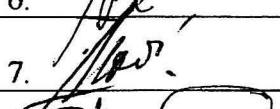
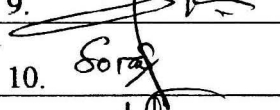
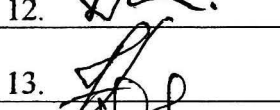
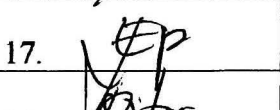
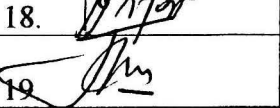
NO.	NAMA	ALAMAT	T. TANGAN
66.	Yosapat Ardila	Antropologi UGM	66. 
67.	Dra. Sri Saptarini	SMA Bopkri Banguntapan	67. 
68.	Noor kholis Akbar	Arsitektur UGM	68. 
69.	Dimas Wihardianto, ST	Arsitektur UGM	69. 
70.	Drs. Mursetyadi	Bopkri I Yogyakarta	70. 
71.	Tiwuk	UNS Surakarta	71. 
72.	Drs. Partono	SMA Muhamadiyah 5 Yk.	72. 
73.	Drs. Pantja Sunjata	BPSNT Yogyakarta	73. 
74.	Drs. Ig. Eko Hadiyanto	BP 3 DIY	74. 
75.	Drs. HJ. Wibowo	STIA "AAN" Yogyakarta	75. 

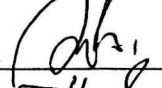
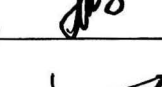
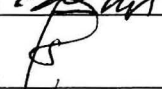
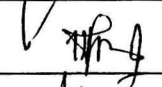
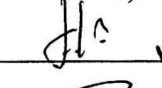
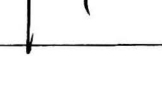
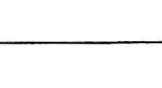
Yogyakarta, April 2007
Kepala Balai Pelestarian Sejarah
Dan Nilai Tradisional

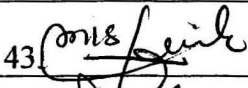
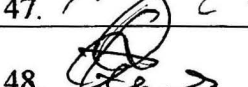
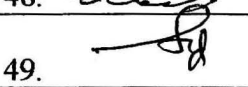
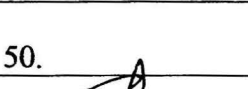
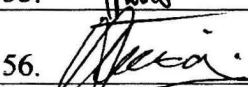
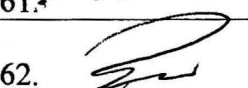
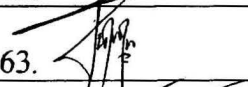
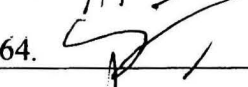
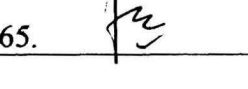


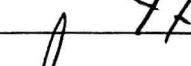
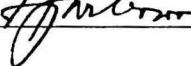
Dra. Sumintarsih, M.Hum
NIP 131126661

DAFTAR HADIR
DISKUSI SEJARAH
KOTA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
11 - 12 April 2007

NO.	NAMA	ALAMAT/INSTANSI ASAL	T.TANGAN
1.	Theresiana Ani Larasati, S.psi	Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta	1. 
2.	Drs. Siswanta	Univ PGRI Yogyakarta	2. 
3.	Drs. Mudji Hartono, M.Hum	Jurusan Sejarah UNY	3. 
4.	Dra. Sulistyawati	Dinas Kebudayaan Propinsi DIY	4. 
5.	Anas Mubakhir, SS	Dinas Budpar kab. Sleman	5. 
6.	Ariani ratna	Pusat Studi Asia Tenggara UGM	6. 
7.	Mudjiono Darmosiswoyo, Bsc.	GKJ Samirono Baru	7. 
8.	Drs. I Gede Adi ^{ATMAJA} Amaya	UPTD Museum Sonobudoyo	8. 
9.	Sukarmin	Polsekta Mantrijeron Yogyakarta	9. 
10.	Dra. Soraya ^{nani} Adiani , M.Si	UIN Yogyakarta (Fak. Adab)	10. 
11.	Drs. Slamet Penardi	FIB UGM (Arkeologi)	11. 
12.	Maharjono, S.Pd	SMAN I Sewon	12. 
13.	Suarman, SH, M.H	Dinas P & K Kab. Bantul	13. 
14.	Ery Iwandiyati ^{Kuswardojo} Kardono , S.Pd	SMA marsudi Luhur	14. 
15.	Drs. Moertjipto	BPSNT Yogyakarta	15. 
16.	Dra. Emiliana Sadilah	BPSNT Yogyakarta	16. 
17.	Ernawati Purwaningsih, S.Si	BPSNT Yogyakarta	17. 
18.	Ir. Sulistyanto Istifaruloh	RRI Yogyakarta	18.
19.	Sutiyasno, S.Pt	RRI Yogyakarta	19.
20.	Drs. Sujarno	BPSNT Yogyakarta	20.

NO.	NAMA	ALAMAT	T.TANGAN
21.	Dra. Christriyati Ariani, M.Hum	BPSNT Yogyakarta	21. 
22.	Andri Rosidi	Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Daerah Melayu	22. 
23.	Soeh Ibunnajah / Soehibunnajah	Fak Geografi UGM	23. 
24.	Poppy Yuanita	Fak Geografi UGM	24. 
25.	Dra. Isni Herawati	BPSNT Yogyakarta	25. 
26.	Eko Suryanti, SS	Bapeda Prop. DIY	26. 
27.	Dra. Suyami, M.Hum	BPSNT Yogyakarta	27. 
28.	Dra. Taryati	BPSNT Yogyakarta	28. 
29.	Sri Sumarsih, BA	BPSNT Yogyakarta	29. 
30.	Noor Sulistyo Budi, SH	BPSNT Yogyakarta	30. 
31.	Drs. Mudjijono, M.Hum	BPSNT Yogyakarta	31. 
32.	Agung Budiyo	Mahasiswa FIB UGM	32. 
33.	Drs. A Adaby Darban, SU	FIB UGM	33. 
34.	Aditya Kusumawan	Mahasiswa FIB UGM	34. 
35.	Drs. Sukari	BPSNT Yogyakarta	35. 
36.	Dra. Titi Mumfangati	BPSNT Yogyakarta	36. 
37.	Drs. Siti Munawaroh	BPSNT Yogyakarta	37. 
38.	Drs. Salamun	BPSNT Yogyakarta	38. 
39.	Drs. Stameslaus Singgih Hapsoro, SS	Dinas Budpar Kab. Kulonprogo	39. 
40.	Drs. Wisnu Wardana	Dinas Budpar Kab. Gunungkidul	40. 
41.	Nunuk Dwi Hastuti	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	41. 
42.	Drs. Suratmin	MSI Yogyakarta	42. 

NO.	NAMA	ALAMAT	T. TANGAN
43.	Dra. Mistianik	SMPN 2 Gamping	43. 
44.	Drs. Mudiastomo, M.Si	Jurusan Sejarah UNY	44. 
45.	Petrus Sukamso	BPPT Yogyakarta	45. 
46.	Nasib Dwi Riyanto, S.Pd	Museum Benteng Vredeberg	46. 
47.	Dra. Andi Riyana	BP 3 Bogem Kalasan	47. 
48.	Ir. Dharma Gupta	JHS Yogyakarta	48. 
49.	Supiyandono, SH, MMA	Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta	49. 
50.	Baha uddin, M.Hum	MSI Yogyakarta	50. 
51.	Silverio R. L. Agi S.	Universitas Sanata Dharma Yk	51. 
52.	Reza Hudiyanto Reza Udiyanto, M.Hum	Pasca Sarjana UGM	52. 
53.	Asti Kurniawati, M.Hum	Pasca Sarjana UGM	53. 
54.	Dra. Chatarina Ety SH	MSI Yogyakarta	54. 
55.	Nirmala	MAN 3 Yogyakarta	55. 
56.	Ambar Nuradi Pramukayana	Bapeda Kota Yogyakarta	56. 
57.	SOFWAN XBERWIDI, S.S. Hari Lelono	Balar Yogyakarta	57. 
58.	Endah Widayanti, S.Pd	SMA 8 Yogyakarta	58. 
59.	A. Diah Setiawati, S.H.	Parbud Bantul	59. 
60.	Dra. Tatik Dwi Kusmiati	SMA PIRI I Yogyakarta	60. 
61.	E. Astoko Datu	LSM	61. 
62.	Drs. Suradi	SMAN 3 Yogyakarta	62. 
63.	Longginus Pekey	Universitas Sanata Dharma	63. 
64.	Dra. Pratiwi Yuliani	Parsenibud Kota Yogyakarta	64. 
65.	Dra. Herdiwati	SMA MUHA Yogyakarta	65. 

NO.	NAMA	ALAMAT	T. TANGAN
66.	Yosapat Ardila	Antropologi UGM	66. 
67.	ARI. SAPTARTINI Dra. Sri Saptarini	SMA Bopkri Banguntapan	67. 
68.	Noor kholis Akbar	Arsitektur UGM	68. 
69.	Dimas Wihardianto, ST	Arsitektur UGM	69. 
70.	Drs. Mursetyadi	Bopkri I Yogyakarta	70. 
71.	Tiwuk	UNS Surakarta	71. 
72.	Drs. Partono	SMA Muhamadiyah 5 Yk.	72. 
73.	Drs. Pantja Sunjata	BPSNT Yogyakarta	73. 
74.	Drs. Ig. Eko Hadiyanto	BP 3 DIY	74. 
75.	Drs. HJ. Wibowo	STIA "AAN" Yogyakarta	75. 

Yogyakarta, April 2007
Kepala Balai Pelestarian Sejarah
Dan Nilai Tradisional



Dra. Sumintarsih, M.Hum
NIP 131126661

JADWAL DISKUSI SEJARAH TGL 11-12 APRIL 2007
DI HOTEL MATAHARI, JL. PARANGTRITIS NO.123 YOGYAKARTA

Hari/tgl	Waktu	Acara	Pembicara	Judul	Moderator	Notulis	Keterangan
Rabu, 11-4-2007	08.00-09.00	Registrasi					Panitia
	09.00-09.30	Pembukaan					MC
	09.30-10.00	Istirahat					Panitia
	10.00-11.00	Pengarahan					Direktur Nilai Sejarah
	11.00-13.00	Sesi I	Dr. Inayati Romli Prof.Dr. Sutikno	Potensi dan Masalah perkotaan Sebagai Kawasan Pusaka Budaya Perpindahan Ibu Kota Suatu Wacana atau Keharusan ?	Suhatno, BA	S Ilmi Albiladiyah, SS	
	13.00-14.00	Istirahat					Panitia
	14.00-16.00	Sesi II	- Prof.Dr. Soegiyanto Padmo, M.Sc - Prof.Dr. Bambang Purwanto	Kota dan Kapitalisme Perkebunan Sejarah Kota, Penduduk Kota dan Warga Kota: Kisah Kota di Indonesia	Drs. Hisbaron Muryantoro	Dra. Isyanti	
	16.00-16.30	Istirahat	-				Panitia
Kamis 12-4-2007	08.30-10.30	Sesi III	- Prof.Dr. Djoko Suryo - Polda DIY	Ruang-Ruang Perkotaan: Makna dan Perubahan Simbol Kekerasan dan Kriminalitas Masyarakat Perkotaan dalam Perkembangan Jaman	Drs. Tugas Tri Wahyono	Drs. Suwarno	
	10.30-10.45	Istirahat	-				Panitia
	10.45-12.45	Sesi IV	- Prof.Dr. Tajuddin Noor Effendi, MA - Prof.Dr. Mudradjat Kuncoro	Permukiman dan Pembangunan Infrastruktur Kota Perkembangan Ekonomi Perkotaan Pasca Kemerdekaan	Drs. Darto Harnoko	Dra. Endah Susilantini	
	12.45-13.45	Istirahat/makan siang/Rapat perumusan	-				Panitia/Tim Perumus
	13.45-14.15	Pembacaan rumusan	-				MC
	14.15-14.45	Penutupan					Panitia
	14.45-15.30	Peny. Adm					Sneck

Yogyakarta, April 2007

Panitia

DR MAGDALIA ALFIAN MA

Urbanisasi Pemicu Perkembangan Kota

YOGYA (KR) - Urbanisasi merupakan salah satu faktor pemicu perkembangan kota. Hanya sayangnya, mereka yang ke kota sering tidak dibekali ketrampilan yang memadai sehingga tidak diterima di sektor formal yang menuntut keahlian tertentu. Kondisi ini menjadi beban tersendiri kota yang bersangkutan.

Demikian diungkapkan Dr Magdalia Alfian MA, Direktur Nilai Sejarah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata saat menjadi pembicara kunci diskusi sejarah 'Kota dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah' di Hotel Matahari, Jl Parangtriris 123, Rabu (11/4). Kegiatan yang diselenggarakan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional/-



KR-JAYADI KASTARI

Dr Magdalia Alfian MA

Jarahnitra DIY tersebut dibuka Ir Condroyono (Kepala Dinas Kebudayaan DIY) diberi pengantar Dra Sumintarsih MHum (Kepala Balai Kajian Jarahnitra DIY) dan Drs Nurdianto (Ketua Pe-

laksana) berlangsung hingga Kamis (12/4). Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber Prof Dr Sutikno, Prof Dr Soegiyanto Padmo MSc, Prof Dr Bambang Purwanto, Prof Dr Djoko Suryo, Prof Dr Tadjudin Noor Effendi, Prof Dr Mudrajat Kuncoro, Dr Inajati Romli.

Menurut Magdalia Alfian, terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota alias urbanisasi disebabkan banyak faktor, baik faktor penarik dan pendorong. "Perkembangan industri dan perdagangan kota menjadi faktor penarik yang menyebabkan orang berdatangan ke kota," ucap Magdalia yang juga Lektor Kepala Departemen Sejarah FIB Universitas Indonesia (UI). (Jay)-n

SENIN LEGI 9 APRIL 2007 (21 MULUD 1940)

Kota Alami Pergeseran Orientasi

YOGYA (KR) - Konsep kota semakin cair dan mengalami pergeseran orientasi. Untuk itu perlu ada pemahaman kembali berkaitan dengan jalur-jalur pertumbuhan kota sebagai kesatuan sosio-kultur. Hal ini penting karena kota-kota merupakan sebuah jaringan yang saling berkait dalam dinamika sejarah. Mempelajari kota sama halnya mempelajari sosial historis kehidupan berbangsa dan negara.

Demikian diungkapkan Dra Sumintarsih MHum, Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (Jarahnitra) DIY berkait dengan diskusi sejarah 'Kota dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah' di Hotel Matahari, Rabu (11/4) mendatang. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber Prof Dr Sutikno, Prof Dr Soegiyanto



KR-JAYADI KASTARI

Dra Sumintarsih MHum

Padmo MSc, Prof Dr Bambang Purwanto, Prof Dr Djoko Suryo, Prof Dr Tadjudin Noor Effendi, Prof Dr Mudrajat Kuncoro, Dr Inajati Romli.

Menurut Sumintarsih, sejalan dengan proses transfor-

masi sosial-ekonomi terdapat problem sosial yang menarik, yakni pergeseran antara kelas-kelas sosial dalam masyarakat. "Tak hanya itu terjadi pergeseran, kejahatan sosial, kriminalitas, juga ekologi kota," ucapnya, Kamis (5/4). Persoalan lain, pertumbuhan sistem produksi, industri kecil dan sistem industri besar, sampai soal birokrasi, perbankan, sekolah, semuanya mempengaruhi ekologi kota.

Dalam pemahaman Sumintarsih, kota adalah tempat konsentrasi keahlian, kekuasaan dan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan kota bisa dilihat dari berbagai aspek, morfologi, jumlah penduduk, hukum, ekonomi dan sosial. Suatu daerah disebut kota jika hubungan penduduk bersifat impresional dan hidup dengan kepentingan masing-masing yang berbeda. (Jay)-s

**DISKUSI SEJARAH
KOTA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
11 – 12 APRIL 2007**

**PERKEMBANGAN PERKOTAAN DAN
MASALAH PEMUKIMAN**

**Oleh :
Tadjuddin Noer Effendi**

**BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI
TRADISIONAL YOGYAKARTA
Jl. Brigjen Katamso, 139 Telp. (0274) 373241**

PERKEMBANGAN PERKOTAAN DAN MASALAH PEMUKIMAN¹

Oleh
Tadjuddin Noer Effendi²

Kota adalah sebuah ruang yang berfungsi sebagai pemukiman permanen dengan ciri-ciri yang berlaku umum atau universal. Sebagai tempat bermukim, kota tidak hanya terdiri dari bangunan fisik perumahan, gedung hotel, kantor, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, jalan, taman, toko, pusat perbelanjaan dan sarana lainnya, tetapi juga dan yang terpenting adalah manusia sebagai pemukim yang membentuk, memberi, dan menghidupkan kota. Maka ketika berbicara tentang pemukiman mau tidak mau kita perlu memikirkan sifat-sifat manusia yang bermukim di kota itu.

Atas dasar itu maka tulisan ini berusaha mendiskusikan secara garis besar konsep pemukiman. Konsep yang dibahas adalah termasuk konsep tipe ideal yang banyak dikembangkan oleh para pakar aliran Eropa³. Konsep ini lahir dari situasi dan kondisi kota serta pemukiman di Eropa saat itu. Konsep ini dipakai sebagai acuan pembandingan ketika memahami perkembangan kota dan pemukiman di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kota dan pemukiman di negara-negara berkembang banyak dipengaruhi oleh konsep Eropa sebagai akibat selama ratusan tahun bangsa Eropa menjajah sebagian besar negara-negara berkembang. Fokus bahasan adalah perkembangan kota dan pemukiman di negara-negara berkembang dengan memperhatikan kota dan pemukiman tradisional serta modern diikuti dengan pemikiran menuju pemukiman yang ideal.

Konsep Ideal Pemukiman

Pemukiman adalah hasil rekaan (buatan) manusia dalam upaya beradaptasi dengan lingkungan (kota) agar dapat hidup nyaman atau mendapatkan kenyamanan, baik yang bersifat material maupun non-material⁴. Proses rekaan pemukiman ditentukan oleh kondisi lingkungan, tingkat perkembangan teknologi, peradaban (kebudayaan), organisasi sosial dan perkembangan (jumlah dan kepadatan) penduduk⁵. Tidak mudah untuk menentukan mana yang paling berperan dalam mempengaruhi perkembangan pemukiman. Sangat mungkin

¹ Dipersiapkan untuk seminar "Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah" diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Yogyakarta, 11-12 April 2007

² Prof.Dr.Tadjuddin Noer Effendi adalah staf pengajar jurusan Sosiologi Fisipol UGM

³ Terutama aliran Jerman seperti Weber, Simmel dan Spengler .

⁴ Marx memakai istilah rohani dan jasmani

⁵ Lihat dalam Gist, Noel.P dan Fava, Sylvia Fleis, 1967, *Urban Society*, New York, Thomas Y.Crowell Company, hal. 97-105

semuanya selalu berada dalam posisi saling mempengaruhi satu sama lain. Bagaimana semuanya saling berpengaruh dapat dilacak dari aliran pemikiran yang berkembang dari sejarah perkembangan kota dan pemukiman di Barat. Sekurang-sekurangnya ada 4 aliran yang dapat dipakai untuk membantu menjelaskan kecenderungan perkembangan kota dan pemukiman⁶.

1. Aliran progresif

Aliran ini berpendapat bahwa manusia adalah hal yang pokok dalam perkembangan pemukiman sehingga sifat-sifat manusia dan kebutuhan manusia menjadi hal yang penting dalam pengembangan pemukiman. Pemukiman yang dibangun terdiri dari unsur-unsur pokok yang dibuat seragam. Pemukiman bentuknya sederhana, sehingga mudah dikenal orang. Dalam pengembangan pemukiman perlu diperhitungkan sifat-sifat manusia. Pemakaian bahan bangunan yang seragam dapat mendorong usaha pengembangan pemukiman dan dapat dijadikan industrialisasi. Ini berarti ada sikap positif terhadap teknologi. Pemukiman akan mengikuti struktur kota dan cenderung meluas dan menyebar kesegala arah. Jalan-jalan berfungsi sebagai sarana angkutan yang menghubungkan antar lokasi pemukiman. Pola pemukiman seperti ini tidak ada inti kota dengan gedung-gedung yang padat dan bertumpuk dalam satu blok tertentu. Perumahan, tempat bekerja, tempat rekreasi terpisah dalam ruangnya masing-masing dan batasnya cukup jelas tidak berbaur menjadi satu. Lapangan-lapangan, taman-taman terbuka dan terang, sejuk dan hijau dipenuhi tanaman yang indah dan terawat. Pemukiman menyerasikan perpaduan alam dan sifat-sifat manusia.

2. Aliran Kebudayaan

Dalam pandangan aliran kebudayaan ini, teknologi dan industri cenderung diabaikan dan kebudayaan manusia lebih diutamakan. Aliran ini menganggap bahwa keinginan dan kegiatan manusia menjadi penghuni suatu ruang berbeda-beda dan tergantung pada situasi dan waktu. Oleh karena itu, pemukiman dibangun tidak dengan bahan yang seragam yang dipengaruhi oleh industri. Bila mengikuti jalan pikiran itu maka suasana khas tiap ruang pemukiman akan hilang. Suasana kota ditentukan oleh bentuk-bentuk bangunan kuno, suasana di jalan-jalan, bercampur baurnya berbagai macam kegiatan di jalan dan di ruang pemukiman. Kegiatan-kegiatan bersama dalam kebudayaan penting ditonjolkan. Menurut aliran kebudayaan, kegiatan bersama adalah roh kota. Gedung-gedung untuk fasilitas pelayanan dibangun secara intensif dan padat serta tidak perlu sama, diselingi dengan jalan-jalan, lapangan-lapangan dan taman-taman yang sejuk. Inti pemukiman harus dapat memadukan tempat-

⁶ Dalam Nas, P.J.M, 1979, *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota*, Jilid 1, Jakarta, Bharatara Karya Aksara, hal. 130

tempat pelayanan umum dimana kebudayaan berkembang dan manusia dapat saling berjumpa. Kota adalah kebudayaan dan pemukiman sebagai inti dimana kegiatan utama manusia. Keduanya harus saling mengisi. Tidak dapat dipisahkan. Di pinggiran kota secara terpisah masih bersifat alami dan sedapat mungkin masih berupa semak atau hutan belukar. Dalam kota yang menghubungkan antar pemukiman perlu ada kenampakan alami dan diberi ruang luas diperindah dengan taman-taman. Inti aliran ini adalah pemukiman yang membuat manusia terasing dari alam sedapat mungkin dicegah.

3. Aliran Natural

Dalam aliran natural sikap terhadap teknologi cukup positif. Namun, dalam penggunaan teknologi, alam beserta keindahannya (pemandangan) tidak boleh diganggu dan dirusak. Menurut aliran ini alam diletakkan sebagai inti dan sebagai pusat segala-galanya. Manusia sebagai inti tidak dipersoalkan. Dalam pemukiman, bangunan tidak harus seragam. Keseragaman kemungkinan dapat merusak alam. Penemuan teknologi baru harus dapat dipergunakan. Manusia harus tinggal di rumah yang terpisah satu sama lain dan dikelilingi pekarangan yang dapat digunakan untuk bercocok tanam sehingga dalam tiap rumah ada ruangan hidup (natural) secukupnya. Pemukiman harus tersebar keseluruh wilayah kota. Kota terdiri dari sel-sel kecil yang dihubungkan dengan jalan-jalan. Perkembangan pemukiman tidak ada batasnya sehingga bersifat desentralisasi. Pemukiman harus dapat menunjukkan hubungan manusia dengan alam. Hubungan ini ditemui di semua tempat.

Ketiga aliran itu berkembang berdasarkan situasi masyarakat pra industrialisasi. Masyarakat masih sederhana belum sekompleks masyarakat industri. Ketidakpuasan terhadap aliran itu memunculkan satu aliran lain yang dapat digolongkan sebagai aliran Utopia.

4. Aliran Utopia

Aliran ini bertitik tolak dari kehidupan masyarakat industrialisasi di Eropa. Dalam masyarakat industrialis, manusia adalah sebagai *homo ludens* yakni manusia yang bebas untuk bermain dan harus mendapat kesempatan hidup wajar. Masyarakat industri harus bebas dari pekerjaan dan santai. Harus menjamin adanya kebebasan dan kreativitas. Dalam masyarakat industrialis, teknologi sudah maju sehingga hasil produksi sudah berlimpah dan semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Inti pemukiman pada masyarakat ini adalah harus tercipta suasana santai dan karenanya manusia harus mampu merubah lingkungannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang baru. Maka akan terjadi proses mencipta dan mencipta dan terus terjadi perubahan. Maka muncullah kota yang seluruhnya buatan dan kota harus lebih terorganisir. Kota buatan jangan berbelit-belit dan ruwet tetapi

luwes. Ruang untuk pemukiman terpisah dengan pusat-pusat produksi. Struktur makro kota ditentukan oleh ruangan tempat tinggal dan pusat-pusat produksi. Kehidupan materi berkembang dan tidak ada inti-inti tetapi pemukiman akan menyebar kesegala arah sehingga muncul sektor-sektor (seperti yang dikembangkan oleh Aliran Chicago⁷). Sektor-sektor bertingkat. Sektor merupakan unsur terkecil dalam jaringan. Ada beberapa ruang kota yang digunakan untuk pusat-pusat teknik, hotel-hotel, pelayanan kesehatan, penjagaan anak, perpustakaan, dan sebagainya. Sisanya adalah ruang yang terus menerus dapat diroboh oleh manusia untuk berkreasi dan bermain. Dibangun dan dibongkar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan manusia. Perombakan yang terus menerus untuk merobah tidak hanya besarnya, tingginya, luasnya, ruangnya tetapi juga perubahan suasana menyangkut warna, iklim, sinar, aroma dan alat-alat komunikasi. Kota harus bersifat dinamis dan manusia menjadi aktif. Mereka yang ragu-ragu akan mengalami disorientasi dan ketakutan.

Sejalan dengan perkembangan pemukiman di Barat Jacobs dan Bahrdt⁸ melontarkan kritik. Menurut mereka susunan kota dan pemukiman modern di Barat menjadikannya pusat-pusatnya seragam dan membosankan dan menyebabkan orang tidak kerasan karena ada kesan kurang manusiawi. Konsep ini adalah perkembangan kota dan pemukiman yang didasarkan pada pengalaman di Barat. Bagaimana di negara- negara berkembang?

Perkembangan Kota dan Pemukiman di Negara-Negara Berkembang

Kota dan Pemukiman Tradisional

Asal mula kota dan pemukiman di negara-negara berkembang menurut Rutz⁹ dapat dilacak mulai era Hindu, Islam, awal kedatangan orang Eropa, masa kolonial dan masa modern industrialisasi. Tidak cukup ruang untuk membahas secara rinci tiap-tiap periode, yang penting ditekankan bahwa kota dan pemukiman telah ada dan berkembang sejak lama dan perkembangan itu turut mewarnai pola pemukiman kini. Sekilas perkembangan kota dan pemukiman itu sebagai berikut,

- Pada masa Hindu kota dan pemukiman sebagian besar berkembang di sepanjang aliran sungai. Struktur kota dan pemukiman mirip dengan kota-kota pelabuhan. Fungsi kota sebagai pusat perdagangan. Transportasi utama adalah kapal dan perahu. Di pusat perdagangan selain ada pemukiman para turunan raja, rumah para pedagang dan prajurit

⁷lihat pembahasan lebih lanjut dalam Johnson, James.H, 1975, *Urban Geography: An Introductory Analysis*, Pergamon Press, Oxford, hal.172-177

⁸Pembahasan dapat diperiksa dalam Nas, P.J.M, 1984, *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota*, Jilid 2 Jakarta, Penerbit Bharatara Karya Akasara, hal 133

⁹ Rutz, Werner, 1987, *Cities and Towns in Indonesia*, Stuttgart, Gebruder Borntraeger, hal 42-67

ditemui juga candi atau tempat ibadah. Menurut Rutz¹⁰ pusat-pusat itu belum dapat dikatakan kota (*town*) tetapi mungkin dapat di kategorikan sebagai kota dalam artian sempit (*towns in the narrow sence*).

- Pada masa kedatangan Islam beberapa pusat perdagangan atau pemukiman yang dibangun oleh kerajaan Hindu hancur. Muncul pusat perdagangan baru tetapi pola tidak jauh berbeda dengan masa Hindu. Pusat perdagangan yang tumbuh menjadi pusat pemukiman sangat jarang bahkan tidak terjadi. Pusat perdagangan berpindah-pindah sesuai dengan kekuasaan raja-raja yang berkuasa pada masa itu.
- Masa kedatangan orang Eropa. Di beberapa tempat yang menjadi pusat perdagangan orang Eropa (Portugis dan Inggris) mulai didirikan benteng sebagai perlindungan atau tempat mempertahankan diri orang Eropa. Waktu itu mulai ada konsentrasi penduduk dalam suatu lokasi, seperti pemukiman. Di situ mulai ada kekuasaan karena benteng mulai bertambah besar dan orang Eropa mulai datang dengan membawa rombongan militer untuk menaklukkan kerajaan yang menguasai pusat-pusat perdagangan. Kota pelabuhan menjadi pusat dan bandar perdagangan dengan jumlah pemukim yang relatif besar ketika orang Eropa mulai mendirikan koloni dan memperluas pengaruh kekuasaannya. Meskipun masih berfungsi sebagai perdagangan dan pertahanan militer, tetapi mulai berkembang kegiatan yang mengarah pada pola kehidupan kota. Kota-kota ini menjadi besar dengan ukuran penduduk ribuan jiwa. Mulai berdiri pusat pemerintahan kolonial dan terjadi pemisahan pemukiman dengan pusat kegiatan perdagangan. Di pusat ada pemukiman orang Eropa, pedagang (Tionghoa dan Arab), ada pasar, kantor dagang orang Eropa, dan dipinggiran pemukiman pribumi.
- Kota berkembang menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan pemukiman ketika bangsa Eropa menjadikan koloni menjadi daerah taklukan atau jajahan. Pemerintah kolonial mendirikan bangunan kantor, membuat jalan, pusat perdagangan dan memperluas kota ke daerah pedalaman. Kota kolonial berkembang di beberapa tempat. Penduduk kota telah mencapai puluhan ribu jiwa. Struktur kota dan pemukiman mulai terlihat jelas. Menurut Ruth¹¹ kota-kota ditandai dengan ciri-ciri antara lain ada pusat kerajaan (kraton), ada lapangan (alun-aluan), pusat tempat ibadah (mesjid besar), jalan utama walaupun masih terbatas, ada pusat pelayanan, kampung (pemukiman) mengelilingi pusat kerajaan (kraton), rumah masih sangat sederhana dengan bangunan dari bambu, pusat kegiatan ekonomi tidak jauh dari tempat tinggal penduduk. Pada waktu itu, di beberapa lokasi kepadatan penduduk mulai bertambah. Menjadi ciri utama kota

¹⁰ Rutz, Werner, *ibid*, hal. 63

¹¹ Rutz, Werner, *ibid*, hal. 74-82

kolonial adalah ada ruang yang khusus sebagai tempat pemukiman orang Eropa. Rumah-rumah dibuat dari batu dan bentuk hampir seragam, seperti kota-kota di Eropa. Pelayanan sarana air bersih untuk melayani kepentingan orang Eropa dibangun di beberapa tempat. Jalan-jalan dan pelayanan transportasi di kota mulai diatur dan taman-taman dibangun disesuaikan dengan kepentingan orang Eropa. Kota-kota kolonial di negara-negara sedang berkembang mirip kota-kota di Eropa. Secara teoritis kota-kota itu menurut Hozelit's¹² adalah kota bersifat *parasitic* dan bukan *generative*. Artinya, kota-kota itu berkembang tetapi tidak memberi kontribusi pada daerah sekitarnya dan daerah pedalaman. Kota-kota masih menjadi pusat kekuasaan penjajah dan pedagang Eropa. Dualisme dalam tatanan kota tampak nyata pada waktu itu. Kota dengan pemukiman modern memiliki sarana jalan-jalan teratur, terutama pemukiman kolonial, di satu sisi. Di sisi lain kampung pemukiman pribumi dengan bangunan dan struktur tidak teratur dengan bahan bambu.

Kota-kota pada masa itu masih memberikan keamanan pada penghuninya karena masih teratur asri dan nilai-nilai kemanusiaan masih sangat mewarnai rona perkotaan. Pemukiman masih menjamin ketenteraman, keamanan dan kenyamanan. Rumah-rumah terpisah dan memiliki pekarangan yang cukup untuk penghuni bercocok tanam dan membangun taman untuk kesejukan. Sarana pendukung masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pada pemukim. Degradasi lingkungan masih rendah. Kepadatan penduduk ditempat tertentu mulai terjadi tetapi masih pada batas normal dan masih memenuhi daya dukung untuk mencukupi kebutuhan dasar penghuni. Situasi itu mengalami perubahan setelah modernisasi dan industrialisasi dipakai dan diterapkan sebagai model pembangunan di negara-negara berkembang.

Kota dan Pemukiman Modern

Pada awal kemerdekaan dan bebas dari penjajahan bangsa Eropa, kota dan pemukiman belum mengalami perubahan yang cukup berarti. Sisa-sisa dualisme kota peninggalan masa kolonial masih mendominasi kenampakan dan rona kota. Memasuki abad 20 kota-kota mulai berkembang dengan pesat. Kota-kota dengan jumlah penduduk di atas 1 juta mulai bertambah. Muncul kota utama (Jakarta, Bangkok, Manila dll) dengan jumlah penduduk di atas 5 juta. Pendorong utama percepatan pertumbuhan kota adalah derasnya arus migrasi desa-kota. Pada tahun 2000 ada 18 kota dengan jumlah penduduk di atas 8 juta jiwa. Memasuki abad 21 muncul beberapa Mega City¹³ yang sarat dengan persoalan karena

¹²Pembahasan lebih rinci periksa dalam Friedman, J dan Wulff, R, 1976, *The Urban Transition: Comparative Studies of Newly Industrializing Societies*, London, Edward Arnold, hal. 34

¹³ Periksa Fuchs, Roland dkk, 1994, *Mega-City Growth and The Future*, Tokyo, United Nations University Press

pemerintah kota semakin tidak mampu memenuhi pelayanan dasar bagi penghuni kota yang terus bertambah.

Proses modernisasi bersamaan dengan industrialisasi dan revolusi hijau di sektor pertanian membawa perubahan sosial yang cukup berarti bagi penduduk pedesaan. Perkembangan teknologi transport, penambahan dan perbaikan sarana jalan telah menembus dan membuka isolasi daerah pedesaan. Akses dan ketersediaan sarana transport mempermudah orang untuk bepergian, terutama di Jawa. Ongkos perjalanan terjangkau penduduk pedesaan. Pedesaan terintegrasi dengan kota.

Pertumbuhan kota semakin pesat ketika kota-kota dijadikan pusat pertumbuhan dan mesin penggerak ekonomi nasional. Pabrik-pabrik berlokasi di sekitar kota utama. Pelayanan kota meningkat. Kota menjadi gemerlap penuh dengan aneka gaya kehidupan modern dan kesenangan. Kota menjadi daya tarik yang luar biasa bagi generasi muda pedesaan. Kota adalah impian dan harapan. Para generasi muda pedesaan yang berpendidikan berusaha untuk merubah nasib meninggalkan desa pergi berbondong-bondong menuju ke kota. Dengan segala keterbatasan berangkat menuju kota untuk mengadu nasib dalam rangka turut serta mencicipi buah pembangunan yang selama ini menumpuk di kota. Pertumbuhan penduduk kota berkisar antara 5 – 10% per tahun. Kota penuh sesak, kepadatan meningkat tajam: rata-rata kepadatan mencapai di atas 1.000 jiwa per kilometer persegi. Bahkan Jakarta pada tahun 2000 kepadatan penduduknya telah mencapai 12.000 jiwa per kilometer persegi.

Saat itu, kota mulai tidak mampu menampung dan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar bagi penghuni kota. Pemukiman kumuh dan liar muncul di kota. Pemukiman reyot dan kotor dan tidak memenuhi standar hidup bermunculan disepanjang rel kereta api, di bawah kolong jembatan, tanah-tanah kosong. Kantong-kantong pemukiman miskin muncul dan tersebar hampir diseluruh kota. Jalan-jalan penuh sesak dengan kendaraan umum maupun pribadi. Kesemerawutan dan kemacetan lalu lintas adalah bagian dari hidup kota. Meskipun infrastruktur pendukung kehidupan di kota diupayakan terus ditambah tetapi senantiasa tidak dapat mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah.

Dalam konteks ini beberapa pakar yang mengamati perkembangan kota-kota di negara-negara berkembang berpendapat bahwa urbanisasi yang terjadi di kota-kota negara-negara berkembang tidak mengikuti pengalaman urbanisasi di Barat. Mereka menyebut urbanisasi di negara-negara berkembang sebagai urbanisasi berlebih (*over urbanization*)¹⁴ yakni urbanisasi yang tidak diikuti dengan kemampuan kota untuk menyediakan sarana pendukung kebutuhan dasar penghuninya. Penyimpangan dalam proses urbanisasi terjadi karena beberapa kebijakan yang bersifat *urban bias* yakni kebijakan yang mengutamakan

¹⁴ Lihat bahasan Todaro, M.P dan Stikind, J, 1981, "The Urbanization Dilemmas", dalam *City Bias and Rural Neglect: The Dilemmas of Urban Development*, New York, The Population Council, hal. 6-37

(memihak pada kepentingan orang kota) kota dan menelantarkan pedesaan. Kebijakan itu menyebabkan terjadi kesenjangan desa kota. Ekonomi kota berkembang pesat tetapi ekonomi pedesaan jalan ditempat (Geertz mengatakan mengalami involusi). Implikasinya, menyebabkan terjadi proses pemiskinan penduduk desa. Penduduk miskin yang tidak mampu bertahan hidup di desa berusaha untuk memperbaiki kehidupan dengan bermigrasi ke kota. Tidak semua para migran beruntung dalam merubah nasib dengan bekerja di sektor formal. Cukup banyak yang terpaksa tidak bekerja. Angka pengangguran terbuka di kota meningkat cukup berarti. Untuk bertahan hidup di kota kebanyakan para migran bekerja di sektor informal. Meskipun sebagian besar dari mereka hidup lebih baik di kota tetapi mereka tergolong dalam lapisan orang miskin di kota. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di beberapa kota dapat periksa Tabel 1.

Tabel 1
Angka Pengangguran terbuka, Pekerja Sektor Informal dan Penduduk
Hidup Di bawah Garis Kemiskinan dan Rumah tangga Tanpa Air Bersih
Sepuluh Kota Terpilih

Kota	Penduduk hidup dibawah garis kemiskinan (%)	Angka pengangguran terbuka (%)	Pekerja sektor Informal (%)	Rumah Tangga tanpa akses air bersih (%)
Medan	4,8	16,9	38,9	20,3
Palembang	9,7	10,2	37,8	20,1
Jakarta	3,4	14,0	24,7	30,3
Bandung	3,5	15,0	35,0	32,7
Semarang	7,1	13,4	29,0	28,4
Yogyakarta	14,5	8,3	43,5	43,3
Surabaya	8,4	9,9	30,4	1,8
Makasar	5,6	21,8	34,6	8,0
Pontianak	6,7	12,6	32,5	85,5

Sumber: BPS, BAPPENAS, UNDP, 2005, *National Human Development Report 2005: The Economic Of Democracy Financing Human Development in Indonesia*, Jakarta

Penghasilan para migran tergolong rendah untuk ukuran kehidupan kota. Mereka tidak mampu membangun rumah yang memenuhi standar kehidupan maka sebagian besar hidup-hidup di kampung-kampung dengan kondisi pemukiman terbatas dan sarana yang sangat minim. Pada tahun 1980an untuk memenuhi tuntutan perumahan yang layak pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta mulai membangun perumahan agar standar kehidupan dapat meningkat. Program perbaikan kampung, program rumah susun, rumah sangat sederhana disertai perbaikan jalan dan penerangan dilaksanakan. Kota semakin menarik karena pemerintah memberikan subsidi dan kredit untuk pembangunan perumahan. Penduduk terus bertambah jumlah rumah yang dibangun selalu kurang tidak dapat memenuhi permintaan. Untuk mengatasi itu pemerintah menyalurkan dana untuk swasta untuk membangun dan mengadakan perumahan dipinggir dan di luar kota. Degradasi lingkungan di tengah kota juga menyebabkan sebagian penduduk golongan atas menengah juga mencari

rumah di pinggir kota yang lingkungan masih mendukung untuk hidup sehat. Permintaan itu mendorong muncul pembangunan perumahan mewah (*real estate*), kota satelit dan perumahan dengan fasilitas mewah di pinggir kota.

Kebijakan ini memunculkan fenomena segregasi¹⁵, yakni berkembangnya pemukiman untuk golongan atas, pemukiman untuk kelas menengah dan pemukiman untuk orang miskin. Pemukiman ini menyebabkan ada perbedaan yang cukup mencolok dari segi fasilitas dan kondisi lingkungan. Ini artinya, terjadi pemisahan tempat tinggal berdasarkan status ekonomi. Kemudian berkembang kota satelit di pinggiran kota. Hal ini menimbulkan gejala invasi atau suksesi¹⁶, yakni pemukiman dan fasilitas mewah tetapi berada ditengah-tengah pemukiman penduduk miskin. Daerah pedesaan pinggiran kota yang kondisi lingkungan masih baik diserbu penduduk kota, terutama golongan atas. Bahkan daerah yang merupakan kawasan resapan air pun dibangun untuk perumahan. Para pemilik modal (kapitalis) mereguk banyak keuntungan tetapi mereka mengorbankan lingkungan. Lingkungan mengalami kerusakan. Pohon-pohon yang dapat berfungsi untuk mengurangi aliran air permukaan berkurang. Apalagi, daerah-daerah yang dulu berfungsi sebagai penyangga resapan dan daerah tampungan air hujan sudah dipenuhi bangunan. Akibatnya, dalam musim hujan daerah kota sering banjir. Pemukiman di kota tidak lagi memberikan kenyamanan.

Ketidaknyamanan semakin terasa karena jalan-jalan yang menghubungkan pemukiman-pemukiman baru dengan pusat kegiatan pada jam-jam sibuk padat dan macet. Polusi udara akibat kendaraan sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Udara kota panas sumpek penuh dengan bau asap knalpot kendaraan. Saat tertentu para pedagang mencari nafkah di tengah jalan dengan menjajakan berbagai macam aneka barang dan makanan. Pengemis, pencoleng dan penodong berada ditengah kota di *traffic light* yang setiap saat mengintai untuk menjalankan aksinya. Kelelahan, kebosanan, dan kegelisahan, ketakutan mewarnai dan menyertai kehidupan manusia kota. Kenyamanan tidak lagi menyertai kehidupan di kota.

Menuju Pemukiman Ideal

Membangun kota dengan pemukiman yang nyaman bukan hal yang mudah. Mengingat situasi dunia saat ini yang sulit untuk diprediksi. Globalisasi cenderung menambah persoalan baru di negara-negara berkembang¹⁷. Hutang negara-negara berkembang bertambah dan kemiskinan tetap menjadi persoalan utama dan belum dapat dikurangi,

¹⁵Pembahasan tentang segregasi lihat dalam Gist, Noel.P dan Fava, Sylvia Fleis, 1967, *Urban Society*, New York, Thomas Y.Crowell Company, hal. 118 - 146

¹⁶Ibid, hal. 147-176

¹⁷Lihat bahasan Fu-chen Lo, 1994, "The Impact of Current Global Adjustment and Shifting Techno-economic Paradigm on the World City System", dalam Fuchs, Roland, J. dkk, *Mega City Growth and The Future*, Tokyo, United Nations University Press, hal. 103-130

bahkan ada kecenderungan meningkat. Beban kota semakin bertambah karena kota menjadi tumpuan harapan semua orang. Melihat prospek tersebut, mungkinkah dapat dilakukan perbaikan? Apa pun yang terjadi, tentu upaya ke arah perbaikan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik tetap terus dilakukan. Setidaknya upaya membangun kota dengan pemukiman yang nyaman adalah hal yang masih perlu dan sedapat mungkin dilakukan. Itu dapat dicapai dengan upaya memenuhi kebutuhan hidup dasar manusia. Kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan material, seperti penyediaan air bersih, pekerjaan, pendidikan dan lingkungan pemukiman yang baik, tetapi perlu diikuti dengan memenuhi kebutuhan non-material yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Itu dapat dilakukan dengan mengupayakan tegaknya keadilan, meningkatkan partisipasi, mengembangkan rasa tanggung jawab bersama, kebebasan yang saling menghargai dan toleransi. Syarat minimum kebutuhan rohani dan jasmani harus dapat dipenuhi. Dengan demikian ada jaminan kehidupan pribadi dan kelompok yang bermartabat. Jika batas minimal kebutuhan itu tidak dapat terpenuhi maka akan muncul kegelisahan sosial, konflik (pertentangan), bahkan kehancuran dalam masyarakat.

Apa yang dapat dilakukan karena beban kota terus bertambah akibat pertambahan penduduk yang sulit dikendalikan? Harus diakui kepadatan penduduk yang telah melampaui batas daya dukung untuk pemukiman yang layak adalah sumber persoalan. Ada dua hal yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk mengurangi tekanan persoalan itu.

1. Pertama mengurangi arus migrasi desa-kota. Sebenarnya pemikiran ini sudah cukup lama dan banyak dibahas dalam berbagai diskusi, yakni menyeimbangkan pembangunan desa-kota. Kesenjangan desa-kota harus dikurangi dengan memberikan perhatian pada pembangunan pedesaan. Salah satu kebijakan untuk menyeimbangkan itu adalah lewat desentralisasi. Namun, setelah sekian lama desentralisasi diterapkan nampaknya belum memberi dampak pada pembangunan di daerah dan belum dapat mengurangi arus migrasi desa-kota. Konon kabarnya, dalam pelaksanaan desentralisasi belum berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah pusat masih belum sepenuh hati memberikan kewenangan disentralisasi pada daerah-daerah. Pelaksanaan disentralisasi dapat digambarkan seperti pepatah "kepala di lepas tetapi ekor di pegang erat-erat". Dalam implementasinya desentralisasi tersendat-sendat dihadap berbagai persoalan antara lain konflik kepentingan, kerusakan sosial, korupsi, sumberdaya aparat yang belum siap dstnya. Akibatnya, pembangunan pedesaan tetap belum mengalami perubahan yang berarti dan sebagian penduduk pedesaan tetap hidup dalam lilitan kemiskinan. Kota adalah impian dan harapan untuk merubah nasib.

2. Kemungkinan kedua yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah itu adalah mengurangi jumlah dan kepadatan penduduk dengan memindahkan beberapa kegiatan utama ke daerah lain. Sebagai contoh, Jakarta sebagai Ibu Kota negara menanggung beban cukup berat karena kegiatan utama perdagangan, administrasi, industri dll ada di sana. Tidak mengherankan bila konsentrasi penduduk cukup besar di sana. Pada masa-masa tertentu ketika penghuni Jakarta berlibur meninggalkan Jakarta, seperti pada masa lebaran atau liburan panjang, kota Jakarta kelihatan lengang. Kepadatan lalu lintas berkurang dan terasa ada kenyamanan. Itu artinya bila penduduk Jakarta dapat dikurangi akan dapat memberikan kenyamanan, terutama jalan-jalan tidak macet dan sumpek. Berapa jumlah penduduk yang harus dikurangi mungkin sekitar 25%. Hal itu dapat dicapai bila salah satu peran Jakarta dikurangi. Yang paling mungkin dikurangi adalah peran sebagai kota administrasi negara. Artinya, kantor-kantor pemerintahan dapat dipindah ke daerah lain. Atau membangun kota administrasi pemerintahan baru. Contoh baik untuk ini adalah Australia. Di Australia ibu kota pemerintahan ada di Canberra sedang pusat perdagangan, industri dll ada di Sidney.

Pengalaman yang diperoleh dari perkembangan kota-kota di Barat atau kota-kota dengan teknologi maju merupakan hal yang berguna bagi kota-kota di negara berkembang yang miskin sarana. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kota-kota Barat jangan diulang di kota-kota negara berkembang. Kesalahan itu antara lain menurut Ward¹⁸ menyangkut pemilikan tanah dan pembangunan pemukiman. Pertama, sistem ekonomi pasar bebas dengan memberikan hak pemilikan tanah pada perorangan yang bersifat eksklusif dapat berpengaruh pada keadilan sosial. Pemilik modal dengan mudah menggusur dan meminggirkan orang miskin. Hal itu akan memicu munculnya konflik sosial. Sebaiknya, pemerintah kota mengatur pemilikan tanah dengan berpegang pada prinsip keadilan dengan memberikan perlindungan pada mereka yang lemah. Kedua, pembangunan pemukiman dengan gedung-gedung perumahan secara besar-besaran, seperti apartemen, perumahan mewah, flat yang bertingkat yang umumnya ditolak masyarakat di Barat jangan ditiru. Pembangunan yang seperti itu akan memunculkan gejala segregasi dan suksesi yang menyebabkan hancurnya relasi sosial sehingga orang tidak saling mengenal, kesenjangan, keterasingan, dan ketakutan. Untuk mengurangi berbagai akibat negatif akibat pola pembangunan itu maka hendaknya diupayakan ukuran-ukuran gedung perumahan yang wajar bagi manusia. Sifat manusiawi adalah hal yang perlu diutamakan dalam tiap langkah untuk pemecahan masalah pemukiman. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan material.

¹⁸ Lihat bahasan Ward, Barbara, 1976, *The Home of Man*, Harmondswort

**DISKUSI SEJARAH
KOTA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
11 – 12 APRIL 2007**

**PERPINDAHAN IBU KOTA SUATU
KEHARUSAN ATAU WACANA**

**Oleh :
Sutikno**

**BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI
TRADISIONAL YOGYAKARTA
Jl. Brigjen Katamso, 139 Telp. (0274) 373241**

PERPINDAHAN IBU KOTA SUATU KEHARUSAN ATAU WACANA

Oleh:

Sutikno

Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada
Pusat Studi Bencana, Universitas Gadjah Mada

INTISARI

Wacana untuk memindahkan ibu kota negara telah berulang kali muncul, yakni ketika timbul kejadian kritis akibat faktor sosial, ekonomi politik, lingkungan dan bencana. Ibu kota negara mempunyai fungsi sentral bagi Pemimpin negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Kondisi aman, nyaman, kondusif dari ibu kota negara merupakan bagian penting dalam memikirkan dan mengkoordinasikan jalannya pemerintahan agar negara dan bangsa maju sejajar dengan negara maju lainnya, serta rakyatnya cerdas, sejahtera secara berkeadilan. Ibu kota negara menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri dan harga diri bangsa dan negara. Kondisi umum yang mencitrakan Jakarta sebagai ibu kota negara adalah semrawut tata ruangnya, kemacetan lalu lintas banyak terjadi, ketimpangan sosial ekonomi sangat tinggi, tata guna lahannya tumpang tindih, pencemaran udara dan air telah terjadi, dan sering terlanda bencana banjir. Kondisi umum tersebut memunculkan beberapa pertanyaan antara lain: masih layakkah Jakarta sebagai ibu kota negara?; perpindahan ibu kota suatu keharusan atau wacana. Makalah ini mencoba mendiskusikan pertanyaan tersebut dengan sudut pandang geografis. Pendekatan keruangan, ekologis dan kewilayahan digunakan untuk mendiskusikan kelayakan Jakarta sebagai ibu kota negara. Hasil diskusi terungkap bahwa Jakarta kurang layak sebagai ibu kota negara, perpindahan ibu kota menjadi suatu keharusan yang perlu diwacanakan. Beberapa alternatif lokasi untuk memindahkan ibu kota negara pernah diwacanakan, perlu kajian yang mendalam untuk menentukan dimana dan kapan harus pindah.

PENDAHULUAN

Sepengetahuan penulis sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memproklamlirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, belum pernah mendirikan kota sebagai ibu kota negara atau ibu kota nasional. Kota-kota besar yang sekarang menjadi ibu kota negara (Jakarta) dan ibu kota provinsi semuanya atau sebagian besar merupakan tinggalan kolonialisme Belanda. Sangat berbeda dengan jaman kejayaan kerajaan di nusantara dahulu, sebelum jaman penjajahan, hampir semua mempunyai dan membangun ibu kota (kota raja). Sebagai contoh Majapahit mempunyai tinggalan situs Trowulan yang sementara ini dianggap sebagai pusat pemerintahannya; Mataram dengan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahannya. Perpindahan pusat pemerintahan pada jaman kerajaan sering terjadi. Apabila suatu kerajaan tertimpa bencana pusat kerajaan

harus pindah karena anggapannya terkena kutukan dewa. Pergantian rajapun sering diikuti dengan perpindahan pusat pemerintahan, apalagi kalau pergantiannya melalui perebutan.

Bagaimana halnya dengan NKRI, tampaknya para pemimpin NKRI diawal kemerdekaan mempunyai filsafat: tiada rotan akarpun jadi dan narimo. Dalam arti bahwa daripada membangun ibu kota baru dan istana negara baru, yang ada sajalah dimanfaatkan, yakni memanfaatkan bekas kantor gubernur penjajah sebagai istana kenegaraan. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena negara yang baru merdeka dan terjajah selama lebih dari 3 abad belum mempunyai kemampuan untuk membangun. Setelah merdeka selama lebih dari 62 tahun niat untuk mendirikan istana negara dan ibu kota NKRI hasil karya anak bangsa setelah memperoleh kemerdekaan belum muncul. Mungkin saja para pemimpin kita ini telah menikmati kemewahan yang ditinggalkan oleh penjajah dan disibukkan pula untuk memikirkan kedudukan dan golongannya dan kurang memikirkan kesemestaan NKRI ini.

Pemindahan ibu kota negara banyak dilakukan oleh banyak negara, dengan alasan yang berbeda-beda. Contoh berikut memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara itu tidak tabu dan dilakukan dengan tujuan memecahkan permasalahan untuk menuju ke perbaikan.

- 1) Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat.
- 2) Pemerintah Korea Selatan da;lam tahun 2004 ibu kotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea.
- 3) Ibu kota tradisional secara ekonomi memudar oleh kota pesaingnya, seperti Nanjing oleh Shanghai.
- 4) Menurunnya suatu dinasti atau budaya dapat juga ibu kota yang telah ada mati/pudar/kalah pamor seperti di Babilon dan Cahokia.

Selain ibu kota negara dipindahkan terdapat juga pemindahan sebagian dari kekuasaan pemerintah, contoh berikut dapat dijadikan salah satu alternatif untuk pemecahan masalah yang terkait dengan ibu kota negara.

- 1) Bolivia: Sucre masih ibu kota konstitusional tetapi pemerintahan nasional telah lama ditinggalkan dan beralih ke La Paz.
- 2) Chili: Santiago masih dianggap sebagai ibu kota meskipun Kongres Nasionalnya di Valparaiso.
- 3) Belanda: Amsterdam ibu kota nasional konsitusional, meskipun pemerintahan Belanda, parlemen, istana ratu semuanya terletak di Den Haag.
- 4) Afrika Selatan: ibu kota administratif di Pretoria, ibu kota legislatifnya di Cape Town dan ibu kota judisialnya di Bloemfontein (Wikipedia, 2007).

Pemindahan sebagian kekuasaan pemerintah di NKRI sangat dimungkinkan, karena di dalam Undang-Undang Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam Bab II ayat (2) UUD NKRI tertulis: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam UUD tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Dengan demikian terdapat fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur, termasuk memindah ibu kota negara. Dalam pemindahan ibu kota negara tentunya perlu ada alasan yang kuat dan mendasar tentang efektifitas fungsinya.

ARTI DAN FUNGSI SUATU IBU KOTA NEGARA

Ibu kota (*a capital; capital city; political capital*) adalah kota utama yang diasosiasikan dengan pemerintahan suatu negara; secara fisik difungsikan sebagai kantor pusat dan tempat pertemuan dari pimpinan pemerintahan dan ditentukan berdasarkan hukum. Asal katanya dari bahasa Latin *caput* yang berarti kepala (*head*) dan terkait dengan kata *capitol* yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan.

Sejarahnya, ibu kota sebagai pusat ekonomi utama dari suatu wilayah sering menjadi titik pusat dari kekuatan politik, dan menjadi suatu ibu kota melalui suatu penaklukan atau penggabungan. Ibu kota secara alamiah mempunyai daya tarik politik dan skill yang

diperlukan untuk efisiensi administrasi pemerintahan seperti ahli hukum, jurnalis, peneliti kebijakan publik. Ibu kota adalah pusat ekonomi, budaya atau pusat intelektual.

Ibu kota menjadi simbol bagi negara dan pemerintahannya, dan sebagai tempat berkembangnya muatan politik. Kota-kota abad pertengahan, pemilihan, relokasi, pendirian dari suatu ibu kota modern dilandasi dengan emosional. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut.

1. Athena yang hancur dan hampir tak berpenduduk dijadikan ibu kota baru bagi Greece, sebagai simbol kejayaan masa lalu. Hal yang mirip adalah Perang Dingin dan Reunifikasi Jerman, Berlin menjadi ibu kota lagi bagi Jerman.
2. Suatu relokasi simbolik dari ibu kota ke lokasi periferi geografis dan demografis dengan alasan ekonomi atau strategi (sering disebut ibu kota masa depan atau ibu kota pelopor). Peter I dari Rusia memindahkan pemerintahan dari Mosko ke Sain Petersburg untuk memberikan kebesaran Rusia berorientasi ke barat.
3. Kemal Ataturk memindahkan pusat pemerintahan dari Ottoman Istanbul ke Ankara.
4. Kaisar Ming memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beijing untuk menjauhi Mongols dan Manchus.

Ibu kota mempunyai fungsi strategis, ibu kota selalu menjadi target utama dalam peperangan, karena dengan menguasai ibu kota biasanya menjadi jaminan menguasai sebagian besar musuh atau penentang, paling tidak memerosotkan moral untuk mengalahkan musuh (militer). Seperti halnya yang terjadi di China masa lalu, dimana pemerintahan tersentralisir dengan sedikit fleksibilitas pada tingkat provinsi, suatu Dinasti dapat ambruk dengan ambruknya ibu kota. Oleh sebab itu Dinasti Ming memindahkan Ibu kota Nanjing ke Beijing dengan alasan dapat mengontrol musuh yang berasal dari Mongols dan Manchus.

Dalam kaitannya dengan fungsi strategis suatu ibu kota negara ada yang berpandangan lain bahwa ibu kota negara kurang penting sebagai sasaran militer. Karena pusat pemerintahan dapat dipindahkan ke tempat lain. Sebagai contoh tentara Inggris yang

menyerang beberapa ibu kota Amerika berulang kali dalam Perang Revolusi dan Perang tahun 1812, tentara Amerika tetap dapat bertempur dari luar kota, dimana mereka didukung oleh pemerintah setempat dan penduduk civil di perbatasan. Perkecualiannya adalah Perancis, yang birokrasinya terpusat tetap dapat terkordinisasi secara efektif dan terdukung oleh sumberdaya yang sangat luas, menjadikan negaranya sangat kuat melebihi pesaingnya, tetapi berisiko tinggi jika ibu kota diduduki musuh; dalam strategi militernya. Ancaman tradisional dari Perancis adalah Jerman terfokus untuk menguasai Paris. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, ketika Jakarta jatuh oleh tentara Belanda sewaktu perang revolusi ibu kota negara pernah berpindah ke Yogyakarta dan ke Bukit Tinggi. Dengan demikian pemerintahan tetap berjalan, sehingga NKRI tetap berdiri dengan melakukan perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan.

KONDISI JAKARTA SEBAGAI IBU KOTA

Menurut sejarah, kota Jakarta berawal dari pekan pelabuhan kecil yang dikenal sebagai Sunda Kelapa, yang kemudian menjadi Kota Batavia. Pernah seorang pengembara Inggris terkenal, Kapten James Cook mengatakan pelabuhan di situ adalah kawasan labuhan kapal besar dan kecil terbaik di dunia ketika itu. Kota yang telah berumur hampir 500 tahun tersebut telah mengalami perkembangan yang cepat dan sering terlanda banjir. Dalam sejarah tercatat, pada tahun 1872 akibat meluapnya Sungai Ciliwung menjebolkan pintu air dan merendam kawasan Batavia. Kejadian serupa muncul pada 9 Januari 1932, hujan yang turun lebat sepanjang malam menyebabkan hampir semua wilayah kota Batavia terendam dan Jalan Sabang tercatat sebagai paling parah. Upaya penanggulangan banjir Jakarta sebenarnya telah diusahakan seperti pada masa pemerintahan Belanda tahun 1920 ketika seorang insinyur Belanda, Van Breen memimpin pembangunan saluran (banjir kanal) dan sejumlah pintu air. Semuanya untuk mengakomodasi air yang datang.

Masalah banjir Jakarta memang sulit diatasi tanpa ada suatu usaha menyeluruh dan terpadu. Amblesan tanah akibat penurapan airtanah yang berlebih menjadi salah satu

penyebab daerah menjadi sasaran banjir. Secara alami Jakarta memang rawan terhadap banjir, karena terletak pada kipas aluvial yang berkembang dari Selatan (Bogor) dan dialiri oleh 13 sungai dengan daerah hulunya bercurah hujan tinggi, yang sebagian lahannya telah terbangun. Faktor alami lainnya adalah di bagian Utara terdapat beting gisik (beach ridges) yang dapat menghambat aliran ke laut Teluk Jakarta. Sebenarnya pada beting gisik itupun terdapat cekungan antar beting yang dapat berfungsi sebagai penampung air, namun itupun sudah terbangun.

Hampir setiap tahun terjadi banjir yang besarnya bervariasi. Banjir yang terjadi tahun 2007 merupakan yang terbesar, hampir mencakup 70% wilayah Jakarta. Akibat banjir 2007 tersebut menimbulkan pemikiran atau gagasan untuk memindahkan Ibu Kota Jakarta. Banjir dijadikan salah satu pemicu ide untuk memindahkan ibu kota. Gagasan untuk memindahkan ibu kota negara telah mengemuka dalam berbagai kesempatan antara lain tanggal 20 Mei 1988 ketika gerakan reformasi. Waktu itu kondisi Jakarta sangat mengkhawatirkan sehingga muncul gagasan spontan, agar Yogya untuk menerima kembali fungsi ibu kota pemerintahan. Pemikiran untuk memindahkan ibu kota negara juga datang dari Ketua DPR Agung Laksono dengan argumentasi sedikit berbeda, dan menyatakan bahwa Jakarta sudah saatnya kantor presiden yang menjadi pusat pengendali pemerintahan dipindahkan ke tempat yang lebih kondusif. Jakarta saat ini dinilai sudah kelebihan beban, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga Jakarta mempunyai multi fungsi. Ibu kota negara yang mempunyai multi fungsi umumnya akan menimbulkan berbagai dampak.

DAMPAK MULTI FUNGSI DARI JAKARTA

Multi fungsi Jakarta merupakan dampak dari sistem pemerintahan sentralistik dan sistem multi fungsi yang memusat di Jakarta. Akibatnya sejumlah dampak sosial, politik, ekonomi dan ekologi menjadi beban Jakarta, berikut dampak yang dimaksud (Baiquni, 2004).

1. Pemerintahan sentralitis yang dikendalikan secara otoriter dan serba seragam telah mengabaikan kemajemukan sosial budaya masyarakat dan keseragaman ekosistem

wilayah negara kepulauan. Sistem kekuasaan yang memusat, membuat sistem pemerintahan daerah kehilangan kemandirian dan fungsi birokrasi tidak dapat berkembang melayani dan memfasilitasi partisipasi masyarakat, tetapi lebih melayani atasan atau pimpinan elitnya.

2. Kedekatan sumber pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang mengerucut pada elite dan hampir tanpa kontrol dari rakyat secara konstitusional maupun publik menyebabkan mewabahnya korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Pemusatan fungsi tersebut akhirnya membawa beban bagi Jakarta yang ditandai dengan ledakan jumlah penduduk, kemacetan lalu lintas, kesenjangan ekonomi, kerawanan sosial, kekerasan dan kejahatan.
4. Permasalahan tersebut diikuti krisis ekologi, yang berupa pencemaran udara, pencemaran airtanah, air bersih, banjir rutin, tata ruang yang semrawut, munculnya kawasan kumuh, lingkungan hidup yang kurang nyaman.
5. Konflik mudah terjadi antara kepentingan ekonomi dan ekologi, kepentingan sesaat dan jangka panjang, kepentingan elit dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi Jakarta dan berbagai dampak tersebut perlu dipertanyakan masih layakkah Jakarta sebagai ibu kota negara, dan apakah pemindahan ibu kota sebagai suatu keharusan atau sekedar wacana.

PEMINDAHAN IBU KOTA SUATU KEHARUSAN ATAU WACANA

Analisis garis besar aspek keruangan, ekologis dan kewilayahan serta dampak sosial, ekonomi, dan politik, menghasilkan suatu pemikiran bahwa: (i) pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan, tetapi dengan tenggang waktu, dan seharusnya tidak sebagai wacana lagi; (ii) ibu kota negara tetap di Jakarta tetapi pemindahan beberapa departemen dan pusat-pusat kegiatan dialihkan ke luar Jakarta. Argumentasi dari masing-masing pemikiran adalah sebagai berikut.

Secara keruangan Jakarta sudah terlalu padat penduduk, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan tata ruangnya semrawut, pemanfaatan lahan yang saling kontradiktif banyak terjadi. Pembangunan fisik terus dipacu tanpa arah yang jelas. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang sedemikian bagus disusun Bang Ali,

(1966-1977), dengan mudahnya dapat berubah sehingga banyak peruntukan kota yang dilanggar. Banyak situ-situ yang berfungsi sebagai penampung air hilang menjadi perumahan. Program proyek kali bersih (prokasih) macet total. Tiga belas kali yang membelah kota ini tetap menjadi kubangan sampah. Rencana Induk 1965-1985 tidak berkelanjutan pada Rencana Induk 1985-2005, sangat dimungkinkan banyak campur tangan pihak pengusaha, terutama developer dengan para pejabat Pemda Jakarta. Kemacetan lalu lintas setiap saat, dan banjir yang setiap tahun terjadi menunjukkan bahwa tata ruang kurang memperhatikan karakteristik lahan serta kurang mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Secara keruangan Jakarta sebagai ibu kota negara tidak mungkin menampung datangnya urbanit di masa depan. Jakarta mempunyai daya tarik bagi penduduk di luar Jakarta dan bahkan dari manca negara, lapangan pekerjaan terpusat dan sebagian besar uang beredar disana. Urbanisasi yang terus menerus dan urbanit yang kurang ketrampilan dan pendidikannya akan menjadi tambahan beban bagi Jakarta. Urbanisasi dapat dicegah dengan cara pemerataan lapangan kerja dengan membangun pusat pertumbuhan di wilayah lain. Secara ekologis sebagian besar wilayah Jakarta telah mengalami degradasi kualitas lingkungannya, dengan indikator banjir, pencemaran udara, pencemaran air, pembuangan limbah cair/padat dan pencemaran sosial. Banjir yang menggenangi 70% wilayah Jakarta memberikan kerugian yang sangat besar, hasil pembangunan yang memerlukan biaya yang tinggi dan waktu lama terkadang rusak, atau hilang dalam waktu yang singkat. Momentum banjir Jakarta tahun 2007 perlu dijadikan pemikiran, perencanaan untuk memindahkan ibu kota Jakarta, karena umumnya bencana alam itu cepat dilupakan.

Secara kewilayahan Jakarta sudah amat padat penduduk dan syarat dengan fasilitas, sedang di luar Jakarta, baik di Jawa maupun luar Jawa masih tersedia wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan. Tersedianya jaringan transportasi yang baik memungkinkan kelancaran arus manusia, informasi dan jasa antar wilayah. Dengan demikian tidak ada alasan dalam koordinasi antar pejabat dan negara dan antar departemen seandainya terjadi pemisahan antara pimpinan negara dengan menteri atau lembaga. Ditinjau dari strategik dalam menghadapi situasi kritis (perang) pusat kekuasaan negara yang tersentralisir mempunyai risiko tinggi. Jika ibu kota negara

sebagai pusat kekuasaan negara jatuh, maka akan berakibat buruk terhadap keberlangsungan suatu negara.

Uraian di atas menyatakan bahwa pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan, tetapi dengan tenggang waktu. Tenggang waktu diperlukan untuk memperoleh legal formal, menjaring pendapat, menyusun program, memilih lokasi yang sesuai, menyusun rencana dan membangunnya. Pemindahan ibu kota tidak seperti membalik telapak tangan, perlu pemikiran yang mendalam.

Alternatif ke dua pemindahan ibu kota negara tetap di Jakarta, dengan pemindahan beberapa departemen dan pusat-pusat kegiatan ke luar Jakarta, dengan tujuan mengurangi beban Jakarta. Alternatif ini tampaknya lebih banyak menghadapi kesulitan berbanding alternatif pertama. Beban Jakarta dikurangi tidak berarti akan meniadakan masalahnya, karena banjir tetap menjadi ancaman, apalagi jika pemindahan pusat kegiatan ke arah selatan Jakarta, banjir akan semakin meningkat bila tidak diikuti dengan usaha konservasi lahan atasnya. Kejadian banjir di Jakarta tidak meliputi seluruh wilayahnya, masih ada sebagian yang tidak terkena. Bagi penduduk yang tinggal di daerah yang tidak terkena banjir tentunya tidak sependapat apabila ibu kota negara dipindahkan, dan menghendaki tetap dipertahankan. Apabila dasar pemikirannya sempit dan jangka pendek maka alternatif ke dua yang dipilih. Namun dalam pemikiran yang lebih luas dan jangka panjang bahwa Indonesia dengan potensi sumberdaya alamnya yang melimpah dan sumberdaya manusia yang cukup besar akan menjadi negara yang besar dan kuat, maka alternatif pemindahan ibu kota ke dua menjadi lemah.

ALTERNATIF PENENTUAN IBU KOTA NEGARA

Jajak pendapat terhadap mahasiswa Program S2 Geografi menghasilkan pandangan bahwa ibu kota negara perlu dipindahkan. Banyak alternatif yang disampaikan meskipun belum disertai dengan argumentasi yang matang. Daerah yang diusulkan untuk dipilih pemindahan ibu kota negara adalah: tetap di P. Jawa di luar Jakarta, Kalimantan, dan Sumatra. Sebelum menentukan alternatif untuk menentukan pilihan lokasi pemindahan

ibu kota negara, terlebih dahulu perlu dicari rumusan ibu kota negara yang ideal. Penelusuran pustaka tentang syarat ibu kota negara yang ideal belum ditemukan; berdasarkan pemikiran geografis ibu kota negara yang ideal harus mempertimbangkan aspek spasial, ekologis dan kewilayahan antara lain adalah: tersedia lahan yang sesuai, aman, nyaman, lingkungan sehat, bebas dari bahaya dan bencana, aksesibilitas dan arus informasi memadai, ketersediaan lahan untuk perwakilan negara sahabat (kedutaan), ketersediaan air bersih, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, masyarakat sekitar kondusif dan tidak menimbulkan ketimpangan antara wilayah. Berdasarkan rumusan tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia untuk menentukan alternatif lokasi sebagai calon ibu kota negara.

Beberapa pandangan tentang alternatif pemindahan ibu kota negara yang muncul pada periode bulan Mei 1988 (gerakan reformasi) adalah Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Malang dan Kalimantan Tengah (Baiquni, 2004). Alternatif lokasi tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan.

Yogyakarta keunggulannya pernah menjadi ibu kota negara dan berfungsi dengan baik, fasilitas transportasi tersedia (Bandara Adi Sutjipto, dan Stasiun KA. Tugu). Yogyakarta terkenal dengan kota pelajar, kota budaya, sehingga telah berpenduduk padat dan jalan sempit, sehingga tidak memungkinkan untuk ditambahi beban.

Magelang letaknya di tengah P. Jawa sering dikenal dengan *pakuning tanah Jawa* berarti daerahnya mantap. Namun demikian lokasinya berdekatan dengan Gunungapi Merapi yang masih aktif, sehingga bahaya vulkanik sebagai ancaman. Aksesibilitas dapat didukung dari Yogyakarta dan Semarang.

Purwokerto mempunyai kelebihan ketersediaan ruang (lahan) yang masih dimungkinkan untuk pembangunan ibu kota. Aksesibilitas laut dapat didukung dari pelabuhan Cilacap, sedang akses darat dapat dari Yogyakarta dan Bandung. Transportasi udara perlu dibangun. Gunungapi Slamet mungkin merupakan bahaya, tetapi berdasarkan sejarahnya, kurang aktif; dan terdapat daerah yang layak sebagai tempat peristirahatan (Baturaden).

Malang mempunyai lingkungan pegunungan yang sejuk , terdukung oleh aksesibilitas darat dan udara yang memadai dengan Surabaya. Namun demikian Malang termasuk kota pelajar dan padat penduduk, jalan di dalam kota umumnya sempit.

Berdasarkan alternatif lokasi di P. Jawa tersebut, Purwokerto merupakan salah satu pilihan. Namun demikian evaluasi tersebut baru dilakukan secara dangkal, perlu dukungan data yang lebih banyak dan akurat. Alternatif tersebut bukan harga mati, baru sebagai wacana lokasi yang diperkirakan layak, masih terbuka bagi masukkan dengan pertimbangan dari sudut keilmuan yang lain. Seandainya alternatif yang terpilih tadi menjadi kenyataan itupun berlaku dalam waktu tertentu, mungkin 50 tahun atau 100 tahun. Dasar pertimbangannya adalah setiap pembangunan ibu kota baru tentu diikuti oleh pembangunan ikutannya, sehingga dalam kurun waktu tersebut ibu kota baru sudah penuh dengan beban baru lagi, sehingga perlu pindah lagi. Dengan azas tersebut ketimpangan antar wilayah dapat dihindari.

Alternatif pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa, pilihannya adalah Kalimantan. Kelebihan dari Kalimantan adalah lokasinya merupakan pusat dari wilayah Nusantara. Lahan masih sangat luas, sehingga dapat menyusun tata ruang ibu kota negara yang sangat ideal. Kelemahannya adalah prasarana dan sarana belum memadai, sebagian besar harus membangun yang baru, berarti biaya mahal. Kelemahan lainnya adalah penyediaan air bersih; kebakaran hutan, banjir dan longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan.

Alternatif pemindahan lokasi ibu kota negara tersebut di atas, baik yang tetap di P. Jawa maupun di Kalimantan merupakan embrio pemikiran yang masih perlu didiskusikan secara mendalam. Tentunya masih banyak alternatif lain untuk pemindahan ibu kota negara, mengingat jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17.000. Untuk pemilihan lokasi ibu kota perlu peraturan perundang-undangan. Undang-undang tata ruang saat ini sedang digodog di DPR, mudah-mudahan persyaratan ibu kota negara tidak terlewatkan atau terabaikan.

PENUTUP

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka selama 62 tahun, ibu kota negaranya (Jakarta) menempati bekas ibu kota penjajah selama lebih dari tiga abad. NKRI belum memiliki ibu kota negara yang merupakan pemikiran, hasil karya anak bangsa. Jakarta yang sekarang dijadikan sebagai ibu kota negara telah berumur lebih dari 577 tahun berkembang menjadi metropolitan, mempunyai multi fungsi, sarat dengan beban sehingga banyak dampak ekonomi, sosial, politik dan ekologis.
2. Ibu kota negara (Jakarta) sebagai simbol kewibawaan negara dan jati diri bangsa saat ini dan masa depan kurang layak untuk dipertahankan, karena sebagai pemusatan kekuasaan dan pemusatan ekonomi banyak menimbulkan KKN, berpenduduk padat, tata ruang sewrawut, kemacetan lalu lintas, berbagai konflik kepentingan, pencemaran dan setiap tahun terlanda banjir. Pemusatan kekuasaan dan kegiatan di ibu kota mempunyai risiko tinggi dalam kondisi kritis (perang), ibu kota menjadi sasaran untuk diserang.
3. Pemindahan ibu kota negara Jakarta menjadi suatu keharusan, bukan merupakan wacana lagi. Kebutuhan bertenggang waktu, menanti perundangan-undangan tata ruang termasuk persyaratan suatu ibu kota negara.
4. Alternatif lokasi pemindahan ibu kota yang pernah muncul sebagai wacana antara lain: Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Malang dan Kalimantan. Alternatif lokasi tersebut bukan haraga mati, harus didiskusikan secara mendalam, alternatif lain dapat dimunculkan.
5. Dalam menatap ke depan untuk menyongsong NKRI menjadi besar, kuat dan berwibawa pemikiran, gagasan untuk memindahkan ibu kota negara harus terus dikumandangkan, sehingga menjadi realita. Paling tidak terjadi penyebaran pusat-pusat pertumbuhan di seluruh wilayah, sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi kenyataan.

DAFTAR BACAAN

Anonim, 2007. Masih Layakkah Jakarta Jadi Ibu Kota?. Jawa Pos, 6 Februari 2007-04-06

Anonim, 2002. Benang Kusut Ibu Kota Jakarta. Sinar Harapan 6 Juni 2002.

Anonim, 2002. Banjir Jakarta Sulit Diatasi. Pikiran Rakyat, 19 Oktober 2002.

Baiquni, M.; Susilowardani. 2002. Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan. Refkesi Kritis Pembangunan Indonesia. Penerbit Transmedia Global Wacana. Yogyakarta.

Baiquni, M. 2004. Membangun Pusat-pusat di Pinggiran. Ideas. Yogyakarta.

Jayadinata, Johara T. 1999. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan dan Perkotaan & Wilayah. Penerbit ITB. Bandung.

. wikipedia.org/wiki/Capital.

**DISKUSI SEJARAH
KOTA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
11 – 12 APRIL 2007**

**SEJARAH KOTA DAN EKONOMI
PERKEBUNAN**

**Oleh :
Soegijanto Padmo**

**BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI
TRADISIONAL YOGYAKARTA
Jl. Brigjen Katamso, 139 Telp. (0274) 373241**

SEJARAH KOTA DAN EKONOMI PERKEBUNAN*)

Oleh:

Soegijanto Padmo**)

1. Pengantar

Kota sebagai suatu pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya baru berkembang dengan pesat sekitar dua abad terakhir. Dengan kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya Revolusi Industri serta dikembangkannya berbagai industri massa membuat berbagai kota-kota tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan itu ditandai antara lain dengan dibangunnya gedung baik untuk pemukiman, pelayanan publik maupun kegiatan industri; sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi; serta urbanisasi yaitu arus kedatangan penduduk pedesaan ke kota (Lihat [http://en.wikipedia.org/Urban History](http://en.wikipedia.org/Urban_History)"; [http://en.wikipedia.org/Urban Geography](http://en.wikipedia.org/Urban_Geography))).

Pada pertengahan abad ke-19 kota-kota di Jawa masih merupakan kota tradisional meskipun beberapa kota di pantai utara Jawa sudah berfungsi sebagai kota pelabuhan yang melayani pelayaran antar pulau antara Jawa-Banjarmasin-Makasar; serta Jawa-Singaraja; maupun Jawa-Jambi-Malaka (O'Campo, 1987; Mashuri, 2000; Singgih Tri Sulistiyana, 1999). Sementara itu kota di pedalaman menjadi pusat kegiatan ekonomi dan politik di hinterland yang bersifat agraris feodal. Apabila dalam proses perkembangannya kota pantai memperoleh dukungan dari kegiatan perdagangan antar pulau maka perkembangan kota pedalaman didukung oleh kemampuan industri pedesaan serta industri manufaktur yang berkembang di kota, serta yang muncul pada paruhan kedua abad ke-19 adalah industri perkebunan (Lihat Soegijanto Padmo, 1999; Fernando, 1982; O'Malley, 1988; Loekman Sutrisno, 1982; dan Elson, 1982). Sebagai pusat kegiatan

*)Makalah disampaikan pada Diskusi Sejarah diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jogjakarta, 11-12 April 2007.

**)Dosen Sekolah Pasca Sarjana dan FIB UGM

ekonomi, kota mempunyai berbagai kegiatan ekonomi seperti kegiatan industri dan manufaktur, serta kegiatan pelayanan dan jasa yang mencerminkan tahap perkembangan kehidupan masyarakat kota yang semakin kompleks. Dalam makalah ini akan dibahas tentang hubungan antara perkembangan kota Surakarta dengan ekonomi perkebunan pada periode 1860-1940.

2. Surakarta dan perusahaan perkebunan

Kota Surakarta dibangun pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono II sebagai ganti Kartosuro yang dianggap tidak layak lagi sebagai ibukota kerajaan. Wilayah Kasunanan Surakarta seluas 6.215 kilometer persegi dengan penduduk 358.230 orang pada 1838 menjadi 2.049.547 jiwa pada 1920 (Deskripsi pada bagian ini berdasarkan pada Suhartono, 1991; Sariyatun, 2003; Suyatno, 1982 kecuali apabila disebut secara khusus). Wilayah kasunanan Surakarta merupakan daerah pertanian yang subur terutama daerah barat yaitu daerah Pajang dan daerah di bagian timur yaitu daerah Sokaowati merupakan daerah yang kurang subur.

Sejak dasawarsa pertama abad ke-19 Vorstenlanden yaitu daerah kerajaan Jogjakarta dan Surakarta persewaan tanah telah dilakukan baik oleh orang Cina maupun orang Eropa. Pada tahun 1816 sampai 1821 misalnya di Surakarta terdapat 16, 6, 8, 19, 50 dan 27 orang Belanda yang menyewa lahan, sementara itu baru pada 1820 terdapat seorang Cina dan pada 1821 terdapat 63 orang Cina lain menyewa lahan di Surakarta. Di Jogjakarta sejak tiga tahun sebelumnya yaitu pada 1814 telah ada 3 orang Belanda yang menyewa lahan Sultan untuk membangun peristirahatan di Bedoyo. Pada tahun berikutnya sampai tahun 1820 terdapat masing-masing 2, 8, 19, 30, 2, dan 1 orang Belanda menyewa lahan di Jogjakarta. Seperti halnya di Surakarta baru pada 1815 orang Cina mulai menyewa lahan di Jogjakarta (Soegijanto Padmo, 1999:47).

Perkebunan yang dilakukan pada masa awal meliputi tanaman semusim seperti indigo, padi, serat, maupun tanaman keras seperti kopi. Sampai dengan pertengahan abad ke-19 sifat pengusahaan tanaman perkebunan masih bersifat coba-coba dengan cirinya antara

lain bahwa kegiatan itu merupakan perusahaan patungan antara beberapa orang atau keluarga kaya, mengusahakan di lahan persawaan yang relative sempit yaitu antara 30-50 bau, menguasai tanaman local seperti padi, serat, dan kopi, menggunakan teknologi sederhana, produksi skala kecil, serta pemasaran di pasar local. Perkebunan pada masa awal belum menunjukkan adanya pembedaan antara tanaman dataran rendah seperti tembakau dan tebu bukannya padi dan serat maupun tanaman pegunungan atau dataran tinggi seperti kopi karena berbagai tanaman itu ditanam di dataran rendah seperti di Gantiwarno, Klaten. Beberapa tanaman yang semula lebih dimaksudkan sebagai tanaman hias seperti tanaman kopi, di sekitar tempat peristirahatan Keluarga Kasunana maupun orang Belanda seperti di Tawangmangu pada masa berikutnya diusahakan dalam skala luas sebagai perkebunan.

Perkembangan perusahaan perkebunan di Surakarta berjalan cukup pesat bukan hanya untuk perkebunan di wilayah dataran rendah yang subur tetapi juga perkebunan yang diusahakan di dataran tinggi seperti di lereng timur Gunung Merapi serta perbukitan di sekitar Tawangmangu. Jumlah perusahaan serta tanaman yang diusahakan dapat dilihat di Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Jumlah perusahaan dan jenis tanaman yang diusahakan di Karesidenan Surakarta pada 1915.

Kabupaten	!	Jumlah perusahaan	! Jenis tanaman yg diusahakan
Surakarta	!	10	! tembakau, indigo, gula, serat, ! kopi
Klaten	! !	35	! tembakau, indigo, gula, serat, ! kapok, padi
Boyolali	! !	18	! tembakau, indigo, mrica, ! karet, kapok, kopi
Sragen	! !	35	! kopi, indigo, karet, teh, gula, ! serat, kapok

Sumber: Suyatno Kartodirdjo, 1982:11

Sistem tanam Paksa yang diterapkan pemerintah colonial di Tanah Jawa sebagai cara untuk memperoleh penyerahan wajib atas hasil bumi pada periode 1830-1870 tidak dapat diterapkan di wilayah Kerajaan yang masih dianggap memiliki kekuasaan. Meskipun demikian pada kurun tersebut para pengusaha Eropa berhasil memperoleh kesempatan menyewa lahan para bangsawan untuk mengusahakan tanaman perkebunan seperti indigo, gula, dan kopi. Para pengusaha Belanda, yang dilarang membuka usaha di daerah lain di Jawa, cenderung mengkonsentrasikan usaha mereka di Wilayah Kerajaan terutama setelah 1842.

Pada pertengahan abad ke-19 beberapa tanaman perkebunan memperoleh tempat yang penting di Surakarta. Antara tahun 1842-1849 jumlah produksi kopi di wilayah Mangkunegaran adalah 2.169 kuintal sementara wilayah Kasunanan memproduksi 39.262 kuintal. Dalam waktu tiga tahun, yaitu antara 1861-63, produksi meningkat menjadi 12.127 kuintal di wilayah Mangkunegaran dan 38.020 kuintal di wilayah Kasunanan. Pada 1863, produksi indigo di wilayah Surakarta diperkirakan 32.597 kilogram (Pringgodigdo, 1950).

Tahun 1870 dengan dicanangkannya Undang-undang Agraria menandai berakhirnya pelaksanaan STP di Jawa. Kebijakan baru ini bertujuan untuk mendukung perkembangan perkebunan swasta di Tanah Jawa, yang secara nyata mendorong meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di tanah Jawa termasuk Surakarta sebagai tertera dalam Tabel 1 di atas.

Beberapa tanaman tertentu seperti indigo, gula, dan kopi, tetap menjadi tanaman penting pada kurun sistem liberal. Setelah tahun 1915, proses penggabungan perusahaan swasta Belanda dimulai. Beberapa perusahaan kecil yang merasa kurang kuat untuk bersaing dalam usaha diambil alih oleh perusahaan besar sehingga perusahaan perkebunan yang semula berjumlah 98 menjadi 80 perusahaan pada 1920. Meskipun jumlah perusahaan berkurang namun jumlah modal yang ditanam serta lahan yang dikuasai bertambah.

Pada 1906 dikeluarkan *Staatblad* nomor 93 yang memuat peraturan pemerintah colonial tentang penyewaan lahan di Surakarta yang memberi hak menyewa lahan kepada dua pihak yaitu

1. Orang Belanda, dan
2. Orang Eropa lain yang mempunyai kegiatan usaha serta perusahaan dagang yang didirikan di Hindia Belanda.

Dengan adanya peraturan ini maka orang Cina yang pada awal abad ke-19 mendominasi persewaan lahan di Surakarta harus melepaskan usahanya dalam persewaan lahan di Surakarta.

Pengusaha swasta Belanda menyewa lahan dari pemegang hak atas tanah atau *patuh*, yaitu pejabat dan kerabat Sunan. Pada prakteknya, mereka menyewa hak dari *patuh* termasuk hak menggunakan bekel dan penduduk guna menguasai tanaman perkebunan. Ini berarti bahwa penduduk desa yang dikoordinasikan oleh bekel, mengalami beban kerja yang berat di perkebunan. Perkebunan gula terutama memerlukan kerja berat dari petani (Geertz, 1963).

Hubungan antara penyewa lahan dengan pemegang hak tanah apanage dibawah control Patih atau Bupati Nayoko. Sistem sewa tanah untuk tanaman perkebunan dilakukan dengan cara sistem gembungan, yaitu rotasi dalam penggunaan lahan. Hak atas tanah dibagi menjadi dua blok yaitu blok A dan blok B. Perusahaan perkebunan diberi hak menggunakan lahan blok A pada tahun genap dan menggunakan blok B pada tahun ganjil. Di kala perkebunan menggunakan lahan blok A maka petani berhak mengerjakan lahan di blok B demikian sebaliknya (Adatsrechtbundels, Vol, 19:370; Supomo, 1927:44-45).

Dalam sistem persewaan ini, pengusaha Belanda memperoleh hak para *patuh*, sementara bekel dan penggarap diwajibkan bekerja untuk kepentingan perusahaan perkebunan. Sistem serupa dipraktikkan di Jogjakarta, dimana dampak yang berat pada bekel dan para petani penggarap dilukiskan oleh Selo Sumarjan (1962:33-34).

3. Kegiatan ekonomi dan pembangunan sarana prasarana kota

Pengaruh perkebunan Eropa thd ekonomi petani sangatlah besar, terutama pada periode STP dan system liberal. Dalam system apanage, bekel menguasai lahan dengan luasan tertentu dengan persetujuan patuh termasuk penduduk yang tinggal di tempat tersebut. Hak penduduk atas lahan itu adalah hak anggadu atau hak menggarap. Patuh mempunyai hak memperoleh tenaga kerja dari penggarap yang disebut *bau suku* dan *pasumbang*, yang diperoleh saat ia punya kerja atau acara tradisional lainnya. Selain itu penggarap juga wajib bekerja di lahan patuh yang lain yang disebut kerja *kuduran*.

Peraturan tentang kerja wajib perkebunan mulai dilaksanakan pada 23 Agustus 1909 yang kemudian dikuatkan dengan peraturan Sunan untuk daerah Kasunanan dengan *Rijksblad* Surakarta, no. 23, 1917 dan untuk Mangkunegaran dalam *Rijksblad* Mangkunegaran, no. 23, 1920. Tujuan dikeluarkannya aturan ini adalah untuk menjamin agar tenaga yang diperlukan perusahaan perkebunan tersedia setiap saat diperlukan. Jenis pekerjaan adalah bermacam-macam. Pertama, *intiran*, yaitu kerja di lahan perkebunan selama 10 jam setiap lapan atau 35 hari. Kedua, jaga malam di perkebunan. Ketiga, *gugur gunung*, yaitu kerja kolektif tanpa upah untuk kepentingan desa atau perkebunan. Lazimnya *gugur gunung* digunakan untuk memperbaiki atau memelihara saluran irigasi. Bekel dan penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan saluran irigasi. Warga desa yang bebas dari kerja wajib ini adalah bekel dan *wong numpang*, yaitu warga desa yang tidak memiliki rumah dan tanah.

Di Surakarta, petani melakukan kerja wajib dengan upah di perkebunan yang disebut *glidig*. Penggarap wajib bekerja di perkebunan dengan pengawasan bekel yang melakukan fungsinya sebagai pemimpinnya orang kecil atau *pangarepe wong cilik*. Bekel dan penggarap yang melalaikan kerja wajib akan menerima hukuman berupa kerja wajib tanpa upah selama tiga bulan hanya memperoleh makanan ringan. Dalam system *glidig* ini seperti dilaporkan oleh Pringgodigdo (loc.cit) penggarap hamper tidak punya waktu untuk mengerjakan lahan yang menjadi hak mereka. Keadaan inilah yang memicu munculnya system penyakapan dimana *wong numpang* dapat memperoleh lahan garapan dengan system *maro*.

Kerja wajib di perkebunan yang menyita sebagian besar waktu penggarap sehingga mereka tidak punya waktu untuk menggarap lahannya merupakan berkah bagi wong numpang. Dalam penelitian yang dilakukan di Klaten Soegijanto Padmo (1999) melaporkan bahwa desa perkebunan kuli penggarap, isteri dan anak-anaknya harus dikerahkan ke ladang perkebunan agar terbebas dari hukuman. Sementara itu system penyakapan yang lazim adalah system *maro* dimana seluruh sarana produksi menjadi tanggung jawab penyakap. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memiliki lahan garapan sementara lahan garapan relative stabil, sebagaimana dikemukakan oleh Geertz (1963) akan terjadi proses involusi dimana syarat penyakapan semakin berat sementara imbalan yang diterima oleh penyakap semakin kecil.

Prinsip kerja bebas yang diterapkan oleh pemerintah pada awal abad ke-20 memperoleh dukungan pengusaha swasta sampai dengan Masa depresi Ekonomi. Pada masa ini ekonomi uang sedemikian dasyat merasuk ke dalam kehidupan masyarakat Surakarta. Perusahaan perkebunan yang ada di Surakarta tersebar dari Prambanan-Sorogedug di bagian barat sampai Gondang-Sragen di ujung timur, serta di Wonogiri di ujung selatan sampai Boyolali dan lereng Merapi di ujung utara dapat dijumpai perkebunan semusim seperti tebu dan tembakau maupun tanaman tahunan seperti kopi dan teh. Perkebunan itu memerlukan sejumlah besar tenaga kerja yang bukan hanya berupa petani laki-laki dewasa tetapi juga tenaga wanita dan anak yang diperkerjakan pada berbagai pekerjaan baik di ladang maupun di emplasemen, serta perjaan yang rutin setiap saat harus dikerjakan sampai pada pekerjaan incidental. Dapat dikatakan bahwa pada masa jayanya perkebunan penduduk pedesaan lebih memilih bekerja di perkebunan daripada sebagai penggarap atau pemilik tanah atau *kuli kenceng* pada Reorganisasi Agraria 1916.

Fenomena semacam ini juga ditemukan di Pasuruan. Dalam penelitian yang dilakukan di Pasuruan Elson (1982) mengatakan bahwa perkebunan tebu telah mendorong munculnya kelas baru yaitu tukang grobag. Mereka merupakan kelompok masyarakat baru yang berhasil menangkap peluang ekonomi yang diciptakan oleh ekonomi perkebunan. Di Surakarta rupanya transformasi social mulai menunjukkan bentuknya antara lain dengan

munculnya kelompok baru dalam masyarakat pedesaan adalah kelompok masyarakat yang aktif dalam sector sekunder yaitu pengolahan hasil pertanian serta manufaktur lain seperti pembuatan pakaian atau konfeksi, pembuatan mebeler atau alat rumah tangga atau sector tertier seperti penjualan jasa angkutan, pemasaran, dan hiburan.

Tentang upah yang diperoleh kuli, Suhartono (ibid) melaporkan bahwa buruh wanita dan anak-anak dipekerjakan di gudang, kebun kopi dan tembakau, sedangkan laki-laki diserap dalam kegiatan di pabrik atau los pengeringan dan kebun tebu dan tembakau.

Upah yang diterima tergantung ringan-beratnya pekerjaan Upah harian yang diberikan pada 1832 sebesar 10 sen mengalami kenaikan pada 1864 menjadi 12,5 sen dengan memperoleh makan sekali. Pada 1865 upah dinaikkan menjadi antara 20-50 sen. Di pabrik gula upah kerja siang hari berkisar antara 20-35 sen, untuk malam hari antara 22-40 sen, dan untuk kerja yang berat dibayar 50 sen.

Sistem upah juga dibedakan antara kuli tetap dengan kuli lepas. Pada 1875 kuli tetap menerima upah sebesar f.9-f.20 sebulan. Kuli harian menerima 24-40 sen, wanita dan anak-anak diupah 15 sen, sedangkan tukang menerma upah sebesar 25 sen sampai f.1.

Dengan adanya pendapatan berupa uang kontan dari upah yang diterima oleh kuli penggarap, isteri dan anaknya itu berarti terdapat daya beli dalam masyarakat. Kenyataan ini diketahui oleh warga desa terutama *wong numpang*. Mereka dengan sigap memproduksi hasil pertanian dan pekarangan berupa umbi-umbian dan buah-buahan yang dijajakan pada saat hari gajian setiap Sabtu sore dua minggu sekali di depan pabrik. Saat seperti itu puluhan orang dengan membawa uang siap membeli apa saja di dijajakan oleh penjual. Barang yang dijajakan yang semula berupa hasil pertanian berkembang menjadi hasil kerajinan serta barang lain yang berasal dari luar desa. Demikian pula tempat transaksi antara penjual dan pembeli sudah tidak hanya dilakukan di sepanjang jalan di depan pabrik tetapi perlu dibuatkan pasar secara khusus di suatu tempat yang tidak jauh dari bangunan pabrik seperti yang dapat diamati di perkebunan Wedi-Birit yang berlokasi di Kecamatan Wedi.

Perkembangan industri pedesaan dan manufaktur mengalami kenaikan pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1890 misalnya kerajinan berkembang dan hasilnya dijual di pasar-pasar yang ada di sekitar perkebunan maupun pasar di luar daerah Surakarta. Kerajinan batik tulis yang semula menjadi monopoli keluarga bangsawan sejak 1890 menjadi monopoli orang Cina. Pada waktu itu pemasaran kain batik sudah menjangkau pasar di seluruh daerah Kejawen dan Priangan (AVS, 1897). Kerajinan bamboo, rotan dan anyaman dipasarkan di pasar local. Kerajinan kuningan seperti bokor, talam, dan pendok keris berkembang di Solo. Alat pertanian dan rumah tangga dari bahan besi dan tembaga dijual di pasar di Daerah Kerajaan. Payung yang menjadi status simbol social merupakan kerajinan rumah tangga yang cukup lama berkembang seperti di desa Juwiring. Demikian pula kerajinan gerabah di Bayat, Klaten. Pembuatan perahu terhenti ketika jalan kereta api dibuka untuk jurusan Solo-Surabaya pada 1884. Selain barang dari kulit, di pasar dan desa banyak beredar minuman keras, *ciu*, dan *rokok wangen*, sebagai barang penikmat Orang Cina membuat *soya* dan *taoco* dan kecap dari kedelai yang dijual di warung-warung.

Daerah Kejawen relative diuntungkan karena topografi yang landai. Prasarana transportasi dan komunikasi tidak menuntut dibangun dengan konstruksi yang canggih karena kedalaman sungai memungkinkan sungai-sungai diseberangi. Demikian pula sarana angkutan seperti gerobak, cikar dan angkutan manusia lazim digunakan pada pertengahan abad ke-19 (Lihat Carey, 1986). Lebih jauh Carey juga mendeskripsikan kecuali tentang produksi dan pengolahan hasil pertanian seperti kacang tanah, minyak klentik, dan kain tenun dan kain batik juga jaringan perdagangan yang menghubungkan antara daerah produsen di Kedu dengan berbagai pasar di pusat perdagangan yang ada di daerah lain di pedalaman Jawa Tengah maupun pantai utara Jawa. Jaringan transportasi antara pedalaman dengan pantai utara itu bukan saja memungkinkan terjadinya transaksi dagang antara produsen dengan pasar tetapi juga menjadi saluran masuknya barang dari luar ke pedalaman.

Jangkauan perdagangan di pedalaman masih relative dekat, meskipun angkutan untuk jarak yang relative jauh digunakan gerobak dan cikar dengan daya tempuh sekitar 40 paal

sehari. Dilaporkan dalam Babad Tanah Jawi (BTJ) bahwa ibukota Kerajaan Mataram telah mempunyai jaringan angkutan darat ke Semarang lewat Ambarawa dengan melewati jembatan yang ada di Jambu (BTJ, t.th.). Untuk perjalanan yang mempunyai jarak lebih dari 40 paal memerlukan penginapan di *koplakan* yang terletak di antara kota-kota kecil yang tersebar di Surakarta. Prambanan, Delanggu, Penggung, Jatinom, Boyolali, Pungkruk, dan Banaran adalah tempat transit pedagang yang akan melanjutkan perjalanannya ke arah barat, utara dan timur dari Surakarta. Di pasar yang ada di Surakarta banyak dijual hasil kerajinan maupun hewan piaraan yang ditukarkan dengan kapas dari Ponorogo, kelapa dari Pacitan, pakaian dan alat rumah tangga buatan Surakarta, kain lurik dari Jogjakarta, Bagelen, Rembang, dan Pekalongan.

Tempat transit itu sebenarnya bukan hanya terdapat penginapan tetapi juga warung dan hiburan lain yang diperlukan oleh mereka yang memerlukan hiburan seperti penjualan candu, warung yang menjual ciu dan jenewer buatan local seperti yang dijumpai di Delanggu. Berkaitan dengan masuknya ekonomi uang ke pedesaan di Surakarta maka masyarakat pedesaan di sekitar *koplakan* itu juga sebenarnya adalah pengguna fasilitas yang disediakan di *koplakan* itu. Dengan kata lain *koplakan* itu sebenarnya adalah embrio dari pusat pertumbuhan di simpul kegiatan ekonomi perkebunan yang tersebar di seluruh wilayah Surakarta yang kelak berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan kemudian menjadi pusat kegiatan administrasi seperti desa, kecamatan, atau bahkan kawedanan.

Tempat transit itu biasanya terletak dekat dengan perkebunan dan pusat kegiatan ekonomi seperti pasar misalnya Gondang Jetis dekat setasiun Srowot. Untuk mendukung angkutan barang di beberapa tempat tertentu tersedia pelayanan perbaikan kereta dan gerobak antara lain di Karangwuni, Wonggo, dan Pokohan.

Bagi perusahaan perkebunan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana sangat penting. Prasarana perhubungan seperti jalan dan jembatan, sarana angkutan berupa grobag dan cekar perlu disiapkan secara matang. Jalan dan jembatan perlu disiapkan guna menunjang angkutan sarana produksi dari gudang ke kebun atau membawa hasil panen ke gudang

atau los pengering, serta mengangkut produk dari gudang ke setasiun kereta api atau ke pelabuhan untuk diekspor. Sebelum jaringan kereta api yang menghubungkan antara Semarang dan Vorstenlanden dibangun pada 1884 prasarana angkutan yang digunakan di Surakarta adalah jalan darat dan jaringan sungai lewat Bengawan Solo. Pada waktu itu industri pembuatan kapal atau perahu cukup maju di Surakarta karena perahu digunakan bukan hanya untuk mengangkut produk pertanian dari daerah sekitar kota ke pasar kota tetapi juga digunakan untuk mengangkut produk yang dihasilkan daerah ini ke Surabaya untuk diekspor. Namun dengan dibukanya jaringan kereta api Semarang – Vorstenlanden itu berdampak bukan saja tidak berfungsi angkutan sungai dari Surakarta ke Surabaya tetapi juga matinya industri pembuatan kapal di Surakarta.

Jalan raya Jogjakarta – Surakarta menjadi ruas utama yang menghubungkan kedua ibukota kerajaan Kejawen itu dengan Jakarta di barat dan Surabaya di timur lewat jalur selatan. Di beberapa tempat sepanjang ruas Jogja-Surakarta-Ngawi itu terdapat simpul-simpul yang lewat jalan darat berhubungan dengan perusahaan perkebunan di wilayah Surakarta yang berada di utara dan selatan jalan raya tersebut. Jalan kereta api yang menghubungkan Semarang dengan Surakarta, kemudia dihubungkan dengan Jogjakarta ke barat dan Madiun di timur. Untuk mendukung perkembangan di daerah selatan jaringan jalan kereta api antara Solo – Kampak lewat Wonogiri sempat dipertimbangkan namun realisasinya tersendat-sendat (KV, 1886).

Jalan raya yang menghubungkan ibukota kasunanan Surakarta dengan kota dan pusat pertumbuhan lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun dengan kota-kecil di wilayah Surakarta telah terjalin bersamaan dengan perkembangan ekonomi pribumi baik di sector pertanian maupun industri pedesaan. Sejak 1830 misalnya Surakarta telah muncul sebagai salah satu penghasil beras yang utama di Jawa dan sebagai pengeksport beras yang penting ke beberapa daerah di sekitarnya seperti Jogjakarta, Ponorogo, Madiun, Salatigo dan Semarang, dan keadaan ini berlangsung terus sampai akhir abad ke-19. Jaringan itu semakin luas dengan dibangunnya rel kereta api sehingga kota seperti Surabaya dan Kediri menjadi pasar bagi produk yang dihasilkan Surakarta.

Jaringan transportasi dan komunikasi yang ada di Surakarta sejak dasawarsa pertama abad ke-19 telah berfungsi secara optimal dan menempatkan Surakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi di Daerah Kewajen. Posisi Surakarta sebagai penyedia bahan pangan dan berbagai kebutuhan bagi penduduk di kota-kota di Daerah Kewajen berubah menjadi semakin penting dengan masuknya perusahaan perkebunan swasta dan dibangunnya jaringan rel kereta api. Ekonomi perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi colonial memperoleh dukungan pemerintah colonial. Berkaitan dengan hal; itu maka di Surakarta didirikan perwakilan pemerintah colonial di Batavia dengan menempatkan Residen dan kemudian dinaikkan statusnya menjadi Gubernur.

Untuk mendukung kebijakan swastanisasi perkebunan ini maka di berbagai tempat dimana perkebunan diusahakan didirikan berbagai fasilitas yang diperlukan seperti gudang, pabrik dan los pengering serta sarana pendukung yang lain seperti jaringan jalan, sarana irigasi, armada angkutan yang terdiri dari lori dan armada angkutan grobag. Khusus untuk angkutan grobag hanya disiapkan di desa penghasil gula. Namun karena hampir di setiap wilayah kecamatan terdapat pabrik gula maka hampir di setiap desa dapat ditemukan petani yang menjadi tukang grobag. Di setiap perkebunan kecuali dibangun empalsemen atau pabrik untuk mengolah hasil perkebunan juga dibangun fasilitas perumahan bagi administrator dan staf, serta kantor. Di sekitar pabrik juga dibangun fasilitas untuk memenuhi keperluan orang Eropa seperti gereja dan rumah sakit. Sementara itu untuk keperluan masyarakat pasar musiman setiap hari gaji berkembang pesat sehingga perlu dibuatkan pasar khusus. Tempat yang memiliki berbagai fasilitas seperti itu berhasil menarik masyarakat di desa sekitar untuk datang dan berusaha di berbagai kegiatan seperti membuka usaha pengolahan hasil serta industri pedesaan lain maupun membuka warung dan pelayanan seperti bengkel grobag dan jasa lainnya.

Apabila keberadaan pabrik berhasil mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi desa serta menarik penduduk dari desa sekitar datang ke tempat tersebut maka di kota Surakarta keberadaan petinggi pemerintah colonial baik Residen apalagi Gubernur memberikan dampak yang luar biasa. Ditambah lagi bahwa kota Surakarta yang menjadi tempat berkumpulnya para pimpinan perusahaan perkebunan setiap akhir pekan membuat

kota Surakarta harus berbenah. Untuk itu maka dibangunlah berbagai gedung perkantoran yang merupakan symbol dari supremasi kekuasaan colonial di Daerah Kewajen. Maka dibangunlah Rumah Residen yang megah yang kemudian disebut dengan Loji Gandrung. Fasilitas lain seperti benteng dan loji di dalamnya, gereja serta kantor pos melengkapi simbolisasi pengaruh kekuasaan colonial di Surakarta. Saat Pasar Kliwon dibangun oleh Sunan maka pengusaha Belanda yang dimotori oleh Dezentje memanfaatkan lahan yang ada di tepi jalan raya yang terletak di sebelah utara alun-alun Kraton Surakarta antara Gladag sampai Purwosari untuk membangun gedung guna keperluan petinggi penguasa colonial dan petinggi di Surakarta. Demikian pula ketika Sunan membangun Taman Sriwedari Residen memerintahkan membuat Gedung Perpustakaan Radya Pustaka.

Untuk kepentingan pengamanan kompleks pabrik direkrut beberapa orang sebagai tenaga pengamanan sementara itu untuk penjagaan keamanan tanaman perkebunan tugas ronda malam dibebankan pada penduduk desa sekitar kebun. Tidak jarang penduduk desa juga harus membuat pagar pengaman bagi tanaman perkebunan berupa tanaman berduri di sekeliling kebun. Dalam memanfaatkan irigasi kepentingan perusahaan perkebunan diutamakan sementara itu kepentingan petani dinomorduakan. Sistem yang digunakan disebut *dag-en-nacht*, di siang hari air digunakan untuk tanaman perusahaan dan di malam hari untuk kepentingan petani.

Guna memasarkan produk yang dihasilkan di kota maupun daerah sekitarnya di Surakarta ada pasar besar yaitu Pasar Kliwon dan Pasar Legi. Di pasar inilah barang berupa hasil industri dan kerajinan yang diproduksi di kota seperti batik dan hasil manufaktur lain serta hasil pertanian dari pedesaan di pasarkan. Transaksi jual beli untuk keperluan perdagangan antarkota maupun kepentingan ekspor juga sudah dilakukan. Seperti komoditas batik sudah dipasarkan ke berbagai daerah di Jawa demikian juga hasil pertanian seperti beras. Perkembangan penting lainnya adalah bahwa terdapat hirarkhi dalam menjalankan fungsi perdagangan yang melibatkan perdagangan local maupun internasional. Daerah penghasil di luar kota akan mengirim barang ke pos pengumpul yang kemudian pos ini akan mengirim ke terminal angkutan ke pelabuhan pengirim ke daerah lain atau ke pasar internasional di luar negeri. Demikianlah gula yang dihasilkan

oleh berbagai pabrik gula yang ada di Karesidenan Surakarta seperti di perkebunan gula di Gondang, Karanganyar, Manisrenggo, Cepur, dan Gondangwinangun akan mengirim dengan armada grobag dari gudang ke stasiun kereta api di Sragen, Delanggu, Klaten, Srowot, dan Prambanan. Dari stasiun kecil ini komoditas dikirim ke stasiun Purwosari dan dari tempat ini komoditas itu dikirim ke pelabuhan Semarang dengan angkutan grobag dan kemudian dengan kereta api setelah 1884. Komoditas yang dihasilkan perusahaan perkebunan di Surakarta kecuali gula adalah tembakau, kopi, serat agave, dan beras. Mengingat komoditas tersebut tidak memiliki pola tanam dan panen yang seragam maka kegiatan produksi, prosesing dan pemasaran berlangsung sepanjang tahun. Dengan demikian betapa kegiatan di seluruh wilayah Kasunan dan Mangkunegaran mampu menggerakkan hampir seluruh elemen masyarakat di desa dan di kota yang ada.

Karena kegiatan ekonomi itu tidak selalu dilakukan pada siang hari maka pada malam hari juga lazim dijumpai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Terlebih lagi kerja bebas diterapkan secara serius oleh pemerintah colonial pada dasawarsa awal abad ke-20 maka setiap kegiatan ekonomi berarti terbukanya sumber penghasilan tambahan bagi penduduk pribumi. Keadaan ini membuat kehidupan malam di Surakarta sangat dinamis sehingga kota Surakarta sampai dengan dasawarsa 1870-an dikenal sebagai satu-satunya kota di Bumi Kejawaan yang tidak pernah tidur.

Selain kegiatan ekonomi aktivitas pembangunan berbagai sarana dan prasarana seperti gedung, jalan dan jembatan di kota dan berbagai wilayah Kasunanan membuat penduduk memperoleh sumber penghasilan. Penduduk pedesaan di sekitar kota bergerak ke kota untuk memanfaatkan terbukanya peluang ekonomi tersebut di sektor informal yang menjadi mulai penting pada awal abad ke-20. Sebagai akibatnya adalah di kota muncul pemukiman kumuh di sekitar proyek maupun di sekitar jalan kereta api. Tempat kumuh ini, yang disebut dengan *slum*, adalah sumber bagi kegiatan kriminal yang berkembang sejalan dengan tumbuhnya kota sebagai pusat kegiatan ekonomi yang semakin penting.

4. Ekonomi Perkebunan dan urbanisme

Perkembangan ekonomi dan budaya Surakarta didukung oleh kota di sekitarnya. Sebagai ibukota kerajaan Surakarta adalah pusat kegiatan politik, ekonomi dan budaya. Tentulah penguasa yang lebih rendah di tingkat kabupaten yaitu Klaten, Sragen, Karanganyar dan Boyolali akan meniru gaya hidup dengan membuat duplikat budaya feodal agraris di wilayahnya. Begitu seterusnya sampai ke jenjang yang lebih rendah di tingkat kawedanan, dan asisten wedana. Budaya Eropa tak pelak juga mewarnai kehidupan di istana Kasunanan. Tradisi dansa dan pesta pada setiap akhir pekan yang diselenggarakan di kediaman Residen atau di rumah bilyar yang disebut dengan kamar bola memperkuat berkembangnya corak kehidupan yang hedonistis di kalangan rakyat kebanyakan di Surakarta (Wawancara dengan Slamet, mantan *boekhouder* pabrik tembakau Bangak, Juli 1985). Tradisi minum ciu dan arak, konsumsi candu dan berfoya-foya yang didukung oleh bonanza ekonomi perkebunan mendorong berkembangnya industri ciu serta munculnya pusat hiburan di kota kawedanan seperti Delanggu dan Sragen.

Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan perusahaan perkebunan maka reorganisasi agrarian di Daerah Kerajaan dilaksanakan dengan control ketat dari petinggi pemerintah colonial. Reorganisasi yang dilaksanakan pada 1912 di Surakarta dan 1916 di Jogjakarta memberikan hak anggadung kepada masing-masing petani penggarap atau kuli. Dengan status sebagai penggarap maka perkebunan mempunyai jaminan bukan hanya tanah tetapi juga tenaga kerja yang diperlukan untuk mengusahakan tanaman perdagangan. Sebaliknya bagi petani dengan memiliki hak individu atas lahan pertanian dan pekarangan itu menjamin mereka untuk menerima uang kontrak dari perusahaan perkebunan yang menyewa lahannya. Meskipun demikian pada dasawarsa 1920an kecuali petani terserap dalam kegiatan di kebun tetapi juga wanita dan anak-anak yang ada di desa perusahaan tembakau terserap ke dalam pekerjaan di perkebunan. Ini berarti bahwa di desa perkebunan tembakau seperti Gayamprit, Wedi-Birit, Kemudo, Gantiwarno, Jiwo, Demangan, Ketandan, dan Pandan Simping secara ekonomis mempunyai daya beli yang semakin kuat. Di samping itu industri pedesaan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perkebunan tembakau seperti pembuatan bahan atap los pengering atau welit serta usaha angkutan grobag dan cikar juga

bermhang pesat. Semakin banyak kegiatan yang melibatkan penduduk desa yang terserap oleh perusahaan perkebunan akan semakin besar uang yang beredar di masyarakat. Hal ini akan menimbulkan dampak langsung atau backward linkage ataupun damaktidak langsung atau forward linkages. Logika seperti inilah yang sebenarnya merupakan factor yang mendorong berkembangnya kota kecil yng berada di sekitar perusahaan perkebunan di Surakarta.

Kota Surakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan penduduk yang semakin banyak baik yang terdiri dari bangsa Eropa dan Timur Asing lain maupun orang yg datang dari pedesaan untuk mengadu untung di sector informal membuat kota semakin hidup. Kepemilikan angkutan berupa mobil mulai meramaikan jalan di kota Surakarta. Demikian pula angkutan umum berupa bis yang menghubungkan Surakarta dengan berbagai kota seperti Sragen dan Madiun, Boyolali, Salatiga dan Semarang, Kartosuro, Klaten, dan Jogjakarta, maupun Wonogiri. Jalan kereta api menghubungkan angkutan dari Suraarta ke Surabaya ke arah timur, serta ke Semarang atau ke Jogjakarta. Jaringan angkutan darat itu mempermudah dan mempercepat angkutan manusia dan barang yang mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian di Surakarta dan kota kecil lainnya.

Berdirinya berbagai fasilitas pelayanan politik, ekonomi, social dan budaya bagi masyarakat Eropa maupun pribumi terutama untuk periode sampai 1930 menunjukkan perkembangan kota yang optimal dari di Surakarta maupun di kota kecil lain di seluruh daerah ini. Di Kota Surakarta dibangun berbagai fasilitas hiburan seperti Taman Sriwedari dan Taman hiburan Tirtonadi, serta kebun binatang Sriwedari. Pusat kegiatan perdagangan berupa pasar dan toko di buka di beberapapemukiman dan jalan besar. Pera orang Eropa dan Cina, serta pribumi cukup penting dalam kegiatan ini yang melibat produk local maupun import seperti kain cita dari India dan Cina yg sdh masuk Hindia Belanda sejak pertengah abad ke-19.

Pelayanan jasa yng semakin bervariasi di kota besar dan kota kecil di Karesidenan Surakarta menunjukkan bahwa perkembangan kota semakin pesat serta gaya hidup masyarakat yang semakin variatif. Fasilitas hidup dengan segala plus minusnya ternyata

membuka peluang bagi pelayanan kesehatan seperti pemasangan gigi palsu sampai pengobatan sakit kelamin yang lazim dijumpai dalam reklame surat kabar waktu itu (Sukarto, 2000). Demikian pula tempat khusus untuk penjualan candu dan minuman keras serta pelayanan hiburan bagi lelaki dijumpai hampir di setiap kota kawedanan. Di kota kecil ini kecuali ada *koplakan*, pasar, warung remang-remang, juga terdapat pelayanan social yg lain seperti kantor pemerintah, sekolah, gereja atau masjid, rumah sakit, pegadaian serta kantor polisi dan pos militer.

Masa Depresi 1930an adalah masa sulit bagi semua orang terutama perusahaan swasta yang hampir semuanya gulung tikar kecuali beberapa perkebunan tembakau karena tidak mampu menjual produknya ke pasar internasional. Sementara itu di Surakarta dan kota kecil lainnya dibanjiri buruh perkebunan yang dipulangkan dari Sumatra Timur. Hilangnya sumber penghidupan di perkebunan di Surakarta dan kembalinya sanak kerabat mereka dari Sumatra Timur menjadikan beban yang ditanggung oleh daerah ini semakin berat. Sektor yang tertimpa beban langsung adalah sector pertanian. Anehnya di tengah dasawarsa 1930an yang sulit itu pedesaan di Surakarta justru menunjukkan kemampuan yg elastis untuk beradaptasi. Dalam mencari jalan keluar bagi semakin banyaknya penduduk yg harus diberi makan tanaman pangan yang diusahakan bergeser dari sumber karbohidrat berkualitas tinggi ke sumber karbohidrat berkualitas lebih rendah misalnya dari beras ke ketela pohon atau ubi jalar. Demikian pula pemanfaatan lahan dilakukan semakin intensif seperti diversifikasi tanaman serta multiple cropping yang memungkinkan dilakukan panen beberapa kali dalam satu musim tanam (Wawancara dengan Carik Kotesan, Kec. Prambanan, 2 Juni 1986).

Masa Pendudukan Jepang, periode perjuangan kemerdekaan, serta awal periode kemerdekaan Surakarta penuh dengan gejolak yang dimotori oleh satuan pemuda dan kelompok militer. Peran istana Mangunegaran dan Kasunanan maupun pedagang serta ulama membuat dinamika social politik semakin kompleks. Kota Surakarta dan kota kecil lain menunggu hadirnya kembali perkebunan sebagai akibat Konferensi Meja Bundar. Meskipun modal perkebunan sempat kembali beroperasi di Surakarta tetapi dampak di

timbulkannya terhadap kota dan masyarakat Surakarta tidak sebesar yang diharapkan oleh mereka.

5. Penutup

Berdasarkan pada uraian terdahulu beberapa dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kota di Surakarta yang berbasis pada ekonomi dan lingkungan agraris telah berkembang sedemikian rupa sehingga mampu memberi manfaat bagi penduduk di pedesaan sekitar kota-kota tersebut baik dalam sector formal maupun sector informal.
2. Ekonomi perkebunan telah mampu membuka peluang ekonomi bagi penduduk potensial di pedesaan untuk memanfaatkan daya beli yang meningkat maupun perubahan ekologi budaya petani yang mampu menangkap kesempatan yang ada.
3. Transformasi social di Surakarta ditandai dengan munculnya sector informal di kota serta pedesaan di daerah *rurban (rural-urban)*.
4. Dampak langsung ekonomi perkebunan seperti yang dialami oleh petani penggarap berupa meningkatnya daya beli yang merangsang tumbuh dan berkembangnya industri pedesaan. Adapun dampak tidak langsung adalah munculnya penyakapan lahan nganggur milik penggarap oleh wong numpang yang pada perkembangannya diwarnai oleh proses involusi seperti yang dirumuskan oleh Geertz.
5. Perusahaan perkebunan dan penguasa colonial dengan segala fasilitas yang diperlukan di Surakarta menjadi motor bagi dinamika yang berlangsung di Surakarta dan dalam proses itu pula berbagai pihak dapat memperoleh manfaat dalam mencari sumber penghidupan dalam berbagai kegiatan ekonomi meskipun pada masa sulit seperti Depresi 1930an, masa penjajahan Jepang sampai dengan masa perjuangan kemerdekaan dan awal kemerdekaan.

Daftar Pustaka

- Elson, R.E., 1984. *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry*. Singapore: Oxford UP.
- Fernando, R.M., 1982. "Peasant and Plantation Economy: The Social Impact of the European Plantation Economy in Cirebon Residency from the Cultivation System to the End of First Decade of the Twentieth Century". Unpublished thesis, Monash University.
- Geertz, C., 1963. *Agricultural Involution The Proces of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Mashuri, 1995. *Menyisir pantai Utara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Nusantara-KITLV.
- O'Malley, W.J., 1977. "Indonesia in the Great Depression: A Studt of East Sumatra and Jogjakarta in 1930s" Unpublished Ph.D. thesis, Cornell University
- Singgih Tri Sulistiyono, 2003. *The Java Sea Network: Patterns in the Development of Interregional shipping and trade in the process of national economic integration in Indonesia, 1870s-1970s*. Proefschrift Universiteit Leiden.
- Soegijanto Padmo, 1999. *Tobacco Plantations and their impact on pesanat society and economy in Surakarta Residency: 1860-1960*. Jogjakarta: Aditya Media.
- Suhartono, 1991. *Apanage dan Bekel Perubahan social di pedesaan Surakarta 1830-1920*. Jogjakarta: Tiara Wacana.
- Supomo, 1927. *De Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta*. 's-Gravenhage: L.Gerretsen.
- Suyatno Kartodirdjo, 1982. "Revolution in Surakarta 1945-1950: A Case Study of City and Village in the Indonesian Revolution" Unpublished Ph.D. thesis, the Australian National University.

KISAH DARI DUA KOTA: SEJARAH KOTA DAN PENDUDUK KOTA INDONESIA¹

Oleh:
Bambang Purwanto

Keberadaan kota sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia. Sejak lama pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, kota dan kehidupan masyarakatnya telah menjadi salah satu realitas penting dari proses kemajuan dan perkembangan peradaban di berbagai wilayah di kepulauan Indonesia. Proses pengkotaan itu diyakini oleh beberapa sejarawan sebagai salah bukti telah terjadi "modernisasi" internal di kepulauan Indonesia dalam sebuah masyarakat yang sering disebut sebagai "pra-modern" atau "pra-kapitalis", sebelum atau pada saat pengaruh Barat mulai berkembang di wilayah ini. Akan tetapi tidak banyak perhatian yang telah diberikan pada realitas masa lalu perkotaan Indonesia, terutama pada kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sebagai sebuah historiografi, masa lalu Indonesia lebih banyak dipahami, khususnya oleh sejarawan Indonesia, sebagai realitas agraris yang romantis dengan unsur pedesaan yang aman dan tenteram, bukan realitas kota yang hiruk pikuk dengan berbagai persoalan di dalamnya. Kota dengan keberingasannya dianggap tidak layak untuk mewakili identitas keindonesiaan dan masa lalunya yang sering dipahami sebagai sebuah kesahajaan tanpa dosa. Tulisan sederhana ini akan menghadirkan kenyataan masa lalu dari sejarah kehidupan masyarakat di dua kota Indonesia untuk menunjukkan sisi lain dari identitas keindonesiaan, dan sekaligus membangun kesadaran tentang arti penting sebuah perspektif baru dalam historiografi Indonesia, baik yang akan digunakan untuk proses pembelajaran sejarah di sekolah maupun untuk masyarakat umum yang ingin memahami dari dalam sejarah Indonesia dalam arti yang lebih luas secara holistik.

¹ Disampaikan pada Diskusi Sejarah dengan teman "Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah" yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Yogyakarta 11-12 April 2007. Penulis adalah staf pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dilarang memperbanyak atau mengutip tulisan ini tanpa izin penulis karena sebagian dari data yang digunakan merupakan bagian dari tulisan yang sedang dalam proses penerbitan.

Belantara Jakarta

Jakarta menurut foto dan lukisan dari abad ke-19 ternyata bukan kota yang diatur sedemikian rupa sehingga nampak menarik. Di samping kemewahan dan kebesaran gaya kolonial yang ditampilkannya, Jakarta juga merupakan kota gersang dan semerawut yang memiliki jalan tanah berdebu pada musim kemarau dan becek serta berlobang pada musim hujan, kanal dengan air yang tidak jernih, sanitasi yang buruk, dan penduduknya terancam banjir serta malaria sepanjang tahun. Selain mengakibatkan berbagai persoalan pada penduduk setempat, panas kota Jakarta yang tinggi juga telah menyebabkan kematian lebih dari lima ratus kuda milik perusahaan trem dalam setahun, ketika trem yang ditarik dengan kuda diperkenalkan pada tahun 1869 (Abeyasekera 1989: 52).

Keberadaan berbagai suku bangsa mengakibatkan Jakarta menjadi sebuah kota multikultural, tetapi tetap menunjukkan adanya pemisahan ala kolonial yang jelas secara sosial. Jika dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat orang Cina, Arab, India dan terutama bumiputera yang berjalan kaki di sepanjang jalan, maka sangat sulit ditemukan orang Eropa dan orang campuran Indis yang kaya mau melakukan hal yang sama. Hampir seluruh orang dari dua kelompok terakhir itu naik kendaraan dalam kegiatan sehari-hari, kecuali mereka yang berada pada strata bawah di dalam kelompoknya, baik karena alasan jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan tempat bekerja maupun karena alasan sosial (Abeyasekare 1989). Jika pun ada orang Eropa atau Indis yang berjalan kaki, mereka biasanya berjalan di bawah payung untuk menutup diri dari sengatan matahari, baik yang dibawa sendiri maupun oleh para budak, jongos, atau babunya, sesuatu yang jarang dilakukan oleh sebagian besar penduduk bumiputera.

Foto dari tahun 1870-an menunjukkan penduduk yang tinggal tidak jauh dari benteng kota sekitar daerah Glodok misalnya, sehari-hari menggunakan kanal yang ada disekitarnya atau Kali Krukut untuk mencuci pakaian, mandi, dan sekaligus sebagai jamban. Bangunan kecil yang berfungsi sebagai kakus didirikan di atas kanal sepanjang jalan-jalan Toko Tiga, Pintu Kecil, dan Pancoran, tempat sebagian besar masyarakat Cina bermukim (Wachlin 2004: 45). Cara hidup sehari-hari yang sama juga dilakukan penduduk yang tinggal di sekitar Pasar Baru atau Jalan Juanda saat ini, Senen dan di sekitar daerah Pejambon pada masa yang sama. Penduduk misalnya memanfaatkan kanal yang ada di depan sebuah toko sepatu di Noordwijk, sepanjang Gunung Sahari, dan di

dekat gereja Imanuel atau Willemkerk untuk mandi, mencuci pakaian, dan juga jamban (Merrillees 2000: 140). Lukisan yang berasal dari periode yang lebih awal, tahun 1806 dan 1811, bahkan memperlihatkan lebih jelas lagi kegiatan sehari-hari penduduk di dalam dan di sepanjang kanal di tempat yang sama tanpa membedakan etnisitas dan kelas sosial. Dari profil yang ada di dalam lukisan, dapat digambarkan bahwa bukan hanya penduduk bumiputera yang memanfaatkan kanal di dekat Willemkerk itu untuk mandi, mencuci, jamban, dan bukan tidak mungkin juga untuk minum dan memasak melihat ada orang yang sedang membawa tempat air, melainkan penduduk Cina, Arab, dan bahkan Eropa, atau paling tidak kelompok campuran Indis yang dikategorikan sebagai Eropa, juga melakukan hal yang sama (Bastin & Brommer 1979: 51). Kanal dan sungai benar-benar merupakan salah satu urat nadi kehidupan sehari-hari penduduk kota Jakarta pada waktu itu, sehingga mereka merasa tidak perlu memiliki sumur, kamar mandi, dan jamban sendiri di rumah masing-masing.

Berdasarkan kenyataan di atas, secara konseptual dapat dikatakan bahwa pada satu masa tertentu atau paling tidak sampai dengan beberapa dekade awal abad ke-19, kegiatan mencuci baju, mandi, dan buang hajat di sungai dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu bisa digunakan untuk menunjukkan status sosial-ekonomi seseorang pada saat itu, karena perilaku yang sama dilakukan oleh orang dari hampir semua kelompok sosial. Bahkan rumah-rumah besar milik orang Eropa atau Indis di Jakarta yang memiliki status sosial tinggi sekalipun, pada awalnya selalu membuat kamar mandi dan jamban di dekat atau di atas sungai. Semua kegiatan yang berhubungan dengan air dilakukan di kanal atau sungai. Bahkan para pekerja rumah tangga dari orang kaya pemilik rumah-rumah besar di Jakarta, yang lebih diperlakukan sebagai budak pada saat itu, juga mencuci baju para majikannya di sungai (Bastin & Brommer 1979: 263). Baru pada pertengahan abad ke-19, rumah-rumah besar yang sebagian besar bergaya Indis itu memiliki kamar mandi dan jamban di dalam rumah, itupun masih sangat sederhana dibandingkan dengan rumah-rumah yang dibangun sejak awal abad ke-20 (Soekiman 2000). Kalaupun orang-orang Eropa itu tidak mandi di sungai, paling tidak dapat dipastikan bahwa mereka membiarkan para pekerja rumah tangganya mencuci pakaian, termasuk pakaian para tuannya, di sungai. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa konsep sehat dan bersih yang ada pada masyarakat pada waktu itu berbeda dengan masa

kemudian, ketika air sungai telah dianggap tidak layak untuk memasak, mandi serta mencuci karena alasan kesehatan. Mandi dan mencuci di sungai hanya pantas untuk mereka yang berasal dari kelas sosial rendah atau orang miskin, dan membuang hajat di sungai bukan hanya mengganggu kesehatan, mencemari lingkungan dan memalukan melainkan juga simbol dari ketidakberadaban. Oleh karena itu tidak mengherankan, iklan sabun baik untuk mandi maupun mencuci, tetap menghadirkan gambar para perempuan yang sedang mandi dan mencuci di sungai, kali, atau kanal sampai awal ke-20 pun. Baru pada masa-masa kemudian gambar yang sama tidak ditampilkan lagi, yang nampaknya berhubungan erat dengan perubahan wacana atau persepsi masyarakat tentang sungai, air, kebersihan, kesehatan, etika pergaulan, atau konsumen yang dituju.

Khusus yang berkaitan dengan mencuci pakaian di kanal atau sungai, ada satu hal menarik tentang siapa yang melakukan kegiatan itu sehari-hari. Berdasarkan lukisan-lukisan yang berasal dari tahun 1851, 1853, dan 1857, kegiatan mencuci di kalangan pekerja rumah tangga digambarkan dilakukan oleh kaum pria, atau para jongos (Bastin & Brommer: 1979: 263 & 281). Dari tiga lukisan itu tidak terlihat sama sekali ada perempuan pekerja rumah tangga atau babu yang sedang mencuci. Bahkan salah satu lukisan menunjukkan seorang babu yang sedang mandi dengan latar belakang dua orang jongos yang sedang mencuci. Hal itu mungkin dapat dijelaskan karena mencuci dengan cara yang berlaku saat itu merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan tenaga yang besar, sesuatu yang dianggap lebih tepat jika dilakukan oleh laki-laki. Sementara itu sebuah foto yang diperkirakan berasal dari awal abad ke-20, berdasarkan pakaian dan teknik foto yang digunakan, memperlihatkan bahwa hampir seluruh orang yang mencuci di kanal di dekat Molenvliet pada waktu itu adalah perempuan (Nieuwenhuys 1998: 137).

Di tengah-tengah kemewahan yang menyeruak seiring dengan perkembangan Jakarta sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi, kemiskinan menjadi sesuatu yang seolah-olah identik dengan Jakarta, kota yang bukan kota melainkan "kelompokan besar dusun" menurut Pramudya Ananta Toer pada tahun 1955 (Toer 1957). Urbanisasi yang terjadi akibat desa yang semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan warganya, kilauan fatamorgana kota yang memikat, dan kekacauan di pedesaan akibat konflik politik nasional berkepanjangan memperbesar jumlah orang kebanyakan yang memasuki

Jakarta pada akhir masa kolonial, selama perang, dan terutama sejak tahun 1950-an (Heeren 1955).

Jumlah penduduk Jakarta mencapai kurang lebih setengah juta orang pada tahun 1930, atau meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 1900. Jumlah itu terus meningkat tajam mencapai lebih dari satu setengah juta dan bahkan hampir dua juta orang pada tahun 1950 menurut sumber lain, dan hampir empat juta orang pada tahun 1965 (Djakarta Raja 1953:10-11; Wertheim 1956: 184; Abeyasekere 1989: 221). Peningkatan jumlah penduduk yang tajam itu tentu saja mempengaruhi mutu kehidupan sehari-hari para pendatang itu. Walaupun menurut kajian sejarah lisan pada tahun 1950-an terdapat pepatah yang mengatakan “ada 80 lowongan kerja untuk 10 pencari kerja” dan “masa ketika pekerjaan mencari orang bukan sebaliknya”, kehadiran para migran dalam jumlah yang banyak itu tetap saja tidak sebanding dengan ketersediaan kerja dan lingkungan yang layak (Jellinek 1991:13).

Hidup sehari-hari dalam keadaan yang miskin dan lingkungan pemukiman yang kumuh tentu saja bukan sesuatu yang baru bagi sebagian masyarakat Jakarta. Adanya kemiskinan dan kekumuhan di wilayah yang menjadi tempat tinggal sebagian besar penduduk bumiputera dan kelompok miskin Cina, Arab, dan Indis itu paling tidak dapat dilihat pada pembicaraan tentang hal itu di Volksraad dan usaha perbaikan kampung sejak dekade kedua abad ke-20, terutama sejak akhir tahun 1920-an. Ironisnya, perbaikan kampung itu malah menjadi sebab dari tersingkirnya orang kebanyakan dari rumah-rumah mereka di tengah kota atau terpaksa harus tinggal jauh dari tempat kerja karena kenaikan harga tanah serta sewa, dan tindakan pemerintah menghancurkan kampung dan rumah-rumah mereka yang dianggap tidak layak untuk dihuni (Abeyasekere 1989:121-122). Sebagian besar orang kebanyakan hanya berpindah tempat, namun kemiskinan, kekumuhan, dan ketidaklayakan tetap menjadi bagian dari hidup mereka sehari-hari. Tidak mengherankan jika menurut sebuah penelitian, lebih dari 60% pendapatan para pekerja langsung habis digunakan untuk membayar hutang pada akhir tahun 1930-an, sehingga sangat sulit bagi sebagian besar mereka memperbaiki mutu kehidupan sehari-hari (Wertheim 1958: 223). Dalam kondisi yang tidak teratur itu, tidak mengherankan jika banjir menjadi salah satu ciri umum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kebanyakan di Jakarta pada tahun 1950-an. Bagi “orang suse” banjir tidak hanya

mengakibatkan “bale basah, pat-tidur lepek” melainkan juga membawa sampah ke dalam rumah termasuk “segale pisang goreng”, dalam bahasa humor Firman Muntaco pada rubrik “Tjerman Djakarta”-nya (Muntaco 2006).

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak Jakarta pun sulit menemukan tempat bermain, dan mereka harus menderita baik secara fisik maupun kejiwaan. Di samping itu, tentu saja nyamuk malaria, bakteri kolera yang dibawa oleh lalat, infeksi tetanus, dan parasit pes yang ditularkan oleh tikus setiap saat mengancam jiwa mereka. Oleh karena itu tidak berlebihan Pramudya Ananta Toer mengatakan dalam karya fiksinya bahwa “anak-anak ini akan mengalami masa kehilangan masa kanak-kanak, masa kanak-kanaknya sendiri. Kanak-kanak Jakarta yang tak punya lapangan bergerak, tak punya lapangan bermain, tak punya daerah perkembangan kejiwaan, menjurus dari gang dan got, membunuh tiap marga-satwa yang tertangkap oleh matanya. Katak dan ketam dan belut dan burung mengalami likuidasi, di Jakarta! Tetapi nyamuk merajalela, dan cicak dan sampah. Juga mereka ini hidup di alam ketaksenangan. Taman-taman hanya di daerah Menteng dan perkampungan baru. Engkau tahu, jadi orang apa kanak-kanak semacam ini jadinya di kemudian hari” (Toer 1957).

Penyakit menjadi persoalan serius pada anak-anak orang kebanyakan di Jakarta. Jika sakit, mereka hanya mengandalkan *kerokan*, dukun, atau minyak angin. Kalau harus minum obat, maka sampai akhir abad ke-20 pun mereka tetap bergantung pada jamu atau obat yang dibeli dari warung atau toko obat. Rumah sakit, dokter, dan apotek merupakan kemewahan atau keterpaksaan, dan hanya Puskesmas yang menjadi unit kesehatan terdekat dalam kehidupan sehari-hari orang kebanyakan Jakarta (Houweling 2002). Tidak mengherankan jika pada tahun 2005, biaya berobat di Puskesmas Setia Budi sebesar Rp 4000 pun tidak mampu dibayar oleh seorang pemulung di Jakarta, sehingga anaknya yang terserang muntaber meninggal dunia di atas gerobak yang biasa digunakan sehari-hari untuk mengumpulkan barang-barang bekas (KCM www.kompas.com 7 Juni 2005)

Di tengah-tengah kemiskinan itu, bagi para pria orang kebanyakan yang “tidak beruntung”, menjadi tukang becak merupakan pilihan terbaik di ibukota. Dalam bahasa imajinatif Utuy Tatang Sontani yang menggambarkan kehidupan sehari-hari Jakarta antara tahun 1961 sampai 1963, “aku tahu, setiap yang datang disini mau menyewa becakku adalah orang yang baru datang dari udik, orang yang tidak punya tempat tinggal.

tidak punya apa-apa untuk dijadikan pegangan” (Sontani 1964: 7). Kesulitan hidup di Jakarta telah mengakibatkan “demi uang manusia sedia jadi kuda”, menarik becak menggantikan delman dan angkutan publik sejenis yang sebelumnya menguasai transportasi di Jakarta sebelum dan selama perang (Toer 1957). Jakarta setelah perang benar-benar dipenuhi oleh laki-laki migran yang menjadi tukang becak. Padahal dalam bahasa imajinatif Pramudya Ananta Toer, “beberapa bulan kemudian paha para pria ini menjadi begitu penuh sesak dengan otot yang terlampau banyak dipaksa kerja. Tiap minggu mereka menelan telur ayam mentah...beberapa tahun kemudian ia “ngejengkan” di balenya karena jantungnya menjadi besar, desakan darahnya meninggi: ia invalid-puluhan! ratusan ribu! Kembali ke kampung sebagai sampah...jumlah kurban ini banyak daripada kurban revolusi bakalnya” (Toer 1957). Jika memiliki uang, para penarik becak itu akan “membual tentang kepelesiran” dan “apakah pula anehnya tukangbecak yang suka main domino” (Toer 1957; Sontani 1964).

Sementara itu bagi para perempuan migran yang “tidak beruntung”, menjadi pelacur merupakan nasib yang terpaksa harus dijalani. Seperti Onih bersama Sapar dan Aminah bersama Diman dua pasang pelacur dan tukang becak dalam karya fiksi “Si Sapar” tulisan Utuy Tatang Sontany dan “Berita dari Kebayoran” dalam buku “Cerita dari Jakarta” tulisan Pramudya Ananta Toer, para perempuan pelacur secara nyata mengisi kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta sejak lama. Walaupun merupakan sebuah karya fiksi, puisi yang ditulis oleh W.S. Rendra pada tahun 1967 juga secara jelas menunjukkan peran penting baik pelacur jalanan maupun pelacur “tingkat tinggi” Jakarta dalam sejarah kehidupan sehari-hari masyarakat ibukota. Dalam bahasa imajinatif yang tersusun rapi dalam karya berjudul “Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta” itu, Rendra secara jelas menggambarkan “bagaimana para pemimpin revolusi/secara bergiliran memelukmu/bicara tentang kemakmuran rakyat dan api revolusi/sambil celananya basah/dan tubuhnya lemes/terkapai di sampingmu/politisi dan pegawai tinggi/adalah caluk yang rapi/kongres-kongres dan konperensi/tak pernah berjalan tanpa kalian” (Rosidi 1972), sesuatu yang tidak banyak berbeda dengan gambaran yang ada pada dokumen atau karya ilmiah hasil penelitian (Murray 1994; Hull 1999).

Pelacur, tukang becak, pemulung, gelandangan, maling, copet, dan pelaku kegiatan non-formal lainnya seolah-olah sebuah komunitas yang tidak terpisahkan dalam

kehidupan sehari-hari masyarakat miskin kota di Jakarta sejak masa kolonial sampai akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21. Para pencopet memenuhi trem-trem yang melintasi jalur Tanah Abang sampai Pasar Ikan lewat Hayam Wuruk-Glodok dan sepanjang jalan sekitar Pasar Senen dan Kramat pada 1950-an, yang bukan hanya memakan korban "Haji Jalal" yang kaya dalam imajinasi Firman Muntaco melainkan juga gaji yang baru diterima "Tinah", gadis kecil yang terpaksa berhenti sekolah di kelas empat untuk bekerja dalam narasi rekaan S.M. Ardan (Muntaco 2006; Ardan 2007). Di kampung-kampung atau stasiun kereta api sekitar Bukit Duri dan Manggarai yang kumuh, para pedagang jalanan dan pelacur dari kota Jakarta yang semakin penuh sesak dan gemerlap tetapi tetap penuh dengan kekumuhan itu, menjalani kehidupan hari demi hari mereka (Murray 1994). Sebuah kehidupan sehari-hari yang tidak banyak berbeda dengan kehidupan para gelandangan dan pelacur seperti yang terekam pada foto-foto koleksi KITLV-Leiden yang diambil pada tahun 1947. Para gelandangan perempuan seolah-olah identik dengan pelacur perempuan, yang hidup dalam kebebasan palsu sambil membesarkan anak mereka di antara gerbong-gerbong kosong di sebuah stasiun kereta api tua di Koningsplain (KITLV 1947). Sebagian perempuan itu memiliki suami baik yang sah maupun tidak menurut agama dan hukum, atau sekedar laki-laki yang berfungsi sebagai "manusia galak" yang akan melindungi dan sekaligus memeras mereka (Toer 1952; Suparlan 1974; Murray 1994).

Akan tetapi ternyata tidak semua pelacur dapat dihubungkan begitu saja dengan kemiskinan dan kekumuhan. Walaupun "kelaparan yang menakutkan/kemiskinan yang mengekang/dan telah lama sia-sia cari kerja" merupakan faktor yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan para pelacur perempuan itu dalam bahasa imajinatif W.S. Rendra, sebagian *callgirl* yang biasa beroperasi di lobi-lobi hotel ternyata merupakan orang berpenghasilan paling tinggi di Jakarta menurut laporan wartawan sebuah berita mingguan pada akhir tahun 1960-an. Menurut keterangan polisi, tidak kurang dari 10 juta rupiah per bulan berhasil dikumpulkan oleh seorang "pelacur tingkat tinggi" di Jakarta pada waktu itu (Selecta 30 September 1968). Bahkan di kalangan pelacur jalanan pun, pendapatan harian rata-rata mereka pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an ternyata paling tinggi dibandingkan dengan kelompok orang miskin lainnya menurut sebuah penelitian ilmiah. Pendapatan rata-rata pelacur berjumlah Rp 800 per hari,

sementara itu guru yang berada pada posisi kedua hanya menerima Rp 360. Pendapatan rata-rata pelacur juga jauh di atas penarik becak dan buruh harian di Jakarta, yang masing-masing per hari hanya mendapat Rp 230 dan Rp 180 atau bahkan kurang (Selecta 14 April 1969; Sumardi 1980).

Dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan yang dialami orang kebanyakan tidak hanya terbatas dengan kehidupan melainkan juga dengan kematian. Walaupun tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah Jakarta untuk sepetak tanah kuburan di Karet Bivak berjumlah Rp 450 sampai Rp 550 pada awal tahun 1970-an, dalam kenyataannya masyarakat harus membayar mulai dari Rp 2500 sampai Rp10.000, belum termasuk pungutan-pungutan lainnya. Bahkan bagi mereka yang beragama Kristen baik Protestan maupun Katholik biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan lahan kuburan bisa mencapai Rp 50.000 (Tempo 12 Mei 1973). Keadaan itu mengakibatkan ada keluarga yang terpaksa menyimpan mayat tidak dikubur selama beberapa hari, sampai jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar biaya penguburan berhasil didapatkan. Tidak mengherankan jika kemudian terjadi peristiwa ketika masyarakat membawa mayat ke balai kota sebagai tanda protes ketidakmampuan orang kebanyakan membiayai penguburan warganya yang meninggal dunia. Setelah dikubur pun, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan digusur atas nama pembangunan dan penertiban, seperti juga yang terjadi pada mereka yang masih hidup (Tempo 12 Mei 1973, 14 Januari 1978, 4 Februari 1978, 19 Mei 1979). Satu demi satu kuburan keluarga mereka menghilang, diganti oleh kuburan-kuburan baru dari mereka yang keluarganya mampu membayar ganti rugi tanah dengan harga yang mahal. Ketika lokasi kuburan dianggap strategis untuk kepentingan ekonomis atau perumahan elite, dalam sekejap lokasi kuburan akan dinyatakan ditutup untuk segera diserahkan kepada para pemilik modal yang sudah menjanjikan uang yang banyak, baik kepada pemerintah daerah maupun pribadi para birokrat.

Kenyataan seperti di atas ternyata terus berulang dalam kehidupan sehari-hari orang kebanyakan di Jakarta pada awal abad ke-21, ketika Supriono harus menggondong kesana kemari mayat anak perempuannya bernama Khaerunisa yang berumur 3 tahun karena tidak mampu membayar ambulans yang akan membawa mayat anaknya ke Bogor untuk dikuburkan. Atas kebaikan hati warga Manggarai Utara VI yang sebagian besar

tinggal di bantaran anak Sungai Ciliwung, biaya pemakaman sebesar Rp 350.000 dan biaya pembelian kain kafan beserta keperluan lain sebesar Rp 250.000 berhasil dikumpulkan. Akhirnya setelah meninggal lebih dari 24 jam, mayat Khaerunisa berhasil dimakamkan di bagian paling belakang yang masih ditumbuhi rumput ilalang yang tinggi di Taman Pemakaman Umum Karet Pulo Jakarta Selatan (KCM, www.kompas.com: 9 Juni 2005).

Keberingasan Kotagede

Sejarah kekerasan di Kotagede pada akhir masa kolonial paling tidak dapat dirunut ke belakang pada masa penjajahan Jepang, ketika masyarakat Kotagede harus berhadapan dengan perubahan baik yang terjadi secara internal maupun perubahan yang terjadi di luar komunitas mereka. Persoalan yang ada tidak hanya menyangkut kesulitan ekonomi, melainkan situasi yang ada telah menimbulkan ketegangan dan ketidakteraturan sosial di dalam masyarakat Kotagede.

Di Mutihan dan Singosaren yang menjadi lokasi sebagian besar tanah pertanian sebagai contoh, beberapa orang baik dari dalam maupun luar Kotagede dianiaya secara kejam dan bahkan dibunuh di tempat karena penduduk lokal berhasil menangkap mereka pada saat sedang mencuri jagung, padi, atau ketela. Sepasang suami istri juga dibunuh ketika mereka sedang memetik daun ketela di kebun milik penduduk Kotagede. Sementara itu beberapa kasus yang hampir sama juga terjadi di pasar Kotagede. Bukti yang ada menunjukkan cukup banyak orang yang dipukul dengan kejam dan bahkan dibunuh karena dicurigai atau dituduh mencuri makanan, pakaian dan termasuk barang-barang yang sangat tidak berharga. Di samping itu, dua toko milik orang Cina di dekat pasar juga dirampok, dan mereka tidak diperkenankan meneruskan bisnisnya setelah itu.

Kehidupan ekonomi penduduk Kotagede yang masih cukup baik pada masa itu ternyata menjadi daya tarik bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau orang-orang lapar dari luar untuk datang ke Kotagede. Terdapat banyak kasus dilaporkan tentang tindakan penduduk memindahkan mayat atau orang sekarat yang tidak teridentifikasi dari dalam wilayah mereka ke dalam batas wilayah yang lain. Sebagai respon terhadap hal itu, penduduk wilayah yang lain juga melakukan hal yang sama. Akibatnya, terdapat bukti yang menunjukkan tindakan penduduk Kotagede menarik

tubuh orang sekarat dari satu tempat ke tempat lain berkali-kali di jalan, dan kemudian ditinggalkan begitu saja sampai akhirnya korban meninggal dunia. Bukti lain menunjukkan orang sekarat atau mayat dibiarkan berhari-hari tanpa perhatian, atau bahkan penduduk dari kampung-kampung yang berbeda saling berkelahi terlebih dahulu untuk menghindari beban merawat orang sekarat atau mayat itu.

Keadaan yang tidak kalah menyedihkan juga terjadi di pasar Kotagede, tempat banyak orang dari luar wilayah itu menggunakannya sebagai tempat tinggal mereka sementara. Bagi orang sakit yang tidak memiliki teman atau keluarga, mereka biasanya diusir dari tempat itu. Sedangkan mereka yang sekarat biasanya dibawa keluar dari pasar karena para pendatang sementara, pedagang, dan penduduk di sekitarnya tidak ingin terbebani jika orang itu meninggal dunia. Selain itu, beberapa orang kaya di Kotagede, terutama di kalangan para pelepas uang memanfaatkan kesulitan yang sedang melanda masyarakat luas pada waktu itu untuk keuntungan ekonomis mereka pribadi. Para pelepas uang itu hanya memberikan uang, makanan atau pakaian yang sedikit kepada orang-orang yang datang kepada mereka, tidak sebanding dengan nilai rumah, tanah, dan perhiasan yang diserahkan. Selain penduduk Kotagede yang sedang mengalami kesulitan ekonomis, banyak penduduk dari luar Kotagede yang juga menjual atau sekedar menggadaikan harta benda berharga mereka kepada para pelepas uang itu.²

Walaupun Kotagede relatif aman seperti juga sebagian besar wilayah di Yogyakarta pada awal kemerdekaan, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pencurian dan perampokan di Kotagede terus meningkat, terutama sejak Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia dan pusat perjuangan. Beberapa keluarga kaya di Kotagede melaporkan bahwa mereka telah dirampok atau mendapat ancaman secara reguler dari para kriminal, baik dari penduduk setempat maupun pendatang. Kasus yang sama dilaporkan oleh para pedagang, penduduk biasa, dan kusir andong yang melewati

² Bukti-bukti itu jangan diinterpretasi secara berlebihan untuk menyatakan bahwa semua orang di Kotagede tidak memiliki kepedulian sosial terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu, karena beberapa bukti juga menunjukkan bahwa Muhammadiyah secara rutin melakukan berbagai aksi sosial untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Satu hal yang ingin dikatakan dalam tulisan ini bahwa pendudukan Jepang telah menimbulkan ketidakseimbangan sosial dan intoleransi di dalam masyarakat Kotagede, sesuatu yang ternyata tidak hilang begitu saja ketika Indonesia telah merdeka.

jalan utama yang menghubungkan Kotagede dengan pusat kota Yogyakarta. Mereka melaporkan tentang sekelompok *grayak* yang secara rutin beroperasi di sepanjang jalan itu ketika hari mulai gelap. Akibatnya, sebagian besar pedagang menghindari perjalanan setelah magrib atau sebelum matahari terbit. Sementara itu banyak kusir yang melayani jalur itu cenderung menolak membawa penumpang dari dan ke Kotagede melalui jalan itu pada malam hari walaupun mereka dijanjikan bayaran yang mahal. Jika mereka sudah terlanjur berada di Kotagede ketika matahari sudah terbenam, para kusir andong itu memilih tinggal di Kotagede sampai pagi berikutnya. Secara perlahan para *grayak* itu bahkan mulai masuk ke dalam kota, baik pada siang maupun malam hari. Bahkan terdapat bukti yang menunjukkan para *grayak* itu tanpa rasa takut mendatangi rumah penduduk dari pintu ke pintu, kemudian memaksa penduduk memberi uang atau menyerahkan barang-barang berharga. Hal itu tentu saja kemudian mengundang reaksi dari penduduk Kotagede untuk melakukan pengamanan terhadap wilayah mereka.

Para laskar yang berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda dan selalu bertentangan secara politis memainkan peranan unik berkaitan dengan masalah keamanan itu. Pada satu sisi mereka ternyata dapat bekerjasama melindungi penduduk Kotagede dari ancaman para kriminal dan kekacauan sosial lainnya pada awal kemerdekaan. Namun di sisi yang lain terdapat juga bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka di dalam ketidakteraturan di Kotagede pada masa itu. Laskar terbukti berhasil menangkap beberapa orang perampok, akan tetapi mereka menerapkan tindakan yang berbeda terhadap para perampok itu. Berdasarkan salah satu bukti yang berhasil dikumpulkan, dari sepuluh kasus penangkapan terhadap perampok, hanya dua orang yang dibawa ke polisi dan kemudian diadili. Sementara perampok yang lain hilang tanpa bekas. Sebuah informasi menyatakan bahwa para perampok itu dibunuh oleh laskar, sedangkan informasi yang lain menyebutkan bahwa sebagian dari para perampok itu dilepas begitu saja karena merupakan bagian dari kelompok mereka.

Diantara penduduk Kotagede yang menjadi korban aksi kriminal itu, para keluarga Kalang yang kaya merupakan kelompok yang paling menderita. Sebagai kelompok yang berhasil secara ekonomis, para keluarga Kalang tidak hanya menguasai bisnis pegadaian, usaha kerajinan, tekstil, dan transportasi melainkan juga aktivitas ekonomi Kotagede secara keseluruhan. Para keluarga Kalang itu dikenal sebagai orang

bumiputera pertama di Jawa yang memiliki mobil Roll Royces, berkeinginan untuk mendekorasi lantai ruang resepsi terbukanya dengan ribuan koin *rix-dollar* sebelum dilarang oleh pemerintah kolonial, keluarga yang mampu meminjamkan banyak uang kepada para bangsawan keraton, memiliki lebih dari 10 balok emas sebesar kaleng minyak tanah, dan mendekorasi ruang tamunya dengan setandan pisang yang terbuat dari mas murni. Namun seperti juga orang Cina di Indonesia, para keluarga Kalang itu tidak pernah dianggap sebagai pribumi di Kotagede. Mereka harus menerima kenyataan selalu dianggap sebagai orang asing di kota yang telah menjadi tempat tinggal mereka dari generasi ke generasi.

Perampokan terhadap keluarga Kalang yang kaya terjadi di rumah Projodrono dan Prawiro Soewarno, yang dikenal dengan nama panggilan Tembung. Orang yang terakhir dikenal sebagai raja rumah gadai, yang memiliki rumah gadai baik di dalam maupun di luar Kotagede. Ia memiliki beberapa rumah di Kotagede, dan salah satunya adalah bangunan layaknya sebuah istana. Perampokan pertama terjadi pada hari Rabu, beberapa hari sebelum aksi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Beberapa orang yang melumurkan muka mereka dengan lumpur dan berpakaian sipil serta militer, pada siang hari tanpa ragu-ragu memasuki rumah kedua korban dan membawa pergi barang berharga yang banyak. Kedua korban kemudian melaporkan kasus perampokan itu kepada komandan militer yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Kotagede, sekaligus mengidentifikasi para perampoknya. Laporan itu tidak mendapat perhatian, sehingga tidak ada tindakan dari penguasa militer setempat untuk melakukan penyelidikan. Hal itu dapat dijelaskan karena pemimpin tentara di Kotagede itu tidak ingin berhadapan langsung dengan sesama rekan pejuang yang diidentifikasi oleh pemilik rumah sebagai pelaku perampokan.

Keputusan untuk tidak menyelidiki kasus perampokan itu mendorong terjadinya perampokan kedua, beberapa hari setelah kota Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Pada kasus yang kedua, para perampok dalam jumlah yang besar hanya merampok rumah Tembung. Selain membawa pergi uang dan perhiasan dalam jumlah yang sangat banyak, para perampok juga membawa pergi tidak kurang dari 15 batang emas murni sebesar kaleng minyak tanah, dekorasi berbentuk sepasang gula jawa terbuat dari emas murni, setandan pisang terbuat dari emas murni, dan berusaha membunuh pemilik rumah namun

gagal. Para perampok dengan mudah menghilang melalui sungai, dan meninggalkan *safety box* sepanjang tepi sungai.

Berbeda dengan perampokan pertama, pemimpin tentara dan laskar di Kotagede melakukan penyelidikan terhadap kasus perampokan setelah para perampok secara terbuka menyatakan akan menggunakan hasil rampokan untuk membiayai perjuangan melawan aksi militer Belanda. Selain itu penduduk setempat juga berusaha mencari peruntungan, karena pemilik rumah menjanjikan akan memberi imbalan kepada setiap orang yang berhasil mengembalikan harta benda mereka. Dalam kenyataannya tidak ada seorang perampok pun yang berhasil ditangkap, namun sebagian harga benda milik keluarga Kalang itu ditemukan tersimpan di atas pohon kelapa di luar Kotagede, termasuk di wilayah Gunung Kidul sekitar 25 kilometer sebelah selatan Kotagede.

Segera setelah perang berakhir, beberapa penduduk Kotagede secara tiba-tiba menjadi kaya dan berperilaku aneh. Salah seorang yang dicurigai sebagai perampok memiliki kebiasaan memakan enam telur goreng setiap kali makan, sedangkan penduduk yang lain mulai membuka usaha kerajinan yang memerlukan modal besar. Padahal sebelumnya, mereka dikategorikan sebagai kelompok buruh dan petani dengan tingkat kemampuan ekonomi yang rendah. Tidak mengherankan jika ada yang berpendapat bahwa sebagian interprenur yang berhasil di Kotagede kemudian memulai bisnis mereka dari harta benda yang di curi dari keluarga Kalang yang kaya pada awal kemerdekaan.

Biarpun sebagian keluarga Kalang yang kaya di Kotagede luput dari perampokan sampai perang berakhir, perampokan yang dialami keluarga Kalang yang lain meninggalkan pengalaman traumatik pada kelompok ini. Mereka menemukan rumah mereka yang bagus di Kotagede telah menjadi tempat tinggal tentara Belanda selama perang, dan kemudian diambil alih oleh tentara Indonesia. Ketika rumah-rumah itu dikembalikan, para keluarga Kalang menjual hampir seluruh rumah mereka di Kotagede. Secara perlahan-lahan mereka mulai meninggalkan Kotagede, menyebar ke berbagai kota lain baik di dalam maupun di luar wilayah Yogyakarta, dan tidak pernah kembali. Keluarga Tembong pindah ke selatan ke wilayah santri lain di Wonokromo Bantul, tempat keluarga ini mendirikan sebuah perusahaan bus pada tahun 1950-an.

Kekerasan dan Kriminalitas Masyarakat Perkotaan Dalam Perkembangan Jaman

Makalah, disampaikan pada
Diskusi Sejarah
"Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif
Sejarah"

Oleh : Kapolda M. Brigjen Pol. P. Ak. Haril Anwar

1. Pendahuluan

Perkembangan kota-kota di Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini meningkat sejalan dengan meningkatnya perkembangan perekonomian pada sektor-sektor tertentu, misalnya pariwisata, pendidikan, perdagangan, pertambangan, dan perindustrian. Selain sektor perekonomian diatas, pesatnya proses modernisasi industrialisasi, komersialisasi dan edukasi yang terpusat di kota-kota besar telah menjadi faktor penggerak perubahan perkembangan kota-kota di Indonesia.

Di Indonesia kita mempunyai beberapa kota besar yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang lebih pesat bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kota-kota tersebut diantaranya adalah Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar, Semarang Bandung dan Yogyakarta.

Perkembangan Kota-kota besar antara satu dengan yang lainnya juga disebabkan karena fungsi atau keberadaan kota tersebut sebagai suatu pusat kegiatan tertentu. Perkembangan pesat Kota Jakarta karena merupakan Ibu Kota Negara, pusat perdagangan dan jasa juga pusat Industri, demikian juga halnya dengan Yogyakarta. Perkembangan Kota disebabkan karena nilai historis atau sejarah kota Yogyakarta itu sendiri dan juga ikon Yogyakarta sebagai kota wisata, pusat kebudayaan dan juga sebagai kota pelajar

Semakin pesat berkembangnya suatu kota akan mengakibatkan
/semakin..

semakin bertambahnya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Misalnya semakin padatnya pemukiman karena meningkatnya jumlah penduduk, perlunya menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum, penyediaan lapangan kerja, dan lain-lain. Apabila permasalahan – permasalahan itu tidak ditangani dengan maksimal akan mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan sosial seperti kriminalitas.

Meskipun secara kuantitas tingkat kejahatan di Kota-kota besar di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan, *tetapi secara kualitas modus kejahatan yang digunakan mengalami perubahan yang semakin beraneka ragam*. Bila dahulu tindak kejahatan yang dilakukan masih bersifat konvensional seperti kita kenal istilah begal, garong tetapi saat ini tindak kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan sudah sangat canggih seperti White colour crime, Cyber Crime, Traficcking, Money Laundryng, Terorism dll.

2. Permasalahan

Sejarah kriminalitas terjadi ketika masyarakat harus berhadapan dengan perubahan baik yang terjadi secara internal maupun perubahan yang terjadi di luar komunitas. Banyak faktor yang sebetulnya menyebabkan terjadinya tindak Kriminalitas dan kejahatan selain niat dan kesempatan, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, semakin meningkatnya kebutuhan yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pendapatan, ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan dan rezim, itu semua merupakan beberapa sebab mengapa kriminalitas dan kejahatan selalu ada.

Satu pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita adalah *mengapa kriminalitas selalu ada ? Benarkah kriminalitas dan kejahatan masyarakat perkotaan semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan perkembangan jaman ?*

Disadari atau tidak berkembangnya dan berubahnya suatu peradaban akan berakibat terhadap perubahan pola-pola perilaku masyarakat itu sendiri, selain tentunya merubah tatanan kehidupan yang

/telah...

telah ada. Pembangunan yang sedang dilaksanakan dan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, tidak serta merta akan membawa kebaikan bagi setiap orang, pembangunan akan senantiasa membawa dampak baik positif maupun negative.

Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan yang tidak diimbangi dengan bertambahnya jumlah lapangan dan kesempatan kerja akan menyebabkan terjadinya berbagai macam persaingan dan semakin tingginya angka pengangguran, bila jumlah penganggur semakin bertambah sementara lapangan kerja susah diperoleh maka akan berdampak pada timbulnya masalah-masalah sosial.

Salah satu masalah sosial yang timbul sebagai akibat semakin berkembangnya daerah perkotaan adalah kriminalitas. Jika saat ini banyak terjadi berbagai tindak kriminalitas yang dilakukan kaum urban dikarenakan tidak ada cara lain bagi penduduk miskin dan pengangguran untuk mempertahankan hidupnya selain melakukan kejahatan. Dan yang gampang dilakukan adalah melakukan kejahatan jalanan seperti merampok, menodong, menjambret dan mencuri. Kriminolog Marshall B Clinard (1975) dan Harvey Blummer (1981) mengatakan krisis ekonomi yang melanda sebagian besar penduduk miskin di kota Negara sedang berkembang karena over urbanization merupakan faktor utama lahirnya berbagai tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh penduduk golongan bawah di perkotaan.

3. Pembahasan

A. Era Orde Lama

Berakhirnya kolonialisme di Negara kita dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 telah menjadi sejarah dimulainya babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara bisa dikatakan bangsa kita masih mencari bentuk Negara yang ideal. Pergantian beberapa kali sistem ketatanegaraan mencerminkan kehidupan politik pada masa ini.

/Kriminalitas...

Kriminalitas dan kejahatan, yang terjadi pada masa ini disebabkan bukan hanya karena masalah ekonomi, melainkan juga disebabkan karena situasi yang ada telah menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan social didalam masyarakat sebagai akibat penjajahan Belanda dan Jepang. Jenis kejahatan yang terjadi pada masa ini merupakan kejahatan umum seperti pencurian, pemukulan, perampokan, pembunuhan. Kriminalitas dan kejahatan terjadi karena adanya kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya. adapun pelaku yang melakukan kejahatan selain berasal dari dalam kota itu sendiri ataupun para pendatang. Wilayah-wilayah pinggiran kota awal-awalnya merupakan daerah yang aman, tetapi terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pencurian dan perampokan di wilayah itu terus meningkat sejalan dengan perkembangan ibu kota itu sendiri.

B. Era Orde Baru

Modus kejahatan dan tindak kriminalitas yang dilakukan masyarakat pada awal tahun era ini tidak begitu berbeda dengan tindak kriminalitas dan kejahatan yang dilakukan era sebelumnya. Kejahatan dan kriminalitas terjadi karena masalah-masalah ekonomi yang disebabkan karena kondisi perekonomian diawal era ini sangat memprihatinkan sebagai dampak masih belum stabilnya situasi politik dan keamanan.

Kriminalitas dan kejahatan yang paling menonjol pada masa ini terjadi pada sekitar tahun 80-an keatas. Hal ini dapat dimengerti karena pada sekitar tahun tersebut kehidupan perekonomian kita mulai menunjukkan perubahan yang berarti. Pertumbuhan di bidang ekonomi tersebut sekaligus berpengaruh terhadap berkembangnya kota-kota besar di Indonesia khususnya kota industri, semakin terbukanya lapangan kerja dan kesempatan kerja di beberapa kota besar tersebut semakin menimbulkan daya tarik masyarakat untuk /datang...

datang dan mengadu nasib mencari kehidupan yang lebih baik. Seiring dengan Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota pada masa ini permasalahan kriminalitas dan kejahatan juga mulai meningkat secara kualitas dan kuantitas, perampokan yang disertai pembunuhan, pencurian dan perusakan, penipuan dan kejahatan lainnya mulai marak terjadi. Penyebab Tindak kriminal dan kejahatan yang terjadi karena terjadinya berbagai permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi. Semakin meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan dan pembunuhan menyebabkan Pemerintah melakukan tindakan tegas dengan melakukan perintah tembak ditempat kepada para pelaku Kriminal dan kejahatan pada masa itu dimana hal itu sebetulnya tidak kita kehendaki bersama. Selain kejahatan konvensional yang dilakukan, pada masa ini juga mulai muncul bentuk-bentuk kejahatan lain. Kampanye Pemilihan umum yang dilakukan dengan cara memobilisasi massa secara besar-besaran merupakan salah satu kerawanan dalam kriminalitas dan kejahatan. Konflik antara pendukung partai yang satu dengan yang lainnya sangat sering terjadi. bekal yang dibawa peserta kampanye juga banyak berupa alat-alat yang sangat membahayakan seperti parang, golok, batu, bambu runcing dll.

C. Era Reformasi

Semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada saat ini semakin luas pula cakrawala pandang dan hubungan masyarakat di berbagai Negara. Kejadian yang terjadi pada suatu Negara dibelahan bumi lain dalam waktu singkat bisa kita lihat, dunia seolah-olah menjadi tanpa batas. Teknologi informasi bisa dikatakan merupakan suatu kebutuhan pada saat ini.

Selain memberikan sisi positif, Berkembangnya Teknologi informasi yang sedemikian pesat tersebut juga memberikan sisi negatif, sisi

/negatif..

negative dari pesatnya perkembangan teknologi ini adalah semakin berkembangnya juga modus-modus kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media informasi dan komunikasi, seperti penipuan, terror, dan lain-lain.

Selain bentuk kejahatan diatas, Salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak dilakukan pada era reformasi yang melibatkan orang terdidik dari masyarakat kelas menengah ke atas adalah kejahatan kerah putih (white colour crime) termasuk didalam kategori ini adalah tindak pidana korupsi dimana biasanya kasus ini diikuti dengan kasus "money laundering" atau kejahatan pencucian uang yang dilakukan melalui suatu kejahatan yang terorganisir (organized crime).

Berikut ini adalah merupakan kejadian kejahatan yang terjadi di wilayah Polda DIY dalam 5 tahun terakhir.

NO	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2001	3199	Kejahatan yg srg terjadi: - Curanmor - Curat - Curas - Penggelapan - Penipuan - Penganiayaan
2	2002	2420	
3	2003	2664	
4	2004	3476	
5	2005	2945	

/4. Kesimpulan...

4. Kesimpulan.

Semakin pesat perkembangan suatu kota akan berakibat pada semakin banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi apabila tidak terselesaikan akan menimbulkan berbagai masalah-masalah social diantaranya adalah kriminalitas dan kejahatan.

Dari tahun ke tahun pelaku kejahatan dan modus kejahatan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan jaman. Pada masa Orde lama kejahatan yang dilakukan masyarakat masih berupa kejahatan dan tindak kriminalitas umum yang dilakukan oleh masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi. Pada tahun-tahun selanjutnya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sudah mengalami perubahan baik modus maupun pelakunya diantaranya dilakukn oleh orang-orang yang emmpunyai jabatan dengan tingkat pendidikan yang cukup.

Pada era reformasi kaulalitas kejahatan yang dilakukan pelaku tindak criminal sudah sangat canggih dengan memanfaatkan berkembangnya media informasi dan komunikasi dan salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat adalah kejahatan kerah putih/ white colour crime, illegal logging, cyber crime, terorism dll.

KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KAWASAN PUSAKA BUDAYA POTENSI DAN PERMASALAHANNYA

Oleh
Inajati Adrisijanti
Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM

Disajikan dalam

Diskusi "Kota dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah

Diselenggarakan oleh

BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA

Yogyakarta 11 -12 April 2007

KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KAWASAN PUSAKA BUDAYA POTENSI DAN PERMASALAHANNYA

Oleh:
Inajati Adrisijanti
Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM

I. Latar belakang dan Permasalahan

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota kuno di Indonesia yang tetap hidup, bahkan makin hari makin berkembang, baik dalam segi kehidupan masyarakatnya maupun segi spasialnya. Pada waktu berdirinya, kota Yogyakarta berperan sebagai kota pusat pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlangsung terus sampai 17 Agustus 1945. Sebagaimana tertulis dalam catatan sejarah, pada waktu itu Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan, dan diikuti pernyataan Sultan Hamengku Buwono IX untuk menyatukan diri dengan negara yang baru berdiri ini. Kemudian kota Yogyakarta sementara beralih status dari kota pusat pemerintahan kesultanan menjadi ibukota Republik Indonesia, dan pusat revolusi Indonesia. Setelah itu Yogyakarta menjadi ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dikenal luas sebagai kota pendidikan tinggi serta salah satu pusat kebudayaan Jawa. Sungguh suatu dinamika yang menarik.

Berbagai aspek yang menarik perhatian itulah yang menyebabkan banyak ahli yang membahas kota Yogyakarta dari sudut pandang keahlian masing-masing. Ada yang membahas dari sudut pandang sejarah, dari sudut pandang politik, ada yang mengupas arsitektur, ada yang mengupas aspek sosiologis, kehidupan seni, dan masih banyak yang lain. Kota Yogyakarta memang suatu kota yang mempunyai banyak aspek untuk dibahas dan dikupas. Maka dari itu, dalam kesempatan ini akan dicoba untuk mengupas potensi dan masalah yang muncul berkaitan dengan status kota Yogyakarta sebagai kawasan pusaka budaya.

Beberapa pengertian :

1. Kota adalah permukiman yang permanen, relatif padat, penduduknya heterogen, mempunyai bangunan-bangunan untuk memwadhahi berbagai macam kegiatan penduduk (Kostof, 1991: 37-38). Kota juga mempunyai hubungan erat dengan daerah hinterland di sekitarnya.
2. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya (Piaqam Pelestarian Pusaka Indonesia, 2003: Kesepakatan)
3. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang melingkupi aglomerasi wilayah yang memiliki benda atau bangunan cagar budaya dan mempunyai karakteristik serta kesamaan latar belakang budaya dalam batas geografis yang ditentukan dengan deliniasi fisik dan non fisik (Perda Prov. DIY no. 11 tahun 2005 ps. 1 ayat 6)
4. Benda Cagar Budaya adalah:
 - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
 - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka muncul pertanyaan—pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa potensi dan permasalahan di Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana meningkatkan potensi dan mengatasi permasalahan yang ada?
3. Bagaimana sosialisasi tentang potensi dan permasalahan Kota Yogyakarta?

II. Gambaran Potensi dan Permasalahan

a. Dari hutan menjadi kota

Secara substansial Kraton Yogyakarta diakui keberadaannya sejak ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 21 Jumadil Awal 1680 J = 13 Februari 1755 TU oleh Sunan Paku Buwana III dan Pangeran Mangkubumi. Akibat langsung dari hal itu adalah pengangkatan Pangeran Mangkubumi menjadi penguasa pertama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tidak lama kemudian Sri Sultan memerintahkan untuk membangun kraton dengan berbagai macam sarana-prasarana, untuk mewadahi aktivitas pemerintahan.

Kraton Yogyakarta dibangun di kawasan hutan Beringan, dan sementara itu sultan beserta kerabatnya tinggal di Pesanggrahan Ambarketawang (Gamping). Setelah kraton selesai dibangun pada tanggal 13 Sura 1682 J = 7 Oktober 1756 TU Sultan pindah ke kraton (Adrisijanti ed., 2003: 28). Pada perkembangan selanjutnya Sultan Hamengku Buwana I dan para penerusnya melakukan pengembangan-pengembangan, baik fisik maupun lingkungan, sesuai dengan kebutuhan dan konteks zamannya.

Lingkungan binaan yang mereka perintahkan untuk dibuat difungsikan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup dan mewadahi berbagai aktivitas pemerintahan, baik berupa kegiatan politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun empat tinggal. Tampaknya lingkungan binaan itu keberadaannya selain memenuhi aspek fungsi juga didasari unsur estetika, etik, simbol, dan filosofis-religius.

Sementara itu, orang-orang asing (Belanda, Cina) mulai datang dan bermukim di kota Yogyakarta. Demikian juga terjadi perubahan dalam hal politik, dengan pembagian wilayah antara Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Kedatangan orang-orang Belanda ke kota Yogyakarta makin banyak seiring dengan maraknya aktivitas perkebunan dan pabrik di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut juga mendorong dibuatnya sarana-prasarana baru pada masa itu.

b. Potensi

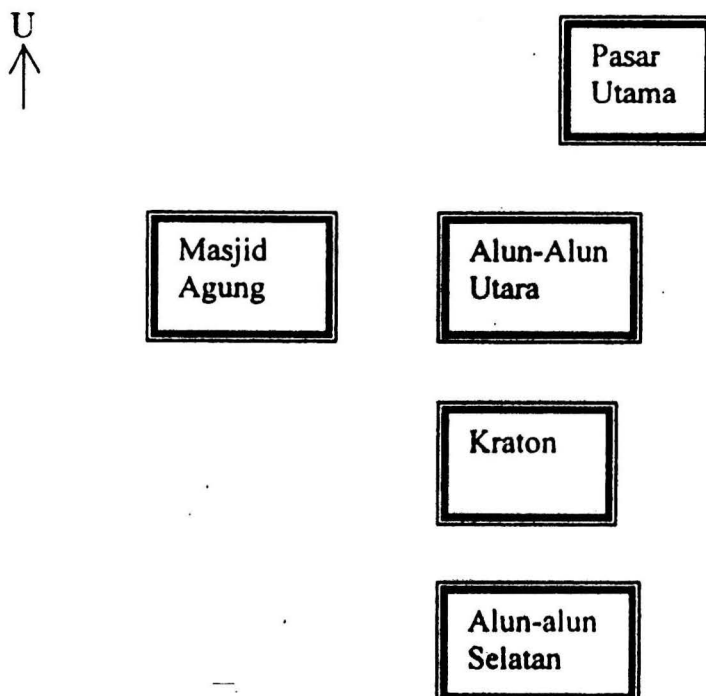
Kota Yogyakarta adalah salah satu kota kuno di Indonesia yang sebenarnya secara spasial dapat dirunut tahap-tahap perkembangannya, mulai dari bagian yang paling kuno sampai yang muncul pada abad XX, atau bahkan abad XXI. Di sini dapat disaksikan kota yang lahir dengan direncanakan (cf. Elisséeff, 1980:91), mulai dari

pemilihan lokasi sampai rencana tata ruang bagi komponen-komponennya, dari *civic center* sampai permukiman penduduknya.

Civic center dalam hal ini berarti bagian dari kota yang secara spasial menjadi pusat bagi berbagai macam kegiatan masyarakat penghuninya (Kostof, 1992:80-81), di antaranya kegiatan politik, spiritual, ekonomi, pertahanan, dan rekreasi. Bertitik tolak dari teori Kostof ini maka *civic center* kota Yogyakarta kuno secara spasial adalah kawasan kraton dan sekitarnya sampai Kepatihan. Di dalam kawasan itu terdapat bermacam-macam bangunan dan pemukiman penduduk, yang menunjukkan beragam fungsi dan aspek kehidupan masyarakat penghuni Yogyakarta. Bangunan-bangunan dan pemukiman itu tampak ditata dalam suatu pola yang teratur dan unik.

Pola tersebut adalah: Alun-Alun Lor yang merupakan pusat kota dikelilingi oleh beberapa komponen lain, yakni: masjid agung di sebelah barat, kraton di sebelah selatan, pasar di sebelah utara. Di samping itu masih ada lagi Alun-Alun Kidul. Kawasan yang memuat keempat komponen itulah yang disebut *civic center*, artinya pusat kehidupan penduduk kota, karena keempat komponen itu adalah representasi aspek kehidupan sosial, politik, keagamaan, dan ekonomi. Pemukiman penduduk didistribusikan mengelilingi kawasan *civic center*. Biasanya kraton mempunyai pagar keliling tinggi atau benteng yang merupakan representasi aspek pertahanan-keamanan di kota bersangkutan. Ada kalanya benteng juga dibangun mengelilingi kawasan *civic center* atau bahkan seluruh kawasan kota.

Tata ruang itu dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut:



Pemukiman penduduk/perkampungan pada kota-kota kuno itu dapat dilacak keberadaannya dari toponim yang berarti nama tempat. Toponim itu sendiri masing-masing mempunyai arti, misalnya di kota Yogyakarta antara lain ada: Pacinan berarti pemukiman orang-orang Cina, Sayidan berarti pemukiman orang Arab, Gerjen berarti pemukiman penjahit, Dagen berarti pemukiman tukang kayu, Siliran berarti pemukiman abdi dalem *silir* (= urusan lampu), Gamelan berarti pemukiman abdi dalem *gamei* (= pemelihara kuda), Mangkubumen berarti tempat tinggal Pangeran Mangkubumi, Wijilan berarti tempat tinggal Pangeran Wijil, Bugisan berarti pemukiman abdi dalem Prajurit Bugis.

Toponim-toponim di kota Yogyakarta menggambarkan keanekaan profesi, asal, dan lapisan masyarakat penduduk kota Yogyakarta pada masa lalu. Selain itu, dari keberadaan toponim-toponim tersebut dapat dilacak distribusi pemukiman di kota Yogyakarta. Menarik perhatian bahwa toponim-toponim di banyak kota, termasuk di kota Yogyakarta, masih terabadikan sampai saat ini.

Pada *civic center* kota Yogyakarta kuno dapat dilihat tata letak komponen-komponennya yang jika diurutkan dari utara terdapat susunan sebagai berikut. Di sisi utara jalan Malioboro terdapat kompleks Kepatihan, pasar Beringharjo, Alun-Alun Lor, masjid agung, kraton dengan cepurinya, Taman Sari, Alun-Alun Kidul, tembok baluwarti, jaringan jalan, dan pemukiman penduduk termasuk *ndalem-ndalem*. Kemudian di dalam kawasan ini muncul "sisipan" berupa bangunan-bangunan Belanda, yakni kantor dan kediaman residen Belanda (Gedung Agung sekarang), benteng Vredeburg, gereja Margamulya dan Kidul Loji, serta Loji Kecil. Tidak seberapa jauh dari *civic center* ini di utara berdiri Tugu Pal Putih, dan di selatan berdiri Gedhong Panggung / Panggung Krapyak.

Bangunan-bangunan tersebut, termasuk kraton, didirikan dalam waktu yang tidak bersamaan. Sebagai contoh: kraton dibangun pada 1682 AJ (= 1756 TU = Tarikh Umum), sementara Prabayeksa dan Sitinggil Ler baru dibangun pada tahun 1769 TU, Taman Sari mulai dikerjakan tahun 1770, dan Masjid Ageng diresmikan tahun 1773 TU (Ricklefs, 1974: 80,166). Adapun benteng Rustenburg kemudian dinamai Vredeburg selesai dibangun beberapa waktu sebelum tahun 1790 (Bruggen, 1998: 19), sedang kantor residen selesai dikerjakan tahun 1824 (Wahyuhono, 1997:2).

Jika diplot dalam peta kota Yogyakarta tampak bahwa komponen-komponen pada *civic center* itu ditata di sepanjang poros utara – selatan yang sudah banyak dikenal itu. Adapun pemukiman berada di sekeliling / di sekitar *civic center*. Hal ini tentu “tidak terjadi begitu saja”. Ini pasti sengaja diatur menurut alur pikiran tertentu yang tersusun juga didasari oleh pengalaman-pengalaman tertentu.

Banyak di antara kita yang tidak menyadari mengapa bangunan-bangunan dan pemukiman tersebut berada di dalam tatanan seperti itu. Banyak yang menganggap bahwa itu *takes for granted*, sudah dengan sendirinya. Ada pula yang dengan mudah merunutnya ke kraton Majapahit (bandingkan: Sumadio, 1990: 234 – 235, catatan 237 – 239), padahal data arkeologi di lapangan mengarah kepada hal yang berbeda, karena keperluan hidup penduduk kota berbeda, dan dasar filosofinya juga berbeda. Di sisi lain, bukan mustahil bahwa terjadinya tata letak pada *civic center* kota Yogyakarta kuno melalui proses yang mungkin diperoleh melalui pengalaman sang pencetus ide, yaitu Sultan Hamengku Buwono I.

Pada waktu Kadipaten Pakualaman muncul, maka muncul juga suatu *civic center* lain, yakni kawasan Pakualaman. *Civic center* tersebut juga lengkap komponen-komponennya seperti di kawasan kesultanan, meskipun ukurannya lebih kecil. Di lingkup kawasan ini kemudian dirintis pemukiman untuk orang Belanda, yaitu Bintaran.

Ketika jumlah mereka yang bermukim di kota Yogyakarta membesar, maka pada awal abad XX dibuatlah area permukiman baru untuk orang Belanda yang dirancang secara cermat, berlandaskan konsep-konsep perancangan arsitektur modern. Area tersebut dinamai Nieuwe Wijk yang setelah kemerdekaan disebut Kota Baru.

Dalam struktur kota Yogyakarta lama diketahui adanya pepohonan di banyak tempat, misalnya di kawasan seputar kraton, Taman Sari, Kota Baru. Ada pepohonan yang ditanam dengan landasan konsep filosofis tertentu, misalnya pohon beringin kembar yang ditanam di tengah Alun-Alun Lor dan Alun-Alun Kidul, serta 63 pohon beringin yang ditanam di sekeliling Alun-Alun Lor. Ada pula pohon yang ditanam untuk keperluan konsumsi tertentu, misalnya pohon buah-buahan dan rempah-rempah yang dahulu ditanam di kompleks Pesanggrahan Taman Sari, atau pohon kepel di lingkungan kraton. Ada pula pohon yang tampaknya ditanam untuk memenuhi kebutuhan estetika dan lingkungan (sebagai peneduh), seperti pohon *nagasari* dan *gayam* yang ditanam sepanjang beberapa jalan tertentu. Ada pula

peneneman pohon yang dilandasi oleh gabungan beberapa aspek tersebut di depan (Adrisijanti, 2002:12).

Pada waktu kekuasaan Belanda masuk ke dalam struktur pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta, mereka juga melakukan pepohonan, baik di halaman rumah maupun di ruang-ruang publik. Sebagai contoh adalah: rumah residen (sekarang Gedung Agung) yang di halamannya tampak deretan pepohonan besar dan rindang, halaman rumah-rumah di Kotabaru sampai beberapa waktu lalu, boulevard-boulevard di Kotabaru.

Keberadaan pepohonan di kota Yogyakarta juga dapat dirunut dari beberapa data. Pertama, toponim di kota Yogyakarta yang menunjukkan jenis-jenis pohon, seperti Gayam, Jambu, Nagasari, Cemarajajar, Ngasem, dan Sawojajar. Kedua, tembang yang menggambarkan keadaan kota Yogyakarta jaman dulu, di antaranya: bentengnya tinggi, *jagangnya* dalam dan airnya jernih, jalan dengan deretan pohon gayam dan nagasari. Ketiga, berita yang ditulis orang-orang asing yang mengunjungi Yogyakarta pada waktu lalu. Keempat, foto-foto lama yang menggambarkan keadaan kota Yogyakarta pra-PD II sampai tahun 1960-an

c. Masalah

Kota Yogyakarta adalah kota yang hidup, terus berkembang, dan semarak sejak lahirnya sampai saat ini. Ditinjau dari segi kewilayahan, kota Yogyakarta juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dari wilayah kota Yogyakarta lama yang diapit oleh Sungai Code dan Sungai Winanga, di antara Tugu Pal Putih dan Gedhong Panggung, melebar secara radial a.l. ke timur Sungai Code, ke utara Tugu Pal Putih, dan ke barat ke arah sungai Winanga.

Akan tetapi, *civic center* tetap berada di seputar *civic center* lama, meskipun kemudian muncul beberapa *civic center* baru. Bangunan-bangunan di areal-areal permukiman lama banyak yang diminati untuk dipindahtangankan, kemudian dilakukan perubahan fungsi, serta perubahan bentuk. Pernah pula muncul keinginan untuk mengubah peruntukan suatu areal tertentu. Kejadian-kejadian tersebut tidak lepas dari nilai-nilai ekonomi, serta prestise.

Di sisi lain, penduduk kota Yogyakarta mengalami pertambahan jumlah daari masa ke masa. Pertambahan jumlah penduduk membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu, seperti: pertambahan sarana-prasarana, pertambahan limbah. Di samping itu, perkembangan zaman juga membawa implikasi lain seperti : perubahan jenis kendaraan, pergeseran tradisi, perkembangan kebutuhan penduduk kota.

Hal-hal tersebut di atas memicu terjadinya ancaman-ancaman, perusakan-perusakan baik disengaja maupun karena ketidaktahuan. Tentu saja harus difahami pula bahwa banyak bangunan lama di kota Yogyakarta yang sudah mengalami keausan karena factor umur. Hal ini juga mengakibatkan kerusakan, atau keinginan untuk "merusak".

III. Diskusi

Di dalam uraian di atas diharapkan dapat difahami bahwa tinggalan-tinggalan yang berupa hasil budaya bendawi dapat dipakai untuk melacak jejak-jejak sejarah, dan menggali pikiran atau konsep yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini peruntutan asal tata letak *civic center* kota Yogyakarta dilakukan dengan memakai tinggalan-tinggalan yang disebutkan di atas sebagai *clue* yang penting nilainya. Namun, di sisi lain banyak tinggalan arkeologis yang rusak atau dirusak, karena orang tidak memahami maknanya, atau orang tidak peduli lagi, atau bahkan orang memandangnya sebagai barang kuno yang secara ekonomis tidak ada harganya.

Ditilik dari sudut pengertian-pengertian, latar belakang, dan potensinya, maka jelas bahwa kota Yogyakarta adalah salah satu kawasan besar pusaka budaya di Indonesia. Di sisi lain juga kelihatan adanya sejumlah ancaman dan kerusakan yang terjadi pada kota Yogyakarta sebagai kawasan pusaka budaya.

Di sisi lain nilai penting tinggalan-tinggalan itu sudah diakui oleh dunia ilmu pengetahuan, sehingga harus dilindungi. Sebenarnya, di wilayah Republik Indonesia dan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diundangkan peraturan perundangan untuk melindungi pusaka-pusaka budaya. Peraturan perundangan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia no. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta no. 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Upaya-upaya untuk sosialisasi peraturan perundangan, dan penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat juga sudah dilakukan.

Demikian pula, kajian-kajian tentang berbagai aspek kota Yogyakarta, khususnya yang berhubungan dengan statusnya sebagai kawasan pusaka budaya sudah dilakukan. Namun, rasanya sosialisasi masih perlu lebih diintensifkan dan diperluas jangkauannya, serta dilakukan dengan bersinergi antar berbagai kalangan. Misalnya dengan membuat versi populer baik dalam bentuk cetak atau elektronik kajian-kajian yang pernah dilakukan, melakukan lawatan-lawatan sejarah pada

siswa-siswa sekolah dan para guru, dll. Sebab sangat diharapkan bahwa tinggalan-tinggalan kota kuno yang masih relatif utuh di Yogyakarta dipelihara dan dijaga supaya kita tidak kehilangan jejak-jejak sejarah yang berharga. Kelonggaran yang diperoleh dalam memanfaatkannya jangan disalah gunakan. Ini untuk kepentingan kita semua dan generasi-generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Adrisijanti, Inajati, t.th., *Arkeologi Perkotaan Mataram-Islam*, Yogyakarta: Jendela

-----, 2002, "Kota Yogyakarta dan Pepohonannya", dalam *Jogja di Mataku*, Yogyakarta: Jurusan Arkeologi, hlm.11- 16

----- (ed.), 2003, *Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Purbakala Yogyakarta

Bruggen, M.P. et.al., 1998, *Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden*, Purmerend: Asia Maior

Elisséeff, Nikita, 1980, "Physical Lay-out", dalam *The Islamic City*, Paris:UNESCO,90-103

Kostof, Spiro, 1992, *The City Assembled*, London : Thames and Hudson

Ricklefs, M.C., 1974, *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749 – 1792. A History of the Division of Java*, London: Oxford University Press

Sumadio, Bambang (ed.), 1990, *Sejarah Nasional Indonesia II*, Jakarta:Balai Pustaka

TATA RUANG PERKOTAAN : MAKNA DAN PERUBAHAN SIMBOL

Oleh:

Djoko Suryo

ABSTRACT

Kota-kota di Indonesia secara dinamis telah mengalami perubahan mendasar dari masa tradisional, masa kolonia sampai ke masa Indonesia modern. Sejalan dengan perubahan dinamis dari masyarakatnya tersebut tata-ruang perkotaan juga ikut mengalami perubahan, diikuti dengan perubahan makna dan simbol-simbol perkotaannya. Berbagai faktor politik, ekonomi, sosial-budaya, ekologis dan demografis telah menjadi pendorong perubahan-perubahan tersebut. Semenjak awal tata ruang dan simbol-simbol kota-kota di Indonesia mengalami perubahan-perubahan, selain sebagai akibat pergeseran kedudukannya sebagai pusat politik, administrasi pemerintahan, perekonomian dan pusat kehidupan masyarakat kota, tetapi juga sebagai akibat dari perubahan demografis dan ekologis yang semenjak awal abad ke-20 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Selain itu, perubahan makna dan simbol-simbol perkotaan juga dipengaruhi oleh pergeseran kedudukannya sebagai pusat berlangsungnya proses konvergensi, transformasi dan konfigurasi berbagai unsur kebudayaan luar dan local di Indonesia. Dengan melacak tiga fase perubahan dan perkembangan kota di Indonesia tersebut karangan singkat ini bermaksud ingin menyimak proses transformasi tata ruang beserta makna dan simbol perkotaannya dan konfigurasi kebudayaan masyarakat Indonesia lama ke kebudayaan masyarakat Indonesia baru yang berlangsung secara dinamis dan integratif di pusat-pusat perkotaan Indonesia.

Diharapkan dengan melacak beberapa segi dinamika kota-kota di Indonesia dan kebudayaannya dari perspektif sejarah akan dapat dipahami tentang dinamika masyarakat dan kebudayaan Indonesia pada masa kini.

LEADYHETTY

1. PENDAHULUAN

Salah satu kecenderungan penting yang terjadi di Indonesia pada masa kini adalah meningkatnya percepatan pertumbuhan dan perluasan kota, baik kota besar, kota menengah maupun kota kecil, dan perluasan areal kota secara fisik serta integrasi keruangan antarkota. Kecenderungan ini dapat memberikan pertanda akan terjadinya kota-kota berskala besar yang cenderung berkembang menjadi apa yang disebut *megapolis* atau *megapolitan*¹ dan *megacity*². Perkembangan ini muncul sejajar dengan gejala meningkatnya proses modernisasi, industrialisasi, komersialisasi dan urbanisasi yang berlangsung sejak masa sesudah kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada tiga dekade terakhir pada abad ke-20 hingga masa awal abad ke-21. Tumbuhnya megapolis atau megacity pada era milenium ketiga ini pada hakekatnya merupakan gejala transformasi bentuk perkotaan global yang banyak terjadi di wilayah negara industri baru dan negara berkembang, terutama di Asia dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.³

Mengingat kota dapat dipandang sebagai pusat komunitas kehidupan manusia baik secara fisik maupun non-fisik, maka kota pada hakekatnya dapat dipandang sebagai hasil cipta dan karya totalitas budaya kehidupan manusia sendiri. Dengan demikian, adanya proses percepatan peningkatan transformasi bentuk kota-kota di Indonesia seperti tersebut di atas, maka dapat diartikan sebagai manifestasi terjadinya dinamika kehidupan budaya dari masyarakat yang hidup di perkotaan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan itu, maka makalah singkat ini ingin melacak tentang bagaimanakah proses perubahan-perubahan kota dan dinamika kehidupan kebudayaan perkotaan di Indonesia itu terjadi, dan sekaligus mempertanyakan apa makna perubahan dinamis perkotaan itu dalam perspektif Sejarah Kebudayaan Indonesia. Mungkinkah kecenderungan perubahan kota dan dinamika kehidupannya itu dapat diartikan sebagai proses perubahan menuju terbentuknya kota-Indonesia baru dan kebudayaan Indonesia baru?

¹ Mengenai terbentuknya megapolis atau megapolitan di Indonesia lihat Hadi Sabari Yunus, *Megapolitan, Konsep, Problematika dan Prospek*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 366-380)

² Mengenai megacities lihat Manuel Castells dalam *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Vol I : *The Rise of Network Society* (Oxford: Blackwell Publishers Inc., 1998), hlm. 403-404.

³ Manuel Castells, *The Information Age* . . . , hlm 404.

2. KOTA INDONESIA LAMA : TATA RUANG DAN SIMBOL

Perkembangan kota-kota di Indonesia pada dasarnya dapat dibedakan atas tiga fase perkembangan, yaitu periode awal/kuna/lama, kolonial dan modern. Sebagian besar kota-kota Indonesia pada masa sekarang pada dasarnya banyak yang berasal dan berakar pada fase-fase perkembangan kota-kota tradisional dan kota-kota kolonial. Secara singkat dapat dikemukakan, bahwa kota-kota Indonesia lama dapat dibedakan atas dua tipe, yaitu tipe kota pedalaman atau kota agraris dan kota pantai atau kota perdagangan. Kota-kota semacam ini telah muncul pada masa Kerajaan Buddha Sriwijaya yang berpusat pada kota maritim dan berbasis pada kegiatan perdagangan, dan pada masa Kerajaan Hindu-Buddha Majapahit yang memiliki pusat kota pedalaman agraris dan basis perekonomian agraris yang kuat⁴. Sementara itu setelah keruntuhan kedua kerajaan Hindu-Buddha tersebut, muncul kota-kota pelabuhan maritim di bawah era kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang sejak abad ke-16 dan 17⁵. Melalui jaringan perdagangannya dengan Cina, India, dan kemudian dengan orang-orang Barat kemudian menjadi sumber kehidupan penting bagi kota kerajaan pantai ini.

Dalam hubungan ini hubungan kekuasaan antara pusat kraton yang ada di kota dan wilayah pinggirannya sangat penting. Struktur pemerintahan yang berkembang

⁴ Sebagai contoh di Sumatra: Samudra/Pase, Perlak, Barus, Pagar Ruyung, Melayu/Jambi, Sriwijaya/Palembang; di Jawa: Pakuan, Dieng, Borobudur, Prambanan, Madiun, Wengker, Kediri/Daha, Singasari, Majapahit, Blitar, Wirasaba/Jombang, Japan/Mojokerta, Kudus, Bintara/Demak, Jepara, Lasem, Tuban, Sedayu, Gresik, Surabaya, Sumenep Cangg, dsb; Lihat, Wolf Tietze Helmstedt & Werner Rutz(edd.), *Cities and Towns in Indonesia*, dalam *Urbanization of the Earth, Urbanisierung der Erd*, 4.(Berlin-Stuttgart: Gebruder Borntraeger, 1987), hlm. 45.

⁵ Kota-kota yang muncul pada periode 1400 dan 1700, sebagai contoh di Sumatra: Pedir-Pidie, Banda Aceh, Deli, Tanjung Balai, Siak Sri Indrapura, Pekan Tua Indragiri, Singkil, Tapanuli, Natal; di Jawa: Banten, Anyer, Sunda Kelapa, Jakarta/ Batavia, Karawang, Pamanukan, Indramayu, Cirebon, Sumedang, Parakan Muncang, Citeureup, Blobur Limbangan, Sukapura/Sukaraja, Galuh, Ciamis, Semarang, Kedu, Bagelen, Banyumas, Mataram, Yogyakarta, Wonokerta/Kertasura, Surakarta, Sampang, Malang, Panarukan, Macanputih. Lateng/Banyuwangi, Tegal, Brebes, Pemalang, Wiradesa, Pekalongan, Batang, Kendal, Kaliwungu, Berbek, Kalangbret, Pacitan, Ponorogo, Caruban, Magetan, Jorogo, Jipang, Blora, Rembang, Juwana, Pati, Sela, Grobogan, Godong, Sukawati, Kaduwantg, Wates, Salatiga, Ungaran, Kali Beber, Rawa Atihail, Nggluk, Pace, Kertosono, Lamongan, Senggara, Lumajang, Puger, Blatej, Probolingga, Besuki, Arosbaya, Blega, Pamekasan, Dayeuh Luhur, Ajibarang, Pamerden, Rema, Ayah, Nampadadi, Bocor. di Kalimantan: Bandar Brunei, Sambas, Kota Waringin, Banjarmasin, Martapura, Pasir dan Kutaj, di Indonesia bagian Timur: Gelgel, Karangasem, Buleleng, Sumbawa Besar, Dompu, Bima, Ende, Lantuka, Fort Henricus (Solor), Kupang, Atapupu, Lifao, Oekusi, Ulu Siau, Tagulandang, Manado, Tondano, Amurang, Boroko/Kaidipang, Gorontalo, Limboto. Leok/Buol, Toli-Toli, Balangnipa (Mandar), Wajo/Sengkag, Makassar, Tibore (Muna), Buton/Bau-Bau, Hitu, Ambon, dan Fort Overberg (Kayeli), Lihat, Wolf Tietze Helsted & Werner Rutz (eds.), *Cities and Towns*, hlm. 50.

pada masa itu adalah struktur pemerintahan patrimonial. Legitimasi kebudayaan kota terpusat pada legitimasi keagamaan raja. Struktur morfologi kota pada masa Indonesia lama ini juga dipengaruhi oleh tradisi keagamaan. Tradisi Hinduisme dan Buddhisme yang datang dari India memiliki dampak kuat terhadap ritus-ritus dan simbol-simbol kota, demikian juga tradisi Cina memiliki pengaruh luas di berbagai daerah di Indonesia. Demikian juga tradisi budaya Islam sangat kuat dalam memberikan pengaruh terhadap penyusunan tata ruang kota, bangunan-bangunan arsitektual, dan simbol-simbol kota, seperti yang tercermin dalam simbol-simbol tempat peribadatan, mesjid, langgar (mushola), pakaian, dan tradisi upacara keagamaan.

Perencanaan kota-kota lama pada dasarnya dilakukan sesuai dengan kondisi dan struktur sosial masyarakatnya. Kraton atau istana, tempat kedudukan raja, memiliki posisi sentral dalam perencanaan dan tata kota lama. Secara struktural, tinggal di istana dikelilingi oleh para pembantunya, yang terdiri dari para abdi kraton atau pejabat birokrat kraton, para prajurit militer, dan para tukang atau undagi, serta kaum literati atau pujangga, dan kaum intelektual kota. Di luar kota istana terdapat kaum pedagang asing dan petani. Kesemuanya ini menggambarkan struktur kosmos yang menempatkan raja sebagai penjelmaan dewa yang berada di pusat jagad, (kerajaan) dan di kelilingi oleh rakyat atau kawulaya yang berada di wilayah pinggiran.⁶

Selain peran administrasi pemerintahan, kekuasaan politik, pusat perdagangan, dan pusat keagamaan, kota-kota lama memiliki peran kultural penting yaitu menjadi pusat kehidupan politik dan pusat kehidupan intelektual serta pusat kebudayaan yang bersifat "*orthogenetic*" dan "*heterogenetic*".⁷ Perlu dikemukakan bahwa pada periode 1400-1700, peran para pedagang santri-pedagang dan pedagang - santri di kota-kota pelabuhan di Nusantara sangat penting. Demikian juga peran para Wali, Ulama dan Mubalig dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Nusantara adalah sangat penting. Sebagian besar dari mereka banyak yang bertempat tinggal di

⁶ Lihat Peter J.M. Nas and Welmoet Boender, "The Indonesian City in Urban Theory" dalam Peter J.M. Nas (ed.), dalam *The Indonesian Town, Revisited*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002), hlm.4..

⁷ Secara "*orthogenetic*" kota berperan untuk mengembangkan dimensi kebudayaan lama secara sistematis dan reflektif dalam masyarakat kota; sementara secara "*heterogenetic*" kota menjadi pusat penciptaan cara berpikir yang tidak bertentangan dengan kebudayaan lama dan peradaban. Lihat Robert Redfield dan Milton B. Singer, "The Cultural Role of Cities" dalam *Economic Development and Cultural Change*, 3 (October, 1954), hlm. 53-72.

kota-kota pelabuhan perdagangan dan kota-kota pusat keagamaan, seperti Giri, yang sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan tradisi dan suasana budaya kota-kota lama di Indonesia pada masa itu.⁸

Patut di catat bahwa sesungguhnya kota-kota di Kepulauan Nusantara pada periode itu memiliki fungsi strategis dalam dinamika kebudayaan di Indonesia. Salah satu di antaranya ialah menjadi pusat transfer dan disimulasi unsur-unsur budaya yang datang dari luar dan sekaligus juga menjadi pusat dialog budaya antara budaya luar dan budaya lokal yang dapat menghasilkan pembentukan dan pengkayaan kebudayaan Nusantara pada tingkat lokal. Unsur-unsur budaya hasil proses akulturasi, asimilasi, sinkritisasi dan dialog, serta konvergensi mainstream budaya besar pada zamannya, pada hakekatnya berhasil dijadikan sebagai fondasi budaya lokal yang pada masa kemudian menjadi akar kebudayaan Indonesia baru.. Ini membuktikan bahwa peran kota sebagai pusat dinamika kebudayaan telah berlangsung sejak masa-masa awal pertumbuhan kota di Indonesia.

3. KOTA KOLONIAL: TATA RUANG DAN SIMBOL PERKOTAAN

Pada abad ke-18, sebagian besar wilayah pantai di Kepulauan Nusantara jatuh di bawah pengaruh kekuasaan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Struktur pemerintahan dan perdagangan di wilayah ini pada dasarnya telah mantap sejak abad ke-15, namun dalam beberapa segi sistem kota mengalami perubahan sebagai akibat dari pengaruh kekuasaan VOC. Salah satu di antaranya ialah cara mengatur dan mempertahankan kedudukan dan fungsi permukiman penduduk di kota-kota yang dikuasai oleh VOC, terutama sekali ialah yang ada di pantai utara Jawa. Dalam hubungan ini, perlu dicatat bahwa sejajar dengan perluasan pengaruh VOC terhadap daerah pesisir Jawa, daerah pusat kraton Mataram mengalami pergeseran-pergeseran lokasi, yaitu dari daerah Kota Gede ke Kartasura, dan dari Kartasura ke Surakarta. Pergeseran ini terjadi dengan diikuti dengan peristiwa-peristiwa konflik internal, seperti pergolakan dalam perebutan takhta, suksesi, dan pemberontakan-pemberontakan-pemberontakan, salah satu di antaranya ialah Pemberontakan Orang Cina (Perang Pacina) pada 1743, yang semuanya membawa dampak kemunduran keraton Mataram. Pergolakan politik internal ini mencapai puncaknya ketika Keraton Mataram harus dibagi dua yaitu Kraton Surakarta dan Kraton Yogyakarta, yang berarti

⁸ Lihat Djoko Suryo, "Commercialization and Pasisir Culture", dalam *Humaniora*, Buletin Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, No. III, (1996), hlm. 1-11.

terpilahnya pusat kota istana Jawa menjadi dua secara abadi.⁹ Hal ini menandakan bahwa bahwa pada abad ke-18 di pusat kerajaan Jawa telah terjadi sebuah dinamika politik yang kemudian mempengaruhi dinamika kulturalnya, terutama dalam menghadapi tantangan masuknya pengaruh kekuasaan dan kebudayaan Barat pada abad ke-18. Proses pemilahan wilayah kekuasaan di lingkungan kraton Jawa ini kemudian terus berlanjut, yaitu dengan berdirinya Kadipaten Mangkunegaran (1757) wilayah keraton Kesunanan Surakarta menjadi terbagi dua, dan kelahiran Kadipaten Pakualaman (1812)¹⁰. Situasi yang sama pada dasarnya juga terjadi di berbagai wilayah pusat-pusat kota istana lainnya di Nusantara, seperti di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan di wilayah Indonesia bagian timur.

Perkotaan di Indonesia pada hakekatnya mengalami peningkatan perkembangan yang cukup berarti pada awal abad ke-19. Hal ini terjadi ketika Pemerintahan Kolonial Belanda di bawah Daendels (1808-1811) meluncurkan reorganisasi administrasi pemerintahan dalam bentuk sistem prefektur (*prefecture*) dan kemudian oleh Raffles (1811-1816) diteruskan dengan pembentukan sistem Residensi (*Residency*) dan Kabupaten (*Regency* atau *regentschap*). Kebijakan Raffles ini pada masa berikutnya dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak 1817. Pembentukan kota-kota administrasi kolonial itu sekaligus diikuti dengan pembentukan ibu-kota masing-masing unit wilayah administrasi pemerintahannya, yang menandai kelahiran kota-kota administrasi baru di tanah jajahan.

Perkembangan kelahiran kota-kota administrasi sejak itu sangat fenomenal, sejajar dengan kebijakan politik pemerintahan Kolonial Belanda, yang berlangsung dari 1816 sampai 1900. Kebijakan-kebijakan politik Tanam Paksa (Tanam Wajib), (1830-1870), kebijakan politik liberal 1870-1900), dan diteruskan dengan Politik Etis (1900-1925), telah ikut mempengaruhi perkembangan baru bagi kelahiran kota-kota administrasi pada masa kolonial yang dikenal juga sebagai Kota Kolonial atau "*Kota Indies*"¹¹. Desentralisasi pemerintahan daerah, termasuk juga dengan pembentukan

⁹ Mengenai terpilahnya Jawa menjadi dua pusat keraton secara abadi, lihat M.C. Ricklefs, *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi, 1749-1992, A History of the Division of Java* (London: Oxford University Press, 1974).

¹⁰ Lihat M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia, since 1200*. Third Edition (Houndmills, etc: Palgrave, 2001), hlm. 148-150.

¹¹ Sebagai contoh kota-kota yang lahir pada periode 1700-1900 di Indonesia adalah sebagai berikut. Di Sumatra: antara lain ialah Meulaboh, Sigli, Lhok Seumawe, Idi, Seruwai, Tanjung Pura, Medan, Rantau panjang, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Mesjid, Negerilima, Kotra mPiang, Labuhan Bilkik, Gunung Sioli, Sibolga, Tarutung, Batang Toru, Padang Sidempuan, Portibi, Panyabungan, Kota Nopan, Air bangis, Talu, Rao, Lubuk Sikaping, Bonjol, Palembang, Fort de Kock/Bukit Tinggi,

pemerintahan Kota *Gemeente* pada 1905, juga merupakan faktor penting bagi perkembangan kota-kota pada masa kolonial.

Menurut konstitusi tahun 1854 wilayah teritorial Hindia Belanda terbagi atas wilayah administratif non-otonom yang disebut: *gewest* (wilayah administratif baik yang dikepalai oleh gubernur atau residen), *afdeling* (bagian wilayah) dikepalai oleh sisten residen; kabupaten dikepalai oleh bupati; *onderafdeling* dikepalai oleh *controleur*; district dikepalai oleh *wedana* atau *demang*; *onderdistrict* dikepalai oleh asisten wedana atau *camat*; desa/*wijk* dikepalai oleh *lurah* atau *wijksmester* untuk penduduk kota¹².

Stratifikasi sosial pada masa kolonial merupakan fenomena yang sangat mencolok. Masyarakat Indonesia pada masa kolonial terbagi atas tiga golongan, yaitu golongan Orang Eropa, golongan Orang Asing Timur dan golongan Orang Pribumi. Orang Eropa ditempatkan pada pusat kekuasaan, berkedudukan tinggi, sementara Orang Asing Timur (Orang Cina) berkedudukan di lapisan kedua dan Orang Pribumi berkedudukan pada lapisan paling bawah. Pembagian golongan sosial ini sekaligus terwujud dalam pembagian tata ruang kota, sebagaimana tercermin dalam pembagian zona-zona pemukiman, beserta ruang-ruang publiknya. Stratifikasi sosial dan tata-ruang ini sekaligus juga terwujud dalam bentuk dan pola hubungan-sosial, politik, kultural, yang semuanya dibatasi serta dilandasi oleh prinsip kolonial, yaitu perbedaan ras, warna kulit, golongan, dan segregasi sosial. Gambaran ini, tepat seperti yang dirumuskan oleh L. Marcussen yang melukiskan kota kolonial (*Colonial Town*) sebagai berikut: " *a social system, where, economic position and political relations coincided socially with race, (and which) found spatial expression in a segregated settlement system*"¹³: Secara spasial gejala segregasi sosial itu tampak mengemuka dalam pembagian zona-zona pemukiman di kota-kota kolonial di Indonesia.

Maninjau, Lunuk basung, Kayu Tanam, Padang Panjang, Fort van der Capellen/Batu sangkar, Buo, Payakumbuh, Suliki, Kota baru, Sijunjung, Alahan Panjang, Tanjung pandan, Muara Dua, lahat, Tanjung Raya, Teluk betungh, Sukadana, Kota Agung,, Kalianda, dsb; di Jawa, al.: Serang, Cilegon, Pandegelang, Caringin, Rangkasbitung Buitenzorg/Bogor, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Pacet, bandung, Panjalu, Kuningan, Purwokerto, Purbalingga, Majalengka, Banjarnegara, Karanganyar, Kebumen, Kutoarjo, Purworejo, Wonoisobo, Temanggung, Magelang, Menoreh, Pengasih, Wonosari, Bantul, Sleman, Klaten, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Ngawi, Jember, Bondowoso, Tasik Malaya, Trenggalek, dsb., di Kalimantan: a.la: Sandakan, Kuching, Singkawang, Montrado, mempawa, Pontianak, Sanggau, ketapang, Sampit Kandangan, dsb; dan Indonesia Timur, a.l.: Tahuna, Kota mabagu, Donggal, Banggai, Majene, Palopo, Rappang, Pinrang, Pare-Pare, Pangkajene, Sinjai, denpasar, Dili, dsb. Lihat Wolf Tietze Helstede & Werner Rutz (eds.), *Cities and Towns* hlm 57

¹² Lihat Pauline Dublin Milone, *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concept* (Berkeley: University of California, 1966) hlm. 15.

¹³ Lihat Pieter J.M. Nas and Welmoet Boender, "The Indonesian City....", hlm. 4.

Pemukiman untuk orang-orang Eropa dipisahkan secara spasial dari orang pribumi dan orang Asiang Timur. Salah satu unsur simbolis kota kolonial, di antaranya ialah ditandai dengan pemberian nama atau istilah "*kampung*" bagi tempat permukiman orang pribumi di wilayah kota. Dengan demikian di kota-kota kolonial, sering terdapat nama-nama tempat permukiman menurut jenis etnisitas orang pribumi, seperti Kampung Jawa, Kampung Melayu, Kampung Bugis, Kampung Banjar, dan lain sebagainya..

Beberapa segi penting yang menarik untuk diperhatikan di lingkungan kota-kota kolonial antara lain ialah sebagai berikut.

- a. Ciri kota yang dilandasi oleh sifat-sifat kegandaan, pluralitas, dan heteroginatas, baik dalam struktur politik, sosial, ekonomi maupun kultural.
- b. Kota kolonial menjadi pusat birokrasi pemerintahan dan menjadi Pusat Negara Birokrasi.
- c. Kota kolonial mulai menjadi magnet penduduk desa, sehingga proses urbanisasi migrasi dan konsentrasi penduduk di perkotaan dan konsentrasi aktivitas menjadi fenomena terkemuka..
- d. Segregasi penduduk dan spesialisasi (fungsi kewilayahan) mulai berkembang
- e. Kota kolonial menjadi pusat modernisasi dan Westernisasi kebudayaan dan peradaban Barat.
- f. Kota '*Indies*' menjadi pusat pendidikan modern dan pusat kelahiran Budaya "*Indies*" atau *Mezo-Culture*, yang melandasi proses terbentuknya 'Awal Kota Indonesia Baru' dan menjadi pesemaian Awal Kesadaran Bangsa-Indonesia".
- g. Lahirnya golongan elit Indonesia Baru (Modern) pada dasarnya terjadi di kota-kota kolonial.
- h. Kesadaran sejarah dan kesadaran kebangsaan yang awal pada hakekatnya tumbuh dan berkembang di pusat-pusat kota kolonial sebagai "Akar Kota Indonesia Baru".

4. KOTA INDONESIA BARU: PERGESERAN TATA RUANG DAN SIMBOL PERKOTAAN

Berakhirnya penjajahan Belanda dan lahirnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sekaligus menjadi tonggak perubahan dan pergeseran berbagai dimensi

kehidupan, baik politik, administrasi pemerintahan, kehidupan perkeonomian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemasyarakatan maupun berbagai dimensi kebudayaan. Transformasi sosial dan budaya dari kebudayaan Indies atau kolonial ke kebudayaan Indonesia Baru yang perlu dibentuk pada masa kemerdekaan menjadi fenomena pusat dalam Sejarah Indonesia. Kota-kota di Indonesia sebagai pusat komunitas sosial dan sekaligus pusat kebudayaan tidak terlepas dari arus transformasi kebudayaan melalui perubahan pemerintahan dari masa pemerintahan Belanda dan Pendudukan Jepang ke masa pemerintahan Republik Muda. Kemudian pergeseran secara berkelanjutan dari pemerintahan masa revolusi ke pemerintahan masa Pasca Revolusi, yaitu pada periode 1950-an sampai dengan masa pemerintahan Orde Baru (1970-1990-an), dan hingga mencapai masa terakhir, yaitu masa pemerintahan Reformasi. Proses pergeseran sepanjang masa tersebut juga diikuti dengan terjadinya proses pergeseran kota-kota di Indonesia, yaitu dari kota Indies menjadi kota Indonesia baru atau modern, yang sekaligus menjadi pusat terjadinya proses transformasi budaya perkotaan di Indonesia yang pada hakekatnya menjadi pusat identitas kebudayaan masyarakat Indonesia baru pada era milenium ketiga.

Sebagian besar dinamika kebudayaan kota di Indonesia yang berkembang pada awal abad ke-21, pada hakekatnya merupakan kelanjutan dinamika perkembangan dari periode sebelumnya, terutama sekali yang terjadi pada sekitar periode 1970-1990-an. Salah satu unsur kecenderungan baru dalam dinamika kebudayaan kota yang menarik untuk dicatat pada masa itu antara lain adalah berkembangnya dimensi ekspresi kreatif dalam kegiatan Seni Pertunjukan, Sastra, dan Mass Media yang muncul di berbagai perkotaan di Indonesia. Munculnya kecenderungan baru tersebut dapat disebut sebagai kemunculan dinamika baru dalam simbolisme perkotaan di Indonesia. Perwujudan ekspresif simbolisme kota ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perubahan yang terjadi dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik pada masa itu.

Sebagaimana maklum bahwa perubahan dramatis dalam kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia selama masa Orde Baru pada dasarnya cukup dapat dilacak dalam berbagai sumber dokumentasi yang terdapat di mana-mana. Salah satu hal yang ingin dikemukakan di sini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi pada masa itu, pada dasarnya telah menciptakan *boom* dalam industri penerbitan buku, majalah, dan surat kabar, yang meningkat dari waktu ke waktu secara pesat. Pasaran komoditi penerbitan ini pada umumnya adalah golongan menengah kota, seperti pengusaha,

pedagang, birokrat, militer, mahasiswa, siswa-siswa sekolah, dan kaum terpelajar pada umumnya.

Sejajar dengan meningkatnya perkembangan kemampuan beli golongan menengah ini, berkembang pula kompleks pusat-pusat perbelanjaan baru, supermarket, bazar, mal dan jalan-jalan yang dipenuhi oleh kendaraan mobil pribadi yang terdapat di berbagai kota-kota besar di Indonesia. . Sementara perluasan pendidikan pada masa itu telah ikut juga menciptakan perluasan publik yang melek baca baik di kampung kota maupun di desa, sehingga mampu mendukung perluasan konsumen bagi bahan-bahan bacaan yang diterbitkan oleh berbagai penerbit. Pada saat yang sama, tumbuh secara pesat media audio-visual – film, musik pop, radio dan terutama TV - , yang diperkirakan audiensnya meningkat dua kali lipat pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Perkembangan tersebut terakhir ini juga merupakan gejala perkembangan baru, yang dapat dikatakan luar biasa ekspansinya dan besar pengaruhnya terhadap kehidupan di kota.

Hal yang menarik untuk dicatat ialah bahwa perkembangan yang tampak spektakuler itu pada dasarnya dapat disebutkan sebagai salah satu unsur perwujudan ekspresi kebudayaan nasional modern, berbasis kota, yang menggunakan bahasa nasional Indonesia, dan berasal dari model Barat. Partisipasi aktif pendukung bentuk kebudayaan Indonesia baru ini bersifat terbuka dan cenderung masuk ke dalam spektrum yang lebih luas daripada perkembangan yang terjadi pada masa lalu. Sebagai contoh, dalam kehidupan seni sastra, misalnya, terdapat pertumbuhan Seni Pembacaan Puisi yang muncul di kota-kota kecil, yang dibacakan oleh siswa-siswa sekolah SMA atau sejenis. Sementara di kota-kota yang sama, juga tumbuh kelompok band-band musik, kelompok teater modern, yang pendukungnya tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tetapi tidak jarang juga dari kalangan tukang becak dan buruh-buruh atau karyawan ikut bergabung. Semua itu adalah merupakan ciri dari kecenderungan baru dalam dinamika kebudayaan masyarakat Indonesia yang berkembang di kota-kota di Indonesia.¹⁴ .

¹⁴Lihat, Barbara Hatley, "Cultural Expression", dalam Hal Hill (ed.), *Indonesia's New Order, The Dynamic of Socio-Economic Transformation*. (St.Leonard: Allen & Unwin, Pty Ltd, 1994.), hlm. 216-266.

5. Kesimpulan

Dari uraian singkat tentang perkembangan kota dan segi-segi yang berkaitan dengan dinamika sosial dan kultural di lingkungan perkotaan di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa proses transformasi kota dan kebudayaan kota di Indonesia yang telah berlangsung semenjak masa lampau, pada masa kini mencapai puncak perkembangannya dalam menuju ke arah masa depannya. Dalam beberapa segi dapat diidentifikasi adanya beberapa kecenderungan terjadinya pergeseran tata ruang dan simbol dan pemaknaannya yang sedang berlangsung di kota-kota Indonesia pada masa kini antara lain adalah sebagai berikut.

- (1). Kecenderungan perkotaan di Indonesia semakin menunjukkan adanya pengumpulan antar dimensi pluralitas, heteroginitas, dan uniformitas serta afinitas kehidupan budaya di perkotaan.
- (2)...Kota-kota Indonesia baru cenderung berkembang menjadi kota-kota industrial, metropolitan, dan mega-politan, diikuti oleh pergeseran ekologi simbolisme perkotaan (*urban symbolic ecology*) dan timbulnya fenomena *hypercity* atau *hyperreality* perkotaan, yaitu suatu fenomena simbol-simbol perkotaan yang menciptakan realitas yang melebihi kenyataan dari pada kotanya sendiri ¹⁵ sebagai akibat dari proses globalisasi perekonomian dan budaya.

¹⁵ Mengenai pembahasan cirri-ciri hypercity di sini dapat di baca dalam Peter J.M. Nas dan Annemarie Samuels (eds.) *Hypercity, The Symbolic Side of Urbanism* (London-Bahrein-New York: Keagan Paul, 2006).

- (3) Fungsi kota-kota Indonesia sebagai pusat pendidikan dan agen transformasi dan diseminasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, makin mengemuka;
- (4) Kota-kota Indonesia menjadi penting dalam proses Indonesianisasi dalam Era Teknologi Informasi dan Globalisasi, yang ditandai oleh kecenderungan-kecenderungan masalisasi, paradoksal, hybridanisasi, dan maya.
- (5) Kota-kota Indonesia pada hakekatnya sedang menghadapi persoalan-persoalan baru dalam arus dinamika kebudayaan baru, seperti kecendrungan budaya *Kitsch*,¹⁶ budaya kapitalis (*capitalist culture*), budaya industrial (*Industrial Culture*), budaya-pop (*Pop-Culture*), konsumerisme, materialisme, dan Budaya-Urban (*Urban Culture*).
- (6) Kedudukan kota pada masa kini dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:
 - a. Pusat kontak dengan dunia "luar";
 - b. Pusat agensi dan difusi perubahan social;
 - c. Tempat investasi;
 - d. Pusat aktivitas dalam dan luar negeri;
 - e. Magnet penduduk desa;
 - f. Implikasi kebijakan;
 - g. Kota di Masa Depan, Perencanaan Kota?¹⁷
 - h. Kota Indonesia Baru -Budaya Indonesia Baru?
 - i. Menjadi Simbol dan Pemaknaan Baru ?
- (7) Apabila tidak ditanggulangi dengan perencanaan dan kebijakan yang tepat perkembangan kota-kota di Indonesia dapat terjerumus menjadi tempat kehidupan yang penuh *horror & terror*: mengerikan (*Dreadful Night*); kemiskinan-kekumuhan, di tengah-tengah gedung-gedung pencakar langit, seperti yang pernah terjadi di kota-kota Eropa pada abad ke-19?¹⁸

¹⁶ Maksudnya, di sini ialah suatu bentuk seni-budaya yang tidak dapat digolongkan sebagai seni-budaya klasik (tradisi) dan juga bukan seni-budaya kontemporer (modern), atau bukan seni-budaya istana dan juga bukan seni-budaya rakyat. Mengenai ini lihat Jenifer Lindsay, *Klasik, Kitsch, Kontemporer. Sebuah Studi Tentang Seni Pertunjukan Jawa*. Terj. Nin Bakdi Sumanto. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991).

¹⁷ Mengenai kota di masa depan, baca Peter Hall, *Cities of Tomorrow, An Intellectual History of Urban Planning, and Design in the Twentieth Century* (Oxford & Cambridge: Blackwell, 1993).

¹⁸ Mengenai ini lihat Peter Hall, *Cities of Tomorrow*, hal. 13- 85.

DAFTAR PUSTAKA

- Castells, Manuel. *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Vol I : *The Rise of Network Society*. Oxford: Blackwell Publishers Inc., 1998
- Djoko Suryo, " Commercialization and Pasisir Culture", dalam *Humaniora*, Buletin Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, No. III, (1996), Hal. 1-11.
- _____. "Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900 – 1990", dalam Freek Colombijn, et.al. (eds.), *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Jogjakarta: Penerbit Ombak, 2005.
- Hadi Sabari Yunus, *Megapolitan, Konsep, Problematika dan Prospek* . Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2006.
- Hall, Peter. *Cities of Tomorrow, An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century*. Oxford & Cambridge:: Blackwell, 1993.
- Hatley, Barbara ."Cultural Expression", dalam Hal Hill (ed.), *Indonesia's New Orde. The Dyynamic of Socio-Economic Transformation..* St.Leonard:, Allen & Unwin,Pty Ltd, 1994..
- Helmstedt Wolf Tietze & Werner Rutz(edd.), *Cities and Towns in Indonesia*, dalam *Urbanization of the Earth, Urbanisierung der Erd*, 4. Berlin -Stuttgart: Gebruder Borntraeger, 1987.
- Landsay, Jennifer. *Klasik, Kitsch, Kontemporer. Sebuah Studi Tentang Seni Pertunjukan Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Milone, Pauline Dublin. *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concept*. Berkeley: University of California, 1966) hlm. 15.
- Nas, Peter, J.M. (ed.). *The Indonesia City, Studies in Urban Development and Planning*. VKI. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publication, 1986..
- Nas, Peter J.M. and Welmoet Boender, " The Indonesian City in Urban Theory" dalam Peter J.M. Nas (ed.), dalam *The Indonesian Town, Revisited* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002.
- Nas Peter J.M dan Annemarie Samuels (eds.). *Hypercity, The Symbolic Side of Urbanism*. London-Bahrein-New York: Keagan Paul, 2006.
- Ricklefs, M.C. *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi, 1749-1992, A History of The Division of Java*. London: Oxford University Press, 1974
- _____. *A History of Modern Indonesia, since 1200*. Third Edition . Houndmills, etc: Palgrave, 2001.

Redfield, Robert dan Milton B. Singer, "The Cultural Role of Cities" dalam
Economic Development and Cultural Change, 3 (October, 1954)..

DINAMIKA EKONOMI PERKOTAAN

Oleh
Prof. MUDRAJAD KUNCORO, Ph. D
Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada

Disajikan Dalam
Diskusi "Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah"
Diselenggarakan Oleh
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA
Yogyakarta 11 - 12 April 2007

DINAMIKA EKONOMI PERKOTAAN

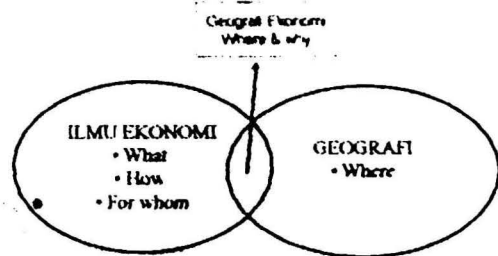
Disampaikan pada Diskusi Sejarah 'Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah', Kamis, 12 April 2007

Prof. MUDRAJAD KUNCORO, Ph.D



Fakultas Ekonomi
Universitas Gadjah Mada
Email: mudrajad@econo.ugm.ac.id
HP: 081125 4255
URL: <http://www.mudrajad.com>

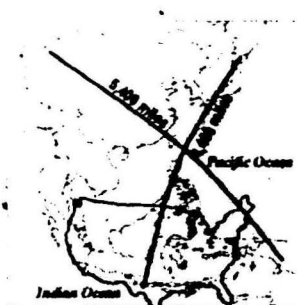
Gambar 1. Keterkaitan Ilmu Ekonomi dan Geografi



Tahap-tahap Evolusi Sejarah Di Kawasan Asia Pasifik

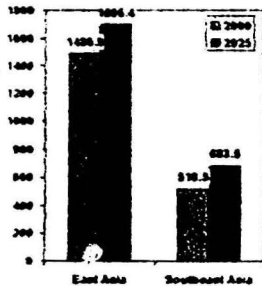
	1500	1800	1700	1800	1850	1900	1950	2000
Jenis Imperialisme	Imperialisme Liberal				Imperialisme Formal		Imperialisme Informal	
Tahap-tahap pembangunan	Pre-kolonialisasi	Kolonialisasi Merkantilisme		Transmigrasi	Kolonialisasi Industri		Pasca-kolonialisasi	
Tipe Kolonisasi	Pre-Kolonialisasi (Pemukim)			Kolonialisasi			Pasca-kolonialisasi	
	Dimulainya perdagangan dengan bangsa Eropa			Revolusi industri dan awal mula kolonisasi			Berakhirnya masa penjajahan oleh bangsa Eropa	

The rise of Region State



- Sikala Geografis
- Regional yang sangat luas di kawasan Amerika Utara
- Sekitar 4,400 mil utara-selatan
- Sekitar 5,400 mil timur-barat
- Continental USA is about 2,800 miles wide
- 60% lautan, 40% daratan
- Akses ke 2 samudera utama
 - Samudera Pasifik
 - Samudera Hindia

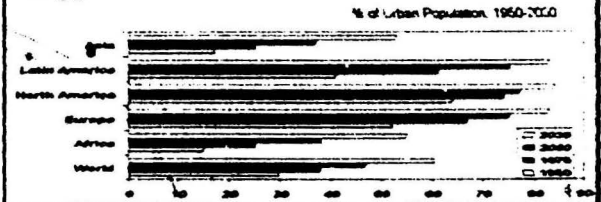
Significance of the Region



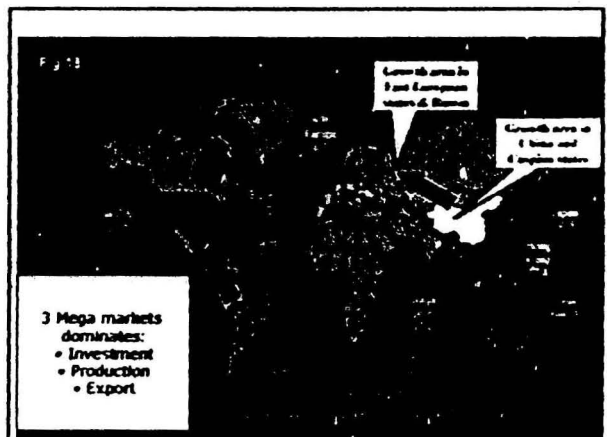
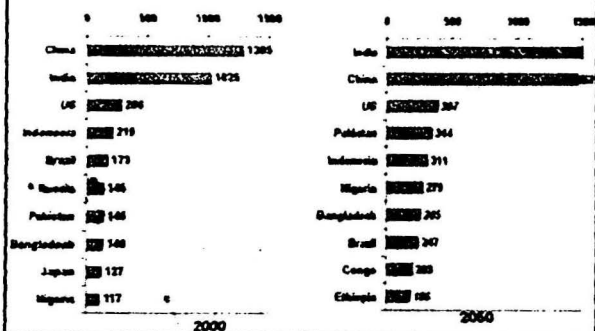
- Urgensi Demografi
 - 2 milyar orang hidup di region pada tahun 2000.
 - 65% adalah Chinese.
 - 1 / 3 dari populasi dunia.
 - Ekspektasi kekayaan 2.4 milyar pada tahun 2025.
 - Share will remain unchanged.
- Overpopulation
 - China bertambah 1 juta orang tiap bulan
 - Kota terluas dan terpadat di dunia.

Urbanisasi di Dunia

- Tahun 1995, hampir separo penduduk dunia hidup di kota.
- Hanya setelah pergantian milenium, penduduk kota mulai beralih ke desa
- Pada tahun 2030, 3 dari 5 penduduk dunia akan tinggal di kota



10 Negara Terbesar, 2000 dan 2050 (juta)



MUNCULNYA KOTA MEGAPOLITAN

Dalam proses urbanisasi dunia, beberapa *mega-cities**, didaftarkan sebagai kota dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta. Hal ini telah terjadi di Asia dalam empat dekade terakhir: Seperti Tokyo, Shanghai dan Bombay di antara 5 aglomerasi terbesar (lihat table 1). Setengah dari 30 populasi terbesar di dunia berada di Asia. Sekitar 65 kota memiliki penduduk lebih dari 1 juta jiwa.

Table 1. The 5 Largest Urban Agglomerations and Asian Cities, 1990-1995

Country	1990		1995	
	Rank	Populasi (Mn)	Rank	Populasi (Mn)
New York, USA	1	14.3	4	13.3
Tokyo, Japan	2	17.0	1	27.0
London, UK	3	9.1	25	7.8
Shanghai, China	4	8.8	9	13.8
Paris, France	5	7.2	18	6.8
Mexico City, Mexico	14	8.4	2	10.6
Sao Paulo, Brazil	15	4.7	3	10.5
Bombay, India	6	4.1	5	10.1
Jakarta, Indonesia	26	2.7	22	3.6
Metro Manila, Philippines	na	na	20	3.3
Bangkok, Thailand	na	na	29	0.5

na = data not available

Source: United Nations (1996).

World Urbanization Prospects: The 1996 Revision, UN: New York

Urbanisasi: Proses dan sebab

• Proses Urbanisasi.

- Populasi kota bertambah 2 kali lipat setiap 25 tahun.
- 0.6 Milyar tahun 1975 menjadi 1.3 Milyar tahun 2000
- 1.3 Milyar tahun 2000 menjadi 2.5 Milyar tahun 2030

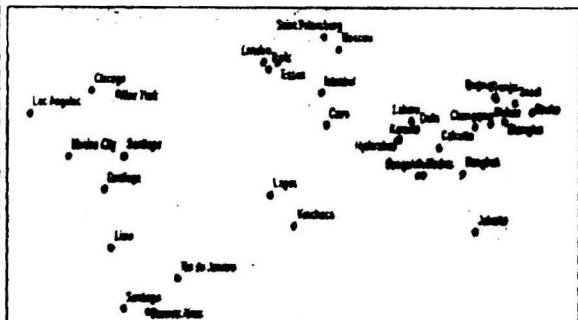
• Penyebab

- Masifnya urbanisasi ke kota.
- Pertumbuhan alami.
- Modernisasi dan Globalisasi

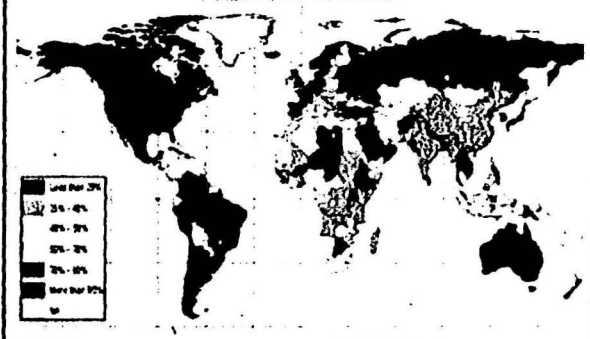
Country	Percentage of urban population in the pop									
	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995
China	12.5	16.5	17.8	18.9	21.4	25.3	29.2	33.1	37.0	40.9
Indonesia	14.6	16.6	17.1	17.2	18.9	21.2	23.9	26.6	29.3	32.0
Japan	30.3	38.5	47.2	55.8	64.6	73.4	82.2	91.0	99.8	108.6
Philippines	27.1	30.3	33.3	37.1	40.9	44.7	48.5	52.3	56.1	59.9
Western	11.9	16.7	18.3	19.3	20.7	22.1	23.5	24.9	26.3	27.7
Thailand	13.5	17.5	21.3	25.1	28.9	32.7	36.5	40.3	44.1	47.9
World Avg	21.4	27.7	33.7	40.9	48.9	56.9	64.9	72.9	80.9	88.9

Source: United Nations Department of Economic and Social Affairs, The World Urbanization Prospects: The 1996 Revision

Kota-kota dengan Jumlah Penduduk Lebih dari 5 Juta



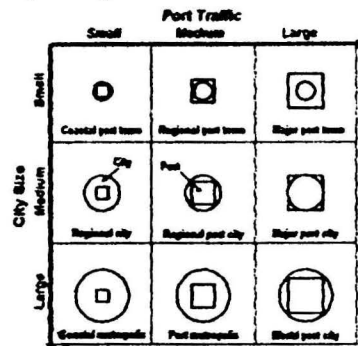
Persentase Populasi Kota Tahun 2000



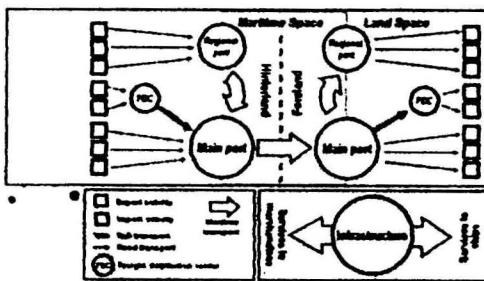
Konsep Kota Pelabuhan

- Kota pelabuhan adalah fenomena yang unik. Konsentrasi aktifitas ekonomi di Kota Pelabuhan sangat tinggi (Fujita, 1996)
- Infrastruktur seperti pelabuhan memacu timbulnya aglomerasi.
- Aktifitas ekonomi di kawasan aglomerasi kota pelabuhan akan memacu pertumbuhan ekonomi.

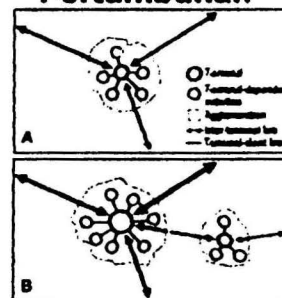
Tipologi Kota Pelabuhan



Fungsi Pelabuhan



Kota Pelabuhan sebagai Pusat Pertumbuhan



RANKING PELABUHAN DUNIA BERDASARKAN TEU's

Rank	Port	Country	TEU's
1	Shanghai	China	40,000,000
2	Los Angeles	USA	20,000,000
3	London	UK	18,000,000
4	Rotterdam	Netherlands	15,000,000
5	San Francisco	USA	14,000,000
6	Seattle	USA	13,000,000
7	Yokohama	Japan	12,000,000
8	Long Beach	USA	11,000,000
9	Manila	Philippines	10,000,000
10	Singapore	Singapore	9,000,000
11	Alameda	USA	8,000,000
12	San Pedro de Macoris	Dominican Republic	7,000,000
13	San Francisco	USA	6,000,000
14	San Francisco	USA	5,000,000
15	San Francisco	USA	4,000,000
16	Tanjung Priok	Indonesia	3,599,850
17	Tanjung Perak	Indonesia	1,418,140
18	Malakka	Indonesia	197,421

PETA AKTIVITAS KONTAINER DUNIA



Secara umum, tampak bahwa Asia menunjukkan kinerja yang tinggi dalam aktivitas KONTAINER (TEU) dibandingkan dengan kawasan benua dunia lainnya.

KONSTELASI PELABUHAN ASIA PASIFIK BERDASARKAN TEU



- Konstelasi pelabuhan di Asia Pasifik sebagian besar terkonsentrasi di Asia Timur seperti yang ditunjukkan dengan lingkaran merah & biru
- Secara global, aktivitas pelabuhan dunia juga terpusat di Asia Timur (6 dari 10 pelabuhan terbesar berelasi di Asia Timur)

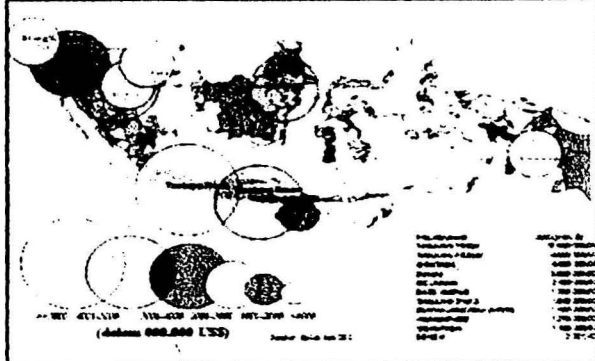
EMPAT PELABUHAN BESAR DI INDONESIA



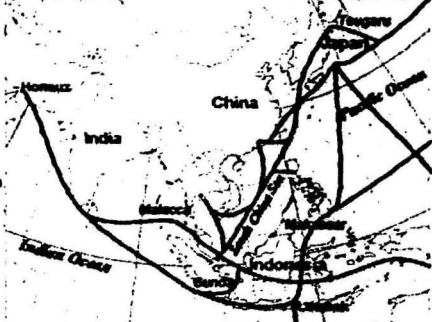
Ports as Gateway for goods, services & HIV?



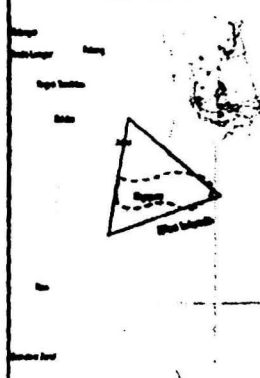
PELABUHAN TERBESAR DI INDONESIA MENURUT JUMLAH EKSPOR DALAM US\$ JUTA (2002)



Shipping Lanes and Strategic Passages in Pacific Asia

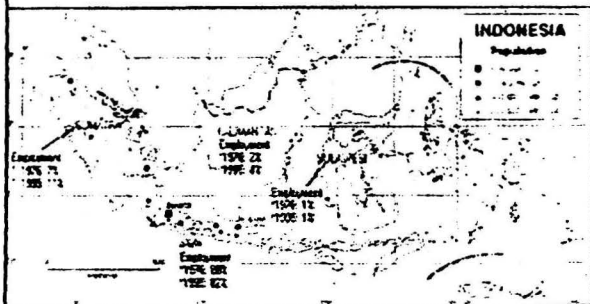


Southeast Asia's Hub



- Growth Triangle
 - Relokasi industri ke daerah yang lebih dekat dengan Malaysia dan Indonesia.
 - Mendapat keuntungan dan tenaga kerja yang lebih murah.
 - Industrial estates
 - Propinsi Johor di Malaysia
 - Kepulauan Riau di Indonesia
 - Singapura berprestasi di bidang manajemen keuangan, dan perdagangan
- Pelabuhan dan Fasiliti Perdagangan
 - Perantara Sedar Minyak
 - Intermediasi antara Minyak Timur Tengah dan Jepang
 - Hal terbagi yang paling penting adalah kapasitas pengolahan minyak dunia
- Model Keunggulan di Asia Tenggara
 - Rendahnya tingkat korupsi membuat Singapura menjadi excellent location untuk mengelola aset di Asia Tenggara

Konsentrasi Industri dan Perkembangan Kota



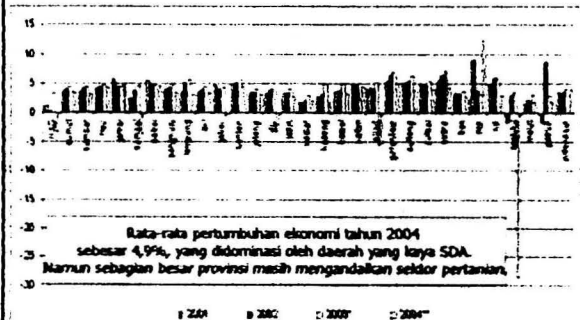
Source: Population data from Census 1990 (PDR 1997), Employment data from various sources.

Daftar 199 Daerah Tertinggal* di Indonesia Menurut Kepmeneg PDT No. 001/KEP/M-PDT/11/2005

Provinsi	Jumlah	Daerah	Provinsi	Jumlah	Daerah
	Kab/kota	Tertinggal		Kab/kota	Tertinggal
NAD	21	12	Jateng	35	3
Sumut	25	6	DIY	5	2
Sumbar	19	9	Jatim	38	6
Bengkulu	9	8	Banten	6	2
Kepri	6	1	Bali	9	1
Riau	11	2	NTB	9	7
Jambi	10	3	NTT	16	15
Sumsel	14	6	Kalbar	12	9
Lampung	10	5	Kalteng	14	7
Babel	7	2	Kaltim	13	5
Jabar	25	2	Sulut	9	2

* 6 kriteria penentuan daerah tertinggal: persentase masyarakat, SDH, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, kemandirian daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi: Indonesia, 2001-2004 (harga konstan 1993)



Mengapa tertinggal?

- Rendahnya tingkat pendidikan dan Human Development Index (IPM)
- Mengandalkan sektor pertanian yang tradisional, bahkan subsisten, dan rendah dari penggunaan mekanisasi pertanian
- Tingginya biaya membeli input antara karena sistem transportasi kurang memadai dan belum berkembang sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- Pelayanan jasa dan perbankan belum merata di banyak wilayah
- Kondisi kesehatan rendah (busung lapar, malaria dll)



FINLANDIA, daerah tertinggal perhasil Nokia

- Finlandia adalah negara Eropa yang tertinggal, miskin akan sumber alam, memiliki sedikit tanah subur, jauh dari jalur perdagangan strategis. Namun Finlandia sekarang terkenal di dunia sbg produsen HP tertans: NOKIA.
- Tahun 1967, Bjorn Westerlund, presiden Finna Cable Works mengembangkan perusahaan yang kelak kita kenal dengan nama Nokia.
- Paradigma baru: kesejahteraan dan kemajuan tak hanya tergantung modal dan teknologi.
- Kunci sukses:
 - Kunci sukses suatu daerah adalah keterbukaan pada dunia.
 - Finlandia membuat wilayahnya menarik untuk investor dengan menawarkan kemudahan peraturan & perizinan.
 - Daerah tak hanya lokasi untuk bekerja tapi tempat kehidupan.



Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta, 1990-2000

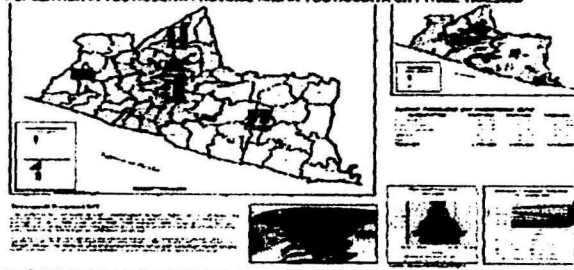
Kabupaten/Kota	1990		2000		Pertumbuhan 1990-2000
	Total	%	Total	%	
1. Kulonprogo	372.321	12,78	370.865	11,58	-0,04
2. Bantul	696.944	23,92	781.059	25,02	1,19
3. Gunungkidul	651.016	22,35	670.544	21,48	0,31
4. Sleman	780.380	26,79	902.705	28,88	1,51
5. Yogyakarta	412.392	14,16	397.398	12,73	-3,38
Propinsi DIY	2.913.054	100,00	3.121.701	100	0,72

Sumber: BPS D.I. Yogyakarta 2000

Aglomerasi di DIY

- Aglomerasi di DIY cenderung berada di kota Jogjakarta dan Kabupaten Sleman.
- Adanya aglomerasi aktivitas ekonomi dan penduduk di kota Jogja ke arah utara (Kabupaten Sleman) menyebabkan meningkatnya ketimpangan pembangunan antar kota/kabupaten di DIY.

POPULATION IN YOGYAKARTA PROVINCE AND IN YOGYAKARTA CITY 1986-1996-2000



Rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten/Kota di DIY, 1997-2000 vs 2001-2003

Kabupaten/Kota	1997-2000		2001-2003	
	Pertumbuhan ekonomi*	PDRB per kapita**	Pertumbuhan ekonomi*	PDRB per kapita**
Jogjakarta	-2,67	3.310.478	3,37	3.679.107
Sleman	-1,17	1.583.300	4,16	1.700.146
KulonProgo	-8,53	973.190	2,60	999.686
Bantul	-2,01	1.068.987	3,59	1.132.711
Gunungkidul	-1,17	1.359.180	2,09	1.438.210
Rata-rata DIY	-3,11	1.660.027	3,16	1.790.172

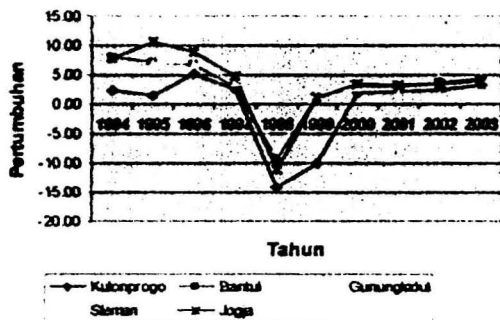
Keterangan:

* Uji beda rata-rata pertumbuhan ekonomi signifikan pada derajat kepercayaan 99%

** Uji beda rata-rata PDRB kapita tidak signifikan pada derajat kepercayaan 95%

Sumber: Diolah dari BPS

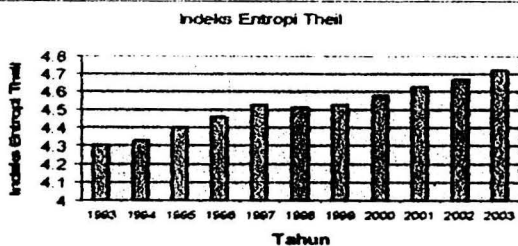
Pertumbuhan PDRB DIY, 1993-2003



Aglomerasi di DIY (Lanjutan)

Melihat fenomena ketimpangan diatas, maka yang dibutuhkan adalah reorientasi pembangunan daerah.

Ketimpangan Antardaerah di DIY Berdasarkan Indeks Entropi Theil, 1993-2003

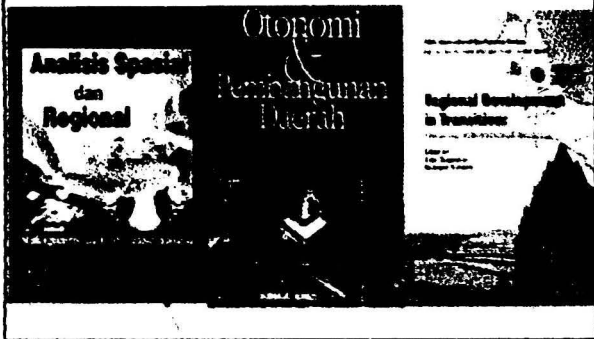


Sumber: Ditahap BPS

Strategi

- Strategi pembangunan ekonomi lokal perlu menekankan pada dimensi spasial.
- Strategi pembangunan daerah pedesaan perlu diintegrasikan dengan strategi pembangunan kota.
- Peningkatan aksesibilitas modal dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal sebagai 'big push' bagi percepatan pembangunan di daerah tersebut.

Bacaan yang Dianjurkan



WHO IS MUDRAJAD KUNCORO?



- Pendidikan:
 - Guru Besar Ilmu Ekonomi, UGM (2007)
 - PhD in Management, University of Melbourne, Australia (2000)
 - M.Soc.Sc in International Finance, University of Birmingham, UK (1993)
 - SE with cum laude: FE UGM
- Jabatan:
 - Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, FE UGM
 - Pemred Jurnal Ek & Bisnis Indonesia
 - Koordinator Ahli Bidang ekonomi regional PSEKP UGM
 - Tim eksternal, Menteri Perekonomian
- Konsultan bisnis dan pemda
- Buku: 15, beberapa best seller:
 - "Ekonomika Industri Indonesia; Menuju Negara Industri Baru 2030?" (terbaru)
- Visit <http://www.mudrajad.com>

Aglomerasi Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Mudrajat Kuncoro

Agglomeration has become a central attention in the literature of economic geography, business strategy and national competitiveness, and regional studies. However, we still know little of how common and widespread the phenomenon of agglomeration across regions, cities, and industries.

This paper explores the nature of agglomeration, where it tends to locate in DIY, and the driving forces underpinning agglomeration. It found that urbanisation and industrialisation tend to merge and form an extended city of Yogyakarta. The pattern and dynamics of agglomeration has been extending, albeit bringing wider inequality spatially. Hence, a common "spaceless" regional development strategy is urgently reformed.

Key words: aglomerasi, industri, ketimpangan

Penduduk dunia makin lama semakin banyak yang tinggal di kota. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa hampir separo penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan (UN, 1998: 2). Laporan tersebut juga menyajikan proyeksi yang menarik: Pertama, begitu melewati milenium baru, untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia, penduduk perkotaan akan melampaui jumlah penduduk yang tinggal di perdesaan. Kedua, pada tahun 2030 diperkirakan 3 dari 5 penduduk dunia akan tinggal di wilayah perkotaan, baik kota kecil, kota besar, maupun kota metropolitan. Beberapa pakar sependapat bahwa dasawarsa terakhir abad ke-20 akan menjadi saksi apakah penduduk perkotaan melebihi penduduk perdesaan untuk pertama kalinya dalam sejarah (Clark, 1996). Kendati fenomena ini amat monumental, kejadian historis ini relatif kurang mendapat perhatian.

Tingkat urbanisasi di negara-negara Asia Tenggara lebih tinggi dibanding negara-negara Asia lainnya. Selama empat dasawarsa terakhir, tingkat urbanisasi—yang diukur dengan persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan—meningkat hampir dua kali lipat di negara-negara ASEAN (Tabel 1). Pada tahun 1960, tingkat urbanisasi di negara-negara ASEAN sebesar 20 persen, sedikit di bawah negara-negara Asia lainnya. Pada tahun 1985, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki tingkat urbanisasi yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata negara Asia. Kendati demikian, pada skala global, tingkat urbanisasi di negara-negara ASEAN masih tergolong rendah. Ini terbukti dari tingkat urbanisasi dunia pada tahun 1960 dan 1995 masing-masing sebesar 34 persen dan 45 persen, yang lebih tinggi daripada rata-rata tingkat urbanisasi ASEAN.

Industrialisasi telah menjadi kekuatan utama (*driving force*) di balik urbanisasi yang cepat di kawasan Asia sejak dasawarsa

1980-an. Kecuali dalam kasus industri berbasis sumberdaya (*resource-based industries*), industri manufaktur cenderung berlokasi di dalam dan di sekitar kota. Pertanian dan industri berdampingan, bahkan kadang berebut lahan di seputar pusat-pusat kota. Pada gilirannya semakin mengaburkan perbedaan baku antara desa dan kota (McGee, 1991). Industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah di mana potensi dan kemampuan daerah tersebut memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka mendapat manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling berdekatan. Kota umumnya menawarkan berbagai kelebihan dalam bentuk produktifitas dan pendapatan yang lebih tinggi, yang menarik investasi baru, teknologi baru, pekerja terdidik dan terampil dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dibanding perdesaan (Malecki, 1991).

aktivitas ekonomi maupun penduduk di perkotaan, menjadi isu sentral dalam literatur geografi ekonomi (Krugman, 1998), strategi bisnis dan peningkatan daya saing nasional (Porter, 1998a; Porter, 1998b), dan studi-studi regional (Maskell, et al. 1997; Scott & Storper, 1992). Ini disebabkan karena pertanyaan "mengapa" (*why*) industri manufaktur cenderung memilih berlokasi di dalam dan di sekitar kota-kota utama belum terjawab dengan memuaskan. Kita masih belum memahami seberapa jauh dan menyebarnya fenomena aglomerasi antar daerah, kota, dan industri.

Artikel ini akan memfokuskan pada analisis dinamika aglomerasi di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, akan disajikan terlebih dulu apa yang dimaksud dengan aglomerasi. Kedua, di mana dan bagaimanakah perkembangan

antara proses perkembangan kota dan industrialisasi. Ketiga, adanya aglomerasi aktivitas ekonomi dan penduduk di kota Jogja yang cenderung ke arah utara (baca: kabupaten Sleman) telah menyebabkan peningkatan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di DIY. Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul ternyata relatif tertinggal dibandingkan daerah lain di DIY. Masalahnya, mengapa kedua daerah ini tertinggal? Bagaimanakah strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal?

Konsep Aglomerasi

Apa yang dimaksud dengan aglomerasi? Montgomery mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena "penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*)... yang diasosiasikan dengan *kluster spasial* dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen" (Montgomery, 1988).

Ini senada dengan Markusen (1996) yang menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang "tidak mudah berubah" akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa; dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual. Markuser menulis bahwa aglomerasi menunjukkan:

"the stickiness of a place resides not in the individual locational calculus of firms or workers, but in the external economies available to each firm from its spatial conjunction with other firms and suppliers of services" (Markusen, 1996).

Dari kutipan-kutipan definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa suatu aglomerasi tidak lebih dari sekumpulan kluster industri. Namun suatu kluster, atau superkluster di Brazil, atau bahkan kumpulan kluster tidak dapat diidentikkan dengan suatu kota. Nama-nama populer seperti Silicon Valley di AS atau Sinos Valley di Brazil menunjukkan bentuk-bentuk geografis yang berbeda, demikian juga literatur kluster industri seperti Emilia-Romagna di Italia.

Perkembangan konsep dan pemikiran mengenai aglomerasi dapat dirangkum dalam Gambar 1. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa setiap studi atau teori mengenai aglomerasi dapat digolongkan dalam perspektif klasik atau moderen (Kuncoro, 2002: bab 2). Perspektif klasik percaya bahwa aglomerasi merupakan suatu bentuk spasial dan diasosiasikan dengan konsep "penghematan akibat aglomerasi" (*economies of agglomeration*) melalui konsep eksternalitas. Para pendukung perspektif ini telah meletakkan dasar-dasar model mikro mengenai eksternalitas akibat skala ekonomis (Fujita & Ogawa, 1982; Fujita & Thisse, 1996). Belakangan, jalur pemikiran ini ditindaklanjuti dengan berbagai studi empiris yang mencoba menganalisis dan mengestimasi besarnya skala ekonomis, sebagaimana terlihat dari karya Gelder (1994), Henderson (1988), dan Sveikauskas (1975). Sementara itu, para ahli ekonomi perkotaan mendefinisikan kota sebagai hasil dari produksi aglomerasi secara spasial. Pada gilirannya hal ini mendorong tumbuhnya literatur mengenai formasi kota.

Perspektif moderen menunjukkan beberapa kelemahan teori Klasik mengenai aglomerasi. Pada konteks ini, tiga jalur pemikiran dapat diidentifikasi. Pertama, teori-teori baru mengenai eksternalitas

Tabel 1. Urbanisasi di Negara ASEAN, 1995 dan 1960

Negara	Tingkat Urbanisasi (%)	
	1995	1960
Thailand	20.0	12.5
Indonesia	35.4	14.6
Philippines	54.0	30.3
Malaysia	53.6	26.6
Brunei	69.2	43.4
Cambodia	20.4	10.3
Laos	20.7	7.9
Vietnam	19.4	14.7
ASEAN ¹	36.6	20.0
Asia	34.7	20.8
World	45.3	33.6

¹ Tidak termasuk Singapura karena merupakan negara kota dengan 100% penduduk tinggal di kawasan perkotaan.

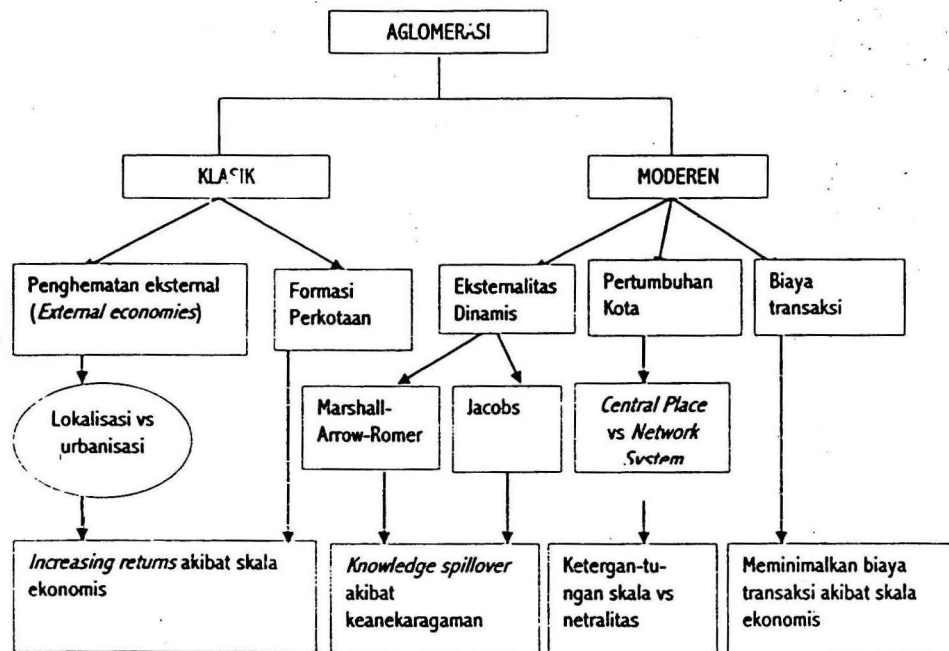
Sumber: UN, 1998.

Oleh karena itu, dapat dimengerti aglomerasi di DIY, yang tidak dapat apabila *aglomerasi* (*agglomeration*), baik dipisahkan dengan adanya kaitan yang erat

dinamis (*dynamic externalities*). Kedua, mazab pertumbuhan perkotaan. Ketiga, paradigma berbasis biaya transaksi.

an, kebanyakan studi memformalkan model yang mencoba menjelaskan daya tarik lokasi kawasan perkotaan. Periode ketiga

Gambar 1. Perkembangan Konsep dan Pemikiran Mengenai Aglomerasi



Sumber: Kuncoro (2000; 2002)

Dalam menjelaskan fenomena aglomerasi, banyak ekonom mendefinisikan kota sebagai hasil dari proses produksi aglomerasi secara spasial. Dalam khasanah studi perkotaan yang secara intensif dilakukan oleh para ekonom agaknya dapat diidentifikasi empat periode evolusi pemikiran (Quigley, 1998: 127-9). Pada periode pertama, yaitu beberapa dasawarsa setelah Perang Dunia I, fokus analisis adalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi perusahaan dan rumah tangga dalam suatu kota. Pada periode kedua, yang dimulai pada pertengahan dasawarsa 1960-

muncul dari analisis yang intensif mengenai kota-kota utama di AS (misalnya, New York) dan memperkenalkan konsep eksternalitas, yang muncul akibat skala ekonomis. Saat ini, kita berada dalam pertengahan periode keempat dalam mencoba memahami perekonomian kota. Pada periode ini, kota digunakan untuk menganalisis hakekat dan sebab-sebab pertumbuhan ekonomi. Kebanyakan analisis aglomerasi secara implisit mengasumsikan bahwa formasi dan perkembangan kota dapat dipahami bila mekanisme konsentrasi produksi secara spasial telah dimengerti dengan benar.

Tabel 2. Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta, 1990-2000

Kabupaten/Kota	1990		2000		Pertumbuhan
	Total	%	Total	%	
1. Kulonprogo	372.321	12,78	370.965	11,88	-0,04
2. Bantul	696.944	23,92	781.059	25,02	1,19
3. Gunungkidul	651.016	22,35	670.544	21,48	0,31
4. Sleman	780.381	26,79	901.735	28,89	1,51
5. Yogyakarta	412.392	14,16	397.398	12,73	-0,38
Propinsi DIY	2.913.054	100,00	3.121.701	100	0,72

Sumber: BPS D.I. Yogyakarta, 2000

Tabel 3. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sleman, 1999-2003

Kecamatan/Kota	1999		2003		Pertumbuhan
	Total	%	Total	%	
1. Moyudan	33.377	4,0	34.143	3,9	0,02
2. Minggir	34.308	4,1	34.990	4,0	0,02
3. Seyegan	41.880	5,0	42.861	4,8	0,02
4. Godean	56.531	6,7	59.320	6,7	0,05
5. Gamping	64.828	7,7	70.435	8,0	0,09
6. Mlati	65.757	7,8	70.403	8,0	0,07
7. Depok	106.730	12,7	115.109	13,0	0,08
8. Berbah	39.793	4,7	41.555	4,7	0,04
9. Prambanan	43.685	5,2	44.829	5,1	0,03
10. Kalasan	54.138	6,5	56.187	6,4	0,04
11. Ngemplak	43.712	5,2	46.661	5,3	0,07
12. Ngaglik	64.538	7,7	70.050	7,9	0,09
13. Sleman	54.845	6,5	57.652	6,5	0,05
14. Tempel	46.032	5,5	47.751	5,4	0,04
15. Turi	32.141	3,8	33.742	3,8	0,05
16. Pakem	30.250	3,6	31.868	3,6	0,04
17. Cangkringan	26.083	3,1	27.171	3,1	0,05
Kabupaten Sleman	836.628		884.727		

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka (1999 & 2003)

Aglomerasi di DIY

DIY adalah provinsi yang unik secara demografik. Jumlah penduduk DIY hanya sekitar 3,1 juta jiwa pada tahun 2000 dan memiliki angka pertumbuhan penduduk 0,72%, yang paling rendah di Indonesia. Dengan sekitar 60% penduduk tinggal di daerah perkotaan, DIY merupakan provinsi dengan penduduk paling padat kedua di Indonesia, setelah DKI Jakarta. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk DIY pada tahun 2000 sebesar 980 orang/km², dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kota Yogyakarta (12.228 orang/km²) dan terendah di Gunung Kidul (451 orang/km²).

Aglomerasi penduduk DIY cenderung berada di kota Jogjakarta dan kabupaten Sleman. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,51% per tahun selama 1990-2000, Kabupaten Sleman memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (lihat Tabel 2), diikuti Bantul dan Gunungkidul, sedang Kota Yogya dan Kulonprogo mengalami pertumbuhan negatif. Dari segi jumlah penduduk, Kabupaten Sleman juga memiliki penduduk terbesar diikuti Bantul, Gunungkidul, Jogja dan Kulonprogo.

Secara demografis hal ini menunjukkan bahwa di Sleman terdapat aktivitas yang tinggi dalam bidang kependudukan berupa bertambahnya para pendatang, meningkatnya angka kelahiran, dan banyaknya pasangan usia subur. Pada gilirannya, hal ini menunjukkan adanya fenomena perkotaan, terutama *Extended Yogyakarta Urban Region*, yaitu kota Yogyakarta ditambah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sleman yang berbatasan langsung dengan Yogyakarta.

Jika dilihat lebih rinci lagi, penyumbang jumlah penduduk yang tinggi di Kabupaten Sleman ternyata adalah Kecamatan Depok,

Gamping, Mlati, dan Ngaglik yang berada di bagian selatan Sleman. Kecamatan-kecamatan tersebut merupakan wilayah yang perkembangannya diarahkan untuk mendukung perkembangan (aglomerasi) Kota Yogyakarta. Keempat kecamatan ini mengalami pertumbuhan yang cepat dalam jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi sebagai pengaruh banyaknya mahasiswa dan pendatang (lihat Tabel 3). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa wilayah tersebut merupakan pertumbuhan perkotaan/kawasan kota di Kabupaten Sleman.

Jika dilihat dilihat dari kepadatan penduduk per kecamatan per km persegi (lihat Tabel 4), kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk di atas 1.800 orang per km² selain Gamping, Ngaglik, Mlati dan Depok adalah Godean dan Kota Sleman. Walaupun jumlah penduduk di Godean dan Sleman di bawah 70 ribu (tahun 2003), kepadatan penduduknya cukup tinggi (di atas 1.800 orang per km²). Ngaglik yang jumlah penduduknya di atas 70 ribu orang, hanya mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.800 orang/km².

Dari uraian di atas, dengan melihat komposisi penduduk Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah selatan Kabupaten Sleman yang meliputi kecamatan Gamping, Mlati, Ngaglik dan Depok ditambah lagi dengan Kecamatan Godean dan Sleman memang merupakan basis pertumbuhan perkotaan yang membentuk satu aglomerasi dengan Kota Jogja. Kecamatan Godean, Sleman dan Ngaglik, kendati terletak agak jauh dari Kota Yogyakarta, telah berkembang menjadi arah kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya sehingga menjadi pusat pertumbuhan. Indikator kependudukan ketiga kecamatan/kota tersebut memiliki

kepadatan penduduk yang cukup tinggi yang mencerminkan tingginya aktivitas kependudukan sebagai salah satu fenomena perkotaan.

dilakukan dengan melihat konsentrasi spasial per kecamatan dari Industri Besar dan Menengah (IBM) yang ada di Kabupaten

Tabel 4. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sleman, 2003

Kecamatan	Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
Moyudan	34.143	1.236
Minggir	34.990	1.283
Sayegan	42.861	1.610
Godean	59.320	2.210
Gamping	70.435	2.408
Mlati	70.403	2.469
Depok	115.109	3.238
Berbah	41.555	1.808
Prambanan	44.829	1.084
Kalasan	56.187	1.568
Ngemplak	46.661	1.307
Ngaglik	70.050	1.819
Sleman	57.652	1.841
Tempel	47.751	1.470
Turi	33.742	783
Pakem	31.868	727
Cangkringan	27.171	566
Jumlah	884.727	1.539

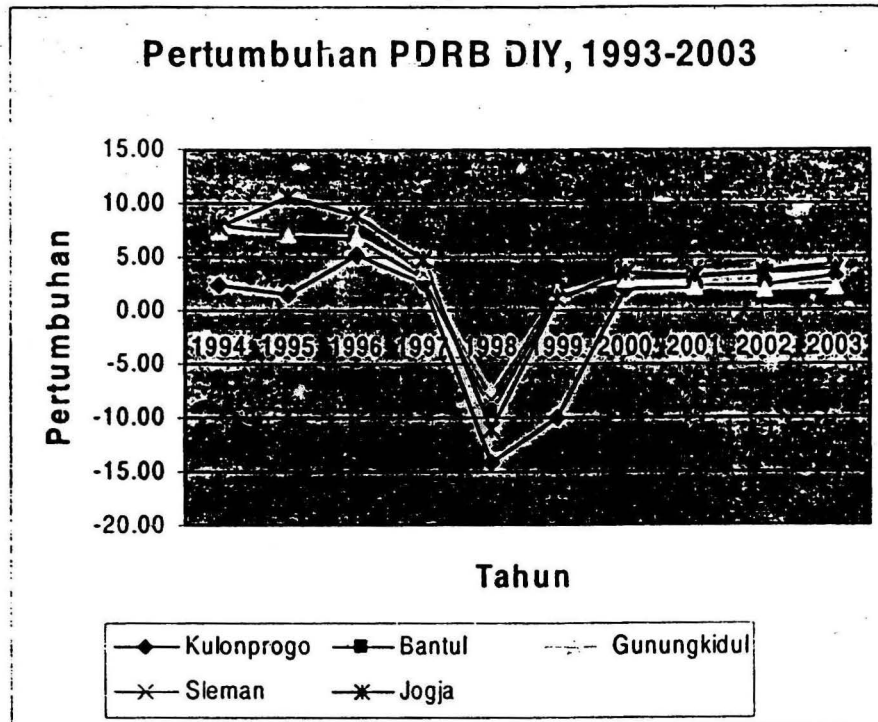
Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2003

Dinamika aktivitas ekonomi di DIY menimbulkan konsentrasi aktivitas ekonomi di kota Yogya dan kabupaten Sleman. Aglomerasi ekonomi di kedua daerah ini nampaknya tumbuh pesat, sebagaimana tercermin dari tingginya pertumbuhan ekonomi yang melebihi rata-rata DIY (lihat gambar 2). Menjamurnya rumah makan, rumah kos, berbagai aktivitas perdagangan dan jasa, berjalan seiring dengan dibangunnya universitas dan hotel.

Apakah aglomerasi penduduk juga sejalan dengan aglomerasi industri di DIY? Identifikasi wilayah perkotaan juga bisa

Sleman. Dengan menggunakan metode identifikasi kluster yang telah dikembangkan dalam literatur Industri (Kuncoro, 2002), Gambar 3 menyajikan peta lokasi IBM Kabupaten Sleman. Terlihat bahwa konsentrasi IBM berada di kawasan selatan Kabupaten Sleman, yang juga merupakan wilayah aglomerasi Kota Yogyakarta. Adanya akses jalan, khususnya *ring road* dan jalan raya yang menghubungkan Kota Yogyakarta dan Magelang, ikut berperan dalam membentuk aglomerasi industri di sepanjang kedua jalan ini.

Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di DIY, 1992-2003



(Menurut Harga Konstan 1993, dalam %)

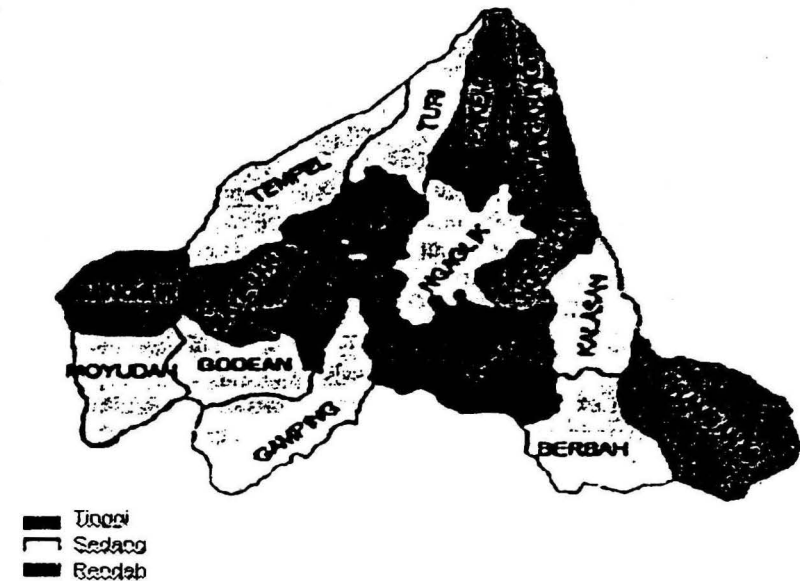
Ketimpangan Antar Daerah di DIY

Pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman ternyata telah jauh meninggalkan daerah lainnya. Dengan menggunakan sejumlah indikator ekonomi dan sosial, harus diakui Gunung Kidul dan Kulon Progo relatif memang tertinggal. Selama 1997-2000, rata-rata kabupaten/kota di DIY mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi -3,11%, dengan rata-rata PDRB per kapita Rp 1,66 juta (lihat Tabel 5). Pada periode krisis tersebut, Gunung Kidul mengalami pertumbuhan -1,2%,

bahkan Kulon Progo lebih parah anjlok -8,5%; PDRB per kapita Gunung Kidul dan Kulon Progo masing-masing Rp 1,36 juta dan Rp 973,2 ribu. Selama 2001-2003, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di DIY sudah mulai pulih dengan rata-rata 3,16%, dengan rata-rata PDRB per kapita Rp 1,79 juta. Pada periode awal otonomi daerah ini, Gunung Kidul mengalami pertumbuhan positif 2,1% dan Kulon Progo tumbuh 2,6%; PDRB per kapita Gunung Kidul dan Kulon Progo masing-masing Rp 1,44 juta dan Rp 999,7 ribu.

Sebelum tahun 1997, Gunung Kidul dikenal sebagai kabupaten yang paling

Gambar 3. Peta Sebaran Industri Menengah dan Besar per Kecamatan di Kabupaten Sleman Berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja, 2001



Sumber: Kuncoro, et al. (2005)

Tabel 5. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita

Kabupaten/ Kota	1997-2000		2001-2003	
	Pertumbuhan ekonomi*	PDRB per kapita**	Pertumbuhan ekonomi*	PDRB per kapita**
Jogjakarta	-2,67	3.310.478	3,37	3.679.107
Sleman	-1,17	1.588.300	4,16	1.700.146
KulonProgo	-8,53	973.190	2,60	999.686
Bantul	-2,01	1.068.987	3,59	1.132.711
GunungKidul	-1,17	1.359.180	2,09	1.439.210
Rata-rata DIY	-3,11	1.660.027	3,16	1.790.172

Keterangan:

* Uji beda rata-rata pertumbuhan ekonomi signifikan pada derajat keyakinan 99%.

** Uji beda rata-rata PDRB/kapita tidak signifikan pada derajat keyakinan 95%

Sumber: Diolah dari BPS

tertinggal di DIY. Namun, ternyata selama 1997-2003, Gunung Kidul sudah jauh berubah. Rekor pertumbuhan ekonomi Gunung Kidul ternyata melebihi rata-rata kabupaten/kota di DIY. Artinya, tingkat pembangunan di Kabupaten tersebut amat pesat di atas rata-rata daerah lain di DIY. Kendati demikian, PDRB per kapitanya masih di bawah rata-rata DIY. Ini mencerminkan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan di kabupaten Gunungkidul memang masih substansial.

Tabel 5 juga memperlihatkan perubahan mendasar yang layak dicatat di DIY adalah pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di DIY terbukti signifikan, sementara PDRB per kapita tidak signifikan. Dengan kata lain, dilihat dari perspektif ekonomi, rekor perubahan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah otonomi daerah amat meyakinkan: dari 3,1% menjadi 3,16%.

Tabel 6. Peringkat Pembangunan Manusia

Kabupaten/kota	IPM		Peringkat IPM	
	1996	2002	1996	2002
Kulon Progo	70	69,4	68	76
Bantul	69,5	68,4	79	94
Gunung Kidul	65,3	67,1	187	140
Sleman	72,9	69,8	33	30
Yogyakarta	76,1	72,7	5	3
DIY	71,8	70,8	2	3

Sumber: BPS, Bappenas, UNDP (2004)

Indikator sosial, terutama kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga menunjukkan kesimpulan serupa (lihat tabel 6). IPM di kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo juga berada dalam papan bawah pada tahun 1999, yaitu masing-masing 63,6 dan 65,8, yang jauh di bawah rata-rata IPM DIY sebesar 68,7. Padahal IPM DIY tercatat memegang peringkat nomor 2 terbaik secara nasional. Pada tahun 2002, IPM DIY turun menjadi peringkat ke-3; sementara peringkat IPM Kabupaten Gunung Kidul meningkat menjadi urutan ke-140 namun Kulon Progo justru mengalami penurunan peringkat menjadi urutan ke 76.

Rekor IPM di DY sejalan dengan catatan angka kemiskinan. Rata-rata tingkat kemiskinan untuk Propinsi DIY tahun 2003 adalah 19,1%, dengan urutan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi adalah Gunung Kidul (25,2%), diikuti Kulon Progo (25,1%), kabupaten Bantul (18,6%), kabupaten Sleman (15,5%), dan kota Yogyakarta (12,8%).

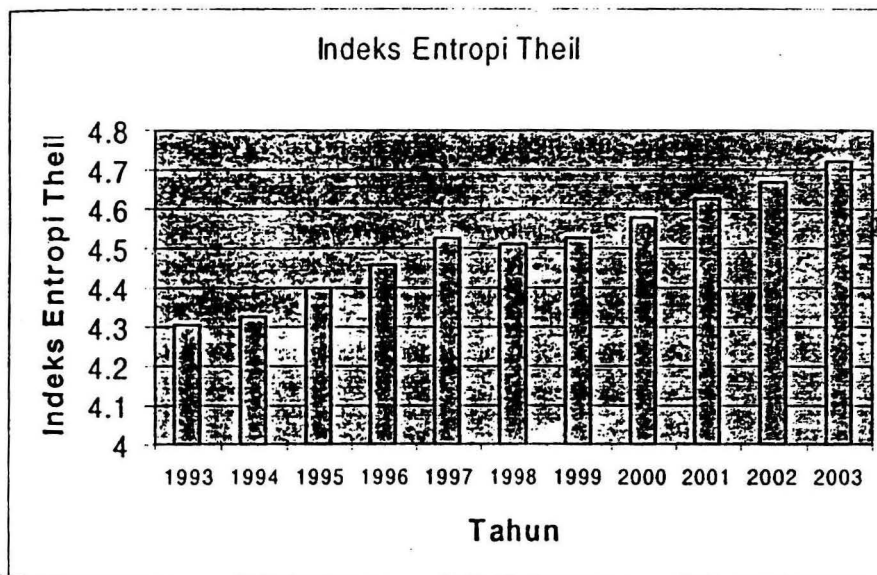
Faktor Penyebab Ketimpangan

Salah satu penyebab utama ketertinggalan Gunung Kidul dan Kulon Progo diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang terlalu bertumpu pada dimensi sektoral. Ini jelas tampak dengan dominannya penerapan asas dekonsentrasi dan orientasi sektoral pemerintah pusat. Di daerah nampaknya tidak jauh berbeda. Ini terlihat dari kuatnya fanatisme dinas dan pendekatan sektoral dalam Propeda/ Renstrada. Ini tercermin dari dokumen-dokumen perencanaan yang tidak ada rincian program maupun aksi hingga tingkat kecamatan, apalagi kelurahan. RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah) nampaknya dalam praktek tidak banyak dimasukkan dalam Renstrada, tak lebih hanya sebagai "tempelan". Bahkan di

banyak daerah RUTRW sering dikalahkan dengan obsesi kepala daerah yang berorientasi jangka pendek dan pragmatis, sejalan dengan masa jabatannya.

Belum dimasukkannya dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan disadari ketika ketimpangan antardaerah mulai terasa. Di banyak kasus, pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan. Ekonom menyebutnya sebagai *trade-off*. Indeks entropi Theil, sebagai indikator ketimpangan spasial, menunjukkan trend peningkatan yang signifikan selama 1991-2002 (lihat Gambar 4). Artinya, memang ada indikasi kuat terjadinya ketimpangan aktivitas ekonomi antar daerah di DIY meskipun khusus untuk Kabupaten Sleman mengalami tren penurunan.

Gambar 4. Ketimpangan Antardaerah di DIY



Sumber: Diolah dari BPS

Diabaikannya dimensi spasial membuat warna pembangunan daerah ditentukan "mekanisme pasar". Akibatnya modal dan orang cenderung memilih daerah yang menawarkan *return* yang lebih tinggi dan menarik, yang pada gilirannya daerah yang maju semakin maju, yang tertinggal tetap tertinggal. Pertanyaannya, mengapa tipologi daerah di DIY seperti itu? Faktor apa di balik perubahan *positioning* daerah kabupaten/kota ini?

Di kalangan para ahli ekonomi regional dikenal setidaknya dua teori. *Pertama*, teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory*), yang menjelaskan adanya konsentrasi pertumbuhan daerah di pusat (*core*), yang tidak selalu berdampak positif bagi daerah pinggiran (*hinterland*). Boleh dikata, kutub pertumbuhan di provinsi DIY adalah kota Jogja, yang selama 15 tahun terakhir cenderung berkembang ke utara khususnya ke wilayah kabupaten Sleman.

Kedua, teori aglomerasi ekonomi, yang menjelaskan peranan *urbanization economies* dan *localization economies*. 'Penghematan urbanisasi' terjadi karena orang dan investor lebih suka memilih kawasan perkotaan, yang menawarkan penghematan biaya akibat kemudahan aksesibilitas dan keberadaan infrastruktur kota. 'Penghematan lokalisasi' muncul karena kedekatan geografis terhadap sumber bahan baku, tenaga kerja, dan *knowledge spillover*, menawarkan manfaat konsentrasi spasial.

Kesimpulan

Artikel ini telah mencoba memberikan bukti empiris adanya perkembangan aglomerasi di DIY, yang ternyata membentuk aglomerasi penduduk dan industri pada saat yang bersamaan. Aglomerasi berada di wilayah kota Yogyakarta, yang juga

mencakup kecamatan-kecamatan di wilayah kabupaten Sleman yang langsung berbatasan dengan kota ini. Adanya aglomerasi aktivitas ekonomi dan penduduk di kota Jogja yang cenderung ke arah utara (baca: kabupaten Sleman) telah menyebabkan peningkatan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di DIY.

Dalam konteks ini, diperlukan reorientasi strategi pembangunan daerah. *Pertama*, strategi pembangunan ekonomi lokal perlu menekankan dimensi spasial. Pendekatan kluster bagi pengembangan bisnis di daerah merupakan trend, yang banyak dianut di banyak negara (Kuncoro, 2002; Porter, 1998). Implikasinya, bagi daerah perlu mengkombinasikan pendekatan sektoral berbasis kluster: di mana bisnis/sektor unggulan daerah cenderung bertokasi dan mengelompok?

Kedua, keteringgalan Gunung Kidul dan Kulon Progo barangkali karena mayoritas kelurahan/desanya masih termasuk kawasan perdesaan. Dari 18 kecamatan di Gunung Kidul, 139 dari 144 kelurahan/desa tergolong kawasan perdesaan. Dari 12 kecamatan di Gunung Kidul, 75 dari 88 kelurahan/desa tergolong kawasan perdesaan. Desa yang jauh dengan keramaian dan hiburan, umumnya masih tertinggal dalam berbagai jenis infrastruktur. Karena itu, dapat dipahami, kantong kemiskinan umumnya berada di daerah perdesaan. Oleh karena itu, strategi pembangunan perdesaan nampaknya perlu diintegrasikan dengan strategi pengembangan kota, dengan mengembangkan keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkage*) dan jejaring antarkota (*network cities*).

Ketiga, diperlukan *big push* bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal. 'Daya dorong' yang tinggi bisa diartikan modal dan infrastruktur. Aksesibilitas modal dan

keberpihakannya kepada daerah yang tertinggal merupakan langkah strategik. Pengembangan infrastruktur ekonomi, yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat-pusat bisnis, pasar, dan jejaring internasional, nampaknya perlu menjadi prioritas bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Di sinilah letak pentingnya menyusun perencanaan jangka panjang dan rencana aksi bagi daerah tertinggal. Sayangnya saat ini belum ada koherensi dan sinergi antara visi maupun Renstrada antardaerah di DIY. Tabel 7 merangkum visi dan misi seluruh kabupaten/kota dan provinsi di DIY. Terlihat masing-masing daerah memiliki visi dan misi yang berbeda, sejalan dengan tuntutan masyarakat, kebutuhan daerah, dan perspektif perencanaan di masing-masing daerah. Apalagi saat ini fanatisme sektoral mulai beralih menjadi fanatisme daerah yang cenderung berlebihan. Rencana Aksi Strategis Pengembangan Perekonomian

DIY dan Outline Business Plan (KR, 10/12/2004), yang disusun PSPPR UGM dan Bappeda DIY, nampaknya belum secara eksplisit memasukkan ketiga usulan reorientasi strategi pembangunan daerah di atas. Perhatian terhadap daerah tertinggal masih minimal.

Implikasinya, bagi pemda, DPD dan DPRD, jelas merupakan pekerjaan rumah yang tidak ringan, terutama bagaimana mempercepat pembangunan daerah tertinggal. DIY membutuhkan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru di luar Kota Jogja dan Sleman agar pemerataan aktivitas ekonomi, dan pada gilirannya pemerataan pendapatan dapat meningkat di mendatang. Pembangunan mal baru, yang semua berada di kota Jogja dan Sleman, perlu diarahkan agar menciptakan keterkaitan dengan aktivitas ekonomi rakyat, yang mayoritas tinggal di perdesaan dan daerah tertinggal. ●

Tabel 7. Visi dan Misi Propinsi, Kabupaten dan Kota di DIY

NO.	KAB/KOTA/PROP	VISI	MISI
1	DIY	Terwujudnya pembangunan regional sebagai wahana menuju pada kondisi DIY pada tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin, didukung oleh nilai-nilai kejujuran dan pemerintahan yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan ketahanan sosial, budaya dan sumber daya berkelanjutan	• Pusat pendidikan terkemuka di Indonesia • Pusat kebudayaan terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya • Daerah otonom berdasarkan <i>good governance</i> • Wilayah pembangunan yang terpadu, kompetitif dan sinergi antar wilayah dan antar sektor yang efisien dan efektif • Daerah tujuan wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) utama di Indonesia • Wilayah pengembangan wisata dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan), yang didukung oleh berkembangnya perekonomian
2	Kota Yogyakarta	Terwujudnya pembangunan Kota Yogyakarta dalam rangka menciptakan kerangka dasar menuju Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, kota pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang didukung pemerintah yang baik.	• Kota Yogyakarta menuju kota pendidikan yang berkualitas didukung oleh masyarakat, swasta yang berilmu pengetahuan dan teknologi • Kota Yogyakarta menuju sebagai kota pariwisata • Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa • Menjaga, melestarikan dan mengembangkan lingkungan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan • Memajukan warga masyarakat dalam setiap aspek kehidupan

3	Kabupaten Bantul	Bantul Proklamasi sejahtera, demokratis, dan agamis. (Proklamasi: produksi dan profesional, maju dan indah, tertib, aman, sehat, asri).	- Mewujudkan kesejahteraan dengan prioritas mendasar dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat - Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab - Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin tegaknya supremasi hukum - Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4	Kabupaten Sleman	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang maju, sejahtera, lestari, mandiri, berdaya saing, damai, demokratis, agamis dan berkeadilan	- Penerapan dan pengembangan teknologi - Peningkatan pertumbuhan ekonomi - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat - Pelestarian lingkungan hidup - Pelestarian nilai-nilai budaya - Penataan dan optimalisasi birokrasi - Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan - Peningkatan pendidikan masyarakat - Peningkatan penegakan supremasi hukum - Peningkatan kesadaran berdemokrasi - Peningkatan kualitas beragama - Pemerataan pemanfaatan sumber daya
5	Kabupaten Kulon Progo	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo, didukung pemerintahan yang baik dan bersih, pengembangan sumber daya daerah, ketahanan sosial budaya dan berwawasan kebangsaan.	- Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditandai dengan kredibilitas aparat pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel serta terwujudnya demokrasi dan penegakan supremasi hukum - Pengembangan sumber daya daerah baik SDM melalui pengembangan pendidikan maupun SDA terutama komoditas pertanian dalam arti luas dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan prioritas pada agribisnis - Ketahanan sosial budaya yang diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan, peningkatan kesejahteraan sosial, kualitas beragama, pengembangan seni budaya dan pariwisata, peningkatan peran perempuan, pemuda, dan olah raga - Penanaman wawasan kebangsaan untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan antar seluruh warga masyarakat
6	Kabupaten Gunung Kidul	Terwujudnya Kabupaten Gunung Kidul sebagai daerah pengembangan pertanian, industri kecil dan menengah, sehat, pariwisata yang berbudaya dengan didukung pemerintahan yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas menuju kemandirian serta peningkatan taraf hidup masyarakat tahun 2005.	- Pemantapan sistem dan kelembagaan pemerintah daerah serta peningkatan kemampuan aparat - Pemantapan kelembagaan serta peningkatan kemampuan masyarakat - Penegakan hukum - Peningkatan kemampuan keuangan daerah - Penyediaan prasarana dasar yang memadai - Pengembangan sumber daya pertanian, pariwisata, industri kecil, dan menengah berbasis pada potensi lokal dan berorientasi pedesaan - Peningkatan pendapatan masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan - Peningkatan peran serta masyarakat - Peningkatan kerjasama antar daerah - Peningkatan kelestarian alam dan lingkungan hidup - Peningkatan iman dan taqwa - Peningkatan budaya berdasarkan nilai luhur Pancasila

Sumber: Pemda DIY (2003); Kuncoro (2004: bab 4)

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. *Survei Industri Manufaktur Menengah dan Besar*, Beberapa Edisi.

Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNDP, 2004. *The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS.

Black, Duncan and Henderson, Vernon. (1999), A Theory of Urban Growth, *Journal of Political Economy*, 107(2): 253-284.

Carlino, Gerald A. 1998, Trend in Metropolitan Employment Growth, *Federal Reserve Bank of Philadelphia*, Juli-Agustus, 13-21.

Clark, D., 1996. *Urban World: Global City*. London: Routledge.

Ellison, Glenn and Glaeser, Edward L., 1999, The Geographic Concentration of Industry: Does Natural Advantage Explain Agglomeration?, *The American Economic Review*, 89(2): 311-316

Firman, Tommy, 1992, The Spatial Pattern of Urban Population Growth in Java, 1980-1990, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 28(2): 95-107.

Fujita, M., & Ogawa, H., 1982. Multiple Equilibria and Structural Transition of Non-monocentric Urban Configuration. *Regional Science and Urban Economics*, 12, 161-196.

Fujita, M., & Thisse, J.-F. (1996). The Economics of Agglomeration. *Journal of Japanese and International Economics*, 10, 339-78.

Gelder, L. v. (1994). *Industrial Agglomeration and Factor Market Segmentation with Empirical Applications to Indonesia*. Unpublished Ph.D Dissertation, Cornell University, US.

Glaeser, E. L., Kallal, H. D., Scheinkman, J. A., and Shleifer, A., 1992, Growth in Cities, *Journal of Political Economy*, 100(6): 1126-1152.

Hayter, Roger. 2000, *The Dynamics of Industrial Location: The Factory, the Firm, and the Production System*, Chichester: John Wiley & Sons.

Henderson, J. V., 1988. *Urban Development, Theory, Fact, and Illusion*. New York: Oxford University Press.

Henderson, J. Vernon, Kuncoro, A., and Nasution, D., 1996, The Dynamics of Jabotabek Development, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32(1): 71-95.

Jones, G. W. and Mamas, S.-G. M. 1996, The Changing Employment Structure of the Extended Jakarta Metropolitan Region, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32(1): 51-70.

Kelly, Philip F. 1999, Everyday Urbanization: The Social Dynamics of Development in Manila's Extended Metropolitan Region, *International Journal of Urban Regional Research*, 23(2): 283-303.

Krugman, P. 1996, Urban Concentration: The Role of Increasing Returns and Transport Costs, *International Regional Science Review*, 19(1&2): 5-30.

Krugman, P. 1998. Space: The Final Frontier. *Journal of Economic Perspectives*, 12(2), 161-74.

Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: AMP YKPN.

Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, UPP AMP YKPN.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

Malecki, E. J. 1991. *Technology and Economic Development: the Dynamics of Local, Regional, and National Change*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Markusen, A. 1996. Sticky places in slippery space: A typology of industrial districts. *Economic Geography*, 72(3), 293-.

Maskell, P., Eskelinen, H., Hannibalsson, I., Malmberg, A., & Vatne, W. 1997. *Competitiveness, Localised Learning and Regional Development*. London and New York: Routledge.

McGee, T. G. 1991. The Emergence of Desakota Regions in Asia: Expanding a Hypothesis. In N. Ginsburg, B. Koppel, & T. G. McGee (Eds.), *The Extended Metropolis: Settlement*

Transition in Asia. Honolulu: University of Hawaii Press.

Mody, Ashoka and Wang, Fang-Yi. 1997. Explaining Industrial Growth in Coastal China: Economic Reform... and What Else?, *The World Bank Economic Review*. 11(2): 293-325.

Montgomery, M. R. 1988. How Large is too Large? Implication of the City Size Literature for Population Policy and Research, *Economic Development and Cultural Change*, 36: 691-720.

Ottaviano, Gianmarco I.P. and Puga, Diego. 1988. Agglomeration in the Global Economy: A Survey of the 'New Economic Geography', *The World New Economy*, 21(6): 707-732.

Porter, M. E. 1998. Clusters and the New Economics of Competition. *Harvard Business Review*, November-December(6), 77-91.

Quigley, J. M. 1998. Urban Diversity and Economic Growth. *Journal of Economic Perspectives*, 12(2), 127-38.

Sveikauskas, L. 1975. The Productivity of Cities. *Quarterly Journal of Economics*, 89(3), 393-413.

UN. 1998. *World Urbanization Prospects The 1996 Revision: Estimates and Projections of Urban and Rural Populations and of Urban Agglomerations*. New York: Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations.

□□□

Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Keterpaduan Sektor Formal dan Informal

Edy Suandi Hamid

The people economy is often called the economic life of people, this terminology contains specific meaning. The economy of people describes the actor of economy, but the economic life of people explains the economical system. The Indonesian people economy play important role for Indonesian economy, and also it is motivated and supported by Indonesia government. For that reason, the strict policy for economy is needed in order economy unit can develop in particular to increase Indonesian national output. Finally, the Indonesian economy building towards to a just, prosperous, welfare, and independent society.

Kata kunci: paradigma, ekonomi kerakyatan dan kebijakan

Paradigma (*paradigm*) merupakan suatu konsep dasar yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu, termasuk masyarakat ilmuwan (Suriasumantri, 1996). Paradigma juga diartikan sebagai suatu pola pandang (*pattern of the declension*) terhadap sesuatu. Dalam pengertian yang lebih umum, paradigma tersebut dianggap sebagai suatu yang secara umum diterima sebagai kebenaran atau yang perlu dilakukan. Sedangkan, pemberdayaan mengandung makna untuk membuat sesuatu lebih baik, lebih berdaya guna, atau bisa juga memperkuat atau memperkokoh.

Bagaimana dengan ekonomi rakyat sendiri? Ekonomi rakyat sering disebut dengan berbagai istilah lain yang terkait, yaitu *perekonomian rakyat* ataupun *ekonomi kerakyatan*. Ini mengandung makna yang spesifik. Jika *ekonomi rakyat* menggambarkan tentang pelaku

ekonominya, maka perekonomian rakyat lebih menunjuk pada obyek atau situasinya. Makna yang lebih luas ada dalam *ekonomi kerakyatan* yang mencerminkan suatu sistem perekonomian.

Jika melihat secara harfiah, kata *rakyat* merujuk pada semua orang dalam suatu wilayah atau negara. Dengan demikian, jika dilihat dari terminologi ini, maka yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian dalam konteks riil yang berkembang, istilah *ekonomi rakyat* muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap perekonomian nasional yang bias kepada unit-unit usaha besar. Oleh karena itu, makna ekonomi rakyat lebih merujuk pada ekonomi *sebagian besar* rakyat Indonesia, yang umumnya masih tergolong ekonomi lemah, bercirikan subsisten (tradisional), dengan modal dan tenaga kerja keluarga, serta teknologi sederhana. Dengan demikian, kalau kita melihat realitas

UNISIA

Keterpaduan Sektor Formal dan Informal Perkotaan

Aglomerasi Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Mudrajad Kuncoro

Pardigma Pemberdayaan Ekonomi Rakyat:
Keterpaduan Sektor Formal dan Informal
Edy Suandi Hamid

Ruang Publik dan Modal Sosial:
Privatisasi dan Komodifikasi Ruang di Kampung
Bobi B. Setiawan

Upaya penataan PKL diperkotaan: Studi kasus Jalan Kaliurang
Suparwoko

TERAKREDITASI
SK DIKTI No. 459/D3/T/2003

ISSN : 0215-1412



Diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah ilmu-ilmu sosial. Berisi tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, praktisi dan siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisan dalam Unisia tidak selalu sejenis atau mencerminkan pendapat redaksi.

DAFTAR ISI EKSPRESI

Keterpaduan Sektor Formal dan Informal Perkotaan	1
Aglomerasi Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta	3
Mudrajad Kuncoro	
Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Keterpaduan Sektor Formal dan Informal	19
Edy Suandi Hamid	
Ruang Publik dan Modal Sosial: Privatisasi dan Komodifikasi Ruang di Kampung	28
Bobi B. Setiawan	
Upaya penataan PKL dipertokoan: Studi kasus Jalan Kaliurang	39
Suparwoko	
Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan Berkelanjutan	53
Ahmad Munawar	
Peran UKM dalam Perekonomian: Studi Kasus Kota Yogyakarta	60
Jaka Sriyana	
Peran Bank Syariah dalam Pengembangan Dunia Usaha	70
Muhammad	
Penataan Perkotaan dan Marginalisasi Sektor Informal	79
Sudarsono	
Kontribusi Sektor Informal dan Pariwisata dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal	89
Fajrianto	
Tantangan dan Peluang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan	99
Fadel Muhammad & Mahmudi	
Doktrin Ekonomi Kesejahteraan Ternyata Lebih Dekat Ke Ajaran Islam	111
Supardi	
Penyumbang Devisa yang selalu Terpinggirkan: Potret Pedagang Kakilima Perkotaan	121
Sobirin Maltan	

Pemimpin Umum: Edy Suandi Hamid, **Wakil Pemimpin Umum:** Amir Mu'allim, **Pemimpin Redaksi:** Suparman Marzuki, **Wakil Pimpinan Redaksi:** Yusdani, **Redaksi Pelaksana:** Awan Setya Dewanta, **Sekretaris Redaksi:** Ibnu Hadjar, **Dewan Redaksi:** Bambang Sudibyo, Edy Suandi Hamid, Moh. Mahlud MD, Djamaluddin Ancok, Ichlasul Amal, Amien Rais, Supardi, **Staf Redaksi:** Rokhedi Priyo Santoso, Agus Triyanta, Eko Prasetyo, Aroma Elmina Martha, M. Idrus, **Kepala Tata Usaha:** M. Dachlan, **Staf Tata Usaha:** Wagyo.

Redaksi menyediakan honorarium bagi tulisan yang dimuat: naskah 20-25 halaman kuarto spasi ganda. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa merubah maksud dan isinya. **Alamat Redaksi/Tata Usaha:** Kampus Pusat UII Jl. Cik Ditiro 1, Telp. 513091, 589604 Yogyakarta. E-mail: unisia_jur2001@yahoo.com; STT SK Menteri Penerangan RI tanggal 20 Februari 1988 No. 1220.5K/DITJENPPGS/STT/1988.ISSN NO 0215-1412.

Diterbitkan oleh UII, Jl. Cik Ditiro 1, Telp. 513091, 589604 Yogyakarta.

Jurnal tiga bulanan Unisia terbit empat kali setahun setiap awal bulan.

EKSPRESI

Keterpaduan Sektor Formal dan Informal Perkotaan

Masalah keterpaduan sektor formal dan informal merupakan salah satu masalah yang banyak dihadapi negara-negara di dunia ketiga. Kedua sektor yang sebetulnya bisa berjalan saling seiring dan saling menguatkan ini, ternyata lebih banyak berjalan sendiri-sendiri. Dengan berbagai kelebihan dan fasilitas yang dimilikinya, sektor formal berkembang sangat cepat, khususnya dari sisi output. Di sisi lain, sektor informal dari sisi kuantitas pelakunya berkembang cepat, namun dari sisi output sangat lambat. Sektor informal ini antara lain dicirikan dengan unit usaha kecil, modal terbatas, kurang tersentuh kebijakan pemerintah yang mendukungnya, dan sebagainya. Perkembangan demikian telah memunculkan banyak masalah, termasuk kesenjangan antara kedua sektor tersebut.

Sektor informal juga sering dianggap sebagai sektor bermasalah karena sektor ini tidak terdaftar, dianggap usaha ilegal yang tidak membayar pajak, sehingga sektor ini dianggap tidak fair dalam berkompetisi dengan usaha lain yang membayar pajak dengan patuh (Llosa, 1989). Namun pandangan seperti ini banyak ditolak, seperti yang ditulis oleh De Soto (1989). Bahkan dalam kasus Indonesia, sektor ini dianggap sebagai katup pengaman dalam menyerap tenaga kerja.

Sulitnya masuk ke sektor formal memang merupakan salah satu pendorong berkembangnya sektor informal ini. Masalah ini sangat terasa di daerah-daerah perkotaan. Hal ini tidak saja dalam kaitannya dengan aktivitas perekonomian secara langsung, melainkan juga dengan masalah-masalah yang terkait lainnya, seperti persoalan transportasi, tata kota, kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Jadi, di balik masalah-masalah yang muncul dari sektor informal tersebut, sektor ini juga membantu memecahkan masalah riil yang dihadapi bangsa ini. Oleh karena itu, sektor ini perlu mendapat perhatian yang serius. Dengan pemikiran demikianlah, UNISIA edisi ini mengangkat topik yang berkaitan dengan "Keterpaduan Sektor Formal dan Informal Perkotaan".

Dalam edisi ini berbagai aspek disorot yang terkait dengan masalah sektor formal, sektor informal, dan persoalan-persoalan perkotaan lainnya. Secara khusus, misalnya, Mudrajad Kuncoro mengkaji tentang aglomerasi yang terjadi di perkotaan DIY. Temuan dari studinya menunjukkan bahwa di DIY aglomerasi terjadi secara bersamaan antara aglomerasi penduduk dan industri, yang keduanya terfokus di kota Yogyakarta. Untuk di luar kota Yogyakarta, hanya terjadi pada daerah di Kabupaten Sleman yang juga berbatasan dengan kota. Masih kasus untuk DIY, Suparwoko menulis persoalan yang berkaitan dengan pedagang kakilima (PKL) perkotaan, yang telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian perkotaan. Keberadaan PKL tidak bisa dipisahkan dari adanya pasar yang luas di sekitarnya. Untuk PKL di jalan Kaliurang Yogyakarta, tumbuh karena adanya kampus/perguruan tinggi, perumahan, pemondokan dan fasilitas umum berupa perdagangan dan jasa. Keberadaan sebagian PKL di jalan Kaliurang ini, di samping membantu masyarakat yang membutuhkan jasanya, juga menyebabkan gangguan bagi pejalan kaki dan kendaraan. Selain itu sebagian bangunan PKL yang bersifat non permanen dan kotor ditinggal di tempat mereka melakukan usaha, sehingga menyebabkan kondisi jalan Kaliurang menjadi nampak kumuh di lokasi para PKL berjalan.

Cuplikan tulisan di atas hanya sebagian kecil dari berbagai kajian lainnya, seperti yang ditulis oleh Ahmad Munawar untuk bidang transportasi perkotaan, Sudarsono tentang penataan perkotaan, dan Bakti Setiawan mengenai perkampungan perkotaan. Semua kajian yang ditulis oleh para ahli di bidangnya masing-masing ini bisa diikuti dalam UNISIA edisi No. 59 ini. Sedang untuk pembaca yang memberikan kontribusi pemikirannya untuk edisi No. 50 yang akan datang, topik utamanya adalah berkaitan dengan masalah globalisasi dan liberalisasi dalam bidang pendidikan. ●

Redaksi

Kekerasan dan Kriminalitas Masyarakat Perkotaan Dalam Perkembangan Jaman

Makalah, disampaikan pada
Diskusi Sejarah
"Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif
Sejarah"

Oleh : Kapolda DIY Brigjen Pol. R. AR. Harri Anwar

1. Pendahuluan

Perkembangan kota-kota di Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini meningkat sejalan dengan meningkatnya perkembangan perekonomian pada sektor-sektor tertentu, misalnya pariwisata, pendidikan, perdagangan, pertambangan, dan perindustrian. Selain sektor perekonomian diatas, pesatnya proses modernisasi, industrialisasi, komersialisasi dan edukasi yang terpusat di kota-kota besar telah menjadi faktor penggerak perubahan perkembangan kota-kota di Indonesia.

Di Indonesia kita mempunyai beberapa kota besar yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang lebih pesat bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kota-kota tersebut diantaranya adalah Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar, Semarang, Bandung dan **Yogyakarta**.

Perkembangan Kota-kota besar antara satu dengan yang lainnya juga disebabkan karena fungsi atau keberadaan kota tersebut sebagai suatu pusat kegiatan tertentu. Perkembangan pesat Kota Jakarta karena merupakan Ibu Kota Negara, pusat perdagangan dan jasa juga pusat Industri, demikian juga halnya dengan *Yogyakarta*. Perkembangan Kota disebabkan karena nilai historis atau sejarah kota Yogyakarta itu sendiri dan juga ikon Yogyakarta sebagai kota wisata, pusat kebudayaan dan juga sebagai kota pelajar

Semakin pesat berkembangnya suatu kota akan mengakibatkan

/semakin....

semakin bertambahnya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Misalnya semakin padatnya pemukiman karena meningkatnya jumlah penduduk, perlunya menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum, penyediaan lapangan kerja, dan lain-lain. Apabila permasalahan – permasalahan itu tidak ditangani dengan maksimal akan mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan sosial seperti kriminalitas.

Meskipun secara kuantitas tingkat kejahatan di Kota-kota besar di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan, *tetapi secara kualitas modus kejahatan yang digunakan mengalami perubahan yang semakin beraneka ragam*. Bila dahulu tindak kejahatan yang dilakukan masih bersifat konvensional seperti Kita kenal istilah begal, garong tetapi saat ini tindak kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan sudah sangat canggih seperti White colour crime, Cyber Crime, Trafficking, Money Laundryng, Terorism dll.

2. Permasalahan

Sejarah kriminalitas terjadi ketika masyarakat harus berhadapan dengan perubahan baik yang terjadi secara internal maupun perubahan yang terjadi di luar komunitas. Banyak faktor yang sebetulnya menyebabkan terjadinya tindak Kriminalitas dan kejahatan selain niat dan kesempatan, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, semakin meningkatnya kebutuhan yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pendapatan, ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan dan rezim, itu semua merupakan beberapa sebab mengapa kriminalitas dan kejahatan selalu ada.

Satu pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita adalah *mengapa kriminalitas selalu ada ? Benarkah kriminalitas dan kejahatan masyarakat perkotaan semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan perkembangan jaman ?*

Disadari atau tidak berkembangnya dan berubahnya suatu peradaban akan berakibat terhadap perubahan pola-pola perilaku masyarakat itu sendiri, selain tentunya merubah tatanan kehidupan yang
/telah...

Kriminalitas dan kejahatan, yang terjadi pada masa ini disebabkan bukan hanya karena masalah ekonomi, melainkan juga disebabkan karena situasi yang ada telah menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan social didalam masyarakat sebagai akibat penjajahan Belanda dan Jepang. Jenis kejahatan yang terjadi pada masa ini merupakan kejahatan umum seperti pencurian, pemukulan, perampokan, pembunuhan. Kriminalitas dan kejahatan terjadi karena adanya kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya. adapun pelaku yang melakukan kejahatan selain berasal dari dalam kota itu sendiri ataupun para pendatang. Wilayah-wilayah pinggiran kota awal-awalnya merupakan daerah yang aman, tetapi terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pencurian dan perampokan di wilayah itu terus meningkat sejalan dengan perkembangan ibu kota itu sendiri.

B. Era Orde Baru

Modus kejahatan dan tindak kriminalitas yang dilakukan masyarakat pada awal tahun era ini tidak begitu berbeda dengan tindak kriminalitas dan kejahatan yang dilakukan era sebelumnya. Kejahatan dan kriminalitas terjadi karena masalah-masalah ekonomi yang disebabkan karena kondisi perekonomian diawal era ini sangat memprihatinkan sebagai dampak masih belum stabilnya situasi politik dan keamanan.

Kriminalitas dan kejahatan yang paling menonjol pada masa ini terjadi pada sekitar tahun 80-an keatas. Hal ini dapat dimengerti karena pada sekitar tahun tersebut kehidupan perekonomian kita mulai menunjukkan perubahan yang berarti. Pertumbuhan di bidang ekonomi tersebut sekaligus berpengaruh terhadap berkembangnya kota-kota besar di Indonesia khususnya kota industri, semakin terbukanya lapangan kerja dan kesempatan kerja di beberapa kota besar tersebut semakin menimbulkan daya tarik masyarakat untuk /datang...

datang dan mengadu nasib mencari kehidupan yang lebih baik. Seiring dengan Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota pada masa ini permasalahan kriminalitas dan kejahatan juga mulai meningkat secara kualitas dan kuantitas, perampokan yang disertai pembunuhan, pencurian dan perusakan, penipuan dan kejahatan lainnya mulai marak terjadi. Penyebab Tindak kriminal dan kejahatan yang terjadi karena terjadinya berbagai permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi. Semakin meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan dan pembunuhan menyebabkan Pemerintah melakukan tindakan tegas dengan melakukan perintah tembak ditempat kepada para pelaku Kriminal dan kejahatan pada masa itu dimana hal itu sebetulnya tidak kita kehendaki bersama. Selain kejahatan konvensional yang dilakukan, pada masa ini juga mulai muncul bentuk-bentuk kejahatan lain. Kampanye Pemilihan umum yang dilakukan dengan cara memobilisasi massa secara besar-besaran merupakan salah satu kerawanan dalam kriminalitas dan kejahatan, Konflik antara pendukung partai yang satu dengan yang lainnya sangat sering terjadi, bekal yang dibawa peserta kampanye juga banyak berupa alat-alat yang sangat membahayakan seperti parang, golok, batu, bambu runcing dll.

C. Era Reformasi

Semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada saat ini semakin luas pula cakrawala pandang dan hubungan masyarakat di berbagai Negara, Kejadian yang terjadi pada suatu Negara dibelahan bumi lain dalam waktu singkat bisa kita lihat, dunia seolah-olah menjadi tanpa batas. Teknologi informasi bisa dikatakan merupakan suatu kebutuhan pada saat ini.

Selain memberikan sisi positif, Berkembangnya Teknologi informasi yang sedemikian pesat tersebut juga memberikan sisi negatif, sisi

/negatif...

negative dari pesatnya perkembangan teknologi ini adalah semakin berkembangnya juga modus-modus kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media informasi dan komunikasi, seperti penipuan, terror, dan lain-lain.

Selain bentuk kejahatan diatas, Salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak dilakukan pada era reformasi yang melibatkan orang terdidik dari masyarakat kelas menengah ke atas adalah kejahatan kerah putih (white colour crime) termasuk didalam kategori ini adalah tindak pidana korupsi dimana biasanya kasus ini diikuti dengan kasus "money laundering" atau kejahatan pencucian uang yang dilakukan melalui suatu kejahatan yang terorganisir (organized crime).

Berikut ini adalah merupakan kejadian kejahatan yang terjadi di wilayah Polda DIY dalam 5 tahun terakhir.

NO	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2001	3199	Kejahatan yg srg terjadi: - Curanmor - Curat - Curas - Penggelapan - Penipuan - Penganiayaan
2	2002	2420	
3	2003	2664	
4	2004	3476	
5	2005	2945	

/4. Kesimpulan...

4. Kesimpulan.

Semakin pesat perkembangan suatu kota akan berakibat pada semakin banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi apabila tidak terselesaikan akan menimbulkan berbagai masalah-masalah social diantaranya adalah kriminalitas dan kejahatan.

Dari tahun ke tahun pelaku kejahatan dan modus kejahatan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan jaman. Pada masa Orde lama kejahatan yang dilakukan masyarakat masih berupa kejahatan dan tindak kriminalitas umum yang dilakukan oleh masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi. Pada tahun-tahun selanjutnya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sudah mengalami perubahan baik modus maupun pelakunya diantaranya dilakukn oleh orang-orang yang emmpunyai jabatan dengan tingkat pendidikan yang cukup.

Pada era reformasi kaulitas kejahatan yang dilakukan pelaku tindak criminal sudah sangat canggih dengan memanfaatkan berkembangnya media informasi dan komunikasi dan salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat adalah kejahatan kerah putih/ white colour crime, illegal logging, cyber crime, terorism dll.

Kekerasan dan Kriminalitas Masyarakat Perkotaan Dalam Perkembangan Jaman

Makalah, disampaikan pada
Diskusi Sejarah
"Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif
Sejarah"

Oleh : Kapolda DIY Brigjen Pol. R. AR. Harri Anwar

1. Pendahuluan

Perkembangan kota-kota di Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini meningkat sejalan dengan meningkatnya perkembangan perekonomian pada sektor-sektor tertentu, misalnya pariwisata, pendidikan, perdagangan, pertambangan, dan perindustrian. Selain sektor perekonomian diatas, pesatnya proses modernisasi, industrialisasi, komersialisasi dan edukasi yang terpusat di kota-kota besar telah menjadi faktor penggerak perubahan perkembangan kota-kota di Indonesia.

Di Indonesia kita mempunyai beberapa kota besar yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang lebih pesat bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kota-kota tersebut diantaranya adalah Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar, Semarang, Bandung dan **Yogyakarta**.

Perkembangan Kota-kota besar antara satu dengan yang lainnya juga disebabkan karena fungsi atau keberadaan kota tersebut sebagai suatu pusat kegiatan tertentu. Perkembangan pesat Kota Jakarta karena merupakan Ibu Kota Negara, pusat perdagangan dan jasa juga pusat Industri, demikian juga halnya dengan *Yogyakarta*. Perkembangan Kota disebabkan karena nilai historis atau sejarah kota Yogyakarta itu sendiri dan juga ikon Yogyakarta sebagai kota wisata, pusat kebudayaan dan juga sebagai kota pelajar

Semakin pesat berkembangnya suatu kota akan mengakibatkan

/semakin....

semakin bertambahnya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Misalnya semakin padatnya pemukiman karena meningkatnya jumlah penduduk, perlunya menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum, penyediaan lapangan kerja, dan lain-lain. Apabila permasalahan – permasalahan itu tidak ditangani dengan maksimal akan mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan sosial seperti kriminalitas.

Meskipun secara kuantitas tingkat kejahatan di Kota-kota besar di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan, *tetapi secara kualitas modus kejahatan yang digunakan mengalami perubahan yang semakin beraneka ragam*. Bila dahulu tindak kejahatan yang dilakukan masih bersifat konvensional seperti kita kenal istilah begal, garong tetapi saat ini tindak kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan sudah sangat canggih seperti White colour crime, Cyber Crime, Trafficking, Money Laundryng, Terorism dll.

2. Permasalahan

Sejarah kriminalitas terjadi ketika masyarakat harus berhadapan dengan perubahan baik yang terjadi secara internal maupun perubahan yang terjadi di luar komunitas. Banyak faktor yang sebetulnya menyebabkan terjadinya tindak Kriminalitas dan kejahatan selain niat dan kesempatan, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, semakin meningkatnya kebutuhan yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pendapatan, ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan dan rezim, itu semua merupakan beberapa sebab mengapa kriminalitas dan kejahatan selalu ada.

Satu pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita adalah *mengapa kriminalitas selalu ada ? Benarkah kriminalitas dan kejahatan masyarakat perkotaan semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan perkembangan jaman ?*

Disadari atau tidak berkembangnya dan berubahnya suatu peradaban akan berakibat terhadap perubahan pola-pola perilaku masyarakat itu sendiri, selain tentunya merubah tatanan kehidupan yang
/telah...

telah ada. Pembangunan yang sedang dilaksanakan dan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, tidak serta merta akan membawa kebaikan bagi setiap orang, pembangunan akan senantiasa membawa dampak baik positif maupun negative.

Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan yang tidak diimbangi dengan bertambahnya jumlah lapangan dan kesempatan kerja akan menyebabkan terjadinya berbagai macam persaingan dan semakin tingginya angka pengangguran, bila jumlah penganggur semakin bertambah sementara lapangan kerja susah diperoleh maka akan berdampak pada timbulnya masalah-masalah sosial.

Salah satu masalah sosial yang timbul sebagai akibat semakin berkembangnya daerah perkotaan adalah kriminalitas. Jika saat ini banyak terjadi berbagai tindak kriminalitas yang dilakukan kaum urban, dikarenakan tidak ada cara lain bagi penduduk miskin dan pengangguran untuk mempertahankan hidupnya selain melakukan kejahatan. Dan yang gampang dilakukan adalah melakukan kejahatan jalanan seperti merampok, menodong, menjambret dan mencuri. Kriminolog Marshall B Clinard (1975) dan Harvey Blummer (1981) mengatakan krisis ekonomi yang melanda sebagian besar penduduk miskin di kota Negara sedang berkembang karena over urbanization merupakan faktor utama lahirnya berbagai tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh penduduk golongan bawah di perkotaan.

3. Pembahasan

A. Era Orde Lama

Berakhirnya kolonialisme di Negara kita dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 telah menjadi sejarah dimulainya babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara bisa dikatakan bangsa kita masih mencari bentuk Negara yang ideal. Pergantian beberapa kali sistem ketetanegaraan mencerminkan kehidupan politik pada masa ini.

/Kriminalitas...

Kriminalitas dan kejahatan, yang terjadi pada masa ini disebabkan bukan hanya karena masalah ekonomi, melainkan juga disebabkan karena situasi yang ada telah menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan social didalam masyarakat sebagai akibat penjajahan Belanda dan Jepang. Jenis kejahatan yang terjadi pada masa ini merupakan kejahatan umum seperti pencurian, pemukulan, perampokan, pembunuhan. Kriminalitas dan kejahatan terjadi karena adanya kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya. adapun pelaku yang melakukan kejahatan selain berasal dari dalam kota itu sendiri ataupun para pendatang. Wilayah-wilayah pinggiran kota awal-awalnya merupakan daerah yang aman, tetapi terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pencurian dan perampokan di wilayah itu terus meningkat sejalan dengan perkembangan ibu kota itu sendiri.

B. Era Orde Baru

Modus kejahatan dan tindak kriminalitas yang dilakukan masyarakat pada awal tahun era ini tidak begitu berbeda dengan tindak kriminalitas dan kejahatan yang dilakukan era sebelumnya. Kejahatan dan kriminalitas terjadi karena masalah-masalah ekonomi yang disebabkan karena kondisi perekonomian diawal era ini sangat memprihatinkan sebagai dampak masih belum stabilnya situasi politik dan keamanan.

Kriminalitas dan kejahatan yang paling menonjol pada masa ini terjadi pada sekitar tahun 80-an keatas. Hal ini dapat dimengerti karena pada sekitar tahun tersebut kehidupan perekonomian kita mulai menunjukkan perubahan yang berarti. Pertumbuhan di bidang ekonomi tersebut sekaligus berpengaruh terhadap berkembangnya kota-kota besar di Indonesia khususnya kota industri, semakin terbukanya lapangan kerja dan kesempatan kerja di beberapa kota besar tersebut semakin menimbulkan daya tarik masyarakat untuk /datang...

datang dan mengadu nasib mencari kehidupan yang lebih baik. Seiring dengan Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota pada masa ini permasalahan kriminalitas dan kejahatan juga mulai meningkat secara kualitas dan kuantitas, perampokan yang disertai pembunuhan, pencurian dan perusakan, penipuan dan kejahatan lainnya mulai marak terjadi. Penyebab Tindak kriminal dan kejahatan yang terjadi karena terjadinya berbagai permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi. Semakin meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan dan pembunuhan menyebabkan Pemerintah melakukan tindakan tegas dengan melakukan perintah tembak ditempat kepada para pelaku Kriminal dan kejahatan pada masa itu dimana hal itu sebetulnya tidak kita kehendaki bersama. Selain kejahatan konvensional yang dilakukan, pada masa ini juga mulai muncul bentuk-bentuk kejahatan lain. Kampanye Pemilihan umum yang dilakukan dengan cara memobilisasi masa secara besar-besaran merupakan salah satu kerawanan dalam kriminalitas dan kejahatan, Konflik antara pendukung partai yang satu dengan yang lainnya sangat sering terjadi, bekal yang dibawa peserta kampanye juga banyak berupa alat-alat yang sangat membahayakan seperti parang, golok, batu, bambu runcing dll.

C. Era Reformasi

Semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada saat ini semakin luas pula cakrawala pandang dan hubungan masyarakat di berbagai Negara, Kejadian yang terjadi pada suatu Negara dibelahan bumi lain dalam waktu singkat bisa kita lihat, dunia seolah-olah menjadi tanpa batas. Teknologi informasi bisa dikatakan merupakan suatu kebutuhan pada saat ini.

Selain memberikan sisi positif, Berkembangnya Teknologi informasi yang sedemikian pesat tersebut juga memberikan sisi negatif, sisi

/negatif...

negative dari pesatnya perkembangan teknologi ini adalah semakin berkembangnya juga modus-modus kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media informasi dan komunikasi, seperti penipuan, terror, dan lain-lain.

Selain bentuk kejahatan diatas, Salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak dilakukan pada era reformasi yang melibatkan orang terdidik dari masyarakat kelas menengah ke atas adalah kejahatan kerah putih (white colour crime) termasuk didalam kategori ini adalah tindak pidana korupsi dimana biasanya kasus ini diikuti dengan kasus "money laundering" atau kejahatan pencucian uang yang dilakukan melalui suatu kejahatan yang terorganisir (organized crime).

Berikut ini adalah merupakan kejadian kejahatan yang terjadi di wilayah Polda DIY dalam 5 tahun terakhir.

NO	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2001	3199	Kejahatan yg srg terjadi: - Curanmor - Curat - Curas - Penggelapan - Penipuan - Penganiayaan
2	2002	2420	
3	2003	2664	
4	2004	3476	
5	2005	2945	

/4.Kesimpulan...

4. Kesimpulan.

Semakin pesat perkembangan suatu kota akan berakibat pada semakin banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi apabila tidak terselesaikan akan menimbulkan berbagai masalah-masalah social diantaranya adalah kriminalitas dan kejahatan.

Dari tahun ke tahun pelaku kejahatan dan modus kejahatan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan jaman. Pada masa Orde lama kejahatan yang dilakukan masyarakat masih berupa kejahatan dan tindak kriminalitas umum yang dilakukan oleh masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi. Pada tahun-tahun selanjutnya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sudah mengalami perubahan baik modus maupun pelakunya diantaranya dilakukn oleh orang-orang yang emmpunyai jabatan dengan tingkat pendidikan yang cukup.

Pada era reformasi kaulitas kejahatan yang dilakukan pelaku tindak criminal sudah sangat canggih dengan memanfaatkan berkembangnya media informasi dan komunikasi dan salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat adalah kejahatan kerah putih/ white colour crime, illegal logging, cyber crime, terorism dll.

KISAH DARI DUA KOTA: SEJARAH KOTA DAN PENDUDUK KOTA INDONESIA¹

Oleh:
Bambang Purwanto

Keberadaan kota sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia. Sejak lama pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, kota dan kehidupan masyarakatnya telah menjadi salah satu realitas penting dari proses kemajuan dan perkembangan peradaban di berbagai wilayah di kepulauan Indonesia. Proses pengkotaan itu diyakini oleh beberapa sejarawan sebagai salah bukti telah terjadi “modernisasi” internal di kepulauan Indonesia dalam sebuah masyarakat yang sering disebut sebagai “pra-modern” atau “pra-kapitalis”, sebelum atau pada saat pengaruh Barat mulai berkembang di wilayah ini. Akan tetapi tidak banyak perhatian yang telah diberikan pada realitas masa lalu perkotaan Indonesia, terutama pada kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sebagai sebuah historiografi, masa lalu Indonesia lebih banyak dipahami, khususnya oleh sejarawan Indonesia, sebagai realitas agraris yang romantis dengan unsur pedesaan yang aman dan tenteram, bukan realitas kota yang hiruk pikuk dengan berbagai persoalan di dalamnya. Kota dengan keberingasannya dianggap tidak layak untuk mewakili identitas keindonesiaan dan masa lalunya yang sering dipahami sebagai sebuah kesahajaan tanpa dosa. Tulisan sederhana ini akan menghadirkan kenyataan masa lalu dari sejarah kehidupan masyarakat di dua kota Indonesia untuk menunjukkan sisi lain dari identitas keindonesiaan, dan sekaligus membangun kesadaran tentang arti penting sebuah perspektif baru dalam historiografi Indonesia, baik yang akan digunakan untuk proses pembelajaran sejarah di sekolah maupun untuk masyarakat umum yang ingin memahami dari dalam sejarah Indonesia dalam arti yang lebih luas secara holistik.

¹ Disampaikan pada Diskusi Sejarah dengan teman “Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah” yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Yogyakarta 11-12 April 2007. Penulis adalah staf pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dilarang memperbanyak atau mengutip tulisan ini tanpa izin penulis karena sebagian dari data yang digunakan merupakan bagian dari tulisan yang sedang dalam proses penerbitan.

Belantara Jakarta

Jakarta menurut foto dan lukisan dari abad ke-19 ternyata bukan kota yang diatur sedemikian rupa sehingga nampak menarik. Di samping kemewahan dan kebesaran gaya kolonial yang ditampilkannya, Jakarta juga merupakan kota gersang dan semerawut yang memiliki jalan tanah berdebu pada musim kemarau dan becek serta berlobang pada musim hujan, kanal dengan air yang tidak jernih, sanitasi yang buruk, dan penduduknya terancam banjir serta malaria sepanjang tahun. Selain mengakibatkan berbagai persoalan pada penduduk setempat, panas kota Jakarta yang tinggi juga telah menyebabkan kematian lebih dari lima ratus kuda milik perusahaan trem dalam setahun, ketika trem yang ditarik dengan kuda diperkenalkan pada tahun 1869 (Abeyasekere 1989: 52).

Keberadaan berbagai suku bangsa mengakibatkan Jakarta menjadi sebuah kota multikultural, tetapi tetap menunjukkan adanya pemisahan ala kolonial yang jelas secara sosial. Jika dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat orang Cina, Arab, India dan terutama bumiputera yang berjalan kaki di sepanjang jalan, maka sangat sulit ditemukan orang Eropa dan orang campuran Indis yang kaya mau melakukan hal yang sama. Hampir seluruh orang dari dua kelompok terakhir itu naik kendaraan dalam kegiatan sehari-hari, kecuali mereka yang berada pada strata bawah di dalam kelompoknya, baik karena alasan jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan tempat bekerja maupun karena alasan sosial (Abeyasekare 1989). Jika pun ada orang Eropa atau Indis yang berjalan kaki, mereka biasanya berjalan di bawah payung untuk menutup diri dari sengatan matahari, baik yang dibawa sendiri maupun oleh para budak, jongos, atau babunya, sesuatu yang jarang dilakukan oleh sebagian besar penduduk bumiputera.

Foto dari tahun 1870-an menunjukkan penduduk yang tinggal tidak jauh dari benteng kota sekitar daerah Glodok misalnya, sehari-hari menggunakan kanal yang ada disekitarnya atau Kali Krukut untuk mencuci pakaian, mandi, dan sekaligus sebagai jamban. Bangunan kecil yang berfungsi sebagai kakus didirikan di atas kanal sepanjang jalan-jalan Toko Tiga, Pintu Kecil, dan Pancoran, tempat sebagian besar masyarakat Cina bermukim (Wachlin 2004: 45). Cara hidup sehari-hari yang sama juga dilakukan penduduk yang tinggal di sekitar Pasar Baru atau Jalan Juanda saat ini, Senen dan di sekitar daerah Pejambon pada masa yang sama. Penduduk misalnya memanfaatkan kanal yang ada di depan sebuah toko sepatu di Noordwijk, sepanjang Gunung Sahari, dan di

dekat gereja Imanuel atau Willemkerk untuk mandi, mencuci pakaian, dan juga jamban (Merrillees 2000: 140). Lukisan yang berasal dari periode yang lebih awal, tahun 1806 dan 1811, bahkan memperlihatkan lebih jelas lagi kegiatan sehari-hari penduduk di dalam dan di sepanjang kanal di tempat yang sama tanpa membedakan etnisitas dan kelas sosial. Dari profil yang ada di dalam lukisan, dapat digambarkan bahwa bukan hanya penduduk bumiputera yang memanfaatkan kanal di dekat Willemkerk itu untuk mandi, mencuci, jamban, dan bukan tidak mungkin juga untuk minum dan memasak melihat ada orang yang sedang membawa tempat air, melainkan penduduk Cina, Arab, dan bahkan Eropa, atau paling tidak kelompok campuran Indis yang dikategorikan sebagai Eropa, juga melakukan hal yang sama (Bastin & Brommer 1979: 51). Kanal dan sungai benar-benar merupakan salah satu urat nadi kehidupan sehari-hari penduduk kota Jakarta pada waktu itu, sehingga mereka merasa tidak perlu memiliki sumur, kamar mandi, dan jamban sendiri di rumah masing-masing.

Berdasarkan kenyataan di atas, secara konseptual dapat dikatakan bahwa pada satu masa tertentu atau paling tidak sampai dengan beberapa dekade awal abad ke-19, kegiatan mencuci baju, mandi, dan buang hajat di sungai dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu bisa digunakan untuk menunjukkan status sosial-ekonomi seseorang pada saat itu, karena perilaku yang sama dilakukan oleh orang dari hampir semua kelompok sosial. Bahkan rumah-rumah besar milik orang Eropa atau Indis di Jakarta yang memiliki status sosial tinggi sekalipun, pada awalnya selalu membuat kamar mandi dan jamban di dekat atau di atas sungai. Semua kegiatan yang berhubungan dengan air dilakukan di kanal atau sungai. Bahkan para pekerja rumah tangga dari orang kaya pemilik rumah-rumah besar di Jakarta, yang lebih diperlakukan sebagai budak pada saat itu, juga mencuci baju para majikannya di sungai (Bastin & Brommer 1979: 263). Baru pada pertengahan abad ke-19, rumah-rumah besar yang sebagian besar bergaya Indis itu memiliki kamar mandi dan jamban di dalam rumah, itupun masih sangat sederhana dibandingkan dengan rumah-rumah yang dibangun sejak awal abad ke-20 (Soekiman 2000). Kalaupun orang-orang Eropa itu tidak mandi di sungai, paling tidak dapat dipastikan bahwa mereka membiarkan para pekerja rumah tangganya mencuci pakaian, termasuk pakaian para tuannya, di sungai. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa konsep sehat dan bersih yang ada pada masyarakat pada waktu itu berbeda dengan masa

kemudian, ketika air sungai telah dianggap tidak layak untuk memasak, mandi serta mencuci karena alasan kesehatan. Mandi dan mencuci di sungai hanya pantas untuk mereka yang berasal dari kelas sosial rendah atau orang miskin, dan membuang hajat di sungai bukan hanya mengganggu kesehatan, mencemari lingkungan dan memalukan melainkan juga simbol dari ketidakberadaban. Oleh karena itu tidak mengherankan, iklan sabun baik untuk mandi maupun mencuci, tetap menghadirkan gambar para perempuan yang sedang mandi dan mencuci di sungai, kali, atau kanal sampai awal ke-20 pun. Baru pada masa-masa kemudian gambar yang sama tidak ditampilkan lagi, yang nampaknya berhubungan erat dengan perubahan wacana atau persepsi masyarakat tentang sungai, air, kebersihan, kesehatan, etika pergaulan, atau konsumen yang dituju.

Khusus yang berkaitan dengan mencuci pakaian di kanal atau sungai, ada satu hal menarik tentang siapa yang melakukan kegiatan itu sehari-hari. Berdasarkan lukisan-lukisan yang berasal dari tahun 1851, 1853, dan 1857, kegiatan mencuci di kalangan pekerja rumah tangga digambarkan dilakukan oleh kaum pria, atau para jongos (Bastin & Brommer: 1979: 263 & 281). Dari tiga lukisan itu tidak terlihat sama sekali ada perempuan pekerja rumah tangga atau babu yang sedang mencuci. Bahkan salah satu lukisan menunjukkan seorang babu yang sedang mandi dengan latar belakang dua orang jongos yang sedang mencuci. Hal itu mungkin dapat dijelaskan karena mencuci dengan cara yang berlaku saat itu merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan tenaga yang besar, sesuatu yang dianggap lebih tepat jika dilakukan oleh laki-laki. Sementara itu sebuah foto yang diperkirakan berasal dari awal abad ke-20, berdasarkan pakaian dan teknik foto yang digunakan, memperlihatkan bahwa hampir seluruh orang yang mencuci di kanal di dekat Molenvliet pada waktu itu adalah perempuan (Nieuwenhuys 1998: 137).

Di tengah-tengah kemewahan yang menyeruak seiring dengan perkembangan Jakarta sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi, kemiskinan menjadi sesuatu yang seolah-olah identik dengan Jakarta, kota yang bukan kota melainkan "kelompokan besar dusun" menurut Pramudya Ananta Toer pada tahun 1955 (Toer 1957). Urbanisasi yang terjadi akibat desa yang semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan warganya, kilauan fatamorgana kota yang memikat, dan kekacauan di pedesaan akibat konflik politik nasional berkepanjangan memperbesar jumlah orang kebanyakan yang memasuki

Jakarta pada akhir masa kolonial, selama perang, dan terutama sejak tahun 1950-an (Heeren 1955).

Jumlah penduduk Jakarta mencapai kurang lebih setengah juta orang pada tahun 1930, atau meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 1900. Jumlah itu terus meningkat tajam mencapai lebih dari satu setengah juta dan bahkan hampir dua juta orang pada tahun 1950 menurut sumber lain, dan hampir empat juta orang pada tahun 1965 (Djakarta Raja 1953:10-11; Wertheim 1956: 184; Abeyasekere 1989: 221). Peningkatan jumlah penduduk yang tajam itu tentu saja mempengaruhi mutu kehidupan sehari-hari para pendatang itu. Walaupun menurut kajian sejarah lisan pada tahun 1950-an terdapat pepatah yang mengatakan “ada 80 lowongan kerja untuk 10 pencari kerja” dan “masa ketika pekerjaan mencari orang bukan sebaliknya”, kehadiran para migran dalam jumlah yang banyak itu tetap saja tidak sebanding dengan ketersediaan kerja dan lingkungan yang layak (Jellinek 1991:13).

Hidup sehari-hari dalam keadaan yang miskin dan lingkungan pemukiman yang kumuh tentu saja bukan sesuatu yang baru bagi sebagian masyarakat Jakarta. Adanya kemiskinan dan kekumuhan di wilayah yang menjadi tempat tinggal sebagian besar penduduk bumiputera dan kelompok miskin Cina, Arab, dan Indis itu paling tidak dapat dilihat pada pembicaraan tentang hal itu di Volksraad dan usaha perbaikan kampung sejak dekade kedua abad ke-20, terutama sejak akhir tahun 1920-an. Ironisnya, perbaikan kampung itu malah menjadi sebab dari tersingkirnya orang kebanyakan dari rumah-rumah mereka di tengah kota atau terpaksa harus tinggal jauh dari tempat kerja karena kenaikan harga tanah serta sewa, dan tindakan pemerintah menghancurkan kampung dan rumah-rumah mereka yang dianggap tidak layak untuk dihuni (Abeyasekere 1989:121-122). Sebagian besar orang kebanyakan hanya berpindah tempat, namun kemiskinan, kekumuhan, dan ketidaklayakan tetap menjadi bagian dari hidup mereka sehari-hari. Tidak mengherankan jika menurut sebuah penelitian, lebih dari 60% pendapatan para pekerja langsung habis digunakan untuk membayar hutang pada akhir tahun 1930-an, sehingga sangat sulit bagi sebagian besar mereka memperbaiki mutu kehidupan sehari-hari (Wertheim 1958: 223). Dalam kondisi yang tidak teratur itu, tidak mengherankan jika banjir menjadi salah satu ciri umum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kebanyakan di Jakarta pada tahun 1950-an. Bagi “orang suse” banjir tidak hanya

mengakibatkan “bale basah, pat-tidur lepek” melainkan juga membawa sampah ke dalam rumah termasuk “segale pisang goreng”, dalam bahasa humor Firman Muntaco pada rubrik “Tjermin Djakarta”-nya (Muntaco 2006).

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak Jakarta pun sulit menemukan tempat bermain, dan mereka harus menderita baik secara fisik maupun kejiwaan. Di samping itu, tentu saja nyamuk malaria, bakteri kolera yang dibawa oleh lalat, infeksi tetanus, dan parasit pes yang ditularkan oleh tikus setiap saat mengancam jiwa mereka. Oleh karena itu tidak berlebihan Pramudya Ananta Toer mengatakan dalam karya fiksinya bahwa “anak-anak ini akan mengalami masa kehilangan masa kanak-kanak, masa kanak-kanaknya sendiri. Kanak-kanak Jakarta yang tak punya lapangan bergerak, tak punya lapangan bermain, tak punya daerah perkembangan kejiwaan, menjurus dari gang dan got, membunuh tiap marga-satwa yang tertangkap oleh matanya. Katak dan ketam dan belut dan burung mengalami likuidasi, di Jakarta! Tetapi nyamuk merajalela, dan cicak dan sampah. Juga mereka ini hidup di alam ketaksenangan. Taman-taman hanya di daerah Menteng dan perkampungan baru. Engkau tahu, jadi orang apa kanak-kanak semacam ini jadinya di kemudian hari” (Toer 1957).

Penyakit menjadi persoalan serius pada anak-anak orang kebanyakan di Jakarta. Jika sakit, mereka hanya mengandalkan *kerokan*, dukun, atau minyak angin. Kalau harus minum obat, maka sampai akhir abad ke-20 pun mereka tetap bergantung pada jamu atau obat yang dibeli dari warung atau toko obat. Rumah sakit, dokter, dan apotek merupakan kemewahan atau keterpaksaan, dan hanya Puskesmas yang menjadi unit kesehatan terdekat dalam kehidupan sehari-hari orang kebanyakan Jakarta (Houweling 2002). Tidak mengherankan jika pada tahun 2005, biaya berobat di Puskesmas Setia Budi sebesar Rp 4000 pun tidak mampu dibayar oleh seorang pemulung di Jakarta, sehingga anaknya yang terserang muntaber meninggal dunia di atas gerobak yang biasa digunakan sehari-hari untuk mengumpulkan barang-barang bekas (KCM www.kompas.com 7 Juni 2005)

Di tengah-tengah kemiskinan itu, bagi para pria orang kebanyakan yang “tidak beruntung”, menjadi tukang becak merupakan pilihan terbaik di ibukota. Dalam bahasa imajinatif Utuy Tatang Sontani yang menggambarkan kehidupan sehari-hari Jakarta antara tahun 1961 sampai 1963, “aku tahu, setiap yang datang disini mau menyewa becakku adalah orang yang baru datang dari udik, orang yang tidak punya tempat tinggal.

tidak punya apa-apa untuk dijadikan pegangan” (Sontani 1964: 7). Kesulitan hidup di Jakarta telah mengakibatkan “demi uang manusia sedia jadi kuda”, menarik becak menggantikan delman dan angkutan publik sejenis yang sebelumnya menguasai transportasi di Jakarta sebelum dan selama perang (Toer 1957). Jakarta setelah perang benar-benar dipenuhi oleh laki-laki migran yang menjadi tukang becak. Padahal dalam bahasa imajinatif Pramudya Ananta Toer, “beberapa bulan kemudian paha para pria ini menjadi begitu penuh sesak dengan otot yang terlampaui banyak dipaksa kerja. Tiap minggu mereka menelan telur ayam mentah...beberapa tahun kemudian ia “ngejengkan” di balenya karena jantungnya menjadi besar, desakan darahnya meninggi: ia invalid-puluhan!ratusan ribu! Kembali ke kampung sebagai sampah...jumlah kurban ini banyak daripada kurban revolusi bakalnya” (Toer 1957). Jika memiliki uang, para penarik becak itu akan “membual tentang kepelesiran” dan “apakah pula anehnya tukangbecak yang suka main domino” (Toer 1957; Sontani 1964).

Sementara itu bagi para perempuan migran yang “tidak beruntung”, menjadi pelacur merupakan nasib yang terpaksa harus dijalani. Seperti Onih bersama Sapar dan Aminah bersama Diman dua pasang pelacur dan tukang becak dalam karya fiksi “Si Sapar” tulisan Utuy Tatang Sontani dan “Berita dari Kebayoran” dalam buku “Cerita dari Jakarta” tulisan Pramudya Ananta Toer, para perempuan pelacur secara nyata mengisi kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta sejak lama. Walaupun merupakan sebuah karya fiksi, puisi yang ditulis oleh W.S. Rendra pada tahun 1967 juga secara jelas menunjukkan peran penting baik pelacur jalanan maupun pelacur “tingkat tinggi” Jakarta dalam sejarah kehidupan sehari-hari masyarakat ibukota. Dalam bahasa imajinatif yang tersusun rapi dalam karya berjudul “Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta” itu, Rendra secara jelas menggambarkan “bagaimana para pemimpin revolusi/secara bergiliran memelukmu/bicara tentang kemakmuran rakyat dan api revolusi/sambil celananya basah/dan tubuhnya lemes/terkapai di sampingmu/politisi dan pegawai tinggi/adalah caluk yang rapi/kongres-kongres dan konperensi/tak pernah berjalan tanpa kalian” (Rosidi 1972), sesuatu yang tidak banyak berbeda dengan gambaran yang ada pada dokumen atau karya ilmiah hasil penelitian (Murray 1994; Hull 1999).

Pelacur, tukang becak, pemulung, gelandangan, maling, copet, dan pelaku kegiatan non-formal lainnya seolah-olah sebuah komunitas yang tidak terpisahkan dalam

kehidupan sehari-hari masyarakat miskin kota di Jakarta sejak masa kolonial sampai akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21. Para pencopet memenuhi trem-trem yang melintasi jalur Tanah Abang sampai Pasar Ikan lewat Hayam Wuruk-Glodok dan sepanjang jalan sekitar Pasar Senen dan Kramat pada 1950-an, yang bukan hanya memakan korban "Haji Jalal" yang kaya dalam imajinasi Firman Muntaco melainkan juga gaji yang baru diterima "Tinah", gadis kecil yang terpaksa berhenti sekolah di kelas empat untuk bekerja dalam narasi rekaman S.M. Ardan (Muntaco 2006; Ardan 2007). Di kampung-kampung atau stasiun kereta api sekitar Bukit Duri dan Manggarai yang kumuh, para pedagang jalanan dan pelacur dari kota Jakarta yang semakin penuh sesak dan gemerlap tetapi tetap penuh dengan kekumuhan itu, menjalani kehidupan hari demi hari mereka (Murray 1994). Sebuah kehidupan sehari-hari yang tidak banyak berbeda dengan kehidupan para gelandangan dan pelacur seperti yang terekam pada foto-foto koleksi KITLV-Leiden yang diambil pada tahun 1947. Para gelandangan perempuan seolah-olah identik dengan pelacur perempuan, yang hidup dalam kebebasan palsu sambil membesarkan anak mereka di antara gerbong-gerbong kosong di sebuah stasiun kereta api tua di Koningsplein (KITLV 1947). Sebagian perempuan itu memiliki suami baik yang sah maupun tidak menurut agama dan hukum, atau sekedar laki-laki yang berfungsi sebagai "manusia galak" yang akan melindungi dan sekaligus memeras mereka (Toer 1952; Suparlan 1974; Murray 1994).

Akan tetapi ternyata tidak semua pelacur dapat dihubungkan begitu saja dengan kemiskinan dan kekumuhan. Walaupun "kelaparan yang menakutkan/kemiskinan yang mengekang/dan telah lama sia-sia cari kerja" merupakan faktor yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan para pelacur perempuan itu dalam bahasa imajinatif W.S. Rendra, sebagian *callgirl* yang biasa beroperasi di lobi-lobi hotel ternyata merupakan orang berpenghasilan paling tinggi di Jakarta menurut laporan wartawan sebuah berita mingguan pada akhir tahun 1960-an. Menurut keterangan polisi, tidak kurang dari 10 juta rupiah per bulan berhasil dikumpulkan oleh seorang "pelacur tingkat tinggi" di Jakarta pada waktu itu (Selecta 30 September 1968). Bahkan di kalangan pelacur jalanan pun, pendapatan harian rata-rata mereka pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an ternyata paling tinggi dibandingkan dengan kelompok orang miskin lainnya menurut sebuah penelitian ilmiah. Pendapatan rata-rata pelacur berjumlah Rp 800 per hari.

sementara itu guru yang berada pada posisi kedua hanya menerima Rp 360. Pendapatan rata-rata pelacur juga jauh di atas penarik becak dan buruh harian di Jakarta, yang masing-masing per hari hanya mendapat Rp 230 dan Rp 180 atau bahkan kurang (Selecta 14 April 1969; Sumardi 1980).

Dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan yang dialami orang kebanyakan tidak hanya terbatas dengan kehidupan melainkan juga dengan kematian. Walaupun tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah Jakarta untuk sepetak tanah kuburan di Karet Bivak berjumlah Rp 450 sampai Rp 550 pada awal tahun 1970-an, dalam kenyataannya masyarakat harus membayar mulai dari Rp 2500 sampai Rp10.000, belum termasuk pungutan-pungutan lainnya. Bahkan bagi mereka yang beragama Kristen baik Protestan maupun Katholik biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan lahan kuburan bisa mencapai Rp 50.000 (Tempo 12 Mei 1973). Keadaan itu mengakibatkan ada keluarga yang terpaksa menyimpan mayat tidak dikubur selama beberapa hari, sampai jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar biaya penguburan berhasil didapatkan. Tidak mengherankan jika kemudian terjadi peristiwa ketika masyarakat membawa mayat ke balai kota sebagai tanda protes ketidakmampuan orang kebanyakan membiayai penguburan warganya yang meninggal dunia. Setelah dikubur pun, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan digusur atas nama pembangunan dan penertiban, seperti juga yang terjadi pada mereka yang masih hidup (Tempo 12 Mei 1973, 14 Januari 1978, 4 Februari 1978, 19 Mei 1979). Satu demi satu kuburan keluarga mereka menghilang, diganti oleh kuburan-kuburan baru dari mereka yang keluarganya mampu membayar ganti rugi tanah dengan harga yang mahal. Ketika lokasi kuburan dianggap strategis untuk kepentingan ekonomis atau perumahan elite, dalam sekejap lokasi kuburan akan dinyatakan ditutup untuk segera diserahkan kepada para pemilik modal yang sudah menjanjikan uang yang banyak, baik kepada pemerintah daerah maupun pribadi para birokrat.

Kenyataan seperti di atas ternyata terus berulang dalam kehidupan sehari-hari orang kebanyakan di Jakarta pada awal abad ke-21, ketika Supriono harus menggondong kesana kemari mayat anak perempuannya bernama Khaerunisa yang berumur 3 tahun karena tidak mampu membayar ambulans yang akan membawa mayat anaknya ke Bogor untuk dikuburkan. Atas kebaikan hati warga Manggarai Utara VI yang sebagian besar

tinggal di bantaran anak Sungai Ciliwung, biaya pemakaman sebesar Rp 350.000 dan biaya pembelian kain kafan beserta keperluan lain sebesar Rp 250.000 berhasil dikumpulkan. Akhirnya setelah meninggal lebih dari 24 jam, mayat Khaerunisa berhasil dimakamkan di bagian paling belakang yang masih ditumbuhi rumput ilalang yang tinggi di Taman Pemakaman Umum Karet Pulo Jakarta Selatan (KCM, www.kompas.com: 9 Juni 2005).

Keberingasan Kotagede

Sejarah kekerasan di Kotagede pada akhir masa kolonial paling tidak dapat dirunut ke belakang pada masa penjajahan Jepang, ketika masyarakat Kotagede harus berhadapan dengan perubahan baik yang terjadi secara internal maupun perubahan yang terjadi di luar komunitas mereka. Persoalan yang ada tidak hanya menyangkut kesulitan ekonomi, melainkan situasi yang ada telah menimbulkan ketegangan dan ketidakteraturan sosial di dalam masyarakat Kotagede.

Di Mutihan dan Singosaren yang menjadi lokasi sebagian besar tanah pertanian sebagai contoh, beberapa orang baik dari dalam maupun luar Kotagede dianiaya secara kejam dan bahkan dibunuh di tempat karena penduduk lokal berhasil menangkap mereka pada saat sedang mencuri jagung, padi, atau ketela. Sepasang suami istri juga dibunuh ketika mereka sedang memetik daun ketela di kebun milik penduduk Kotagede. Sementara itu beberapa kasus yang hampir sama juga terjadi di pasar Kotagede. Bukti yang ada menunjukkan cukup banyak orang yang dipukul dengan kejam dan bahkan dibunuh karena dicurigai atau dituduh mencuri makanan, pakaian dan termasuk barang-barang yang sangat tidak berharga. Di samping itu, dua toko milik orang Cina di dekat pasar juga dirampok, dan mereka tidak diperkenankan meneruskan bisnisnya setelah itu.

Kehidupan ekonomi penduduk Kotagede yang masih cukup baik pada masa itu ternyata menjadi daya tarik bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau orang-orang lapar dari luar untuk datang ke Kotagede. Terdapat banyak kasus dilaporkan tentang tindakan penduduk memindahkan mayat atau orang sekarat yang tidak teridentifikasi dari dalam wilayah mereka ke dalam batas wilayah yang lain. Sebagai respon terhadap hal itu, penduduk wilayah yang lain juga melakukan hal yang sama. Akibatnya, terdapat bukti yang menunjukkan tindakan penduduk Kotagede menarik

tubuh orang sekarat dari satu tempat ke tempat lain berkali-kali di jalan, dan kemudian ditinggalkan begitu saja sampai akhirnya korban meninggal dunia. Bukti lain menunjukkan orang sekarat atau mayat dibiarkan berhari-hari tanpa perhatian, atau bahkan penduduk dari kampung-kampung yang berbeda saling berkelahi terlebih dahulu untuk menghindari beban merawat orang sekarat atau mayat itu.

Keadaan yang tidak kalah menyedihkan juga terjadi di pasar Kotagede, tempat banyak orang dari luar wilayah itu menggunakannya sebagai tempat tinggal mereka sementara. Bagi orang sakit yang tidak memiliki teman atau keluarga, mereka biasanya diusir dari tempat itu. Sedangkan mereka yang sekarat biasanya dibawa keluar dari pasar karena para pendatang sementara, pedagang, dan penduduk di sekitarnya tidak ingin terbebani jika orang itu meninggal dunia. Selain itu, beberapa orang kaya di Kotagede, terutama di kalangan para pelepas uang memanfaatkan kesulitan yang sedang melanda masyarakat luas pada waktu itu untuk keuntungan ekonomis mereka pribadi. Para pelepas uang itu hanya memberikan uang, makanan atau pakaian yang sedikit kepada orang-orang yang datang kepada mereka, tidak sebanding dengan nilai rumah, tanah, dan perhiasan yang diserahkan. Selain penduduk Kotagede yang sedang mengalami kesulitan ekonomis, banyak penduduk dari luar Kotagede yang juga menjual atau sekedar menggadaikan harta benda berharga mereka kepada para pelepas uang itu.²

Walaupun Kotagede relatif aman seperti juga sebagian besar wilayah di Yogyakarta pada awal kemerdekaan, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pencurian dan perampokan di Kotagede terus meningkat, terutama sejak Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia dan pusat perjuangan. Beberapa keluarga kaya di Kotagede melaporkan bahwa mereka telah dirampok atau mendapat ancaman secara reguler dari para kriminal, baik dari penduduk setempat maupun pendatang. Kasus yang sama dilaporkan oleh para pedagang, penduduk biasa, dan kusir andong yang melewati

² Bukti-bukti itu jangan diinterpretasi secara berlebihan untuk menyatakan bahwa semua orang di Kotagede tidak memiliki kepedulian sosial terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu, karena beberapa bukti juga menunjukkan bahwa Muhammadiyah secara rutin melakukan berbagai aksi sosial untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Satu hal yang ingin dikatakan dalam tulisan ini bahwa pendudukan Jepang telah menimbulkan ketidakseimbangan sosial dan intoleransi di dalam masyarakat Kotagede, sesuatu yang ternyata tidak hilang begitu saja ketika Indonesia telah merdeka.

jalan utama yang menghubungkan Kotagede dengan pusat kota Yogyakarta. Mereka melaporkan tentang sekelompok *grayak* yang secara rutin beroperasi di sepanjang jalan itu ketika hari mulai gelap. Akibatnya, sebagian besar pedagang menghindari perjalanan setelah magrib atau sebelum matahari terbit. Sementara itu banyak kusir yang melayani jalur itu cenderung menolak membawa penumpang dari dan ke Kotagede melalui jalan itu pada malam hari walaupun mereka dijanjikan bayaran yang mahal. Jika mereka sudah terlanjur berada di Kotagede ketika matahari sudah terbenam, para kusir andong itu memilih tinggal di Kotagede sampai pagi berikutnya. Secara perlahan para *grayak* itu bahkan mulai masuk ke dalam kota, baik pada siang maupun malam hari. Bahkan terdapat bukti yang menunjukkan para *grayak* itu tanpa rasa takut mendatangi rumah penduduk dari pintu ke pintu, kemudian memaksa penduduk memberi uang atau menyerahkan barang-barang berharga. Hal itu tentu saja kemudian mengundang reaksi dari penduduk Kotagede untuk melakukan pengamanan terhadap wilayah mereka.

Para laskar yang berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda dan selalu bertentangan secara politis memainkan peranan unik berkaitan dengan masalah keamanan itu. Pada satu sisi mereka ternyata dapat bekerjasama melindungi penduduk Kotagede dari ancaman para kriminal dan kekacauan sosial lainnya pada awal kemerdekaan. Namun di sisi yang lain terdapat juga bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka di dalam ketidakteraturan di Kotagede pada masa itu. Laskar terbukti berhasil menangkap beberapa orang perampok, akan tetapi mereka menerapkan tindakan yang berbeda terhadap para perampok itu. Berdasarkan salah satu bukti yang berhasil dikumpulkan, dari sepuluh kasus penangkapan terhadap perampok, hanya dua orang yang dibawa ke polisi dan kemudian diadili. Sementara perampok yang lain hilang tanpa bekas. Sebuah informasi menyatakan bahwa para perampok itu dibunuh oleh laskar, sedangkan informasi yang lain menyebutkan bahwa sebagian dari para perampok itu dilepas begitu saja karena merupakan bagian dari kelompok mereka.

Diantara penduduk Kotagede yang menjadi korban aksi kriminal itu, para keluarga Kalang yang kaya merupakan kelompok yang paling menderita. Sebagai kelompok yang berhasil secara ekonomis, para keluarga Kalang tidak hanya menguasai bisnis pegadaian, usaha kerajinan, tekstil, dan transportasi melainkan juga aktivitas ekonomi Kotagede secara keseluruhan. Para keluarga Kalang itu dikenal sebagai orang

bumiputera pertama di Jawa yang memiliki mobil Roll Royces, berkeinginan untuk mendekorasi lantai ruang resepsi terbukanya dengan ribuan koin *rix-dollar* sebelum dilarang oleh pemerintah kolonial. keluarga yang mampu meminjamkan banyak uang kepada para bangsawan keraton, memiliki lebih dari 10 balok emas sebesar kaleng minyak tanah, dan mendekorasi ruang tamunya dengan setandan pisang yang terbuat dari mas murni. Namun seperti juga orang Cina di Indonesia, para keluarga Kalang itu tidak pernah dianggap sebagai pribumi di Kotagede. Mereka harus menerima kenyataan selalu dianggap sebagai orang asing di kota yang telah menjadi tempat tinggal mereka dari generasi ke generasi.

Perampokan terhadap keluarga Kalang yang kaya terjadi di rumah Projodrono dan Prawiro Soewarno, yang dikenal dengan nama panggilan Tembong. Orang yang terakhir dikenal sebagai raja rumah gadai, yang memiliki rumah gadai baik di dalam maupun di luar Kotagede. Ia memiliki beberapa rumah di Kotagede, dan salah satunya adalah bangunan layaknya sebuah istana. Perampokan pertama terjadi pada hari Rabu, beberapa hari sebelum aksi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Beberapa orang yang melumurkan muka mereka dengan lumpur dan berpakaian sipil serta militer, pada siang hari tanpa ragu-ragu memasuki rumah kedua korban dan membawa pergi barang berharga yang banyak. Kedua korban kemudian melaporkan kasus perampokan itu kepada komandan militer yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Kotagede, sekaligus mengidentifikasi para perampoknya. Laporan itu tidak mendapat perhatian, sehingga tidak ada tindakan dari penguasa militer setempat untuk melakukan penyelidikan. Hal itu dapat dijelaskan karena pemimpin tentara di Kotagede itu tidak ingin berhadapan langsung dengan sesama rekan pejuang yang diidentifikasi oleh pemilik rumah sebagai pelaku perampokan.

Keputusan untuk tidak menyelidiki kasus perampokan itu mendorong terjadinya perampokan kedua, beberapa hari setelah kota Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Pada kasus yang kedua, para perampok dalam jumlah yang besar hanya merampok rumah Tembong. Selain membawa pergi uang dan perhiasan dalam jumlah yang sangat banyak, para perampok juga membawa pergi tidak kurang dari 15 batang emas murni sebesar kaleng minyak tanah, dekorasi berbentuk sepasang gula jawa terbuat dari emas murni, setandan pisang terbuat dari emas murni, dan berusaha membunuh pemilik rumah namun

gagal. Para perampok dengan mudah menghilang melalui sungai, dan meninggalkan *safety box* sepanjang tepi sungai.

Berbeda dengan perampokan pertama, pemimpin tentara dan laskar di Kotagede melakukan penyelidikan terhadap kasus perampokan setelah para perampok secara terbuka menyatakan akan menggunakan hasil rampokan untuk membiayai perjuangan melawan aksi militer Belanda. Selain itu penduduk setempat juga berusaha mencari peruntungan, karena pemilik rumah menjanjikan akan memberi imbalan kepada setiap orang yang berhasil mengembalikan harta benda mereka. Dalam kenyataannya tidak ada seorang perampok pun yang berhasil ditangkap, namun sebagian harga benda milik keluarga Kalang itu ditemukan tersimpan di atas pohon kelapa di luar Kotagede, termasuk di wilayah Gunung Kidul sekitar 25 kilometer sebelah selatan Kotagede.

Segera setelah perang berakhir, beberapa penduduk Kotagede secara tiba-tiba menjadi kaya dan berperilaku aneh. Salah seorang yang dicurigai sebagai perampok memiliki kebiasaan memakan enam telur goreng setiap kali makan, sedangkan penduduk yang lain mulai membuka usaha kerajinan yang memerlukan modal besar. Padahal sebelumnya, mereka dikategorikan sebagai kelompok buruh dan petani dengan tingkat kemampuan ekonomi yang rendah. Tidak mengherankan jika ada yang berpendapat bahwa sebagian interprenur yang berhasil di Kotagede kemudian memulai bisnis mereka dari harta benda yang di curi dari keluarga Kalang yang kaya pada awal kemerdekaan.

Biarpun sebagian keluarga Kalang yang kaya di Kotagede luput dari perampokan sampai perang berakhir, perampokan yang dialami keluarga Kalang yang lain meninggalkan pengalaman traumatik pada kelompok ini. Mereka menemukan rumah mereka yang bagus di Kotagede telah menjadi tempat tinggal tentara Belanda selama perang, dan kemudian diambil alih oleh tentara Indonesia. Ketika rumah-rumah itu dikembalikan, para keluarga Kalang menjual hampir seluruh rumah mereka di Kotagede. Secara perlahan-lahan mereka mulai meninggalkan Kotagede, menyebar ke berbagai kota lain baik di dalam maupun di luar wilayah Yogyakarta, dan tidak pernah kembali. Keluarga Tembong pindah ke selatan ke wilayah santri lain di Wonokromo Bantul, tempat keluarga ini mendirikan sebuah perusahaan bus pada tahun 1950-an.

Perp
Jen